



**Laporan
Tata Kelola
Perusahaan**
*Corporate
Governance
Report*



Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Commitment to Implementation of Good Corporate Governance



Bank Woori Saudara berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan pemegang saham, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bank juga bertekad untuk melakukan penyempurnaan dan penerapan GCG dengan terus-menerus berdasarkan pada ketentuan, pedoman dan standar GCG yang berlaku secara nasional dan internasional termasuk penerapan *Governance, Risk and Compliance (GRC)* secara terintegrasi.

Selain itu, sebagai salah satu pelaku di industri perbankan, Bank Woori Saudara juga berkomitmen untuk senantiasa menginternalisasi prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas usahanya. Bank meyakini, dengan penerapan GCG yang konsisten dan berkelanjutan, Bank dapat mewujudkan bisnis yang sehat selaras dengan etika dan ketentuan yang berlaku yang akan semakin menumbuhkan kinerja Bank.

Bank Woori Saudara is committed to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) as foundation for creating sustainable added value for the interests of shareholders, society and all other stakeholders, both in the short and long term. The Bank is also determined to continuously improve and implement GCG based on GCG provisions, guidelines and standards applicable nationally and internationally including the integrated implementation of Governance, Risk and Compliance (GRC).

In addition, as one of the players in the banking industry, Bank Woori Saudara is also committed to always internalizing GCG principles in all its business activities. The Bank believes, with consistent and sustainable implementation of GCG, the Bank can create a healthy business in line with applicable ethics and regulations which will further grow the Bank's performance.



Landasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

The Foundation for the Implementation of Good Corporate Governance

Penerapan GCG di BWS mengacu pada ketentuan eksternal, ketentuan internal serta *standard best practices* yang berlaku dan diteladani dalam skala nasional maupun internasional.

The implementation of GCG at BWS refers to external regulations, internal regulations and standard best practices that apply and are emulated on a national and international scale.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dalam penerapan GCG di BWS antara lain:

Laws and regulations that are used as references in the implementation of GCG at BWS include the following:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

1. *Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of Financial Sector.*
2. *Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets.*
3. *Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*
4. *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.*
5. *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines.*
6. *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.*
7. *Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance.*
8. *Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter Number 13/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.*

Dalam penerapan GCG, BWS juga mengacu pada beberapa pedoman tata kelola (*best practices*) sebagai berikut:

In implementing GCG, BWS also refers to several governance guidelines (best practices) as follows:

1. *Roadmap* Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pedoman Umum *Governance* Korporat Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
3. *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang dikeluarkan oleh *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF).

1. *Roadmap of Indonesian Corporate Governance Guidelines* issued by Otoritas Jasa Keuangan.
2. *Indonesian General Guidelines for Good Corporate Governance (GCG)* issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG).
3. *ASEAN Corporate Governance Scorecard* issued by the *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF).

Prinsip GCG GCG Principles

Dalam menerapkan GCG, Bank mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran.

In implementing GCG, the Bank refers to 5 (five) basic principles, namely: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness.

Keterbukaan
Transparency

Akuntabilitas
Accountability

Pertanggungjawaban
Responsibility

Independensi
Independency

Kewajaran dan Kesetaraan
Fairness

Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan Bank dalam menyampaikan informasi material dan relevan mengenai segala sesuatu tentang Bank. Bank menerapkan prinsip keterbukaan ini antara lain dalam:

- » Penyusunan dan penjelasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- » Laporan Tahunan.
- » Laporan Keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, semesteran, dan triwulanan

Transparency Principle

The principle of transparency in the decision-making process and the Bank's clarity in conveying material and relevant information regarding everything about the Bank. The Bank applies this principle of transparency, among others, in:

- » *Preparation and explanation of the Annual Work Plan and Budget.*
- » *Annual Report.*
- » *Periodic Financial Reports include annual, semester, and quarterly financial statements*

Prinsip Akuntabilitas

Prinsip kejelasan fungsi, struktur, sistem, tata pelaksanaan dan tanggung jawab di dalam organisasi sehingga pengelolaan Bank dapat berjalan efektif dan efisien. Bank memiliki 3 (tiga) tingkatan akuntabilitas dalam setiap aktivitas, meliputi:

- » Akuntabilitas Korporasi adalah pertanggungjawaban atas aktivitas bisnis yang dijalankan. Masing-masing organ Bank dapat dimintai akuntabilitas masing-masing sesuai tugas dan tanggung jawab dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- » Akuntabilitas Tim adalah pertanggungjawaban suatu unit kerja/bisnis/supporting atas tercapai/tidak tercapai tugasnya.
- » Akuntabilitas Individual adalah pertanggungjawaban atas aktivitas kinerja individu yang dijalankan dalam Bank.

Principle of Accountability

The principle of clarity of functions, structures, systems, implementation procedures, and responsibilities within the organization so that the management of the Bank can run effectively and efficiently. The Bank has 3 (three) levels of accountability in each activity, including:

- » *Corporate Accountability is responsibility for the business activities carried out. Each organ of the Bank can be held accountable according to their respective duties and responsibilities with reference to the applicable laws and regulations.*
- » *Team Accountability is the responsibility of a work/business/supporting unit to achieve/not achieve its tasks.*
- » *Individual Accountability is the responsibility for individual performance activities carried out within the Bank.*

» Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip yang mengemukakan kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Bank menerapkan prinsip pertanggungjawaban antara lain dengan:

- » Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- » Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu.
- » Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- » Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang ditetapkan.

» Prinsip Independensi

Prinsip yang menekankan sikap profesionalisme tanpa benturan kepentingan, pengaruh, serta tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip pengelolaan Bank yang baik.

Penerapan unsur Independensi di lingkungan Bank adakah sebagai berikut:

- » Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab di antara organ Bank.
- » Pemegang saham dan Dewan Komisaris tidak boleh melakukan intervensi terhadap pengurusan Bank.
- » Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam mengambil keputusan.
- » Kegiatan Bank yang memiliki potensi benturan kepentingan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sebagaimana diatur, dan mematuhi peraturan tentang benturan kepentingan.
- » Penerapan kebijakan dan sistem yang meminimalkan terjadinya benturan kepentingan, seperti dalam kebijakan kepegawaian, pengadaan dan keuangan.

» Principle of Responsibility

Principles stating conformity of Bank management with applicable laws and regulations and codes of sound Bank management. The Bank applies the principle of responsibility, among others, by:

- » *Comply with the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations.*
- » *Carry out tax obligations correctly and timely.*
- » *Carry out corporate social responsibility.*
- » *Carry out information disclosure obligations following established regulations.*

» Independence Principle

The principle that emphasizes professionalism without conflict of interest, influence and pressure from any party that is contrary to the applicable laws and regulations and the principles of good bank management.

The implementation of the element of Independence within the Bank is as follows:

- » *Respect each other's rights, obligations, duties, authorities and responsibilities among the Bank's organs.*
- » *Shareholders and the Board of Commissioners may not intervene in the management of the Bank.*
- » *The Board of Commissioners, Board of Directors and employees always avoid conflicts of interest in making decisions.*
- » *Bank activities that have the potential for conflict of interest must obtain prior approval from Independent shareholders or their representatives authorized to do so at the GMS (General Meeting of Shareholders) as stipulated, and comply with regulations regarding conflict of interest.*
- » *Implementation of policies and systems that minimize the occurrence of conflicts of interest, such as in personnel, procurement and finance policies.*

» Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan

Prinsip perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan di Bank diterapkan antara lain dengan:

- » Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- » Bank memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan.
- » Bank memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai dengan kemampuan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

» Principles of Fairness and Equality

The principle of fair and equal treatment in fulfilling the rights of stakeholders based on the applicable laws and regulations.

The Principles of Fairness and Equality in the Bank are implemented among others by:

- » *Shareholders have the right to attend and vote at the GMS in accordance with applicable regulations.*
- » *The Bank treats all partners fairly and transparently.*
- » *The Bank provides excellent and safe working conditions for each employee in accordance with the capabilities of the Bank and the applicable laws and regulations.*



Perkembangan Penerapan GCG di Tahun 2023

Development of GCG Implementation in 2023

BWS terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan yang disertai dengan pengembangan, peningkatan, dan penyempurnaan pelaksanaan prinsip GCG. Di tahun 2023, Bank telah melakukan berbagai kegiatan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG, antara lain:

- a. BWS telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selama tahun 2023, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal Selasa, 14 Februari 2023.
- b. Direksi dan Dewan Komisaris telah menyampaikan pertanggungjawabannya kepada RUPS dan telah diterima oleh RUPS.
- c. Dewan Komisaris diberikan kuasa oleh RUPS untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait pelaksanaan audit laporan keuangan posisi Desember 2023.

BWS continues to seek to make improvements and enhancement accompanied by developing, improving and enhancing the implementation of GCG principles. In 2023, the Bank has carried out various activities to continue to improve the quality of GCG implementation, among others:

- a. *BWS has held General Meeting of Shareholders (GMS) during 2023, namely the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on Tuesday, February 14, 2023.*
- b. *The Board of Directors and Board of Commissioners have submitted their accountability to the GMS and it has been accepted by the GMS.*
- c. *The Board of Commissioners was authorized by the GMS to appoint a Public Accounting Firm registered with the Otoritas Jasa Keuangan regarding the audit of the financial statements for the position of December 2023.*

- | | |
|---|--|
| <p>d. Melaksanakan penerapan manajemen risiko sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.</p> <p>e. Melakukan pengkinian kebijakan terkait GCG, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit; • Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi & Remunerasi; • Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko; • Strategi <i>Anti Fraud</i>; dan • Kebijakan Umum Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. • Prosedur Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan <p>f. Menyusun Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>g. Menyusun, menyampaikan dan mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan Bank.</p> <p>h. Melakukan transparansi informasi produk dan aktivitas Bank sesuai dengan Kebijakan Perlindungan Konsumen yang dilakukan melalui media yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mengurangi dampak risiko hukum dan risiko reputasi terhadap Bank.</p> <p>i. Menyusun Laporan <i>Self-Assessment</i> Tata Kelola secara Semesteran dan Laporan GCG secara tahunan, serta melaporkannya kepada pihak-pihak tertentu.</p> <p>j. Menindaklanjuti laporan-laporan yang telah disampaikan melalui sistem aplikasi <i>whistleblowing</i>.</p> | <p>d. <i>Implement risk management in accordance with Otoritas Jasa Keuangan regulations regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.</i></p> <p>e. <i>Update policies related to GCG, including:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Audit Committee Guidelines and Work Procedures;</i> • <i>Nomination & Remuneration Committee Guidelines and Work Procedures;</i> • <i>Risk Monitoring Committee Guidelines and Work Procedures;</i> • <i>Anti Fraud Strategy; and</i> • <i>General Policy on Implementation of Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorist Financing (CFT), and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (CPF) Program.</i> • <i>Procedures of Affiliate Transaction and Conflict of Interest Transactions</i> <p>f. <i>Prepare Bank Business Plan and Sustainable Financial Action Plan in accordance with applicable statutory provisions.</i></p> <p>g. <i>Prepare, submit and publish Published Financial Statements in the context of implementing transparency of the Bank's financial condition.</i></p> <p>h. <i>Transparency of information of product and activities in accordance with the Consumer Protection Policy, carried out through media that can be easily accessed by the public to mitigate the impact of legal risk and reputation risk on the Bank.</i></p> <p>i. <i>Prepare semi-annual GCG Self-Assessment Report and annual GCG Report, and report them to certain parties.</i></p> <p>j. <i>Follow up on reports that have been submitted via the whistleblowing application system.</i></p> |
|---|--|



Struktur dan Mekanisme GCG

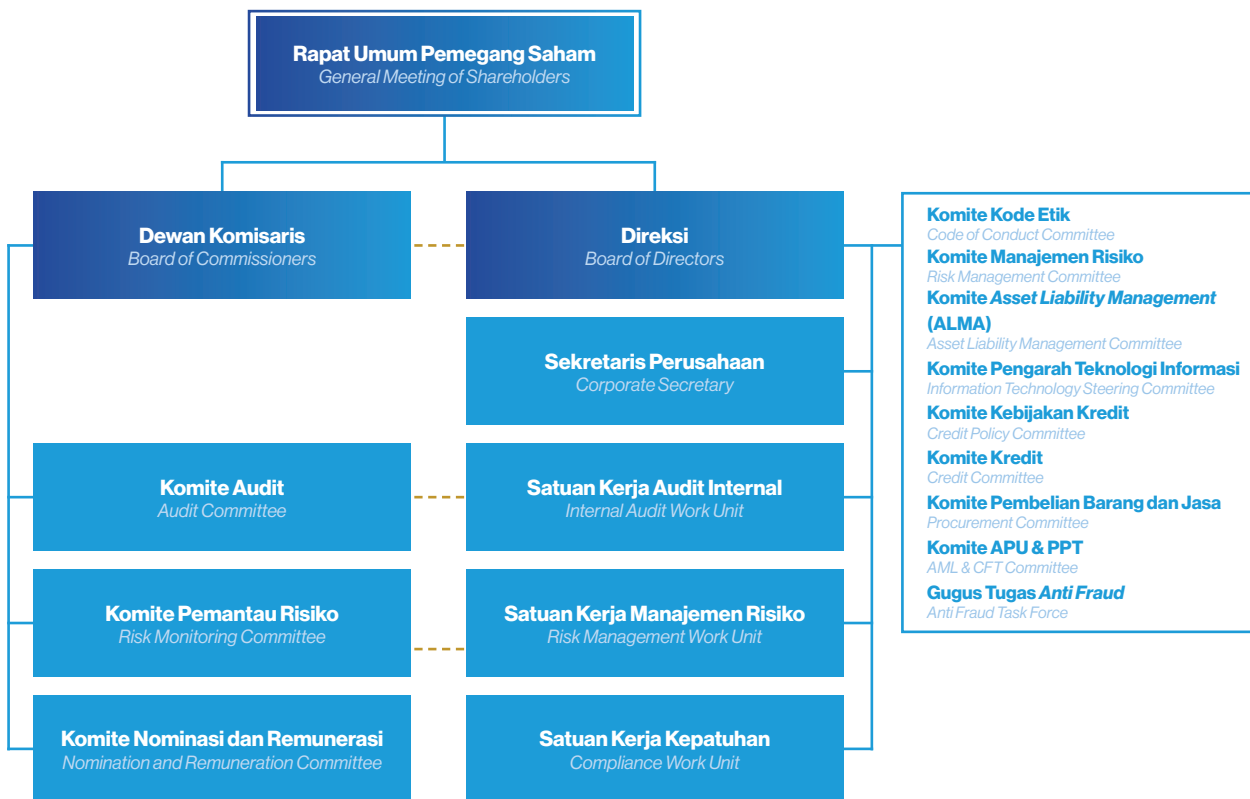
GCG Structure and Mechanism

STRUKTUR GCG

Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, menyebutkan bahwa Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Organ Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*.

GCG STRUCTURE

In accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, states that the Company's Organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Directors and Board of Commissioners. The GMS, Board of Directors and Board of Commissioners respect each other's duties, responsibilities and authorities in accordance with statutory regulations and the Articles of Association. The Company's organs are established to ensure that the implementation of corporate governance principles can run effectively with clear roles and responsibilities so as to create a check and balance control mechanism.



Selain ketiga organ utama tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bank dapat membentuk organ pendukung yang ditujukan untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai visi dan misi Bank.

In addition to these three main organs, following laws and regulations, the Bank may establish supporting organs to assist the Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out their functions, duties, and responsibilities to achieve the Bank's vision and mission.



Mekanisme dan Proses Tata Kelola

Governance Mechanisms and Process

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) merupakan serangkaian proses yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Walaupun setiap organ memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, namun pada akhirnya seluruh organ mengarah pada tujuan yang sama. Karena itu dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat mengatur proses tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Good Corporate Governance (GCG) is a series of process that are related to one another. Although each organ has different tasks and functions, in the end, all organs lead to the same goal. Because of that, we need a mechanism that can regulate the process to run as it should.

Untuk itu, Bank telah menerbitkan sejumlah kebijakan dan prosedur yang tepat yang mengatur fungsi, tugas dan wewenang masing-masing organ agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan serta mengatur pola hubungan antar organ, sehingga terjadi hubungan yang sehat yang dilandasi prinsip saling menghormati masing-masing organ.

For this reason, the Company has issued some appropriate policies and procedures that regulate the functions, duties, and authorities of each organ to achieve the expected goals and control the pattern of relationships between organizations so that a healthy relationship is based on the principle of mutual respect for each organization.



Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi dalam struktur tata kelola Bank yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar Bank. RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan dan menggunakan haknya dalam mengemukakan pendapat dan memperoleh informasi terkait Bank. Keputusan yang diambil dalam RUPS dilakukan secara wajar dan transparan berdasarkan kepentingan Bank.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the Bank's governance structure which has authority that is not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners as regulated in the applicable laws and regulations and/or the Bank's Articles of Association. The GMS is a forum for shareholders to make decisions and exercise their rights to express opinions and obtain information related to the Bank. Decisions taken at the GMS are carried out fairly and transparently based on the interests of the Bank.

Jenis RUPS GMS Type

BWS mengenal dua jenis RUPS, yaitu:

1. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan diadakan setiap tahun, paling lambat enam bulan setelah penutupan tahun buku Bank. Hal-hal yang diputuskan dalam RUPS Tahunan meliputi:

- a. Persetujuan Laporan Tahunan Bank termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Bank.
- b. Pemberian pelunasan dan pembebasan (*acquitt et de charge*) bagi Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang bersangkutan, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Penetapan penggunaan laba bersih Bank.
- d. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Bank.
- e. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Bank.
- f. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS.

BWS recognizes two types of GMS, namely:

1. Annual GMS

The Annual GMS is held every year, no later than six months after the closing of the Bank's financial year. Matters decided in the Annual GMS include:

- a. *Approval of the Bank's Annual Report, including the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners and ratification of the Bank's Financial Statements.*
- b. *Provision of release and discharge (acquitt et de charge) for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision carried out during the relevant financial year, as long as these actions are recorded in the Annual Report and annual calculations and are following applicable regulations.*
- c. *Determination of the use of the Bank's net profit.*
- d. *Appointment of a public accounting firm to audit the Bank's books.*
- e. *Determination of salaries and other benefits for the Board of Directors and honorarium for the Bank's Board of Commissioners.*
- f. *Other matters requiring GMS approval.*

2. RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Bank.

2. Extraordinary GMS

Extraordinary GMS is held at any time based on the needs for the benefit of the Bank.

Wewenang RUPS Authority GMS

Kewenangan RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan Direksi. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Bank.

The authority of the GMS includes appointing and dismissing members of the Board of Commissioners and Board of Directors, evaluating the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors, approving amendments to the Articles of Association, approving annual reports, and determining the form and amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as making decisions regarding corporate actions or other strategic decisions submitted by the Board of Directors. Decisions made at the GMS are based on the interests of the Bank.

Tanpa mengurangi kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh RUPS, RUPS atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengambilan Keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan.

Without reducing the power and authority possessed by the GMS, the GMS or the shareholders cannot intervene in the implementation of the duties, functions, and rules of the Board of Commissioners and Board of Directors to carry out their obligations and rights following the Articles of Association and applicable Laws and Regulations. GMS decision-making is carried out fairly and transparently.

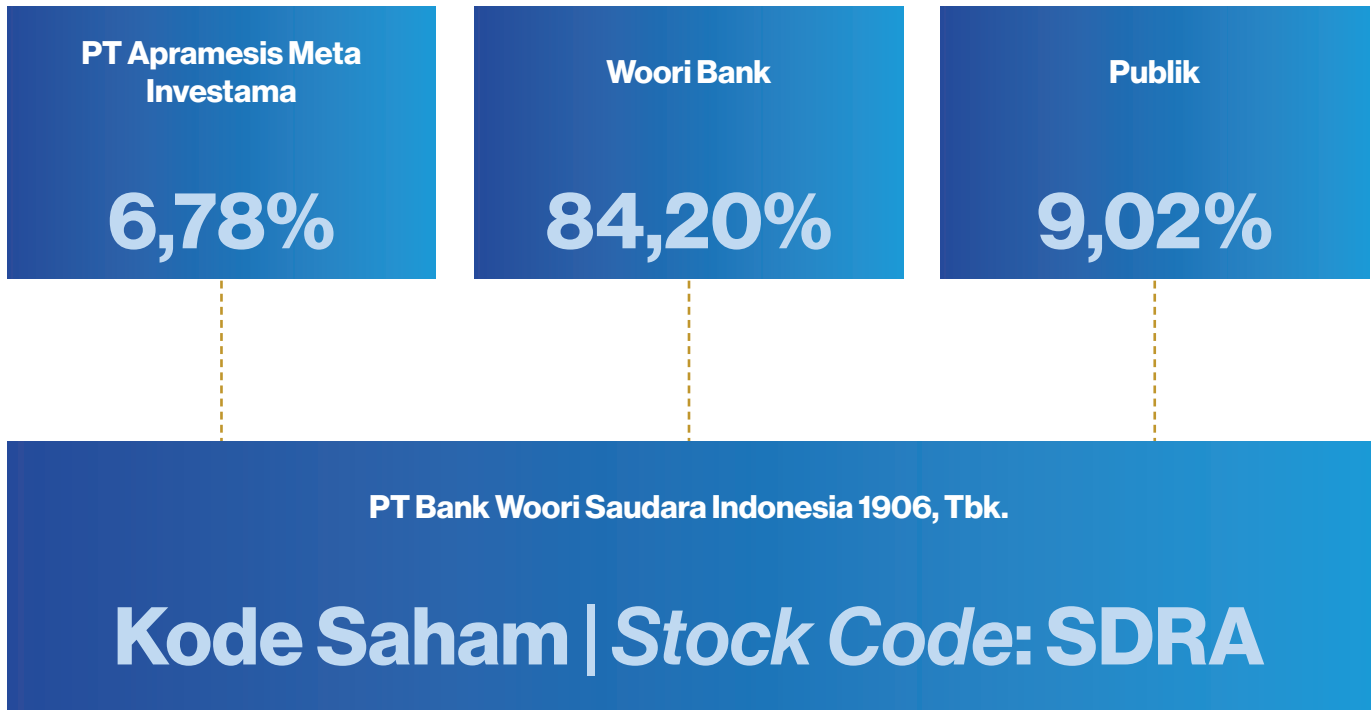
Pemegang Saham Shareholders

Pemegang Saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.

Shareholders, as owners of capital, have rights and responsibilities following applicable laws and regulations and the Articles of Association of the Bank.

Bank merupakan Perseroan Terbatas yang mencatat dan memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Sebanyak 8,43% saham Bank dicatatkan di Bursa, dan dimiliki oleh publik dengan kepemilikan masing-masing kurang dari 5%.

The Bank is a Limited Liability Company that records and trades its shares on the Indonesia Stock Exchange. As much as 8.43% of the Bank's shares are listed on the Exchange, and are owned by the public with ownership of less than 5% each.



Hak Pemegang Saham Dalam RUPS *Rights of Shareholders in GMS*

Dalam penyelenggaraan RUPS, setiap Pemegang Saham memiliki hak untuk:

1. Mengajukan usulan agenda RUPS sesuai ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, selambat-lambatnya tujuh hari sebelum tanggal panggilan rapat.
2. Dalam setiap mata acara RUPS, Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya terkait dengan materi agenda RUPS, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Ketua rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya dalam setiap mata acara;
 - b. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat;

In organizing the GMS, each Shareholder has the right to:

1. *Submit proposals for the GMS agenda following the applicable provisions in the articles of association and applicable laws and regulations, no later than seven days before the date of the summons for the meeting.*
2. *In each agenda item of the GMS, Shareholders are allowed to ask questions and/or express their opinions regarding the material on the GMS agenda with the following mechanism:*
 - a. *The chairman of the meeting will provide an opportunity for each Shareholder or their proxy to ask questions and/or express their opinions on each agenda item;*
 - b. *Only Shareholders or their legal proxies have the right to ask questions and/or express opinions;*

- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas untuk diserahkan kepada ketua rapat;
 - d. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka secara bergilir Pemegang Saham atau kuasanya tersebut diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan atau pendapatnya di depan mikrofon yang telah disediakan;
 - e. Kemudian ketua rapat atau wakilnya yang ditunjuk akan menjawab atau menanggapi satu per satu.
3. Dalam hal keputusan tidak bisa dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, Pemegang Saham dapat menggunakan haknya dalam pengambilan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan surat suara;
 - b. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya;
 - c. Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham yang memberikan suara *abstain*, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- c. *Shareholders or their proxies who wish to ask questions and/or express their opinions are asked to raise their hands and submit the completed question form to the officer to be submitted to the chairman of the meeting;*
 - d. *After the question forms have been collected, the Shareholders or their proxies are allowed to ask questions or opinions in front of the microphone provided;*
 - e. *Then the chairman of the meeting or the appointed deputy will answer or respond to them individually.*
3. *If a decision cannot be made by deliberation to reach a consensus, Shareholders may exercise their right to vote with the following conditions:*
- a. *Voting is done by giving a ballot;*
 - b. *Each share entitles its holder to cast one vote. If a Shareholder owns more than one share, they are only asked to vote once, and the ballots represent all the shares he owns or represents;*
 - c. *According to Otoritas Jasa Keuangan regulations, Shareholders who cast abstain votes are considered to have launched the same voice as the majority of Shareholders who cast ballots.*

Mekanisme Penyelenggara RUPS

Mechanism of Organizing GMS

Mekanisme penyelenggaraan RUPS Bank mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK 16/2020); dan
4. Anggaran Dasar Bank.

Ketentuan mengenai pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan, hak untuk menghadiri, pengumuman ringkasan risalah, dan penyampaian risalah RUPS adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
3. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Bank 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
5. Pengumuman ringkasan risalah RUPS dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
6. Penyampaian risalah RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.

The mechanism for organizing the Bank's GMS refers to the following:

1. *Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law;*
2. *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 15/POJK.04/2020, dated April 21, 2020, concerning Planning and Organizing the General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK 15/2020);*
3. *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 16/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK 16/2020); and*
4. *Bank's Articles of Association.*

Provisions regarding notifications, announcements, summons, right to attend, a report of the summary of the minutes, and delivery of the minutes of the GMS are as follows:

1. *Notification of the agenda of the GMS to Otoritas Jasa Keuangan is submitted no later than 5 (five) working days before the announcement of the GMS, excluding the date of the announcement of the GMS.*
2. *Announcement of the GMS is made no later than 14 (fourteen) days before the summons for the GMS, excluding the date of the announcement and the date of the summons.*
3. *Summons for the GMS are made no later than 21 (twenty one) days before the GMS, excluding the summons and the GMS date.*
4. *Shareholders entitled to attend the GMS are those whose names are registered in the Bank's Register of Shareholders 1 (one) working day before the summons for the GMS.*
5. *Announcement of the summary of the minutes of the GMS is made no later than 2 (two) working days after the GMS is held.*
6. *Submission of the minutes of the GMS to the Otoritas Jasa Keuangan is carried out no later than 30 (thirty) days after the GMS is held.*

Pelaksanaan RUPS Tahun 2023 Implementation of the 2023 GMS

Sepanjang tahun 2023, BWS telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada 30 Maret 2023.

Throughout 2023, BWS has held 1 (one) GMS, namely the Annual GMS (AGMS) which was held on March 30, 2023.

Adapun tahapan pelaksanaan RUPSLB dan RUPST Perseroan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The stages of holding the Company's EGMS and AGMS in 2023 are as follows:

Keterangan Description	RUPST dan RUPSLB AGMS and EGMS
Pemberitahuan Penyelenggaraan RUPS kepada Regulator <i>Notification of GMS to Regulator</i>	14 Februari 2023 <i>February 14, 2023</i>
Pengumuman RUPS <i>Announcement of GMS</i>	21 Februari 2023 <i>February 21, 2023</i>
Pemanggilan RUPS <i>Summons of GMS</i>	8 Maret 2023 <i>March 8, 2023</i>
Penyelenggaraan RUPS <i>Implementation of GMS</i>	Hari/Tanggal <i>Day/Date</i> : Kamis, 30 Maret 2023 <i>Thursday, March 30, 2023</i>
	Waktu <i>Time</i> : Pukul 10.15 WIB s/d 11.06 WIB <i>At 10.15 WIB to 11.06 WIB</i>
	Tempat <i>Venue</i> : Gedung Treasury Tower Lantai 27 27 th Floor District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan <i>South Jakarta</i> 12190
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS <i>Announcement of Summary of GMS Minutes</i>	3 April 2023 <i>April 3, 2023</i>
Penyampaian Risalah RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI <i>Submission of GMS Minutes to Otoritas Jasa Keuangan and BEI</i>	26 April 2023 <i>April 26, 2023</i>

Kewajiban pelaporan di atas dilakukan oleh Perseroan menggunakan sistem pelaporan elektronik PT Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

The above reporting obligation is carried out by the Company using the electronic reporting system of PT Bursa Efek Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan.

Keterangan <i>Description</i>	RUPST dan RUPSLB <i>AGMS and EGMS</i>
Pimpinan Rapat <i>Chairman of Meeting</i>	Arief Budiman
Kuorum Kehadiran <i>Attendance Quorum</i>	<p>Dihadiri baik secara fisik maupun secara elektronik melalui <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI ("eASY.KSEI") sejumlah 8.194.225.979 saham atau merupakan 95,63% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</p> <p><i>Attended both physically and electronically via the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") of 8,194,225,979 shares or representing 95.63% of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.</i></p>
Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris <i>Attendance of the Board of Directors and Board of Commissioners</i>	<p>Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i> : ARIEF BUDIMAN* • Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i> : AHMAD FAJARPRANA • Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i> : ADI HARYADI • Komisaris <i>Commissioner</i> : CHOI JUNG HOON <p>Direksi <i>Board of Directors</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur <i>President Director</i> : HWANG GYUSOON • Direktur Korporat <i>Corporate Director</i> : KANG BONG JOO • Direktur Business Support <i>Business Support Director</i> : EDWIN SULAEMAN* • Direktur IT & Jaringan dan Operasi <i>IT & Network and Operation Director</i> : BENNY SUDARSONO TAN • Direktur Konsumer <i>Consumer Director</i> : MOCHAMAD TRI BUDIONO <p>*) Hadir secara fisik dalam Rapat, sedangkan WURYANTO selaku Direktur Perseroan berhalangan hadir <i>*) Physically present at the Meeting, Meanwhile WURYANTO as Director of the Company was unable to attend</i></p>
Pihak Independen untuk melakukan proses penghitungan suara dan validasinya <i>Independent Party to carry out the vote counting and validation process</i>	PT Sinartama Gunita
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya <i>Number of Shareholders Asking Questions</i>	<p>Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.</p> <p><i>The company has provided the opportunity for shareholders and their proxies/representatives to ask questions, but no shareholder asked questions.</i></p>
Mekanisme Pengambilan Keputusan <i>Decision-Making Mechanism</i>	<p>Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.</p> <p><i>Meeting Resolutions are made by deliberation to reach consensus. If it fails, it will be carried out by voting.</i></p>

Hasil keputusan RUPST telah dituangkan dalam akta No. 32, tanggal 30 Maret 2023 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk yang dibuat oleh Ashoya Ratam S.H., M.Kn., adalah sebagai berikut:

The results of the AGMS decisions have been stated in deed Number 32, dated March 30, 2023 concerning the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk prepared by Ashoya Ratam S.H., M.Kn., is as follows:

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 <i>Approval of the Company's Annual Report, including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Statements for the 2022 financial year.</i>			
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara <i>By Voting</i>			
	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Setuju <i>Agree</i>	Jumlah Suara Setuju <i>Total Votes Agree</i>
	Nihil <i>Nil</i>	30.196 saham <i>30,196 shares</i>	8.194.195.783 saham (99,99%) <i>8,194,195,783 shares (99,99%)</i>	8.194.225.979 saham (100%) <i>8,194,225,979 shares (100%)</i>
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	<ul style="list-style-type: none"> Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik SUHARLI, SUGIHARTO dan REKAN, sesuai laporannya tertanggal 28 Februari 2023, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022. <i>Approved and accepted the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the 2022 financial year.</i> <i>Ratified the Company's Financial Statements for the 2022 financial year, which have been audited by the Public Accounting Firm SUHARLI, SUGIHARTO, and Partners, according to their report dated February 28, 2023, with a fair opinion, in all material respects.</i> <i>Provided full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions that have been carried out during the 2022 financial year, as long as these actions are not criminal acts and these actions are reflected in the Company Annual Report for the 2022 financial year.</i> 			
Tindak Lanjut/Realisasi Follow Up/Realization	Keputusan langsung berlaku efektif <i>The resolutions are immediately effective</i>			

Mata Acara Rapat Kedua <i>Second Meeting Agenda</i>	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 <i>Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2022 financial year.</i>			
Pengambilan Keputusan <i>Decision-making</i>	Dengan Pemungutan Suara <i>By Voting</i>			
	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Setuju <i>Agree</i>	Jumlah Suara Setuju <i>Total Votes Agree</i>
	Nihil <i>Nil</i>	30.196 saham <i>30,196 shares</i>	8.194.195.783 saham (99,99%) <i>8,194,195,783 shares (99.99%)</i>	8.194.225.979 saham (100%) <i>8,194,225,979 shares (100%)</i>
Keputusan Rapat <i>Meeting Resolutions</i>	<p>1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar Rp860.571.111.545,00 (delapan ratus enam puluh miliar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus sebelas ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah) sebagai berikut:</p> <p>a. Sebesar Rp192.785.273.190,00 (seratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh Rupiah) atau Rp22,50 (dua puluh dua koma lima puluh Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 22,40% (dua puluh dua koma nol persen) dari Laba Bersih Perseroan dibagikan sebagai Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2022 kepada Para Pemegang Saham.</p> <p>b. Sebesar Rp667.785.838.355,00 (enam ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima Rupiah) atau sebesar kurang lebih 77,60% (tujuh puluh tujuh koma enam nol persen) dari Laba Bersih Perseroan ditetapkan sebagai Laba Ditahan.</p> <p>2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>1. <i>Approved and determined the use of the Company's Net Profit for the 2022 financial year in the amount of IDR860,571,111,545.00 (eight hundred sixty billion five hundred seventy one million one hundred eleven thousand five hundred and forty-five Rupiah) as follows:</i></p> <p>a. <i>A total of IDR192,785,273,190.00 (one hundred ninety-two billion seven hundred eighty-five million two hundred seventy-three thousand one hundred and ninety Rupiah) or IDR22.50 (twenty-two point fifty Rupiah) per share or approximately 22.40% (twenty-two point four zero percent) of the Company's Net Profit was distributed as Cash Dividends for the 2022 financial year to the Shareholders.</i></p> <p>b. <i>A total of IDR667,785,838,355.00 (six hundred sixty-seven billion seven hundred eighty-five million eight hundred thirty-eight thousand three hundred fifty-five Rupiah) or approximately 77.60% (seventy seven point six zero percent) of the Company's Net Profit was determined as Retained Earnings.</i></p> <p>2. <i>Approved granting power and authority to the Company's Board of Directors to determine the schedule and procedure for distributing Cash Dividends for the 2022 Financial Year following applicable regulations.</i></p>			
Tindak Lanjut/Realisasi <i>Follow Up/Realization</i>	Dividen tunai telah dibagikan pada 3 Mei 2023 <i>Cash dividends have been distributed on May 3, 2023</i>			
Mata Acara Rapat Ketiga <i>Third Meeting Agenda</i>	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 <i>Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2023 financial year.</i>			
Pengambilan Keputusan <i>Decision-making</i>	Dengan Pemungutan Suara <i>By Voting</i>			
	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Setuju <i>Agree</i>	Jumlah Suara Setuju <i>Total Votes Agree</i>
	Nihil <i>Nil</i>	30.196 saham <i>30,196 shares</i>	8.194.195.783 saham (99,99%) <i>8,194,195,783 shares (99.99%)</i>	8.194.225.979 saham (100%) <i>8,194,225,979 shares (100%)</i>
Keputusan Rapat <i>Meeting Resolutions</i>	<p>1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.</p> <p>2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan imbalan jasa Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apa pun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.</p> <p>1. <i>Approved granting authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2023 financial year.</i></p> <p>2. <i>Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the fees for the services of the Public Accountant and other requirements for his appointment and to appoint a Substitute Public Accountant if the designated Public Accountant, for any reason, cannot complete the audit of the Company's Financial Statements for the 2023 financial year, provided that in appointing a Public Accountant, the Board of Commissioners must pay attention to recommendations from the Company's Audit Committee and meet the criteria as stipulated in POJK Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Firms in Financial Services Activities.</i></p>			
Tindak Lanjut/Realisasi <i>Follow Up/Realization</i>	Keputusan langsung berlaku efektif <i>The resolutions are immediately effective</i>			

<p>Mata Acara Rapat Keempat <i>Fourth Meeting Agenda</i></p>	<p>Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 <i>Determination of salaries/honorarium and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the 2023 financial year and tandem for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the 2022 financial year</i></p>			
<p>Pengambilan Keputusan <i>Decision-making</i></p>	<p>Dengan Pemungutan Suara <i>By Voting</i></p>			
	<p>Tidak Setuju <i>Disagree</i></p>	<p>Abstain <i>Abstain</i></p>	<p>Setuju <i>Agree</i></p>	<p>Jumlah Suara Setuju <i>Total Votes Agree</i></p>
	<p>Nihil <i>Nil</i></p>	<p>30.196 saham <i>30,196 shares</i></p>	<p>8.194.195.783 saham (99,99%) <i>8,194,195,783 shares (99.99%)</i></p>	<p>8.194.225.979 saham (100%) <i>8,194,225,979 shares (100%)</i></p>
<p>Keputusan Rapat <i>Meeting Resolutions</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 serta menetapkan besarnya uang jasa (tantiem) bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2022. 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari WOORI BANK KOREA selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta menetapkan besarnya uang jasa (tantiem) bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Approved granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and other benefits for members of the Company's Board of Directors for the 2023 financial year and to determine the number of fees (tandem) for members of the Board of Directors for the 2022 financial year.</i> 2. <i>Approved granting power and authority to the Company's Board of Commissioners by first obtaining approval from WOORI BANK KOREA as the Controlling Shareholder of the Company to determine the honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year and determine the number of fees (tandem) for members Board of Commissioners for the 2022 financial year.</i> 			
<p>Tindak Lanjut/Realisasi <i>Follow Up/Realization</i></p>	<p>Keputusan langsung berlaku efektif <i>The resolutions are immediately effective</i></p>			

Mata Acara Rapat Kelima	Perubahan Pengurus Perseroan			
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara			
	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Jumlah Suara Setuju
	Nihil	30.196 saham	8.194.195.783 saham (99,99%)	8.194.225.979 saham (100%)
Keputusan Rapat	<p>1. Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bapak ARIEF BUDIMAN selaku Presiden Komisaris Perseroan; b. Bapak AHMAD FAJARPRANA selaku Komisaris Independen Perseroan; c. Bapak ADI HARYADI selaku Komisaris Independen Perseroan; d. Bapak CHOI JUNG HOON selaku Komisaris Perseroan; e. Bapak HWANG GYUSOON selaku Presiden Direktur Perseroan; f. Bapak MOCHAMAD TRI BUDIONO selaku Direktur Perseroan; g. Bapak BENNY SUDARSONO TAN selaku Direktur Perseroan; h. Bapak EDWIN SULAEMAN selaku Direktur Perseroan; i. Bapak KANG BONG JOO selaku Direktur Perseroan, dan; j. Bapak WURYANTO selaku Direktur Perseroan. <p>serta mengangkat: Bapak ABDURACHMAN HADI selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat</p> <p>2. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, sedangkan Bapak MOCHAMAD TRI BUDIONO sebagai Direktur Perseroan akan menjabat sampai dengan Bapak ABDURACHMAN HADI yang diangkat selaku Direktur Perseroan yang baru memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta dituangkan dalam suatu Keputusan Direksi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.</p> <p>3. Susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>DIREKSI Presiden Direktur : HWANG GYUSOON; Direktur : KANG BONG JOO; Direktur : BENNY SUDARSONO TAN; Direktur : EDWIN SULAEMAN; Direktur : WURYANTO; Direktur : MOCHAMAD TRI BUDIONO; Direktur : ABDURACHMAN HADI.</p> <p>Efektifnya pengangkatan ABDURACHMAN HADI dan masa jabatan MOCHAMAD TRI BUDIONO sebagaimana keputusan butir 2 di atas</p> <p>DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris : ARIEF BUDIMAN; Komisaris Independen : AHMAD FAJARPRANA; Komisaris Independen : ADI HARYADI; Komisaris : CHOI JUNG HOON.</p> <p>4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat dan peraturan perundangan, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.</p>			
Tindak Lanjut/Realisasi	Keputusan langsung berlaku efektif			

Fifth Meeting Agenda	Changes in the Management of the Company			
Decision-making	By Voting			
	Disagree	Abstain	Agree	Total Votes Agree
	Nil	30,196 shares	8,194,195,783 shares (99.99%)	8,194,225,979 shares (100%)
Meeting Resolutions	<p>1. Approved to reappoint the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mr. ARIEF BUDIMAN as President Commissioner of the Company; b. Mr. AHMAD FAJARPRANA as Independent Commissioner of the Company; c. Mr. ADI HARYADI as Independent Commissioner of the Company; d. Mr. CHOI JUNG HOON as Commissioner of the Company; e. Mr. HWANG GYUSOON as President Director of the Company; f. Mr. MOCHAMAD TRI BUDIONO as Director of the Company; g. Mr. BENNY SUDARSONO TAN as Director of the Company; h. Mr. EDWIN SULAEMAN as Director of the Company; i. Mr. KANG BONG JOO as Director of the Company, and; j. Mr. WURYANTO as Director of the Company. <p>and appointed: Mr. ABDURACHMAN HADI as Director of the Company as of the closing of the Meeting</p> <p>2. The term of office for the appointed members of the Board of Commissioners and Board of Directors is until the closing of the 3rd (third) Annual GMS, since the appointment the relevant person namely the Annual GMS for the 2025 Financial Year which will be held in 2026, while Mr. MOCHAMAD TRI BUDIONO as Director of the Company will serve until Mr. ABDURACHMAN HADI who is appointed as the new Director of the Company has obtained approval from Otoritas Jasa Keuangan for the fit and proper test and has fulfilled all the statutory provisions in force in the Republic of Indonesia as well as stated in a Board of Directors Decree, taking into account the laws and regulations in the Capital Market sector without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to be able to dismiss them at any time.</p> <p>3. The composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company is as follows:</p> <p>BOARD OF DIRECTORS President Director : HWANG GYUSOON; Director : KANG BONG JOO; Director : BENNY SUDARSONO TAN; Director : EDWIN SULAEMAN; Director : WURYANTO; Director : MOCHAMAD TRI BUDIONO; Director : ABDURACHMAN HADI.</p> <p>The effective appointment of ABDURACHMAN HADI and term of office of MOCHAMAD TRI BUDIONO are as in resolution point 2 above</p> <p>BOARD OF COMMISSIONERS President Commissioner : ARIEF BUDIMAN; Independent Commissioner : AHMAD FAJARPRANA; Independent Commissioner : ADI HARYADI; Commissioner : CHOI JUNG HOON.</p> <p>4. Approved granting power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions related to decisions on the agenda of the Meeting and laws and regulations, including to state in a separate Notary deed and notify changes in the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to the Ministry of Law and Rights Human Rights of the Republic of Indonesia following applicable regulations.</p>			
Follow Up/Realization	The resolutions are immediately effective			

Mata Acara Rapat Keenam <i>Sixth Meeting Agenda</i>	Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum <i>Accountability report on the realization of the use of proceeds from the public offering</i>
Pengambilan Keputusan <i>Decision-making</i>	Oleh karena mata acara Rapat ini bersifat laporan, maka tidak dilakukan perhitungan suara dan pengambilan keputusan Rapat <i>Because the Agenda of this Meeting is like a report, the vote count and decision-making of the Meeting are not carried out</i>
Keputusan Rapat <i>Meeting Resolutions</i>	Oleh karena Mata Acara Keenam ini hanya bersifat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (PMHMETD III), dengan demikian dalam Mata Acara ini tidak dilakukan pengambilan keputusan. <i>As this Sixth Agenda is only a Report on the Realization of the Use of Proceeds from a Public Offering for Capital Increase by Providing Pre-emptive Rights III (PMHMETD III), therefore no decision is made in this Agenda.</i>
Tindak Lanjut/Realisasi <i>Follow Up/Realization</i>	Keputusan langsung berlaku efektif <i>The resolutions are immediately effective</i>

Keputusan RUPS Sebelumnya

Previous Year's GMS Resolutions

Pada Tahun 2022, BWS menyelenggarakan RUPST pada tanggal 30 Maret 2022 di Gedung Treasury Tower Lantai 27 District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, 12190, dengan menghasilkan 6 (enam) keputusan untuk RUPST sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 50 tanggal 30 Maret 2022.

In 2022, BWS held AGMS on March 30, 2022 at Gedung Treasury Tower, 27th Floor, District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 South Jakarta, 12190, by passing 6 (six) resolutions for the AGMS as stated in Deed Number 50 dated March 30, 2022.

Seluruh keputusan RUPST telah direalisasikan pada tahun yang sama oleh Bank.

All AGMS resolutions were implemented in the same year by the Bank.



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola terselenggara dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

The Board of Commissioners is a company organ that has the duties and responsibilities to carry out general and/or specific supervision following the Articles of Association, provide advice to the Board of Directors, and ensure that the implementation of the principles of governance is carried out in every business activity at all levels or tiers of the organization.



Dasar Hukum

Legal Basis

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. 2. Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Banks. 3. Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks. 4. Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. |
|--|---|



Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Board Charter)

Guidelines for the Board of Commissioners Work Procedures (Board Charter)

Dalam menjalankan tugas dan menunjang efektivitas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memerlukan suatu Kebijakan dan Pedoman Kerja sebagai Pedoman Bagi Dewan Komisaris. Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris Bank ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris yang terakhir direvisi tanggal 20 Oktober 2022 melalui Nomor 035/KEP-DEKOM/A-13/X/22.

In carrying out its duties and supporting effectiveness in the supervisory function, the Board of Commissioners requires a Policy and Work Guidelines as Guidelines for the Board of Commissioners. The policies and guidelines for the Bank's Board of Commissioners are stipulated through the Decree of the Board of Commissioners dated October 20, 2022 by Number 035/KEP-DEKOM/A-13/X/22.

Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris memuat hal-hal yang terkait dengan organisasi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, etika kerja, keterbukaan, pembentukan komite dan tata tertib rapat Dewan Komisaris berdasarkan peraturan yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Best Practices* yang ditinjau secara berkala dan mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners Policies and Guidelines contain matters related to the organization, duties and responsibilities, authority, work ethics, openness, committee formation, and meeting rules for the Board of Commissioners based on applicable regulations including the Regulations of Otoritas Jasa Keuangan and Best Practices which are reviewed regularly and are binding for each member of the Board of Commissioners.

Komposisi Dewan Komisaris *Composition of the Board of Commissioners*

Tahun 2023, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris BWS tidak mengalami perubahan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 30 Maret 2023. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan komposisi Dewan Komisaris telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 di mana jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit adalah 3 (tiga) namun tidak melebihi jumlah anggota Direksi dan paling sedikit 50% anggotanya adalah Komisaris Independen.

In 2023, the number and composition of the BWS Board of Commissioners have no change following the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders held on March 30, 2023. All members of the Board of Commissioners are domiciled in Indonesia. The composition of the Board of Commissioners is in accordance with Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 17 of 2023, where the number of members of the Board of Commissioners is at least 3 (three) but does not exceed the number of members of the Board of Directors, and at least 50% of the members are Independent Commissioners.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2023

Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2023

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Dasar Penunjukkan <i>Basis of Appointment</i>	Periode Jabatan <i>Term of Office</i>
Arief Budiman	Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i>		
Ahmad Fajarprana	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 30 Maret 2023. <i>Resolution of Annual GMS for the 2022 financial year dated March 30, 2023.</i>	Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2025 yang diselenggarakan di tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu. <i>Until the 2025 Annual GMS closing, which will be held in 2026, without prejudice to the Annual GMS' right to terminate it at any time.</i>
Adi Haryadi	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>		
Choi Jung Hoon	Komisaris <i>Commissioner</i>		

Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Dewan Komisaris

Fit and Proper Assessment of the Board of Commissioners

Seluruh calon anggota Dewan Komisaris wajib dinyatakan lulus dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun penjelasan status Uji Kemampuan dan Kepatutan Dewan Komisaris yang menjabat di akhir tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

All candidates for members of the Board of Commissioners must be declared to have passed the Fit & Proper Test conducted by Otoritas Jasa Keuangan. The Fit and Proper Test status for the Board of Commissioners who will serve at the end of 2023 can be explained in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Status	Keterangan Uji Kemampuan dan Kepatutan Description of Fit and Proper Test
Arief Budiman	Presiden Komisaris President Commissioner	Lulus Passed	Telah diperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) tanggal 29 Agustus 2019. An approval letter has been obtained from Otoritas Jasa Keuangan regarding the Fit and Proper Test Decision dated August 29, 2019.
Ahmad Fajarprana	Komisaris Independen Independent Commissioner	Lulus Passed	Telah diperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) tanggal 19 Desember 2014. An approval letter has been obtained from Otoritas Jasa Keuangan regarding the Fit and Proper Test Decision dated December 19, 2014.
Adi Haryadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Lulus Passed	Telah diperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) tanggal 9 Februari 2021. An approval letter has been obtained from Otoritas Jasa Keuangan regarding the Fit and Proper Test Decision dated February 9, 2021.
Choi Jung Hoon	Komisaris Commissioner	Lulus Passed	Telah diperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) tanggal 22 Juni 2022. An approval letter has been obtained from Otoritas Jasa Keuangan regarding the Fit and Proper Test Decision dated June 22, 2022.

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023, Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen, Komisaris Independen wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. Komisaris Independen diharapkan menjadi penyeimbang terhadap keputusan yang dibuat oleh pemegang saham mayoritas untuk mewakili pemegang saham minoritas.

Referring to Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 17 of 2023, the Board of Commissioners must consist of Independent and Non-Independent Commissioners, Independent Commissioners must comprise at least 50% (fifty percent) of the total number of members of the Board of Commissioners. Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have financial, management, share ownership, and/or family relationships with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and/or controlling shareholders, or relationships with the Bank that may affect the person's ability to act independently. Independent Commissioners are expected to counterbalance decisions made by the majority shareholders to represent minority shareholders.

Komposisi keanggotaan dalam susunan Dewan Komisaris Bank telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

The membership composition in the Bank's Board of Commissioners design has met the number, arrangement, criteria, and independence following Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks and Otoritas Jasa Keuangan Circular Number 13/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.

Kriteria Komisaris Independen mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Adapun kriteria Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

The criteria for Independent Commissioners refer to the provisions of Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. The criteria for Independent Commissioners are as follows:

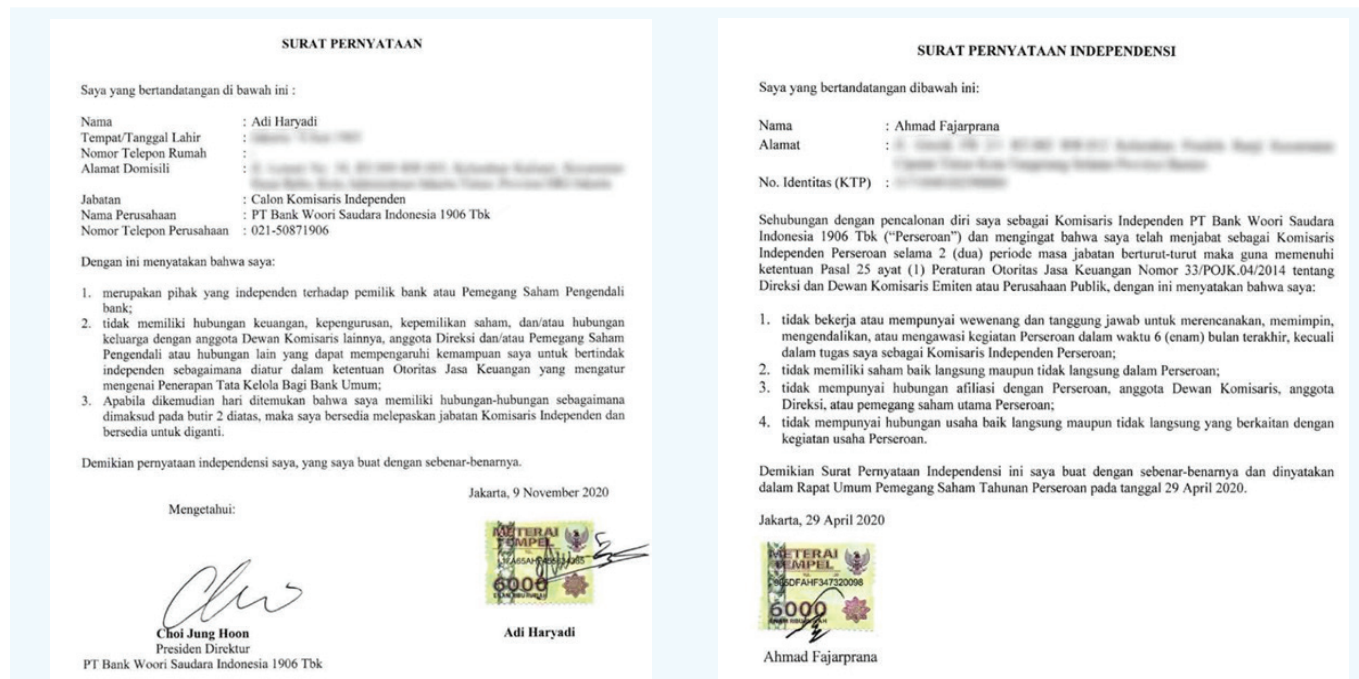
Kriteria Criteria	Komisaris Independen Independent Commissioner	
	Ahmad Fajarprana	Adi Haryadi
Merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya. <i>The person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner of the Issuer or Public Company in the following period.</i>	x	x
Mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. <i>Own shares directly or indirectly in the Issuer or Public Company.</i>	x	x
Mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. <i>Have affiliated relationships with the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or significant shareholders of the Issuer or Public Company.</i>	x	x
Mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. <i>Have a direct or indirect business relationship with the business activities of the Issuer or Public Company.</i>	x	x

√ = ada | x = tidak ada

√ = available | x = not available

Masing-masing Komisaris Independen Bank telah membuat Surat Pernyataan Independen dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Each Independent Commissioner of the Bank has made an Independent Statement and has submitted it to Otoritas Jasa Keuangan.



Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Komisaris Functions, Duties, and Authorities of the Board of Commissioners

Berdasarkan Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris, fungsi tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Based on the Policy and Guidelines for the Board of Commissioners, the duties and authorities of the Board of Commissioners are as follows:

1. Tugas Dewan Komisaris
 - a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
 - b. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

1. Duties of the Board of Commissioners
 - a. The Board of Commissioners has duties of supervising for the Bank's interests over the policies and management of the Board of Directors, providing advice to the Board of Directors, and is responsible for such supervision, in accordance with the Bank's aims and objectives as stipulated in the statutory provisions, articles of association and GMS resolutions.
 - b. Under certain conditions, it is obligatory to hold an annual GMS and other GMS following its authority as stipulated in the laws and regulations and the Articles of Association.

- c. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 - d. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia jika ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 - e. Wajib membentuk Komite-komite guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain:
 - i. Komite Audit
 - ii. Komite Pemantau Risiko
 - iii. Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - f. Bersama dengan Direksi menyusun Pedoman dan Kode Etik yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Bank.
 - g. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
 - i. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
 - ii. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
2. Wewenang Dewan Komisaris
- a. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
 - b. Memeriksa semua pembukuan, surat-surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- c. *Ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit work unit, external auditors, results of supervision by Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia, and/or results of monitoring by other authorities.*
 - d. *Deliver notification to Otoritas Jasa Keuangan and/or Bank Indonesia if violations of laws and regulations in the field of finance and banking are found and conditions or circumstances that could endanger the Bank's going concern.*
 - e. *Required to form Committees to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, including:*
 - i. *Audit Committee*
 - ii. *Risk Monitoring Committee*
 - iii. *Nomination and Remuneration Committee.*
 - f. *Together with the Board of Directors, prepare Guidelines and Code of Conduct that are binding on each member of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as develop a code of ethics that applies to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees, and supporting organs owned by the Bank.*
 - g. *The Board of Commissioners is obliged to report to the Otoritas Jasa Keuangan no later than 5 (five) working days after discovery:*
 - i. *Violation of the statutory provisions in the finance, banking sector and those related to the Bank's business activities; and/or*
 - ii. *Any circumstances or predicted conditions that could endanger the continuity of the Bank's business.*
2. *Authority of the Board of Commissioners*
- a. *The Board of Commissioners accepts and exercises the authority delegated and/or granted to the Board of Commissioners in accordance with the statutory provisions, articles of association, and/or GMS resolutions.*
 - b. *Examine all books, letters, and other evidence, check and match the condition of cash and others and have the right to know all actions that the Board of Directors has carried out.*

- c. Meminta penjelasan tentang segala hal mengenai Bank kepada Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
 - d. Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
 - e. Melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar Bank atau keputusan RUPS.
 - f. Menerima penjelasan dari Direksi mengenai perubahan atas Kebijakan Strategis Bank.
3. Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
 - b. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
 - c. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
 - d. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
 - e. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - f. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
 - g. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
 - h. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
- c. Request an explanation on all matters regarding the Bank to the Board of Directors, and each member of the Board of Directors is required to provide explanation for all issues asked by the Board of Commissioners.
 - d. Temporarily dismiss members of the Board of Directors by stating the reasons.
 - e. Carry out bank management actions under certain conditions for a certain period determined based on the Bank's Articles of Association or GMS resolutions.
 - f. Receive an explanation from the Board of Directors regarding changes to the Bank's Strategic Policy.
3. Responsibilities of the Board of Commissioners
- a. The Board of Commissioners must carry out their duties, authorities, and responsibilities in good faith and with prudence principles.
 - b. The Board of Commissioners must provide time to carry out duties and responsibilities optimally in accordance with guidelines and work procedures.
 - c. In carrying out supervision, the Board of Commissioners must direct, monitor and evaluate the integrated implementation of governance, risk management and compliance as well as the Bank's strategic policies, in accordance with the statutory provisions, articles of association and/or GMS resolutions.
 - d. The Board of Commissioners must carry out their duties and responsibilities independently.
 - e. The Board of Commissioners must ensure the implementation of GCG principles in every business activity of the Bank at all levels or tiers of the organization.
 - f. The Board of Commissioners is obliged to supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, as well as provide advice to the Board of Directors.
 - g. In carrying out supervision, the Commissioners are required to direct, monitor, and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies.
 - h. In carrying out supervision, the Board of Commissioners is prohibited from being involved in making decisions on Bank operational activities, except:

- Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum.
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- j. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- k. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank apabila dapat membuktikan:
- Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank;
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- l. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- *Provision of funds to related parties as stipulated in Otoritas Jasa Keuangan regulations regarding Maximum Limit of Credit Provision and Provision of Large Funds for Commercial Banks.*
 - *Other matters stipulated in the Articles of Association of the Bank or the applicable laws and regulations,*
- i. *Decision-making by the Board of Commissioners does not negate the responsibility of the Board of Directors for the implementation of the Bank management.*
- j. *Each member of the Board of Commissioners is jointly and severally responsible for the Bank's losses caused by the mistakes or negligence of members of the Board of Commissioners in carrying out their duties.*
- k. *Members of the Board of Commissioners cannot be held responsible for losses to the Bank if they can prove:*
- *The losses were not due to their mistakes or negligence;*
 - *Has carried out management in good faith, full of responsibility and prudence for the benefit and following the aims and objectives of the Bank;*
 - *Does not have a conflict of interest, either directly or indirectly, for management actions that result in losses; and*
 - *Has taken action to prevent the loss from arising or continuing.*
- l. *The Board of Commissioners must safeguard all data and information related to the Bank submitted by the Board of Directors, and in accordance with the laws and regulations.*



Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meeting

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga wajib mengadakan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Following Otoritas Jasa Keuangan Regulations Number 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, the Board of Commissioners is required to hold meetings at least 1 (one) time in 2 (two) months. In addition, the Board of Commissioners must have a meeting with the Board of Directors at least 1 (once) in 4 (four) months.

Namun demikian, Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris dibuatkan risalah rapat oleh Sekretaris Perusahaan dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Risalah rapat berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan.

Sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria rapat yang dipersyaratkan, yaitu 14 (empat belas) kali rapat Dewan Komisaris dan 3 (tiga) kali Rapat bersama Direksi. Adapun agenda dan rekapitulasi kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Agenda dan Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris

However, the Board of Commissioners may hold a meeting at any time at the request of 1 (one) or several members of the Board of Commissioners or at the request of the Board of Directors by specifying the matters to be discussed. In each meeting of the Board of Commissioners, minutes of the meeting are prepared by the Corporate Secretary and signed by the chairman of the meeting and all members of the Board of Commissioners present at the meeting. The minutes of the meeting contain matters discussed and matters decided.

Throughout 2023 the Board of Commissioners has fulfilled the required meeting criteria, which namely 14 (fourteen) meetings with the board of commissioners and 3 (three) meetings with the board of directors. The agenda and recapitulation of attendance of the Board of Commissioners at conferences in 2023 are as follows:

Agenda and Board of Commissioners Attendance Recapitulation at Board of Commissioners Meetings

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Rapat Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Meetings</i>			Rapat Bersama Direksi <i>Meetings with Board of Directors</i>		
		Jumlah Rapat <i>Total Meetings</i>	Jumlah Kehadiran <i>Total Attendance</i>	% Kehadiran <i>% Attendance</i>	Jumlah Rapat <i>Total Meetings</i>	Jumlah Kehadiran <i>Total Attendance</i>	% Kehadiran <i>% Attendance</i>
Arief Budiman	Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i>	14	14	100	3	3	100
Ahmad Fajarprana	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	14	14	100	3	3	100
Adi Haryadi	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	14	14	100	3	3	100
Choi Jung Hoon	Komisaris <i>Commissioner</i>	14	13	93	3	3	100



Agenda Rapat Dewan Komisaris

Agenda of Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance			
			AB	AF	AH	CJH
1	25 Januari 2023 January 25, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Update rekapitulasi Progres Tindak Lanjut Temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 Hasil Pemeriksaan Tematik/Special Audit "Take Over Early Disbursement" Hasil Investigasi Audit Inspektorat pada Departemen APU-PPT Laporan Profil Risiko Per November 2022 Risiko Masalah Utama Objective Pada Tahun 2023 Capital Adequacy Ratio Laporan pemantauan Divisi Loan Review 	1	1	1	0
		<ol style="list-style-type: none"> Update on recapitulation of the progress of follow-up to Otoritas Jasa Keuangan findings in 2022 Results of Thematic Inspection/Special Audit "Take Over Early Disbursement" Inspectorate Audit Investigation Results at APU-CFT Department Risk Profile Report as of November 2022 Risk of Major Problem Objective in 2023 Capital Adequacy Ratio Loan Review Division monitoring report 				
2	22 Februari 2023 February 22, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Laporan Pencapaian Indikator Strategik Bank Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II/2022 	1	1	1	1
		<ol style="list-style-type: none"> Changes to the Nomination and Remuneration Committee Guidelines and Work Procedures Bank Strategic Indicator Achievement Report Semester II/2022 Business Plan Supervision Report 				
3	29 Maret 2023 March 29, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pengangkatan dan Perubahan Susunan Pengurus Penilaian Internal calon Direktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perubahan susunan Anggota Komite dibawah Dewan Komisaris 	1	1	1	1
		<ol style="list-style-type: none"> Appointment and Changes in the Composition of Management Internal assessment of prospective Directors Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors Changes in the composition of Committee Members under the Board of Commissioners 				
4	17 April 2023 April 17, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi Progres Tindak Lanjut Temuan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022 Indikator Risiko Unit Bisnis Laporan Profil Risiko Key Issues on Risk Loan Portfolio Movement Insentif Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2022 Remunerasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris 2023 	1	1	1	1
		<ol style="list-style-type: none"> Recapitulation of the progress of follow-up to Otoritas Jasa Keuangan findings in 2022 Business Unit Risk Indicators Risk Profile Report Key Issues on Risk Loan Portfolio Movement Performance Incentives for Board of Directors and Board of Commissioners in 2022 Remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners 2023 				
5	18 April 2023 April 18, 2023	<p>Pembahasan Temuan Audit Internal terkait Sanksi Denda Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p> <p>Discussion of Internal Audit Findings related to Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sanction</p>	1	1	1	1

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance			
			AB	AF	AH	CJH
6	24 Mei 2023 May 24, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi Progres Tindak Lanjut Temuan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022 2. Indikator Risiko Unit Bisnis 3. Rekapitulasi <i>Fraud</i> Semester I 2023 4. Laporan Profil Risiko 5. <i>Key Issues on Risk</i> 6. <i>Loan Portfolio Movement</i> 7. Indikator Likuiditas 8. Implementasi <i>Risk Control Self Assessment</i> (RCSA) 9. Penyesuaian Remunerasi Presiden Direktur 10. Penyesuaian Benefit Pengurus 	1	1	1	1
		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Recapitulation of the progress of follow-up to Otoritas Jasa Keuangan findings in 2022</i> 2. <i>Business Unit Risk Indicators</i> 3. <i>Recapitulation of Fraud Semester I 2023</i> 4. <i>Risk Profile Report</i> 5. <i>Key Issues on Risk</i> 6. <i>Loan Portfolio Movement</i> 7. <i>Liquidity Indicator</i> 8. <i>Implementation of Risk Control Self Assessment (RCSA)</i> 9. <i>President Director's Remuneration Adjustment</i> 10. <i>Management Benefit Adjustments</i> 				
7	20 Juni 2023 June 20, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Kinerja Keuangan 2. Revisi Kinerja Keuangan 3. Rencana TI 	1	1	1	1
		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial Performance Condition</i> 2. <i>Revision of Financial Performance</i> 3. <i>IT Plan</i> 				
8	22 Agustus 2023 August 22, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi Progres tindak lanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 2. Indikator Unit Bisnis 3. Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat pada Wilayah Solo 4. Laporan Profil Risiko 5. <i>Key Issues on Risk</i> 6. Risiko Profil Bank 	1	1	1	1
		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Recapitulation of the progress of follow-up to Otoritas Jasa Keuangan findings in 2022</i> 2. <i>Business Unit Indicators</i> 3. <i>Inspectorate Audit Inspection Results in Solo Region</i> 4. <i>Risk Profile Report</i> 5. <i>Key Issues on Risk</i> 6. <i>Bank Profile Risk</i> 				
9	20 September 2023 September 20, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi Progres tindak lanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 2. Indikator Risiko Unit Bisnis 3. Rekapitulasi <i>Fraud</i> Semester I/2023 4. Pengaturan Dividen Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan 	1	1	1	1
		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Recapitulation of the progress of follow-up to Otoritas Jasa Keuangan findings in 2022</i> 2. <i>Business Unit Risk Indicators</i> 3. <i>Recapitulation of Fraud Semester I/ 2023</i> 4. <i>Bank Dividend Regulations by Otoritas Jasa Keuangan</i> 				
10	24 Oktober 2023 October 24, 2023	Perubahan Keanggotaan Komite Audit <i>Changes in Audit Committee Membership</i>	1	1	1	1

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance			
			AB	AF	AH	CJH
11	25 Oktober 2023 October 25, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi progress tindak lanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 2. Indikator Risiko Unit Bisnis 3. Review Implementasi Penyaluran Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor (KPKB) di Unit Bisnis 4. Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat pada Wilayah Garut 5. Laporan Profil Risiko 6. Key Issues on Risk 7. Profil Risiko Bank 8. Laporan pemantauan Divisi Loan Review 	1	1	1	1
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Recapitulation of the progress of follow-up to Otoritas Jasa Keuangan findings in 2022 2. Business Unit Risk Indicators 3. Review of the Implementation of Motor Vehicle Ownership Credit (KPKB) Distribution in Business Units 4. Inspectorate Audit Inspection Results in Garut Region 5. Risk Profile Report 6. Key Issues on Risk 7. Bank Profile Risk 8. Loan Review Division monitoring report 				
12	29 November 2023 November 29, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Organisasi tahun 2024 2. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing 2024-2026 3. Remunerasi Pengurus dan Karyawan 4. Rencana Training 2024 	1	1	1	1
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizational Structure in 2024 2. Plan for the Use of Foreign Workers 2024-2026 3. Management and Employees Remuneration 4. 2024 Training Plan 				
13	13 Desember 2023 December 13, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunduran diri Presiden Direktur 2. Uang Pisah bagi Pengurus 	1	1	1	1
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Resignation of the President Director 2. Separation pay for Management 				
14	21 Desember 2023 December 21, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi progres tindak lanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022, dan overview hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023 pada Kantor Cabang Makassar, Kantor Cabang Surabaya, dan Kantor Pusat 2. Indikator Risiko Unit Bisnis 3. Overview Audit Plan vs Realisasi Semester I dan II Tahun 2023 4. Highlight Rencana Kerja Tahun 2024 (Auditable Unit, Manpower, serta Komparasi Audit Plan Tahun 2023 dan 2024) 5. Laporan Profil Risiko 6. Key Issues on Risk 7. Profil Risiko Bank 8. Loan Review 	1	1	1	1
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Recapitulation of the progress of follow-up to Otoritas Jasa Keuangan findings in 2022, and overview of Otoritas Jasa Keuangan inspection results in 2023 at Makassar Branch Office, Surabaya Branch Office, and Head Office 2. Business Unit Risk Indicators 3. Overview of Audit Plan vs Realization for Semesters I and II 2023 4. Highlights of the 2024 Work Plan (Auditable Unit, Manpower, and Comparative Audit Plan for 2023 and 2024) 5. Risk Profile Report 6. Key Issues on Risk 7. Bank Risk Profile 8. Loan Review 				

Agenda Rapat Bersama Direksi

Joint Meeting Agenda of the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance			
			AB	AF	AH	CJH
1	22 Februari 2023 February 22, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kenaikan suku bunga Amerika, kondisi perekonomian semakin sulit Rasio profitabilitas dan rasio kepatuhan secara keseluruhan terjaga di atas ketentuan minimum Meningkatnya total saldo pinjaman dan pertumbuhan simpanan Meningkatkan kinerja Kredit Konsumer Menyiapkan laporan independen formal dan rekomendasi untuk Jaringan & Operasi Rasio produktivitas menurun karena peningkatan pengeluaran personal Risiko dan Kepatuhan untuk BWS 	1	1	1	1
		<ul style="list-style-type: none"> American interest rates increased, increasingly difficult economic conditions Overall profitability ratios and compliance ratios were maintained above minimum requirements Increase in total loan balances and growth in deposits Improve Consumer Loan performance Prepare formal independent reports and recommendations for Network & Operations Productivity ratio decreased due to increase in personal expenditure Risk and Compliance for BWS 				
2	21 Juni 2023 June 21, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pada bulan Mei, total aset 52,6 T berada di bawah ekspektasi Pertumbuhan total 1,28 T dalam kondisi baik Kredit konsumer tumbuh 20% Sisi Kredit Korporasi Memperkuat Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Total pendapatan bunga dan komisi pinjaman sebesar USD95 juta dan ditargetkan USD205 juta pada akhir tahun ini 	1	1	1	1
		<ul style="list-style-type: none"> In May, total assets of 52.6 T were below expectations Total growth of 1.28 T in good conditions Consumer loan grew 20% Corporate Loan side Strengthen Risk Management and Internal Control Total interest and commission income from loans were USD95 million and was targeted at USD205 million by the end of this year 				
3	25 Oktober 2023 October 25, 2023	<ul style="list-style-type: none"> Strategi dan Action Plan Q4 konsumer Proyek relokasi Data Center (DC) dan Data Recovery Center (DRC) Fokus mendorong penurunan angka NPL tetap di bawah 1,5% sampai akhir tahun meskipun adanya kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu Rencana Right issue 	1	1	1	1
		<ul style="list-style-type: none"> Consumer Strategy and Action Plan Q4 Data Center (DC) and Data Recovery Center (DRC) relocation projects Focus on encouraging a reduction in the NPL figure to remain below 1.5% until the end of the year despite an increase compared to last year Rights issue plan 				



Program Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Competency Improvement Program

Bank memberikan kesempatan kepada Dewan Komisaris untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan dan sertifikasi, maupun program peningkatan kompetensi lainnya seperti seminar dan *workshop*.

The Bank provides opportunities for the Board of Commissioners to develop and improve their competence through training, certification, and other competency improvements programs such as seminars and workshops.



Berikut disampaikan pelatihan pendidikan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2023.

The following is an educational training and/or competency improvement program attended by the Board of Commissioners throughout 2023.

Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Jenis Pelatihan <i>Types of Training</i>	Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training Materials</i>	Tempat dan Waktu <i>Place and Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Arief Budiman (Presiden Komisaris) <i>(President Commissioner)</i>	<i>Inhouse</i> <i>Inhouse</i>	Manajemen Risiko Operasional di Perbankan <i>Operational Risk Management in Banking</i>	<i>Virtual</i> 6 Januari 2023 <i>Virtual</i> <i>January 6, 2023</i>	Efektifpro
	Eksternal <i>External</i>	Rapat Bidang Pengembangan Kajian Hukum & Peraturan <i>Legal & Regulatory Studies Development Sector Meeting</i>	<i>Zoom</i> 16 Januari 2023 <i>Zoom</i> <i>January 16, 2023</i>	PERBANAS
	<i>Workshop</i>	<i>Workshop BOD-BOC</i> <i>BOD-BOC Workshop</i>	<i>Virtual</i> 25 Oktober 2023 <i>Virtual</i> <i>October 25, 2023</i>	Bank Woori Saudara
Ahmad Fajarprana (Komisaris Independen) <i>(Independent Commissioner)</i>	<i>Inhouse</i> <i>Inhouse</i>	Manajemen Risiko Operasional di Perbankan <i>Operational Risk Management in Banking</i>	<i>Virtual</i> 6 Januari 2023 <i>Virtual</i> <i>January 6, 2023</i>	Efektifpro
	Eksternal <i>External</i>	Rapat Bidang Pengembangan Kajian Hukum & Peraturan <i>Legal & Regulatory Studies Development Sector Meeting</i>	<i>Zoom</i> 16 Januari 2023 <i>Zoom</i> <i>January 16, 2023</i>	PERBANAS
	Eksternal <i>External</i>	<i>Uncovering Cybercrime Through The Power of Collaboration</i> <i>Uncovering Cybercrime Through The Power of Collaboration</i>	Js. Luwansa H.R Rasuna Said 15 Februari 2023 <i>Js. Luwansa H.R Rasuna Said</i> <i>February 15, 2023</i>	PERBANAS
	Eksternal <i>External</i>	Perubahan NIK menjadi NPWP dan Implikasinya Terhadap Business Proses di Perbankan <i>Changing (Resident ID) to TIN and its Implications for Business Process in Banking</i>	<i>Zoom</i> 17 Februari 2023 <i>Zoom</i> <i>February 17, 2023</i>	PERBANAS
	Eksternal <i>External</i>	<i>Bankers Association</i>	<i>Zoom</i> 6 Maret 2023 <i>Zoom</i> <i>March 6, 2023</i>	PERBANAS
	Eksternal <i>External</i>	<i>IFRS Sustainability Disclosure Standards</i>	<i>Virtual</i> 27 - 28 Juni 2023 <i>Virtual</i> <i>June 27 - 28, 2023</i>	Otoritas Jasa Keuangan
	Eksternal <i>External</i>	<i>Peluang, Harapan dan Tantangan Perekonomian Nasional</i> <i>Opportunities, Hopes and Challenges for the National Economy</i>	<i>Virtual</i> 10 Oktober 2023 <i>Virtual</i> <i>October 10, 2023</i>	Forum Komunikasi DKP <i>DKP Communication Forum</i>
<i>Workshop</i>	<i>Workshop BOD-BOC</i> <i>BOD-BOC Workshop</i>	<i>Virtual</i> 25 Oktober 2023 <i>Virtual</i> <i>October 25, 2023</i>	Bank Woori Saudara	
Eksternal <i>External</i>	<i>Media Gathering PERBANAS</i> <i>PERBANAS Media Gathering</i>	<i>Virtual</i> 23 - 24 November 2023 <i>Virtual</i> <i>November 23 - 24, 2023</i>	PERBANAS	

Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Jenis Pelatihan <i>Types of Training</i>	Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training Materials</i>	Tempat dan Waktu <i>Place and Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Adi Haryadi (Komisaris) (Commissioner)	Inhouse Inhouse	Manajemen Risiko Operasional di Perbankan <i>Operational Risk Management in Banking</i>	Virtual 6 Januari 2023 Virtual January 6, 2023	Efektifpro
	Eksternal External	Rapat Bidang Pengembangan Kajian Hukum & Peraturan <i>Legal & Regulatory Studies Development Sector Meeting</i>	Zoom 16 Januari 2023 Zoom January 16, 2023	PERBANAS
	Eksternal External	Peluang, Harapan dan Tantangan Perekonomian Nasional <i>Opportunities, Hopes and Challenges for the National Economy</i>	Virtual 10 Oktober 2023 Virtual October 10, 2023	Forum Komunikasi DKP DKP Communication Forum
	Workshop	Workshop BOD-BOC <i>BOD-BOC Workshop</i>	Virtual 25 Oktober 2023 Virtual October 25, 2023	Bank Woori Saudara
Choi Jung Hoon (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Eksternal External	Rapat Bidang Pengembangan Kajian Hukum & Peraturan <i>Legal & Regulatory Studies Development Sector Meeting</i>	Zoom 16 Januari 2023 Zoom January 16, 2023	PERBANAS
	Workshop	Workshop BOD-BOC <i>BOD-BOC Workshop</i>	Virtual 25 Oktober 2023 Virtual October 25, 2023	Bank Woori Saudara
	Inhouse Inhouse	Refreshment Risk Management <i>Refreshment Risk Management</i>	Virtual 15 Desember 2023 Virtual December 15, 2023	Efektifpro

Program Orientasi bagi Dewan Komisaris Baru *Orientation Program for New Board of Commissioners*

Bank menyelenggarakan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru dengan tujuan agar anggota Dewan Komisaris yang baru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Program orientasi meliputi antara lain program sosialisasi, pelatihan, dan sertifikasi yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia.

The Bank organizes an orientation program for new member of the Board of Commissioners with the aim that new member of the Board of Commissioners can carry out their duties and responsibilities as well as possible. The orientation program includes, among others, outreach, training, and certification programs required by Otoritas Jasa Keuangan and/or Bank Indonesia.

Di tahun 2023, tidak terdapat pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga program orientasi tidak dilaksanakan.

In 2023, there was no appointment of new members of the Board of Commissioners, so the orientation program was not held.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2023 *Implementation of Duties of the Board of Commissioners in 2023*

Sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasannya dan penyampaian saran dan nasihat kepada Direksi, baik yang dilakukan secara langsung maupun dalam bentuk surat menyurat. Selain itu, Dewan Komisaris juga menyampaikan persetujuan atas rencana yang diajukan Direksi.

Throughout 2023 the Board of Commissioners has carried out its supervisory function and provided suggestions and advice to the Board of Directors, both in person and in the form of correspondence. In addition, the Board of Commissioners also conveys approval of the plan submitted by the Board of Directors.

Keputusan dan kegiatan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris terdokumentasi dalam bentuk Surat Keputusan yang disampaikan kepada Direksi maupun kepada Pemegang Saham. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris membuat sebanyak 16 (enam belas) Surat Keputusan, antara lain adalah sebagai berikut:

Decisions and activities carried out by the Board of Commissioners are documented in the form of Decree Letters submitted to the Board of Directors and Shareholders. Throughout 2023, the Board of Commissioners made 16 (sixteen) Decrees, including the following:

No. Surat <i>Letter No.</i>	Tanggal <i>Date</i>	Perihal <i>Regarding</i>
001/BWS.KEP.DEKOM/III/2023	30 Maret 2023 <i>March 30, 2023</i>	Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk <i>Amendment to Decree of the Board of Commissioners of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk</i>
002/BWS.KEP-DEKOM/IV/2023	17 April 2023 <i>April 17, 2023</i>	Surat Keputusan Dewan Komisaris Penetapan Remunerasi BoD dan BoC <i>Decree of the Board of Commissioners on Stipulation on BoD and BoC Remuneration</i>
003/BWS.KEP-DEKOM/IV/2023	18 April 2023 <i>April 18, 2023</i>	Nasihat Dewan Komisaris ke Direksi <i>Advice from the Board of Commissioners to the Board of Directors</i>
004/BWS.KEP-DEKOM/VI/2023	12 Juni 2023 <i>June 12, 2023</i>	Penyesuaian Remunerasi BOC & BOD <i>BOC & BOD Remuneration Adjustment</i>
005/BWS.KEP-DEKOM/VI/2023	20 Juni 2023 <i>June 20, 2023</i>	Persetujuan Revisi Rencana Bisnis <i>Approval of Business Plan Revisions</i>
006/BWS.KEP-DEKOM/VIII/2023	1 Agustus 2023 <i>August 1, 2023</i>	Surat Penunjukkan Kantor Akuntan Publik <i>Letter of Appointment of Public Accounting Firm</i>
007/BWS.KEP-DEKOM/VIII/2023	30 Agustus 2023 <i>August 30, 2023</i>	Persetujuan Kepada Direksi Perseroan Untuk Melaksanakan Pemberian Penambahan Limit Kredit Kepada PT Woori Finance Indonesia, Tbk. <i>Approval to the Company's Board of Directors to Provide Additional Loan Limits to PT Woori Finance Indonesia, Tbk.</i>
008/BWS.KEP-DEKOM/IX/2023	25 September 2023 <i>September 25, 2023</i>	Persetujuan Fasilitas Kredit KPKB <i>KPKB Credit Facility Approval</i>
009/BWS.KEP-DEKOM/X/2023	24 Oktober 2023 <i>October 24, 2023</i>	Perubahan Anggota Komite di Bawah Dewan Komisaris <i>Changes in Committee Members Under the Board of Commissioners</i>
010/BWS.KEP-DEKOM/XI/2023	15 November 2023 <i>November 15, 2023</i>	Rencana Bisnis PT Bank Woori Saudara 1906, Tbk <i>Business Plan of PT Bank Woori Saudara 1906, Tbk</i>
011/BWS.KEP-DEKOM/XI/2023	20 November 2023 <i>November 20, 2023</i>	Persetujuan Fasilitas Kredit A.N Meidi Lazuardi <i>Approval of A.N Meidi Lazuardi Credit Facility</i>
012/BWS.KEP-DEKOM/XI/2023	27 November 2023 <i>November 27, 2023</i>	Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan PT Bank Woori Saudara 1906, Tbk periode 30 September 2023 <i>Recommendation Regarding to The Appointment of Public Accounting Firm (KAP) as External Auditor for The Financial Statements of PT Bank Woori Saudara 1906, Tbk September 30, 2023 period</i>
013/BWS.KEP-DEKOM/XI/2023	27 November 2023 <i>November 27, 2023</i>	Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan PT Bank Woori Saudara 1906, Tbk periode 30 November 2023 <i>Recommendation Regarding to The Appointment of Public Accounting Firm (KAP) as External Auditor for The Financial Statements of PT Bank Woori Saudara 1906, Tbk November 30, 2023 period</i>
014/BWS.KEP-DEKOM/XI/2023	29 November 2023 <i>November 29, 2023</i>	Hapus Buku Tahun 2023 <i>Write-Off the Books for 2023</i>

No. Surat Letter No.	Tanggal Date	Perihal Regarding
015/BWS.KEP-DEKOM/XI/2023	11 Desember 2023 December 11, 2023	Surat Persetujuan <i>Write-Off</i> Tagihan Klaim Asuransi Desember 2023 Insurance Claim Invoice <i>Write-Off</i> Approval Letter December 2023
016/BWS.KEP-DEKOM/XI/2023	12 Desember 2023 December 12, 2023	Remunerasi BOD dan BOD BOD and BOD Remuneration

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan di setiap semester.

Based on Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 5/POJK.03/2016 concerning Bank Business Plan, the Board of Commissioners is required to supervise the implementation of the Bank's Business Plan, which includes, among others, management policies and strategies. The supervision results are outlined in the Business Plan Supervision Report, which is submitted to the Otoritas Jasa Keuangan every semester.

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank sebagai berikut:

In 2023, the Board of Commissioners prepared and submitted the following Business Plan Supervision Report:

No Surat Letter No.	Tanggal Date	Perihal Regarding
001/BWS-DEKOM/OJK/II/2023	22 Februari 2023 February 22, 2023	Penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Periode Semester II Tahun 2022 Submission of Business Plan Supervision Report of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Semester II/2022 Period
002/BWS-DEKOM/OJK/VIII/2023	30 Agustus 2023 August 30, 2023	Penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Periode Semester I Tahun 2023 Submission of Business Plan Supervision Report of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Semester I/2023 Period



Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Setiap tahun, Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja dari setiap Komite, baik secara kolektif kolegal maupun individu.

In carrying out its functions, duties, and responsibilities, the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee assist the Board of Commissioners. Every year, the Board of Commissioners evaluates the performance of each committee, both collectively and individually.

Tahun 2023, Dewan Komisaris memandang bahwa seluruh komite tersebut telah bekerja dengan menjunjung standar kompetensi dan kualitas yang baik. Adapun penilaian masing-masing komite adalah sebagai berikut:

In 2023, the Board of Commissioners viewed that these committees have worked by upholding good standards of competence and quality. The assessment of each committee is as follows:

Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualitas informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di tahun 2023, Dewan Komisaris berpandangan bahwa Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sepanjang tahun 2023 Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan bagi Bank. Di tahun 2023, Dewan Komisaris berpandangan bahwa Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Di tahun 2023, Dewan Komisaris berpandangan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sepanjang tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali.

Audit Committee

The Audit Committee has the duty and responsibility to assist and facilitate the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties and functions on matters related to the quality of financial information, internal control systems, effectiveness of external and internal auditor inspections, effectiveness of risk management implementation and compliance with applicable laws and regulations. In 2023, the Board of Commissioners is of the view that the Audit Committee has properly carried out its duties and responsibilities. Throughout 2023 the Audit Committee has held 12 (twelve) meetings.

Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee has duties and responsibilities in carrying out supervision and providing advice to the Board of Directors to obtain adequate assurance that the implementation of the Bank's risk management still meets the elements of adequacy of risk management procedures and methodologies, so that the Bank's business activities can remain under control at the limits acceptable and profitable for the Bank. In 2023, the Board of Commissioners is of the view that the Risk Monitoring Committee has carried out its duties and responsibilities properly. Throughout 2023, the Risk Monitoring Committee has held 12 (twelve) meetings.

Nomination and Remuneration Committee

The Audit Committee has the duty and responsibility to assist and facilitate the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties and functions on matters related to the quality of financial information, internal control systems, effectiveness of external and internal auditor audits, effectiveness of risk management implementation and compliance with applicable laws and regulations. In 2023, the Board of Commissioners is of the view that the Audit Committee has properly carried out its duties and responsibilities. Throughout 2023, the Audit Committee has held 11 (eleven) meetings.



Evaluasi dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Evaluation and Performance Assessment of the Board of Commissioners

Evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham, berdasarkan kinerja yang telah dilakukan Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya pengelolaan Bank yang dilakukan Direksi. Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Anggota Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatannya.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Dewan Komisaris.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan pelaksanaannya paling sedikit meliputi:

- **Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja**
Prosedur pelaksanaan evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan sekali setiap tahun, dengan menggunakan indikator *Self Assessment*.
- **Kriteria yang digunakan dalam Penilaian Kinerja:**
 - Kontribusi dan dukungan Dewan Komisaris dalam mengimplementasikan visi dan misi Bank dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Bank.
 - *Monitoring* untuk terciptanya GCG.
- **Pihak yang melakukan Penilaian Kinerja**
Pihak-pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah Pemegang Saham. Penilaian terhadap pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dalam RUPS. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan kinerja Dewan Komisaris selama periode 2023.

The Board of Commissioners' performance is evaluated by Shareholders based on the commission carried out by the Board of Commissioners in supervising the running of the Bank's management by the Board of Directors. In general, the performance of the Board of Commissioners is determined based on the duties and obligations stated in the applicable laws and regulations and the Articles of Association, as well as the Shareholders' mandate. Formal evaluation criteria are submitted openly to Members of the Board of Commissioners from the date of their appointment.

The results of the evaluation of the performance of the Board of Commissioners as a whole and the implementation of each Member of the Board of Commissioners individually are an integral part of the compensation and incentive scheme for Members of the Board of Commissioners.

Performance Assessment of the Board of Commissioners and its implementation includes at least the following:

- **Performance Assessment Implementation Procedures**
The procedure for evaluating the performance of the Board of Commissioners is carried out once every year, using the Self Assessment indicator.
- **Criteria used in Performance Assessment:**
 - *Contribution and support of the Board of Commissioners in implementing the Bank's vision and mission in the work program in the current year while adhering to the Bank's values.*
 - *Monitoring for the creation of GCG.*
- **Parties conducting Performance Assessment**
The parties who evaluate the performance of the Board of Commissioners are Shareholders. Assessment of implementation of the performance of the Board of Commissioners is carried out at the GMS. The Board of Commissioners will be accountable for the performance of the Board of Commissioners during the 2023 period.



Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan organ Tata Kelola yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi memiliki tanggung jawab penuh secara kolegal atas pengelolaan Bank sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.

The Board of Directors is a governance organ authorized and fully responsible for managing the Bank for the Bank's interests, in accordance with the Bank's goals and objectives and representing the Bank, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the articles of association and laws and regulations in force. The Board of Directors has full collegial responsibility for the management of the Bank in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association.

Dasar Hukum

Legal Basis

1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
 5. Anggaran Dasar Bank.
1. *Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*
 2. *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Banks.*
 3. *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.*
 4. *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.*
 5. *Bank's Articles of Association.*

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi (Board Charter)

Guidelines for the Board of Directors Work Procedures (Board Charter)

Dalam melakukan tugas dan kewajibannya, Direksi senantiasa merujuk pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Anggaran Dasar Bank dan dijabarkan pada Kebijakan Direksi No. 070/KEP-DIR/A-13/IX/20 tanggal 21 September 2020. Dalam kebijakan tersebut, dijelaskan mengenai tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan dengan konsisten dalam melaksanakan

In carrying out their duties and responsibilities, the Board of Directors always refers to the Work Guidelines for the Board of Commissioners and Board of Directors, which are contained in the Bank's Articles of Association and are spelled out in the Board of Directors Policy Number 070/KEP-DIR/A-13/IX/20 dated September 21, 2020. The policy describes the stages of activities in a structured, systematic, easy-to-understand, and consistent manner in carrying out their

tugasnya masing-masing untuk mencapai visi dan misi Bank, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

respective duties to achieve the vision and mission Bank, with the result that it is hoped that high work standards will be completed in line with GCG principles.

Komposisi Direksi Composition of the Board of Directors

Tahun 2023, komposisi Direksi BWS mengalami perubahan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 30 Maret 2023. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 di mana salah satu anggota Direksi membawahi fungsi kepatuhan.

In 2023, the composition of the BWS Board of Directors has changed following the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders, which was held on March 30, 2023. All members of the Board of Directors are domiciled in Indonesia in accordance with Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 17 of 2023, and a member of the Board of Directors is in charge of the compliance function.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penunjukkan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Hwang Gyusoon	Presiden Direktur President Director		
Kang Bong Joo	Direktur Korporat Corporate Director		
Benny Sudarsono Tan	Direktur IT & Jaringan dan Operasi IT & Network and Operation Director	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2022 tanggal 30 Maret 2023	Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2025 yang diselenggarakan di tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.
Edwin Sulaeman	Direktur Business Support Business Support Director	Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 financial year dated March 30, 2023	Until the 2025 Annual GMS closing, which will be held in 2026, without prejudice to the Company's General Meeting of Shareholders' right to terminate it at any time.
Wuryanto	Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director		
Abdurachman Hadi	Direktur Konsumer Consumer Director		
Mochamad Tri Budiono	Direktur Konsumer Consumer Director	Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 29 Maret 2020 Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2019 financial year dated March 29, 2020	Menjabat sampai dengan Abdurachman Hadi yang diangkat selaku Direktur Perseroan yang baru memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta dituangkan dalam suatu Keputusan Direksi. Serve until Abdurachman Hadi appointed as a new Director of the Company has obtained approval from the Otoritas Jasa Keuangan for the fit and proper test and has complied with all the statutory provisions in force in the Republic of Indonesia as stated in a Board of Directors Decree.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi

Board of Directors Fit and Proper Test

Seluruh calon anggota Direksi wajib dinyatakan lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun penjelasan status Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi yang menjabat di akhir tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

All prospective members of the Board of Directors must be declared to have passed the Fit & Proper Test conducted by the Otoritas Jasa Keuangan. The status of the Fit and Proper Test of the Board of Directors who serve at the end of 2023 can be explained in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Status	Keterangan Uji Kemampuan dan Kepatutan Description of Fit and Proper Test
Hwang Gyusoon	Presiden Direktur President Director	Lulus Passed	Telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Presiden Direktur pada Bank berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-71/D.03/2021 tertanggal 19 Mei 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Hwang Gyusoon Selaku Presiden Direktur PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk <i>Has been declared to meet the requirements to become President Director of the Bank based on the Decree of the Members of the Otoritas Jasa Keuangan Board of Commissioners Number KEP-71/D.03/2021 dated May 19, 2021 concerning Results of the Fit and Proper Test of Mr. Hwang Gyusoon as President Director of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk</i>
Kang Bong Joo	Direktur Korporat Corporate Director	Lulus Passed	Telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan disetujui untuk menjadi Direktur Korporat pada Bank berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-103/D.03/2020 tertanggal 7 Agustus 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Kang Bong Joo Selaku Direktur Korporat PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk <i>Has been declared to meet the requirements and approved to become Corporate Director of the Bank based on the Decree of the Members of the Otoritas Jasa Keuangan Board of Commissioners Number KEP-103/D.03/2020 dated August 7, 2020 concerning Results of the Fit and Proper Test of Mr. Kang Bong Joo As Corporate Director of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk</i>
Benny Sudarsono Tan	Direktur IT & Jaringan dan Operasi IT & Network and Operation Director	Lulus Passed	Telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan disetujui untuk menjadi Direktur TI & Jaringan dan Operasi pada Bank berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-130/D.03/2019 tertanggal 25 Juli 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Benny Sudarsono Tan Selaku Direktur TI & Jaringan dan Operasi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk <i>Has been declared to meet the requirements and approved to become Director of Information Technology & Network and Operations of the Bank based on the Decree of Members of the Otoritas Jasa Keuangan Board of Commissioners Number KEP-130/D.03/2019 dated July 25, 2019 concerning Results of the Fit and Proper Test of Mr. Benny Sudarsono Tan As Director of Information Technology & Network and Operations of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk</i>
Edwin Sulaeman	Direktur Business Support Business Support Director	Lulus Passed	Telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan disetujui untuk menjadi Direktur Business Support pada Bank berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-102/D.03/2020 tertanggal 7 Agustus 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Edwin Sulaeman Selaku Direktur Business Support PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk <i>Has been declared to meet the requirements and approved to become Director of Business Support of the Bank based on the Decree of Members of the Otoritas Jasa Keuangan Board of Commissioners Number KEP-102/D.03/2020 dated August 7, 2020 concerning Results of the Fit and Proper Test of Mr. Edwin Sulaeman as Business Support Director of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk</i>
Wuryanto	Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	Lulus Passed	Telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan disetujui untuk menjadi Direktur Risiko & Kepatuhan pada Bank berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-86/D.03/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pengangkatan Pengurus PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk <i>Has been declared to meet the requirements and approved to become Director of Risk & Compliance of the Bank based on the Decree of Members of the Otoritas Jasa Keuangan Board of Commissioners Number KEP-86/D.03/2022 dated June 22, 2022 concerning Results of the Fit and Proper Test for the Appointment of Management of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk</i>
Abdurachman Hadi	Direktur Konsumer Consumer Director	Lulus Passed	Telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan disetujui untuk menjadi Direktur Konsumer pada Bank berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-88/D.03/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Abdurachman Hadi selaku Direktur Konsumer PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk <i>Has been declared to meet the requirements and approved to become Director of Risk & Compliance of the Bank based on the Decree of Members of the Otoritas Jasa Keuangan Board of Commissioners Number KEPR-88/D.03/2023 dated August 7, 2023 concerning Results of the Fit and Proper Test of Mr. Abdurachman Hadi As Director of Consumer of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk</i>

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi *Duties and Responsibilities of the Board of Directors*

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank.
5. Membentuk komite.
6. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
7. Menyusun:
 - Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
9. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.

In general, the duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

1. *The Board of Directors carries out and is responsible for managing the Bank for the benefit of the Bank, following the aims and objectives of the Bank set out in the statutory provisions, articles of association and GMS resolutions.*
2. *Organize annual GMS and other GMS as stipulated in laws and regulations and the articles of association.*
3. *Carry out duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and prudence.*
4. *Implement GCG principles in every business activity of the Bank at all levels or organizational levels in the Bank.*
5. *Establish committees.*
6. *Evaluate the committee's performance at the end of each financial year.*
7. *Arrange:*
 - *Guidelines that bind each member of the Board of Directors by the provisions of the applicable laws and regulations.*
 - *The code of ethics applies to all Board of Directors. It applies to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees, and supporting organs owned by the Bank in accordance with laws and regulations.*
8. *Follow up on audit findings or inspections and recommendations from the Bank's internal audit work unit, external auditors, results of supervision by the Otoritas Jasa Keuangan, and/or results of supervision by other authorities and institutions.*
9. *Disclose to employees regarding the Bank's strategic internal policies in the field of staffing.*

- | | |
|---|--|
| <p>10. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>11. Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, termasuk kepada Dewan Komisaris.</p> <p>12. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>13. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diatur dalam anggaran dasar, peraturan perundang-undangan dan yang ditetapkan dalam RUPS, Rapat Direksi dan peraturan Bank.</p> | <p>10. <i>Accountable for the implementation of duties to shareholders through the GMS.</i></p> <p>11. <i>Have and provide accurate, relevant and timely data and information, including to the Board of Commissioners.</i></p> <p>12. <i>Carry out data and information management in accordance with the Bank's Good Governance and statutory provisions.</i></p> <p>13. <i>Carry out other duties and responsibilities stipulated in the articles of association, laws, and regulations, and those specified in the GMS, Board of Directors Meetings, and Bank regulations.</i></p> |
|---|--|



Wewenang Direksi

Authority of the Board of Directors

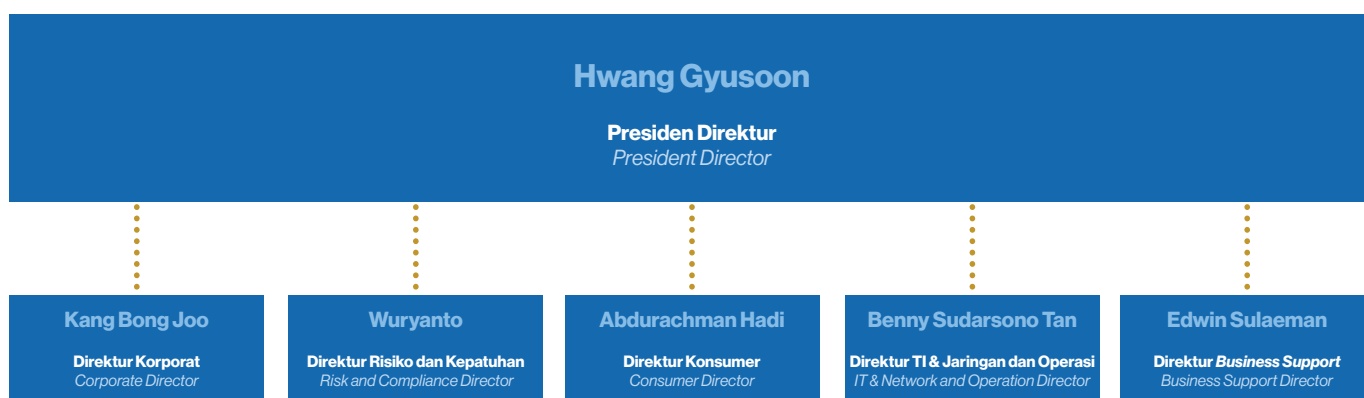
Direksi memiliki wewenang sebagai berikut:

- | | |
|--|--|
| <p>1. Menjalankan pengurusan Bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.</p> <p>2. Mewakili Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.</p> <p>3. Mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan.</p> <p>4. Melakukan perbuatan hukum dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengalihkan atau melepaskan hak. • Menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Bank yang besaran nilainya diatur dalam anggaran dasar. • Pelaksanaan transaksi material, transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. <p>5. Mengatur pembagian wewenang pengurusan di antara anggota Direksi.</p> | <p><i>The Board of Directors has the following authorities:</i></p> <p>1. <i>Running the management of the Bank following the policies deemed appropriate, by the aims and objectives set out in the articles of association.</i></p> <p>2. <i>Represent the Bank in accordance with in the laws and regulations, articles of association and GMS resolutions.</i></p> <p>3. <i>Represent the Bank inside and outside the court.</i></p> <p>4. <i>Perform legal actions in terms of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Transfer or waive rights.</i> • <i>Make debt guarantees for all or most of the Bank's assets, the amount of which is regulated in the articles of association.</i> • <i>Implementation of material transactions, affiliate transactions, and conflict of interest transactions as stipulated in laws and regulations in the capital market sector.</i> <p>5. <i>Regulate the distribution of management authority among members of the Board of Directors.</i></p> |
|--|--|

Pembagian Tugas Antar Direksi *Division of Duties Between the Board of Directors*

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 055/KEP.DIR/HC.III/X/2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat sebagaimana diubah dalam Keputusan Direksi Nomor 008/KEP. DIR/HC/III/2022 tentang Perubahan Struktur Organisasi Direktorat Risiko & Kepatuhan, Direktorat Konsumer, Direktorat IT & Jaringan dan Operasi dan Direktorat Korporat Kantor Pusat, Direksi melakukan pembagian lingkup tugas sebagai berikut ini:

Based on Board of Directors Decree Number 055/KEP.DIR/HC.III/X/2021 concerning Changes in the Organizational Structure of the Head Office as amended in the the Board of Directors Decree Number 008/KEP.DIR/HC/III/2022 concerning Changes in the Organizational Structure of the Risk & Compliance Directorate, Consumer Directorate, IT & Network and Operations Directorate and the Head Office Corporate Directorate, the Board of Directors performs the scope of duties as follows:



Hwang Gyusoon, Presiden Direktur

- Audit Internal
- Perencanaan Strategi dan Keuangan

Hwang Gyusoon, President Director

- Internal Audit
- Strategic and Financial Planning

Kang Bong Joo, Direktur Korporat

- Pemasaran Korporat
- Pemasaran Korporat Global
- *Corporate Investment Banking*
- *Corporate Business Support*
- Manajemen *Treasury*

Kang Bong Joo, Corporate Director

- Corporate Marketing
- Global Corporate Marketing
- Corporate Investment Banking
- Corporate Business Support
- Treasury Management

Abdurachman Hadi, Direktur Konsumer

- Produk dan Layanan
- Kredit Konsumer
- Unit Bisnis

Abdurachman Hadi, Consumer Director

- Products and Services
- Consumer Loan
- Business Unit

Benny Sudarsono Tan, Direktur TI & Jaringan dan Operasi

- Satuan Kerja Teknologi Informasi
- Jaringan dan Operasi
- *Digital Banking*

Edwin Sulaeman, Direktur Business Support

- *Human Capital*
- *Remedial & Special Asset Management*
- *General Affairs & Tax*
- Manajemen Kredit
- Manajemen Asuransi

Wuryanto, Direktur Risiko dan Kepatuhan

- Manajemen Risiko
- Kepatuhan
- *Loan Review*
- *Corporate & Business Legal*
- *Corporate Secretary & Communications*

Benny Sudarsono Tan, Director of IT & Network and Operations

- *Information Technology Work Unit*
- *Network and Operations*
- *Digital Banking*

Edwin Sulaeman, Business Support Director

- *Human Capital*
- *Remedial & Special Asset Management*
- *General Affairs & Tax*
- *Credit Management*
- *Insurance Management*

Wuryanto, Risk & Compliance Director

- *Risk Management*
- *Compliance*
- *Loan Review*
- *Corporate & Business Legal*
- *Corporate Secretary & Communications*

Rapat Direksi *Board of Directors Meeting*

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Direksi wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Selain itu, Direksi juga wajib mengadakan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Namun demikian, Direksi dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Direksi atau permintaan Dewan Komisaris, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Dalam setiap rapat Direksi dibuatkan risalah rapat oleh Sekretaris Perusahaan dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat. Risalah rapat berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan.

Following Otoritas Jasa Keuangan Regulations Number 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, the Board of Directors is required to hold meetings at least 1 (once) in 1 (one) month. In addition, the Board of Directors must hold joint meetings with the Board of Directors at least 1 (once) time in 4 (four) months.

However, the Board of Directors may hold a meeting at any time at the request of 1 (one) or several members of the Board of Directors or at the request of the Board of Commissioners by stating the matters to be discussed. In each meeting of the Board of Directors, minutes of the meeting are prepared by the Corporate Secretary and signed by the chairman of the meeting and all members of the Board of Directors present at the meeting. The minutes of the meeting contain matters discussed and matters decided.

Sepanjang tahun 2023 Direksi telah memenuhi kriteria rapat yang dipersyaratkan, yang telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali dan rapat bersama Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) kali.

Throughout 2023 the Board of Directors has met the required meeting criteria, which have been held 12 (twelve) times and meetings with the Board of Commissioners 3 (three) times.

Adapun agenda dan rekapitulasi kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Bersama Dewan Komisaris di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The agenda and recapitulation of the Board of Directors attendance at Board of Directors Meeting and Meetings with the Board of Commissioners in 2023 are as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Direksi

Board of Directors Attendance Recapitulation

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Direksi Board of Directors Meeting			Rapat Bersama Dewan Komisaris Meetings with the Board of Commissioners		
		Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Hwang Gyusoon	Presiden Direktur President Director	12	12	100	3	3	100
Kang Bong Joo	Direktur Korporat Corporate Director	12	12	100	3	3	100
Benny Sudarsono Tan	Direktur TI & Jaringan dan Operasi IT & Network and Operations Director	12	12	100	3	3	100
Edwin Sulaeman	Direktur Business Support Business Support Director	12	12	100	3	3	100
Wuryanto	Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk & Compliance Director	12	12	100	3	3	100
Abdurachman Hadi*	Direktur Konsumer Consumer Director	5	5	100	1	1	100
Mochamad Tri Budiono**	Direktur Konsumer Consumer Director	7	7	100	2	2	100

*) menjabat sejak 14 Agustus 2023

*) served since August 14, 2023

***) menjabat hingga 13 Agustus 2023

**) served until August 13, 2023

Agenda Rapat Direksi

Agenda of Board of Directors Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance						
			HG	KB	BST	ES	WSY	AH	MTB
1	9 Januari 2023 January 9, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja KUPEN, KUPEG, KPH Pemenuhan kebutuhan RO KPKB Penerapan Program Top Up untuk Ganti Pertanggungan Asuransi Penerapan asuransi kebakaran dan gempa bumi wajib untuk gedung yang disewakan untuk cabang 	1	1	1	1	1	0	1
		<ol style="list-style-type: none"> Performance of KUPEN, KUPEG, KPH Fulfillment of RO KPKB needs Implementation of the Top Up Program to Change Insurance Coverage Implementation of mandatory fire and earthquake insurance for buildings rented to branches 							

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance						
			HG	KBJ	BST	ES	WSY	AH	MTB
2	20 Februari 2023 February 20, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Platform Digital Baru pada Mobile Banking Perbaikan Manajemen Asuransi Kredit Rencana pengembangan situs web resmi baru BWS 	1	1	1	1	1	0	1
		<ol style="list-style-type: none"> New Digital Platform in Mobile Banking Credit Insurance Management improvement BWS new official website development plan 							
3	13 Maret 2023 March 13, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kinerja kredit Kontribusi KUPEN, KUPEG, KPH Finalisasi relokasi KCP Sragen Push NPL di bawah 1,5% 	1	1	1	1	1	0	1
		<ol style="list-style-type: none"> Loan performance improvement Contribution of KUPEN, KUPEG, KPH Finalize the relocation of Sragen Sub-Branch Office Push NPL below 1.5% 							
4	17 April 2023 April 17, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan perbaharuan pasar dan sosialisasi ST010 Platform Digital Baru pada Mobile Banking Manajemen Asuransi TFT Penyesuaian jam kerja selama Ramadhan 	1	1	1	1	1	0	1
		<ol style="list-style-type: none"> Preparation for market updates and ST010 dissemination New Digital Platform in Mobile Banking TFT Insurance Management Adjustment of working hours during Ramadhan 							
5	8 Mei 2023 May 8, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Aksi mendorong debitur yang masih on hold Perluasan Marketing KUPEN, KUPEG, SPAN, KPR, dan KPKB Program bundling HOTS dan Mirae Assets Rencana untuk bergabung dalam Asian Payment Network 	1	1	1	1	1	0	1
		<ol style="list-style-type: none"> Action to encourage debtors remaining on hold Expansion of marketing for KUPEN, KUPEG, SPAN, KPR and KPKB HOTS and Mirae Assets bundling program Plan to join the Asian Payment Network 							
6	13 Juni 2023 June 13, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja konsumen loan Refreshment Program Knowledge Stategi Push Out 	1	1	1	1	1	0	1
		<ol style="list-style-type: none"> Consumer loan performance Knowledge Program Refreshment Push Out Strategy 							
7	31 Juli 2023 July 31, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pemaksimalan pencegahan kenaikan angka NPL Relokasi Data Center dan Disaster Recovery Center Evaluasi perngoperasian QRIS pada tanggal 7 Juni 	1	1	1	1	1	0	1
		<ol style="list-style-type: none"> Maximizing prevention of increase in NPL figures Relocation of Data Center and Disaster Recovery Center Evaluation of QRIS operations on June 7 							
8	21 Agustus 2023 August 21, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Rencana pembukaan KC Manado Temuan Otoritas Jasa Keuangan di KC Makassar Pemantauan ketat terhadap pelanggan yang telah jatuh tempo 	1	1	1	1	1	1	0
		<ol style="list-style-type: none"> Plan for opening Manado Branch Office Otoritas Jasa Keuangan's findings at Makassar Branch Office Close monitoring of overdue customers 							
9	11 September 2023 September 11, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan WhatsApp Business dan Visa Licensing Evaluasi vendor data clean up untuk core banking WGSS 	1	1	1	1	1	1	0
		<ol style="list-style-type: none"> Development of WhatsApp Business and Visa Licensing Evaluation of data clean up vendors for WGSS core banking 							

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance						
			HG	KBJ	BST	ES	WSY	AH	MTB
10	30 Oktober 2023 October 30, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Rencana penandatanganan bisnis corporate yang telah dijadwalkan sampai bulan Desember 2023 Pembentukan tim TFT Digitalisasi Dokumen Peningkatan signifikan klaim asuransi pada Triwulan 3 	1	1	1	1	1	1	0
		<ol style="list-style-type: none"> Corporate business signing plan which has been scheduled until December 2023 Formation of TFT Document Digitization team Significant increase in insurance claims in Quarter 3 							
11	27 November 2023 November 27, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pengimplementasian SSL Security untuk peningkatan keamanan WON BWS Pemfokusan penurunan NPL di bawah 1,6% pada akhir tahun 2023 	1	1	1	1	1	1	0
		<ol style="list-style-type: none"> Implementation of SSL Security to increase WON BWS security Focus on reducing NPLs below 1.6% by the end of 2023 							
12	11 Desember 2023 December 11, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Perpanjangan program dan mulai berlakunya program baru untuk RO dan nasabah Relokasi KC Denpasar Peningkatan keamanan Internet Banking dan Mobile Banking (IBMB) Fokus menjaga NPL tetap di bawah 1,5% pada akhir tahun 2023 	1	1	1	1	1	1	0
		<ol style="list-style-type: none"> Extension of the program and entry into force of new programs for RO and customers Relocation of Denpasar Branch Office Improvement of Internet Banking and Mobile Banking (IBMB) security Focus on keeping NPL below 1.5% by the end of 2023 							

Kehadiran Rapat Bersama Dewan Komisaris

Attendance at Meetings with the Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Kehadiran Attendance						
		HG	KBJ	BST	ES	WSY	AH**	MTB*
1	22 Februari 2023 February 22, 2023	1	1	1	1	1	0	1
2	21 Juni 2023 June 21, 2023	1	1	1	1	1	0	1
3	25 Oktober 2023 October 25, 2023	1	1	1	1	1	1	-

*) menjabat sampai dengan 13 Agustus 2023

*) serves until August 13, 2023

**) menjabat sejak 14 Agustus 2023

**) serves since August 14, 2023



Program Peningkatan Kompetensi Direksi

Board of Directors Competency Improvement Program

Bank memberikan kesempatan kepada Direksi untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan dan sertifikasi, maupun program peningkatan kompetensi lainnya seperti seminar dan *workshop*.

The Bank provides opportunities for the Board of Directors to develop and improve their competence through training and certification and other competency improvements programs such as seminars and *workshops*.



Berikut disampaikan pelatihan pendidikan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2023.

The following is an educational training and/or competency improvement program attended by the Board of Directors throughout 2023.

Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Jenis Pelatihan <i>Types of Training</i>	Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training Materials</i>	Tempat dan Waktu <i>Place and Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Hwang Gyu Soon (Presiden Direktur) <i>(President Director)</i>	<i>Inhouse</i> <i>Inhouse</i>	Manajemen Risiko Operasional di Perbankan <i>Operational Risk Management in Banking</i>	<i>Virtual</i> 6 Januari 2023 <i>January 6, 2023</i>	Efektifpro
	Eksternal <i>External</i>	Audiensi Dengan Hukum Online <i>Online Legal Hearing</i>	Zoom 2 Mei 2023 <i>May 2, 2023</i>	Hukum Online
Wuryanto (Direktur Risiko & Kepatuhan) <i>(Risk & Compliance Director)</i>	Internal <i>Internal</i>	CAFM Refreshment & Resertifikasi <i>CAFM Refreshment & Resertification</i>	Bandung, Crowne Plaza Hotel 10 Mei 2023 <i>May 10, 2023</i>	Asia Anti Fraud Management (AAFMM)
	Eksternal <i>External</i>	Pertemuan Tahunan LPS dan Stakeholders <i>LPS and Stakeholders Annual Meeting</i>	St Regis Hotel Kuningan 20 Juni 2023 <i>June 20, 2023</i>	LPS
	Eksternal <i>External</i>	Personal Data Protection Law	Zoom 11 Juli 2023 <i>July 11, 2023</i>	Perbanas
	Workshop	Workshop BOD-BOC <i>BOD-BOC Workshop</i>	<i>Virtual</i> 25 Oktober 2023 <i>October 25, 2023</i>	Bank Woori Saudara
	Eksternal <i>External</i>	Indonesia Risk Management Outlook 2024 <i>Indonesia Risk Management Outlook 2024</i>	<i>Virtual</i> 27 Oktober 2023 <i>October 27, 2023</i>	LPPI
	<i>Inhouse</i> <i>Inhouse</i>	Refreshment Risk Management <i>Refreshment Risk Management</i>	<i>Virtual</i> 15 Desember 2023 <i>December 15, 2023</i>	Efektifpro
	Abdurachman Hadi (Direktur Konsumer) <i>(Consumer Director)</i>	Eksternal <i>External</i>	ASEAN Chairmanship "Energy Efficient Mortgage (EEM) Development Throughout ASEAN Countries" <i>ASEAN Chairmanship "Energy Efficient Mortgage (EEM) Development Throughout ASEAN Countries"</i>	Hotel Mulia Senayan 22 Agustus 2023 <i>August 22, 2023</i>
Workshop		Workshop BOD-BOC <i>BOD-BOC Workshop</i>	<i>Virtual</i> 25 Oktober 2023 <i>October 25, 2023</i>	Bank Woori Saudara
<i>Inhouse</i> <i>Inhouse</i>		Refreshment for Banking Top Management <i>Refreshment for Banking Top Management</i>	Jakarta, KC The Energy 7 November 2023 <i>November 7, 2023</i>	Efektifpro
Certification	Risk Management Certification Level 7 <i>Risk Management Certification Level 7</i>	<i>Virtual</i> 15 & 18 Desember 2023 <i>December 15 & 18, 2023</i>	Efektifpro	
Eksternal <i>External</i>	Webinar Menyongsong Tantangan dan Peluang Industri Asuransi di 2024 <i>Webinar Facing the Insurance Industry Challenges and Opportunities in 2024</i>	<i>Virtual</i> 22 Desember 2023 <i>December 22, 2023</i>	LPPI	

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pelatihan Types of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat dan Waktu Place and Date	Penyelenggara Organizer
Benny Sudarsono Tan (Direktur TI & Jaringan dan Operasi) (IT & Network and Operation Consumer)	Eksternal External	High Level Dinner (Rencana Penerbitan Consultative Paper Digital Rupiah, Penguatan Kepesertaan Operasi Moneter, dan Pembentukan SRO Pasar Uang) High Level Dinner (Plan for Issuing Consultative Paper Digital Rupiah, Strengthening Monetary Operation Participation, and Establishing a Money Market SRO)	Kompleks Perkantoran Bank Indonesia 24 Januari 2023 January 24, 2023	Bank Indonesia
	Inhouse Inhouse	Training Awareness ISO 27001 Training Awareness ISO 27001	Virtual 14 April 2023 April 14, 2023	PT Catur Daya Solusi
	Eksternal External	"IDC CIO Summit Top Priorities for Digital-First CIOs" "IDC CIO Summit Top Priorities for Digital-First CIOs"	Westin Hotel 25 Mei 2023 May 25, 2023	IDC
	Eksternal External	Webinar Pemanfaatan Internet of Things Di Industri Jasa Keuangan Webinar on Using the Internet of Things in the Financial Services Industry	Virtual 14 September 2023 September 14, 2023	LPPI
	Workshop	Workshop BOD-BOC BOD-BOC Workshop	Virtual 25 Oktober 2023 October 25, 2023	Bank Woori Saudara
	Inhouse Inhouse	Refreshment Risk Management Refreshment Risk Management	Virtual 15 Desember 2023 December 15, 2023	Efektifpro
Kang Bong Joo (Direktur Korporat) (Corporate Director)	Inhouse Inhouse	Manajemen Risiko Operasional di Perbankan Operational Risk Management in Banking	Virtual 6 Januari 2023 January 6, 2023	Efektifpro
	Eksternal External	Code of Conduct (Brown Book) Edisi 4 Code of Conduct (Brown Book) Edition 4	Jakarta, Grand Hyatt Hotel 1 Maret 2023 March 1, 2023	Bank Indonesia
	Certification	Refreshment Program for Treasury Certificate Lv Advance Refreshment Program for Treasury Certificate Lv Advance	Virtual 11 Maret 2023 March 11, 2023	ACI
	Workshop	Workshop BOD-BOC BOD-BOC Workshop	Virtual 25 Oktober 2023 October 25, 2023	Bank Woori Saudara
Edwin Sulaeman (Direktur Business Support) (Business Support Director)	Eksternal External	Undangan Pertemuan terkait SEOJK tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum Invitation to a meeting related to SEOJK regarding Risk Management Certification for Commercial Bank Human Resources	Le Meridien Hotel Jakarta 16 Januari 2023 January 16, 2023	Otoritas Jasa Keuangan
	Eksternal External	Kuliah Umum Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 2023 Public Lecture by Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati 2023	Grand Studio Metro TV, Kedoya 3 Februari 2023 February 3, 2023	Media Indonesia
	Eksternal External	Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 2023 Financial Services Industry Annual Meeting	Shangri-La Hotel 6 Februari 2023 February 6, 2023	Otoritas Jasa Keuangan
	Workshop	Workshop BOD-BOC BOD-BOC Workshop	Virtual 25 Oktober 2023 October 25, 2023	Bank Woori Saudara
	Inhouse Inhouse	Refreshment Risk Management Refreshment Risk Management	Virtual 15 Desember 2023 December 15, 2023	Efektifpro
	Eksternal External	Webinar Menyongsong Tantangan dan Peluang Industri Asuransi di 2024 Webinar Facing the Insurance Industry Challenges and Opportunities in 2024	Virtual 22 Desember 2023 December 22, 2023	LPPI

Program Orientasi bagi Direksi Baru Orientation Program for New Board of Directors

Bank menyelenggarakan program orientasi bagi Direksi baru dengan tujuan agar Direksi baru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Program orientasi meliputi antara lain program sosialisasi, pelatihan, dan sertifikasi yang diwajibkan oleh OJK dan/atau Bank Indonesia.

The Bank organizes an orientation program for new Board of Directors with the aim of ensuring that new Board of Directors can carry out their duties and responsibilities as well as possible. The orientation program includes, among other things, socialization, training and certification programs required by OJK and/or Bank Indonesia.

Di tahun 2023 BWS mengangkat Abdurachman Hadi sebagai Direktur. Berikut disampaikan pelatihan pelaksanaan program orientasi terhadap Abdurachman Hadi:

In 2023 BWS appointed Abdurachman Hadi as Director. The following is a presentation of competency improvement that Orientation Program for Abdurachman Hadi:

Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Jenis Pelatihan <i>Types of Training</i>	Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training Materials</i>	Tempat dan Waktu <i>Place and Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Abdurachman Hadi (Direktur Konsumer) (Consumer Director)	Workshop	Workshop BOD-BOC BOD-BOC Workshop	Virtual 25 Oktober 2023 October 25, 2023	Bank Woori Saudara
	Inhouse Inhouse	Refreshment for Banking Top Management Refreshment for Banking Top Management	Jakarta, KC The Energy 7 November 2023 November 7, 2023	Efektifpro
	Certification Certification	Risk Management Certification Level 7 Risk Management Certification Level 7	Virtual 15 & 18 Desember 2023 December 15 & 18, 2023	Efektifpro
	Eksternal External	Webinar Menyongsong Tantangan dan Peluang Industri Asuransi di 2024 Webinar Facing the Insurance Industry Challenges and Opportunities in 2024	Virtual 22 Desember 2023 December 22, 2023	LPPI
	Eksternal External	ASEAN Chairmanship "Energy Efficient Mortgage (EEM) Development Throughout ASEAN Countries" ASEAN Chairmanship "Energy Efficient Mortgage (EEM) Development Throughout ASEAN Countries"	Hotel Mulia Senayan 22 Agustus 2023 August 22, 2023	SMF

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2023 Brief Report on the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors in 2023

Sepanjang tahun 2023, Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kebijakan Direksi. Pelaksanaan tugas Direksi salah satunya tercermin dari Surat Keputusan yang diterbitkan Direksi.

Throughout 2023, the Board of Directors has carried out its duties and responsibilities by laws and regulations and the Board of Directors Policy. Implementation of the duties of the Board of Directors is reflected in the Decree issued by the Board of Directors.

Sepanjang tahun 2023, Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan baik di bidang operasional, keuangan, maupun beberapa penunjang usaha melalui perangkat kebijakan berupa Keputusan, sebagai berikut:

Throughout 2023, the Board of Directors has issued various decisions in the operational, financial, and business support sectors through policy tools in the form of Decisions as follows:

No. Surat Letter No.	Tanggal Date	Perihal Regarding
002/KEP.DIR/HC.III/I/2023	14 Januari 2023 January 14, 2023	SK Pembentukan Tim Task Force Pengendalian Sanksi Regulator Decree on the Establishment of a Regulatory Sanctions Control Task Force Team
001/KEP.DIR/HC.III/I/2023	25 Januari 2023 January 25, 2023	SK Pembentukan Tim Task Force Manajemen Risiko & Kualitas Aset Decree on the Establishment of a Risk Management & Asset Quality Task Force Team
006/KEP-DIR/A-09/II/23	27 Februari 2023 February 27, 2023	Pedoman Pengendalian Khasanah Khasanah Control Guidelines
007/KEP.DIR/HC.III/III/2023	30 Maret 2023 March 30, 2023	Keanggotaan Komite Dibawah Dewan Komisaris PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Membership of Committees Under the Board of Commissioners of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
009/KEP.DIR/HC.III/IV/2023	3 April 2023 April 3, 2023	SK Penetapan PA Semester 2 tahun 2022 Decree on Determining PA for Semester 2 of 2022
010/KEP.DIR/HC.III/IV/2023	4 April 2023 April 4, 2023	Ketetapan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1444 H Provisions for Payment of Allowances for Eid Al-Fitr 1444 H
008/KEP-DIR/A-09/IV/23	13 April 2023 April 13, 2023	Pedoman Pengendalian Khasanah Khasanah Control Guidelines
015/KEP.DIR/HC.III/IV/2023	14 April 2023 April 14, 2023	Penetapan Penyesuaian Gaji Dan Skala Gaji Tahun 2023 Determination of Salary Adjustments and Salary Scales for 2023
011/KEP.DIR/HC.III/IV/2023	18 April 2023 April 18, 2023	Penetapan Penyesuaian Gaji 2023 Determination of 2023 Salary Adjustments
012/KEP.DIR/HC.III/IV/2023	18 April 2023 April 18, 2023	Insentif Kinerja Semester II 2022 Semester II 2022 Performance Incentives
013/KEP.DIR/HC.III/IV/2023	18 April 2023 April 18, 2023	Insentif Kinerja Bagi Pemimpin Unit Bisnis Dan Karyawan Kantor Pusat Dengan Jabatan Tertentu Performance Incentives for Business Unit Leaders and Head Office Employees in Certain Positions
014/KEP.DIR/HC.III/IV/2023	18 April 2023 April 18, 2023	Tunjangan Kemahalan Bagi Karyawan/TI Cost Benefits for Employees/IT
008A/KEP-DIR/A-04/V/23	20 Mei 2023 May 20, 2023	Kebijakan Pengembangan SDM HR Development Policy
010/KEP-DIR/A-13/VI/23	26 Juni 2023 June 26, 2023	Strategi Anti Fraud Anti Fraud Strategy
048/KEP.DIR/HC.III/VIII/2023	19 Agustus 2023 August 19, 2023	SK Penetapan PA Semester 1 tahun 2023 Decree on Determining PA for Semester 1 of 2023
045/KEP.DIR/HC.III/VIII/2023	23 Agustus 2023 August 23, 2023	Penunjukan Group Head Kantor Pusat Designation of Group Head of Head Office
011/KEP-DIR/A-08/VIII/23	29 Agustus 2023 August 29, 2023	Limit dan Kewenangan Bidang Pendanaan Financing Limits and Authorities
012/KEP-DIR/A-04/VIII/23	29 Agustus 2023 August 29, 2023	Penetapan Material Risk Takers Determination of Material Risk Takers
051/KEP.DIR/HC.III/X/2023	4 Oktober 2023 October 4, 2023	Insentif Kinerja Semester I 2023 Semester I 2023 Performance Incentives
053/KEP.DIR/HC.III/X/2023	17 Oktober 2023 October 17, 2023	Pembentukan Tim Task Force Digitalisasi Dokumen Establishment of a Document Digitization Task Force Team
054/KEP.DIR/HC.III/X/2023	24 Oktober 2023 October 24, 2023	Keanggotaan Komite Dibawah Dewan Komisaris PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Membership of Committees Under the Board of Commissioners of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
055/KEP.DIR/HC.III/XI/2023	1 November 2023 November 1, 2023	Perubahan Struktur Organisasi Direktorat Konsumer Changes in the Organizational Structure of the Consumer Directorate

No. Surat <i>Letter No.</i>	Tanggal <i>Date</i>	Perihal <i>Regarding</i>
058/KEP.DIR/HC.I/XI/2023	15 November 2023 <i>November 15, 2023</i>	Pembentukan Tim <i>Task Force Right Issue</i> Bank Woori Saudara Tahun 2024 <i>Formation of the Bank Woori Saudara Task Force Right Issue Team in 2024</i>
059/KEP.DIR/HC.III/XI/2023	29 November 2023 <i>November 29, 2023</i>	Perubahan Penunjukkan TKI Pendamping TKA Periode Tahun 2023-2024 <i>Changes in the Appointment of TKA Accompanying TKA for the 2023-2024 Period</i>
015/KEP-DIR/A-11/XII/23	14 Desember 2023 <i>December 14, 2023</i>	Kebijakan Umum Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM <i>General Policy for Implementing the AML & CFT and CPF Programs</i>
066/KEP.DIR/HC.III/XII/2023	18 Desember 2023 <i>December 18, 2023</i>	Perubahan Struktur Organisasi Kantor Unit Bisnis <i>Changes in Business Unit Office Organizational Structure</i>
014/KEP-DIR/A-03/XII/23	28 Desember 2023 <i>December 28, 2023</i>	Limit Transaksi <i>Money Market</i> , <i>Capital Market</i> , dan Valuta Asing <i>Limits for Money Market, Capital Market and Foreign Exchange Transactions</i>



Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Performance Assessment of Committees Under the Board of Directors

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Direksi dapat membentuk Komite yang membantu Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengurusan Bank. Hingga akhir tahun 2023, Direksi BWS telah membentuk Komite Kode Etik, Komite Manajemen Risiko, Komite *Asset Liability Management* (ALMA), Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kebijakan Kredit, Komite Kredit, Komite Pembelian Barang dan Jasa, Komite Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Gugus Tugas *Anti Fraud*.

Sepanjang tahun 2023, Direksi menilai komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Komite Kode Etik

Komite Kode Etik merupakan komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direksi dalam rangka melakukan kajian atas suatu Pelanggaran Peraturan. Sepanjang tahun 2023, Komite Kode Etik telah melaksanakan 10 (sepuluh) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertugas untuk membantu Direksi dalam memberikan informasi tentang risiko yang dihadapi Bank melalui laporan profil risiko agar Direksi dapat menentukan mitigasi risiko yang dapat diterapkan, hal lain yang dibahas adalah pengajuan produk dan aktivitas baru. Sepanjang tahun 2023, kinerja Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 5 (lima) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

By laws and regulations, the Board of Directors can form a Committee that assists the Board of Directors in carrying out the duties and responsibilities of managing the Bank. Until the end of 2023, BWS Board of Directors have formed Code of Conduct Committee, Risk Management Committee, Asset Liability Management Committee (ALMA), Information Technology Steering Committee, Credit Policy Committee, Credit Committee, Procurement Committee, Anti-Money Laundering and Combating Funding of Terrorism Committee and the Anti-Fraud Task Force.

Throughout 2023, the Board of Directors considers that the committee has carried out its duties and responsibilities properly.

Code of Ethics Committee

The Code of Ethics Committee is a committee formed and responsible to the Board of Directors in order to conduct a review of a Violation of Regulations. Throughout 2023, the Code of Ethics Committee has held 10 (ten) meetings and has carried out its duties properly.

Risk Management Committee

The Risk Management Committee is tasked with assisting the Board of Directors in providing information about the risks faced by the Bank through risk profile reports so that the Board of Directors can determine which risk mitigation can be applied. Throughout 2023, the performance of the Risk Management Committee has held 5 (five) meetings and has carried out its duties properly.

Komite Asset Liability Management (ALMA)

Komite Asset Liability Management (ALMA) bertugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan aset dan liabilitas, penetapan suku bunga dan likuiditas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas Bank. Sepanjang tahun 2023, Komite ALMA telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan operasional BWS pada bidang Teknologi Informasi. Sepanjang tahun 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat pembahasan teknologi informasi Bank dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan merupakan komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran atau langkah perbaikan.

Komite Kredit

Komite Kredit merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam proses pengambilan keputusan atas persetujuan pemberian kredit. Sepanjang tahun 2023, Komite Kredit telah melaksanakan proses pengambilan keputusan atas persetujuan pemberian kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Komite Pembelian Barang dan Jasa

Komite Pembelian Barang dan Jasa dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi dengan tujuan untuk membantu Direksi dalam pengelolaan kegiatan Pembelian Barang dan Jasa; memastikan efektivitas atas aktivitas kegiatan Pembelian Barang dan Jasa; dan memastikan pelaksanaan kegiatan Pembelian Barang dan Jasa sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur yang berlaku di Bank Woori Saudara. Sepanjang tahun 2023, Komite Pembelian Barang dan Jasa telah memberikan rekomendasi atas penetapan pihak ketiga vendor, khususnya terkait pembelian barang dan jasa yang memerlukan persetujuan dari Direktur.

Asset Liability Management Committee (ALMA)

The Asset Liability Management Committee (ALMA) is tasked with assisting the Board of Directors in carrying out the functions of determining asset and liability management strategies, determining interest rates and liquidity, as well as other matters related to managing the Bank's assets and liabilities. Throughout 2023, the ALMA Committee has held 12 (twelve) meetings and has carried out its duties properly.

Information Technology Steering Committee

The Information Technology Steering Committee is a committee tasked with assisting the Board of Directors in the decision-making process related to BWS operational management policies in the Information Technology sector. Throughout 2023, the Information Technology Steering Committee has held 4 (four) meetings to discuss the Bank's information technology and has carried out its duties properly.

Credit Policy Committee

The Credit Policy Committee is a committee that assists the Board of Directors in formulating policies, supervising the implementation of policies, monitoring the development and condition of the credit portfolio and providing suggestions or corrective steps..

Credit Committee

The Credit Committee is a committee tasked with assisting the Board of Directors in the decision-making process for approval of credit grants. Throughout 2023, the Credit Committee has carried out the decision-making process for loan approval by applying the principles of prudence and good governance.

Procurement Committee

The Procurement Committee is formed by and is responsible to the Board of Directors with the aim of assisting the Board of Directors in managing the activities of the Purchase of Goods and Services; ensure the effectiveness of goods and services purchasing activities; and ensure the implementation of Goods and Services Purchase activities in accordance with the Policies and Procedures that apply at Bank Woori Saudara. Throughout 2023, the Procurement Committee has provided recommendations on the determination of third party vendors, particularly regarding the purchase of goods and services which require approval from the Director.

Komite Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

Komite Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bertugas untuk membantu Direksi dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) di lingkup BWS, termasuk dalam hal ini evaluasi atas kebijakan, prosedur dan standar. Sepanjang tahun 2023, Komite Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat pembahasan terkait:

1. Kebijakan dan prosedur terkait penerapan Program APU & PPT.
2. Perbaikan proses kerja penerapan Program APU & PPT.
3. Rencana kerja pelatihan terkait penerapan Program APU & PPT.
4. Permasalahan-permasalahan terkait penerapan Program APU & PPT.

Gugus Tugas Anti Fraud

Gugus Tugas *Anti Fraud* bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris dalam penanganan penerapan strategi *anti fraud*. Gugus Tugas *Anti Fraud* telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Pembahasan terkait strategi *Anti Fraud*.
2. Pembahasan pokok-pokok/concern Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana surat Nomor SR-113/PB.32/2022 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud PT Bank Woori Saudara 1906, Tbk Semester I dan II Tahun 2021.
3. Pembahasan kasus *fraud* dan *action plan* penyelesaiannya.
4. Penetapan *threshold*/limit signifikansi untuk kejadian *fraud* dan kejadian risiko operasional lainnya.
5. Penetapan kriteria dan pengkinian status tindak lanjut kasus *fraud*.
6. Pembahasan mekanisme deteksi atau identifikasi terkait penyimpangan.
7. Pengembangan aplikasi FINA untuk pencatatan dan *database fraud*.

Committee for Anti-Money Laundering and Combating Funding of Terrorism (AML & CFT)

The AML & CFT Committee is tasked with assisting the Board of Directors in evaluating the implementation of the AML & CFT Program within BWS, including in this case the evaluation of policies, procedures and standards. Throughout 2023, the Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Committee has conducted 4 (four) discussion meetings related to:

1. Policies and procedures related to the implementation of the AML & CFT Program.
2. Improvement of the work process for implementing the AML & CFT Program.
3. Training work plan related to the implementation of the AML & CFT Program.
4. Issues related to the implementation of the AML & CFT Program.

Anti Fraud Task Force

The Anti-Fraud Task Force is directly responsible to the President Director and has a direct communication and reporting relationship to the Board of Commissioners in handling the implementation of the anti-fraud strategy. The Anti-Fraud Task Force has held 4 (four) meetings with the following discussions:

1. Discussion regarding Anti-Fraud strategy.
2. Discussion of the main points/concerns of the Otoritas Jasa Keuangan as stated in letter Number SR-113/PB.32/2022 regarding the Implementation of the Anti-Fraud Strategy of PT Bank Woori Saudara 1906, Tbk Semester I and II of 2021.
3. Discussion of fraud cases and action plans for resolution.
4. Determining the significance threshold/limit for fraud incidents and other operational risk incidents.
5. Determining criteria and updating the status of follow-up on fraud cases.
6. Discussion of detection or identification mechanisms related to deviations.
7. Development of the FINA application for fraud recording and database.



Evaluasi dan Penilaian Kinerja Direksi

Evaluation and Performance Assessment of the Board of Directors

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara komprehensif, berjenjang, dan berkala. Penilaian kinerja Direksi adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris meminta Komite Nominasi dan Remunerasi untuk melakukan kajian terhadap sistem penilaian kinerja Direksi.
- Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan koordinasi dengan *Human Capital Division* dan unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan rekomendasi tentang sistem penilaian kinerja Direksi.
- Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun rekomendasi penilaian kinerja Direksi dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris membahas rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tentang penilaian kinerja Direksi dan kemudian memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi untuk dapat disampaikan dalam RUPS.
- Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan usulan persetujuan atas pencapaian kinerja Direksi dalam RUPS dan RUPS akan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

Performance Assessment is carried out in a comprehensive, tiered, and periodically. The performance assessment of the Board of Directors is as follows:

- *The Board of Commissioners requested the Nomination and Remuneration Committee to review the Performance Assessment system for the Board of Directors.*
- *The Nomination and Remuneration Committee coordinates with the Human Capital Division and related work units to formulate recommendations regarding the Performance Assessment System for the Board of Directors.*
- *The Nomination and Remuneration Committee prepares recommendations for Performance Assessment of the Board of Directors and then submits them to the Board of Commissioners.*
- *The Board of Commissioners discusses the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee regarding the Performance Assessment of the Board of Directors. Then it provides an assessment of the performance of the Board of Directors to be submitted at the GMS.*
- *The Board of Commissioners and the Board of Directors submit proposals for approval of the achievement of the performance of the Board of Directors in the GMS. The GMS will provide full release and discharge of responsibility to the members of the Board of Directors for the management that has been carried out during the past financial year, in so far as these actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements except embezzlement, fraud, and other criminal acts.*



Independensi dan Transparansi Informasi Dewan Komisaris dan Direksi

Independence And Information Transparency of the Board of Commissioners and Board of Directors

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank wajib menjaga independensi dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan tertentu.

In carrying out their functions, duties, and responsibilities, members of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors must maintain independence and avoid any conflict of interest, whether for personal, group, or class interests.



Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Share Ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BWS (dan anggota keluarga) memiliki kewajiban untuk melaporkan kepemilikan saham, baik di Bank maupun di perusahaan terbuka lainnya.

Members of the BWS Board of Commissioners and Board of Directors (and their family members) should report sharing ownership in the Bank and other public companies.

Berikut disampaikan transparansi kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang telah dilaporkan Bank kepada regulator per 31 Desember 2023.

The following is the transparency of share ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors, which the Bank has reported to regulators as of December 31, 2023.

Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Kepemilikan Saham BWS (kode saham: SDRA) <i>BWS Share Ownership</i> <i>(stock code: SDRA)</i>	Persentase Kepemilikan Saham: BWS <i>Percentage of BWS Share</i> <i>Ownership</i>	Kepemilikan Saham Perusahaan Lain yang Lebih dari 5% <i>Ownership of Shares in Other</i> <i>Companies with More Than 5%</i>
Arief Budiman	2.307.600	0,03%	-
Ahmad Fajarprana	0	0,00%	-
Adi Haryadi	0	0,00%	-
Choi Jung Hoon	272.400	0,00%	-
Gyusoon Hwang	171.400	0,00%	-
Benny Sudarsono Tan	84.900	0,00%	-

Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Kepemilikan Saham BWS (kode saham: SDRA) <i>BWS Share Ownership (stock code: SDRA)</i>	Persentase Kepemilikan Saham: BWS <i>Percentage of BWS Share Ownership</i>	Kepemilikan Saham Perusahaan Lain yang Lebih dari 5% <i>Ownership of Shares in Other Companies with More Than 5%</i>
Edwin Sulaeman	62.200	0,00%	-
Bong Joo Kang	144.100	0,00%	-
Wuryanto	14.600	0,00%	-
Abdurrachman Hadi	0	0,00%	-

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada Bank mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Bank paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya transaksi. Selanjutnya, Bank wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas transaksi tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.

Berkenaan dengan hal tersebut, di sepanjang tahun 2023, Bank telah melaporkan 8 (delapan) kali transaksi pembelian dan/atau penjualan saham BWS yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, dengan rincian sebagai berikut:

Following Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 11/POJK.04/2017 concerning Ownership Reports or Any Changes in Ownership of Public Company Shares, each member of the Board of Commissioners and Board of Directors is required to submit information to the Bank regarding ownership and any change in ownership of Bank shares no later than 3 (three) working days after the transaction occurs. Furthermore, the Bank must submit a report to the Otoritas Jasa Keuangan on the trade by 10 (ten) days after the transaction occurred.

In this regard, throughout 2023, the Bank has reported 8 (eight) times of buying and/or selling of BWS shares conducted by the Board of Directors and Board of Commissioners, with the following details:



Nama dan Jabatan Name and Position	Transaksi Transaction	Jumlah Saham Sebelum Transaksi Number of Shares Before Transaction	Jumlah Pembelian/ Penjualan Number of Purchases/ Sales	Harga Saham Stock price	Jumlah Saham Setelah Transaksi Number of Shares After Transaction	Tanggal Transaksi Transaction Date	Tujuan Transaksi Transaction Purpose	Pelaporan Reporting
Arief Budiman (Presiden Komisaris) (President Commissioner)	Pembelian Purchase	2.304.800 saham 2,304,800 shares	2.800 saham 2,800 shares	Rp560 IDR560	2.307.600 saham 2.307.600 shares	21 Juni 2023 June 21, 2023	Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum In order to comply with the Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks	22 Juni 2023 June 22, 2023
Choi Jung Hoon (Komisaris) (Commissioner)	Pembelian Purchase	271.500 saham 271,500 shares	900 saham 900 shares	Rp605 IDR605	272.400 saham 272,400 shares	31 Juli 2023 July 31, 2023	Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum In order to comply with the Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks	2 Agustus 2023 August 2, 2023
Hwang Gyusoon (Presiden Direktur) (President Director)	Pembelian Purchase	55.400 saham 55,400 shares	116.000 saham 116,000 shares	Rp605 IDR605	171.400 saham 171,400 shares	1 Agustus 2023 August 1, 2023	Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum In order to comply with the Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks	2 Agustus 2023 August 2, 2023
Benny Sudarsono Tan (Direktur IT & Jaringan dan Operasi) (IT & Network and Operation Director)	Pembelian Purchase	53.700 saham 53,700 shares	31.200 saham 31,200 shares	Rp605 IDR605	84.900 saham 84,900 shares	31 Juli 2023 July 31, 2023	Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum In order to comply with the Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks	1 Agustus 2023 August 1, 2023
Edwin Sulaeman (Direktur Business Support) (Business Support Director)	Pembelian Purchase	33.100 saham 33,100 shares	29.100 saham 29,100 shares	Rp605 IDR605	62.200 saham 62,200 shares	31 Juli 2023 July 31, 2023	Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum In order to comply with the Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks	1 Agustus 2023 August 1, 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	Transaksi Transaction	Jumlah Saham Sebelum Transaksi Number of Shares Before Transaction	Jumlah Pembelian/ Penjualan Number of Purchases/Sales	Harga Saham Stock price	Jumlah Saham Setelah Transaksi Number of Shares After Transaction	Tanggal Transaksi Transaction Date	Tujuan Transaksi Transaction Purpose	Pelaporan Reporting
Kang Bong Joo (Direktur Korporat) (Corporate Director)	Pembelian Purchase	74.600 saham 74,600 shares	69.500 saham 69,500 shares	Rp605 IDR605	144.100 saham 144,100 shares	31 Juli 2023 July 31, 2023	Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum In order to comply with the Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks	2 Agustus 2023 August 2, 2023
Mochamad Tri Budiono* (Direktur Konsumer) (Consumer Director)	Pembelian Purchase	68.400 saham 68,400 shares	30.100 saham 30,100 shares	Rp605 IDR605	98.500 saham 98,500 shares	31 Juli 2023 July 31, 2023	Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum In order to comply with the Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks	1 Agustus 2023 August 1, 2023
Wuryanto (Direktur Risiko dan Kepatuhan) (Risk & Compliance Director)	Pembelian Purchase	0 saham 0 shares	14.600 saham 14,600 shares	Rp560 IDR560	14.600 saham 14,600 shares	21 Juni 2023 June 21, 2023	Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum In order to comply with the Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks	22 Juni 2023 June 22, 2023

*) Menjabat sampai dengan 13 Agustus 2023

*) Serves until August 13, 2023



Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Concurrent Positions of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Sepanjang Tahun 2023, BWS telah memastikan bahwa anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi telah mematuhi ketentuan terkait rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BWS tidak ada yang melakukan rangkap jabatan, kecuali rangkap jabatan salah satu anggota Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua Komite di BWS.

Throughout 2023, BWS has ensured that members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors have complied with the provisions regarding holding multiple positions as regulated in OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Issuer or Public Company and OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.

There are no members of the Board of Commissioners and members of the BWS Board of Directors who hold concurrent positions, except for one of the Independent Commissioners who doubles as Committee Chairman at BWS.

Pengungkapan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BWS tahun 2023 sebagai berikut:

Disclosure of concurrent positions of members of the BWS Board of Commissioners and Board of Directors in 2023 are as follows:

Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Rangkap Jabatan sebagai <i>Concurrent Position as</i>		
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>	Komite <i>Committee</i>
Arief Budiman (Presiden Komisaris) <i>(President Commissioner)</i>	-	-	-
Ahmad Fajarprana (Komisaris Independen) <i>(Independent Commissioner)</i>	-	-	Merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Concurrent positions as Chairman of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee</i>
Adi Haryadi (Komisaris Independen) <i>(Independent Commissioner)</i>	-	-	-
Choi Jung Hoon (Komisaris) <i>(Commissioner)</i>	-	-	-
Hwang Gyusoon (Presiden Direktur) <i>(President Director)</i>	-	-	-
Kang Bong Joo (Direktur Korporat) <i>(Corporate Director)</i>	-	-	-
Wuryanto (Direktur Risiko dan Kepatuhan) <i>(Risk & Compliance Director)</i>	-	-	-
Mochamad Tri Budiono* (Direktur Konsumer) <i>(Consumer Director)</i>	-	-	-
Abdurachman Hadi** (Direktur Konsumer) <i>(Consumer Director)</i>	-	-	-
Edwin Sulaeman (Direktur <i>Business Support</i>) <i>(Business Support Director)</i>	-	-	-

**) serves until August 13, 2023*

****) serves since August 14, 2023*

**) menjabat hingga 13 Agustus 2023*

****) menjabat sejak 14 Agustus 2023*



Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

Affiliation Relations of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Controlling Shareholders

Mengenai hubungan afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi juga telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 32 huruf b dan c mengenai Aspek Transparansi Direksi, dalam pemenuhan pelaksanaan tata kelola, anggota Direksi mengungkapkan:

Regarding the affiliation of the Board of Commissioners and the Board of Directors, it has also been regulated in Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, article 32 letters b and c regarding Transparency Aspects of the Board of Directors, in fulfilling the implementation of governance, members of the Board of Directors disclose:

- | | |
|--|---|
| <p>a. Hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan</p> <p>b. Hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.</p> | <p>a. Financial relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or controlling shareholders of the Bank; and</p> <p>b. Family relationship up to the second degree with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or controlling shareholders of the Bank.</p> |
|--|---|

<p>Tahun 2023, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi BWS tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi lainnya dan dengan Pemegang Saham Pengendali.</p>	<p>In 2023, all members of the BWS Board of Commissioners and Board of Directors have no family or financial relationships with other members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors and with Controlling Shareholders.</p>
--	---

Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris dan Direksi
Financial and Family Relations of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Nama <i>Name</i>	Hubungan Keuangan Dengan <i>Financial Relations with</i>						Hubungan Keluarga Dengan <i>Family Relations with</i>					
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>		Pemegang Saham Utama/ Pengendali <i>Major/Controlling Shareholders</i>		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>		Pemegang Saham Utama/ Pengendali <i>Major/Controlling Shareholders</i>	
	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>
Dewan Komisaris Board of Commissioners												
Arief Budiman (Presiden Komisaris) <i>(President Commissioner)</i>		√		√		√		√		√		√
Ahmad Fajarprana (Komisaris Independen) <i>(Independent Commissioner)</i>		√		√		√		√		√		√
Adi Haryadi (Komisaris Independen) <i>(Independent Commissioner)</i>		√		√		√		√		√		√
Choi Jung Hoon (Komisaris) <i>(Commissioner)</i>		√		√		√		√		√		√
Direksi Board of Directors												
Hwang Gyusoon (Presiden Direktur) <i>(President Director)</i>		√		√		√		√		√		√
Kang Bong Joo (Direktur Korporat) <i>(Corporate Director)</i>		√		√		√		√		√		√
Wuryanto (Direktur Risiko dan Kepatuhan) <i>(Risk & Compliance Director)</i>		√		√		√		√		√		√

Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris dan Direksi
Financial and Family Relations of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Nama <i>Name</i>	Hubungan Keuangan Dengan <i>Financial Relations with</i>						Hubungan Keluarga Dengan <i>Family Relations with</i>					
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>		Pemegang Saham Utama/ Pengendali <i>Major/Controlling Shareholders</i>		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>		Pemegang Saham Utama/ Pengendali <i>Major/Controlling Shareholders</i>	
	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>
Benny Sudarsono Tan (Direktur IT & Jaringan dan Operasi) <i>(IT & Network and Operation Director)</i>		√		√		√		√		√		√
Edwin Sulaeman (Direktur Business Support) <i>(Business Support Director)</i>		√		√		√		√		√		√
Mochamad Tri Budiono* (Direktur Konsumer) <i>(Consumer Director)</i>		√		√		√		√		√		√
Abdurachman Hadi** (Direktur Konsumer) <i>(Consumer Director)</i>		√		√		√		√		√		√

*) menjabat hingga 13 Agustus 2023

*) serves until August 13, 2023

***) menjabat sejak 14 Agustus 2023

**) serves since August 14, 2023



Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi memperhatikan keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris.

The diversity of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors has been regulated in the Appendix to Otoritas Jasa Keuangan Circular Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance, stating that the composition of members of the Board of Commissioners and Board of Directors takes into account the diversity in the design of members of the Board of Commissioners.

Bank memiliki kebijakan dan ketentuan tentang keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang dimuat dalam dalam Kebijakan Dewan Komisaris dan Kebijakan Direksi, yaitu:

- Hal-hal yang terkait dengan komposisi Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:
 - » Komposisi Dewan Komisaris sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen.
 - » Jumlah Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
 - » Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
 - » Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Hal-hal yang terkait dengan komposisi Direksi diatur sebagai berikut:
 - » Komposisi Direksi sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis.
 - » Direksi terdiri atas setidaknya 4 (empat) orang anggota Direktur yang dipimpin oleh Presiden Direktur atau Presiden Direktur.
 - » Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
 - » Salah seorang anggota Direksi harus menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
 - » Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau lembaga keuangan antara lain adalah keahlian di bidang operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, dan hukum perundang-undangan, yang berkaitan dengan bidang perbankan dan/atau lembaga keuangan.

The Bank has policies and provisions regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors, which are contained in the Board of Commissioners and Board of Directors Policies, namely:

- *Matters related to the composition of the Board of Commissioners are regulated as follows:*
 - » *The composition of the Board of Commissioners is such that it enables effective and fast decision-making and can act independently.*
 - » *The number of members of the Board of Commissioners is at least 3 (three) people led by the President Commissioner or Main Commissioner and at most equal to the number of the Board of Directors.*
 - » *At least 50% (fifty percent) of the members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners.*
 - » *At least 1 (one) member of the Board of Commissioners must be domiciled in Indonesia.*
- *Matters related to the composition of the Board of Directors are regulated as follows:*
 - » *The composition of the Board of Directors is such that it enables practical, precise, and fast decision-making and can act independently in the sense that it does not have any interests that could interfere with its ability to carry out its duties independently and critically.*
 - » *The Board of Directors consists of at least 4 (four) members of the Board of Directors led by the President Director.*
 - » *Majority of the Board of Directors have at least experience in operations as Bank Executive Officers.*
 - » *One member of the Board of Directors must serve as Compliance Director by Bank Indonesia regulations.*
 - » *Have experience and expertise in banking and/or financial institutions, including operations, marketing, bookkeeping, funding, credit, money markets, capital markets, and statutory law related to banking and/or financial institutions.*



Berikut disampaikan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2023.

The following conveys the diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2023.

Nama dan Jabatan Name and Position	Usia (tahun) Age (years)	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Terakhir Last Education	Pengalaman Kerja (tahun) Work Experience (years)
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Arief Budiman (Presiden Komisaris) (President Commissioner)	67	L	S/1	38
Ahmad Fajarprana (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	65	L	S/2	39
Adi Haryadi (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	60	L	S/2	34
Choi Jung Hoon (Komisaris) (Commissioner)	65	L	S/2	29
Direksi Board of Directors				
Hwang Gyusoon (Presiden Direktur) (President Director)	59	L	S/1	32
Kang Bong Joo (Direktur Korporat) (Corporate Director)	58	L	S/1	32
Wuryanto (Direktur Risiko dan Kepatuhan) (Risk & Compliance Director)	46	L	S/1	25
Benny Sudarsono Tan (Direktur IT & Jaringan dan Operasi) (IT & Network and Operation Director)	53	L	S/2	30
Edwin Sulaeman (Direktur Business Support) (Business Support Director)	55	L	S/1	33
Mochamad Tri Budiono* (Direktur Konsumer) (Consumer Director)	60	L	S/1	34
Abdurachman Hadi** (Direktur Konsumer) (Consumer Director)	48	L	S/1	23

*) menjabat hingga 13 Agustus 2023

*) serves until August 13, 2023

**) menjabat sejak 14 Agustus 2023

**) serves since August 14, 2023



Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination and Remuneration of The Board of Commissioners and Board of Directors

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta penetapan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan wewenang pemegang saham melalui mekanisme RUPS.

Appointment of members of the Board of Commissioners and Board of Directors and determination of the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors is the authority of the shareholders through the GMS mechanism.



Prosedur dan Mekanisme Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Procedures and Mechanisms for the Nomination of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BWS diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pemegang Saham Pengendali dapat mengusulkan nama-nama calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank untuk kemudian dilakukan pembahasan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Selain itu, calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank juga dapat berasal dari sumber lainnya.

Members of the BWS Board of Commissioners and Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS. Controlling Shareholders may propose names of candidates for members of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors for discussion by the Nomination and Remuneration Committee. In addition, candidates for members of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors can also come from other sources.

Nama-nama yang diusulkan sebagai calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam *Board Charter* Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu:

Names proposed as candidates for members of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors must meet the criteria stipulated in the policy regarding the Board of Commissioners and Board of Directors, namely:

Kriteria Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang diputuskan sesuai dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat, antara lain:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Board of Commissioners Criteria

Members of the Board of Commissioners are individuals who are determined according to their needs and meet the requirements at the time of appointment and during their tenure, including:

1. *Have good character, morals, and integrity.*
2. *Capable of performing legal actions.*
3. *Within 5 (five) years before an appointment and during tenure:*
 - *Never been declared bankrupt.*
 - *Never been a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt.*
 - *Never been punished for committing a crime detrimental to state finances and/or the financial sector.*

- Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Dalam 20 (dua puluh) tahun sebelum dicalonkan.
 - Selama menjabat sebagai Dewan Komisaris.
 - 5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - 6. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat.
 - 7. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dan pengalaman di bidang Perbankan dan bidang Keuangan.
 - 8. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 9. Tidak termasuk dalam pihak yang dilarang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris.
 - 10. Wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 6 (enam).
 - 11. Tidak memiliki kredit bermasalah.
- *Never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners during their tenure:*
 - *Have never held an annual GMS.*
 - *His accountability as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners have never been accepted by the GMS or have failed to provide accountability as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the GMS.*
 - *Ever caused a company that obtained permits, approval, or registration from the Otoritas Jasa Keuangan not to fulfill the obligation to submit annual and/or financial reports to Otoritas Jasa Keuangan.*
 - 4. *Never been punished for committing a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector with the following requirements:*
 - *Within 20 (twenty) years before being nominated.*
 - *While serving on the Board of Commissioners.*
 - 5. *Commit to compliance with laws and regulations.*
 - 6. *Commit to the development of a healthy Bank.*
 - 7. *Have knowledge and/or expertise and experience in Banking and Finance.*
 - 8. *Members of the Board of Commissioners must fulfill the fit and proper test requirements according to the Otoritas Jasa Keuangan Regulations.*
 - 9. *Not included in the party prohibited from becoming a member of the Board of Commissioners.*
 - 10. *Required a Risk Management Certificate of at least Level 6 (six).*
 - 11. *Do not have bad credit.*

Kriteria Direksi

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

Board of Directors Criteria

Those who can be appointed as members of the Board of Directors are individuals who meet the requirements at the time of appointment and during their tenure:

1. *Have good character, morals, and integrity.*
2. *Capable of performing legal actions.*
3. *Within 5 (five) years before an appointment and during tenure:*

- Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Dalam 20 (dua puluh) tahun sebelum dicalonkan.
 - Selama menjabat sebagai Direksi.
 5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 6. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat
 7. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau perusahaan publik.
 8. Mayoritas anggota direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank.
 9. Setiap anggota direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan otoritas jasa keuangan.
 10. Tidak termasuk dalam pihak yang dilarang untuk menjadi direksi.
 11. Wajib memiliki sertifikat manajemen risiko Jenjang 7 (tujuh).
 12. Tidak memiliki kredit bermasalah.
- *Never been declared bankrupt.*
 - *Never been a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt.*
 - *Never been punished for committing a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector.*
 - *Never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners during their tenure:*
 - *Have never held an annual GMS.*
 - *Accountabilities as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners have never been accepted by the GMS or have failed to provide accountability as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the GMS.*
 - *Ever caused a company that obtained a license, approval, or registration from the Otoritas Jasa Keuangan to fail to fulfill the obligation to submit annual reports and/or financial reports to the Otoritas Jasa Keuangan.*
4. *Never been punished for committing a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector with the following requirements:*
 - *Within 20 (twenty) years before being nominated.*
 - *While serving on the Board of Directors.*
 5. *Commit to comply with laws and regulations.*
 6. *Commit to the development of a healthy Bank.*
 7. *Have knowledge and/or expertise in the field required by Issuers or public companies.*
 8. *The majority of members of the board of directors have at least 5 (five) years of experience in operations as an executive bank officer.*
 9. *Each member of the board of directors must meet the fit and proper test requirements according to the regulations of the Otoritas Jasa Keuangan.*
 10. *Not included in the parties prohibited from becoming directors.*
 11. *Must have a level 7 (seven) risk management certificate.*
 12. *Do not have bad credit.*

Kebijakan Suksesi Dewan Komisaris dan Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki peran khusus terkait suksesi Dewan Komisaris dan Direksi, sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini.

Succession Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors

The Nomination and Remuneration Committee has a unique role related to the succession of the Board of Commissioners and Board of Directors, as shown in the chart below.



Prosedur Pengangkatan, Pengunduran Diri serta Pemberhentian Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar Bank, Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. Dalam satu periode masa jabatan Dewan Komisaris adalah tiga tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir satu periode masa jabatan, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Bank untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, cepat, tepat, dan independen.

Tata cara pengunduran diri dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris yang diatur dalam Kebijakan Bank tentang Dewan Komisaris yang telah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

A. Pengunduran Diri

1. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank.
2. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi bank Umum, dijelaskan bahwa pengunduran diri Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.
4. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris; dan
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS terkait permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.

Procedures for Appointment, Resignation, and Dismissal of the Board of Commissioners

Following the Bank's Articles of Association, the Board of Commissioners is appointed for a specific term of office and can be reappointed. In one period, the duration of office of the Board of Commissioners is three years or until the closing of the Annual GMS at the end of one term of office, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to at any time dismiss members of the Board of Commissioners who are in office.

The GMS determines the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners by considering the Bank's vision, mission, and strategic plans to enable effective, fast, accurate, and independent decision-making.

The procedures for the resignation and dismissal of Members of the Board of Commissioners are regulated in the Bank's Policy regarding the Board of Commissioners, which has been adjusted to the applicable Laws and Regulations, namely as follows:

A. Resignation

1. *Members of the Board of Commissioners have the right to resign from their position before their term of office ends by giving written notification of their intention to the Bank.*
2. *Bank is required to hold a GMS to decide on the application for the resignation of a member of the Board of Commissioners by 90 (ninety) days after receipt of the application.*
3. *In accordance with Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, stating that the resignation of an Independent Commissioner before the end of the term of office must obtain prior approval from the Otoritas Jasa Keuangan before being decided at the GMS.*
4. *Bank is required to disclose information to the public and submit it to Otoritas Jasa Keuangan no later than 2 (two) working days after the following:*
 - a. *Receipt of the application for the resignation of a member of the Board of Commissioners; and*
 - b. *The results of holding the GMS regarding the request for the resignation of members of the Board of Commissioners.*

5. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS membebaskannya.
7. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan.
 - c. Diberhentikan karena keputusan RUPS.
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Bank atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS, namun pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

5. *Before the resignation becomes effective, the Board of Commissioners concerned member is still obliged to complete his duties and responsibilities by the provisions in the Bank's Articles of Association and applicable laws and regulations.*
6. *The member of the Board of Commissioners who resigns can still be held accountable as a member of the Board of Commissioners from the date of his appointment until the date when his resignation is approved at the GMS. The discharge from the responsibilities of a member of the Board of Commissioners who has resigned is given after the GMS releases him.*
7. *The term of office of a member of the Board of Commissioners automatically ends if the member of the Board of Commissioners:*
 - a. *Passed away.*
 - b. *Placed under guardianship based on a court decision.*
 - c. *Dismissed due to the decision of the GMS.*
 - d. *No longer fulfills the requirements of the applicable laws and regulations.*

B. Dismissal of Members of the Board of Commissioners

1. *Members of the Board of Commissioners can be dismissed at any time based on a GMS decision by stating the reasons. The reason for dismissal of a member of the Board of Commissioners is carried out if the member of the Board of Commissioners concerned no longer fulfills the requirements as a member of the Board of Commissioners, which includes taking actions that are detrimental to the Bank or for other reasons deemed appropriate by the GMS. The decision to dismiss a member of the Board of Commissioners is taken after the person concerned has been allowed to defend himself at the GMS. However, this opportunity to protect himself is unnecessary if the person concerned does not have an objection to the dismissal.*

2. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi bank Umum, dijelaskan bahwa pemberhentian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.
3. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 (satu) di atas berlaku sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
4. Setiap pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
 - a. Situs web penyedia e-RUPS
 - b. Situs web Bursa Efek
 - c. Situs web Bank
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan saat RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat tersebut. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

Procedures for Appointment and Dismissal of the Board of Directors

The members of the Board of Directors are appointed by the GMS by the applicable provisions, each for a period commencing from the date determined at the GMS that established them until the closing of the third annual GMS after the date of their appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time by stating the reasons after the member of the Board of Directors concerned has been allowed to defend himself at the meeting. Such dismissal is effective from the close of the meeting that decided the dismissal unless the meeting determines another date of dismissal. The resolution of the GMS may reappoint members of the Board of Directors whose term of office has expired.

Tata cara pengunduran diri diatur dalam Kebijakan Direksi yang mengacu kepada Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum:

- Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank.
- Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.
- Pemberhentian atau penggantian presiden direktur dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.
- Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
- Setiap pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
 - » Situs web penyedia e-RUPS
 - » Situs web Bursa Efek
 - » Situs web Bank
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

The procedure for resignation is regulated in the Board of Directors Policy, which refers to Law Number 40 of 2007, Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks:

- *Members of the Board of Directors have the right to resign from their position before their term of office ends by giving written notification of their intention to the Bank.*
- *Bank is required to hold a GMS to decide on requests for the resignation of members of the Board of Directors no later than 90 (ninety) days after receipt of the application for resignation.*
- *Dismissal or replacement of the president director and/or director in charge of the compliance function before the end of the term of office must obtain prior approval from the Otoritas Jasa Keuangan before being decided at the GMS.*
- *Before the resignation becomes effective, the member of the Board of directors member is still obliged to complete his duties and responsibilities in accordance with the provisions in the Bank's Articles of Association and applicable laws and regulations.*
- *The member of the Board of Directors who resigns can still be held accountable as a member of the Board of Directors from the date of his appointment until the date of approval of his resignation at the GMS.*
- *Each appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Directors as stated in the Summary of Minutes of the GMS must be announced to the public at least through:*
 - *Website of e-GMS provider*
 - *Stock Exchange website*
 - *Bank's website**in Indonesian and foreign languages, provided that the foreign language used is at least English.*



Prosedur dan Mekanisme Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Procedures and Mechanisms for Determining Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

Besaran remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS Tahunan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

The amount of remuneration and other facilities provided to the Board of Commissioners and Board of Directors is determined by the Annual GMS by considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

Dasar Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

BWS telah menerapkan kebijakan remunerasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Karyawan/wati BWS baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Penerapan tata kelola dalam pemberian Remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* sehingga kelangsungan usaha Bank dapat tetap terjaga.

Basic Remuneration Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors

BWS has implemented a remuneration policy based on Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 45/POJK.03/2015 and Otoritas Jasa Keuangan Circular Number 40/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks. Remuneration is compensation determined and given to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or BWS employees, both fixed and variable in cash or non-cash, according to their duties, authorities, and responsibilities. The implementation of governance in the provision of remuneration encourages prudent risk-taking so that the continuity of the Bank's business can be maintained.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi mendapatkan sejumlah remunerasi dan fasilitas lainnya. Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Bank.

Remuneration Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors

In carrying out their duties and responsibilities, the Board of Commissioners and the Board of Directors receive remuneration and other facilities. The policy on providing compensation and other facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors refers to the Shareholders' decision as determined in the GMS by taking into account the results of the review conducted by the Bank.

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan karyawan, pejabat eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris yang kompeten serta berkualitas. Kebijakan remunerasi merupakan strategi BWS dalam memberikan imbalan yang disesuaikan dengan kemampuan Bank agar dapat mengakomodir perubahan demografi karyawan, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank.

Remuneration Policy Formulation Process

The remuneration policy is essential in obtaining and/or retaining competent and qualified employees, executive officers, the Board of Directors, and the Board of Commissioners. The remuneration policy is a BWS strategy in providing compensation that is adjusted to the Bank's ability to accommodate changes in employee demographics, manage labor costs, and encourage the achievement of the Bank's business objectives.



Remunerasi BWS disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan karyawan agar dapat secara terus-menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank.

BWS remuneration is structured with the aim of being able to attract, retain, motivate, and increase employee engagement so that they can continuously provide optimal performance, support the vision, mission, and strategy of the Bank.

Bagan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Chart of Remuneration Determination Procedures for the Board of Commissioners and Board of Directors

Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penilaian kinerja dan paket remunerasi Manajemen

The Nomination and Remuneration Committee provides recommendations to the Board of Commissioners regarding management Performance Assessment and remuneration packages

Dewan Komisaris menyampaikan laporan kepada Pemegang Saham Utama/Pengendali untuk mendapatkan persetujuan terkait remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

The Board of Commissioners submit a report to the Main/Controlling Shareholders to obtain approval related to remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

Atas persetujuan Pemegang Saham Utama/Pengendali, Dewan Komisaris dapat mengajukan usulan kepada RUPS

With the approval of the Main/Controlling Shareholders, the Board of Commissioners submitted a proposal to the GMS

Persetujuan RUPS atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

GMS approves remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Cakupan Kebijakan Remunerasi

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, BWS telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 077/KEP-DIR/A-04/IX/20 tanggal

Remuneration Policy Coverage

In connection with the enactment of Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 45/POJK.03/2015 and Otoritas Jasa Keuangan Circular Number 40/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks, BWS already has a Remuneration Policy established based on the Board of Directors Decree Number

24 September 2020. Kebijakan Remunerasi BWS berisi mengenai pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan, termasuk dalam hal ini penetapan material *risk taker* untuk beberapa posisi tertentu. Penetapan material *risk taker* dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.

Dalam melakukan menetapkan remunerasi yang bersifat tetap, BWS memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Skala usaha
2. Kompleksitas usaha
3. *Peer group*
4. Tingkat inflasi
5. Kondisi dan kemampuan keuangan
6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
7. Perbedaan (*gap*) remunerasi antar tingkat jabatan sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya konflik internal dan risiko operasional seperti *fraud* atau risiko operasional lain

Sedangkan dalam menetapkan remunerasi yang bersifat variabel, selain pertimbangan sebagaimana dijelaskan dalam poin 1 sampai dengan 7 di atas, BWS juga mempertimbangkan pelaksanaan *prudent risk taking*.

- **Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko**

Dalam memberikan remunerasi BWS memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* dalam rangka menjaga kelangsungan usaha BWS, menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha BWS. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi BWS memperhatikan jenis, kriteria, dampak serta perubahan penentuan jenis risiko utama dalam menetapkan remunerasi.

- **Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi**

Dalam memberikan remunerasi, BWS melakukan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi, meliputi kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja BWS dan kinerja unit kerja serta metode yang digunakan BWS sesuai dengan *Key Performance Indicator* yang telah

077/KEP-DIR/A-04/IX/20 dated September 24, 2020. The BWS Remuneration Policy contains remuneration for the Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees, including, in this case, the determination of material risk takers for certain positions. Determination of material risk takers is carried out through qualitative and quantitative approaches.

In determining fixed remuneration, BWS pays attention to the following matters:

1. *Business scale*
2. *Business complexity*
3. *Peer groups*
4. *Inflation rate*
5. *Condition and financial capability*
6. *Does not conflict with laws and regulations*
7. *Differences (gaps) in remuneration between levels of office to reduce the potential for internal conflicts and operational risks such as fraud or other operational risks.*

Meanwhile, in determining variable remuneration, apart from the considerations described in points 1 to 7 above, BWS also considers implementing prudent risk-taking.

- **Risk-Linked Remuneration**

In providing remuneration, BWS pays attention to the principles of prudence which aims to encourage prudent risk-taking to maintain the continuity of the BWS business. BWS determines performance measurement methods and types of risk in assessing the provision of Variable remuneration according to the scale and complexity of BWS business activities. In setting BWS remuneration policies, pay attention to the types, criteria, impacts, and changes in determining the main types of risk in determining remuneration.

- **Performance Measurement Linked to Remuneration**

In providing remuneration, BWS pays attention to the principles of prudence which aims to encourage prudent risk-taking to maintain the continuity of the BWS business. BWS determines performance measurement methods and types of risk in assessing the provision of Variable remuneration according to the scale and complexity of BWS business activities. In setting

disepakati. Penerapan strategi remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai (*based on performance*), kinerja unit kerja dan kinerja BWS secara keseluruhan, namun tetap dalam anggaran yang ditetapkan.

- **Penentuan Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko**

BWS memberikan remunerasi yang bersifat variabel yakni remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain Bonus, tantiem/insentif kinerja atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu. Remunerasi yang berupa bonus, tantiem, insentif dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh BWS. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham, khusus bagi Komisaris Independen dikonversi dan diberikan dalam bentuk tunai.

- **Jasa Konsultan Eksternal**

Di tahun 2023, BWS tidak menggunakan konsultan eksternal dalam merumuskan kebijakan terkait remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan.

BWS remuneration policies, pay attention to the types, criteria, impacts, and changes in determining the main types of risk in determining remuneration.

- **Determination of Remuneration Linked to Performance and Risk**

BWS provides variable remuneration linked to performance and risk, including bonuses, performance bonuses/incentives, or other equivalent forms. Compensation in the form of dividends, and tandem, incentives can be given in cash, shares, or share-based instruments issued by BWS. Based on Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 45/POJK.03/2015 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks, remuneration that is variable in the form of shares or stock-based instruments, specifically for Independent Commissioners, is converted and given in cash.

- **External Consulting Services**

In 2023, BWS will not use external consultants in formulating policies related to remuneration for the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees.

Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remuneration and Facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2023

The remuneration package and facilities received by the Board of Directors and Board of Commissioners include the remuneration structure and details of the nominal amount, as shown in the table below:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain <i>Types of Remuneration and Other Facilities</i>	Jumlah yang Diterima Direksi dalam 1 Tahun <i>Amount Received by the Board of Directors in 1 Year</i>				Jumlah yang Diterima Dewan Komisaris dalam 1 Tahun <i>Amount Received by the Board of Commissioners in 1 Year</i>			
	2023		2022		2023		2022	
	Orang <i>Person</i>	Jumlah (Rp-juta) <i>Amount (IDR-million)</i>	Orang <i>Person</i>	Jumlah (Rp-juta) <i>Amount (IDR-million)</i>	Orang <i>Person</i>	Jumlah (Rp-juta) <i>Amount (IDR-million)</i>	Orang <i>Person</i>	Jumlah (Rp-juta) <i>Amount (IDR-million)</i>
Gaji, bonus, tunjangan, rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura <i>Salary, bonus, allowance, routine, tandem, and other facilities in-kind</i>	7**)	16.149,32	7*)	14.663,65	4	3.515,96	4	2.851,69

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain <i>Types of Remuneration and Other Facilities</i>	Jumlah yang Diterima Direksi dalam 1 Tahun <i>Amount Received by the Board of Directors in 1 Year</i>				Jumlah yang Diterima Dewan Komisaris dalam 1 Tahun <i>Amount Received by the Board of Commissioners in 1 Year</i>			
	2023		2022		2023		2022	
	Orang Person	Jumlah (Rp-juta) Amount (IDR-million)	Orang Person	Jumlah (Rp-juta) Amount (IDR-million)	Orang Person	Jumlah (Rp-juta) Amount (IDR-million)	Orang Person	Jumlah (Rp-juta) Amount (IDR-million)
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi, kesehatan, dan sebagainya) <i>Other facilities in kind (housing, insurance, health, etc.)</i>	7**)	15.345,74	7*)	13.213,67	4	1.993,14	4	2.249,53
Jumlah Total		31.495,06		27.877,32		5.509,10		5.101,22

*) Terdapat remunerasi Bapak Sadhana Priatmadja yang dibayarkan pada tahun 2022

*) There is remuneration for Mr. Sadhana Priatmadja paid in 2022

***) Terdapat remunerasi Bapak M Tri Budiono yang dibayarkan pada tahun 2023

**) There is remuneration for Mr. M Tri Budiono paid in 2023

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Remuneration in one year is grouped into a range of income levels as follows:

Jumlah Remunerasi <i>Total of Remuneration</i>	Jumlah Direksi <i>Number of Board of Directors</i>		Jumlah Dewan Komisaris <i>Number of Board of Commissioners</i>	
	2023	2022	2023	2022
Di atas Rp2 miliar <i>Above IDR2 billion</i>	6	6	-	-
Di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar <i>Above IDR1 billion to IDR2 billion</i>	-	1	3	3
Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar <i>Above IDR500 million to IDR1 billion</i>	1	-	1	1
Rp500 juta ke bawah <i>IDR500 million and below</i>	-	-	-	-

Remunerasi yang Bersifat Variabel:

- Bentuk remunerasi yang bersifat variabel
Remunerasi bersifat variabel diberikan dengan berbasis kinerja dalam bentuk tunai dan saham, implementasi pemberian remunerasi bersifat variabel dalam bentuk saham tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor 23/KEP.DIR/HC.III/III/19.
- Terdapat perbedaan pemberian remunerasi bersifat variabel dengan penjelasan sebagai berikut:

Variable Remuneration:

- Variable form of remuneration*
Variable remuneration is given on a performance basis in cash and shares. The implementation of variable remuneration in the form of shares is stated in the Board of Directors Decree Number 23/KEP.DIR/HC.III/III/19.
- There are differences in the provision of variable remuneration with the following explanation:*



Jabatan Position	Dasar Remunerasi Variabel Variable Remuneration Basis	Pertimbangan Consideration
Direksi Board of Directors	Berdasarkan pencapaian nilai KPI (Key Performance Indicator), dikalikan gaji selama 1 tahun. Based on the achievement of the KPI (Key Performance Indicator) value, it is multiplied by the salary for 1 year.	Direksi memiliki fungsi untuk mengelola Bank dan bertanggung jawab terhadap pencapaian Rencana Bisnis Bank. The Board of Directors has a function to manage the Bank and is responsible for achieving the Bank's Business Plan.
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Maksimal 1 (satu) kali gaji sebulan. Maximum 1 (one) time monthly salary.	Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam operasional bank. The Board of Commissioners has a supervisory function on the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors. The Board of Commissioners is not involved in bank operations.
Pegawai Employee	Berdasarkan pencapaian KPI Individu dan KPI Bank, sehingga ditetapkan besaran persentase masing-masing remunerasi variabel. The percentage of each variable remuneration is determined based on the achievement of Individual KPIs and Bank KPIs.	Bertanggung jawab secara keseluruhan sesuai dengan uraian pekerjaan masing-masing. Responsible as a whole following their respective job descriptions.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel *Number of the Board of Directors, Board of Commissioners and Employees Receiving Variable Remuneration*

Total Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) Tahun Total Variable Remuneration for 1 (one) Year			
2023		2022	
Orang Person	Jumlah (Rp-Juta) Amount (IDR-million)	Orang Person	Jumlah (Rp-Juta) Amount (IDR-million)
1.625	24.157,72	1.555	25.831,443

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Taker *Position and Number of Parties who Become Material Risk Takers*

Jabatan Position	2023 (orang) 2023 (person)	2022 (orang) 2022 (person)
Presiden Direktur President Director	1	1
Direktur Director	5	5
Jumlah Total	6	6

Tidak terdapat opsi saham untuk Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif selama tahun 2023. *There are no stock options for Board of Directors, Board of Commissioners and/or Executive Officers during 2023.*

Rasio Gaji

Berikut disampaikan rasio gaji yang berlaku di BWS.

Perbandingan Comparison	Rasio Ratio	
	2023	2022
Karyawan Tertinggi dengan Karyawan Terendah <i>Highest Employee with Lowest Employee</i>	27,6:1	27,8:1
Presiden Direktur dengan Direktur <i>President Director with Director</i>	2,9:1	3,0:1
Komisaris Utama dengan Anggota Komisaris <i>President Commissioners with Member of Commissioner</i>	1,3:1	1,3:1
Direksi Tertinggi dengan Karyawan Tertinggi <i>Highest Board of Directors with Highest Employees</i>	2,2:1	2:1

Yang dimaksud karyawan tertinggi adalah karyawan yang secara struktur organisasi berada di bawah jajaran direksi yang memperoleh penghasilan tertinggi dalam 1 (satu) tahun, sedangkan karyawan terendah adalah karyawan yang secara struktur organisasi berada di bawah jajaran direksi yang memperoleh penghasilan terendah dalam 1 (satu) tahun.

Jumlah Penerima dan Total Remunerasi yang Dijamin Tanpa Syarat

Selama tahun 2023 tidak terdapat penerima remunerasi yang dijamin tanpa syarat.

Jumlah Pegawai yang Terkena PHK dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan Orang dalam 1 (Satu) Tahun

Rentang Range	Jumlah Pegawai Total Employees	
	2023	2022
Di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar <i>Above IDR1 billion to IDR2 billion</i>	-	-
Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar <i>Above IDR500 million to IDR1 billion</i>	-	-
Rp500 juta ke bawah <i>IDR500 million and below</i>	-	-

Salary Ratio

The following is the salary ratio that applies to BWS.

The highest employee is the employee who is organizationally under the board of directors and earns the highest income in 1 (one) year. In comparison, the lowest employee is the employee who is organizationally under the board of directors and makes the most lowest income in 1 (one) year.

Number of Beneficiaries and Total Unconditionally Guaranteed Remuneration

During 2023 there are no unconditionally guaranteed remuneration recipients.

Number of Employees Affected by Layoffs and Total Nominal Severance Paid

The number of employees affected by the termination of employment and the total amount of severance pay paid is in the table below:

Nominal Amount of Severance Paid by People in 1 (One) Year

Jumlah Total Remunerasi yang bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan BWS adalah sebesar Rp1.155.700.418 di mana terdiri dari uang tunai sebesar Rp419.353.780 dan saham sebesar Rp736.346.638.

Total Amount of Deferred Variable Remuneration

The total amount of deferred variable Remuneration, which consists of cash and/or shares or share-based instruments issued by BWS is IDR1,155,700,418, with details consisting of cash of IDR419,353,780 and shares of IDR736,346,638.

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama Satu Tahun

Jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun adalah Rp232.667.759.

Total Amount of Deferred Variable Remuneration Paid During One Year

The total amount of deferred variable Remuneration paid for 1 (one) year is IDR232,667,759.

Rincian jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam Satu Tahun

Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun (dalam jutaan rupiah) meliputi:

Details of the amount of Remuneration Provided in One Year

Details of the amount of Remuneration given in 1 (one) Year (in millions of rupiah) include:

Remunerasi yang Bersifat Tetap Fixed Remuneration		
	2023	2022
Tunai Cash	25,233.06	23,040.32
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank Shares/share-based instruments issued by the Bank	-	-

Remunerasi yang Bersifat Variabel Variable Remuneration				
	2023		2022	
	Tidak Ditangguhkan Not Suspended	Ditangguhkan Suspended	Tidak Ditangguhkan Not Suspended	Ditangguhkan Suspended
Tunai Cash	5,949	125	4,595	97
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank Shares/share-based instruments issued by the Bank	-	188	-	145

*) Hanya untuk MRT (Material Risk Taker) diungkapkan dalam jutaan Rupiah

*) Only for MRT (Material Risk Taker) expressed in millions of Rupiah

Informasi Kuantitatif

- Total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit adalah sebesar Rp722.181.791.
- Total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
- Total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Quantitative Information

- The remaining deferred remuneration, exposed to implicit and explicit adjustments, is IDR722,181,791.
- Total reduction in remuneration caused by explicit adjustments during the reporting period.
- Total reduction in remuneration due to implicit adjustments during the reporting period.

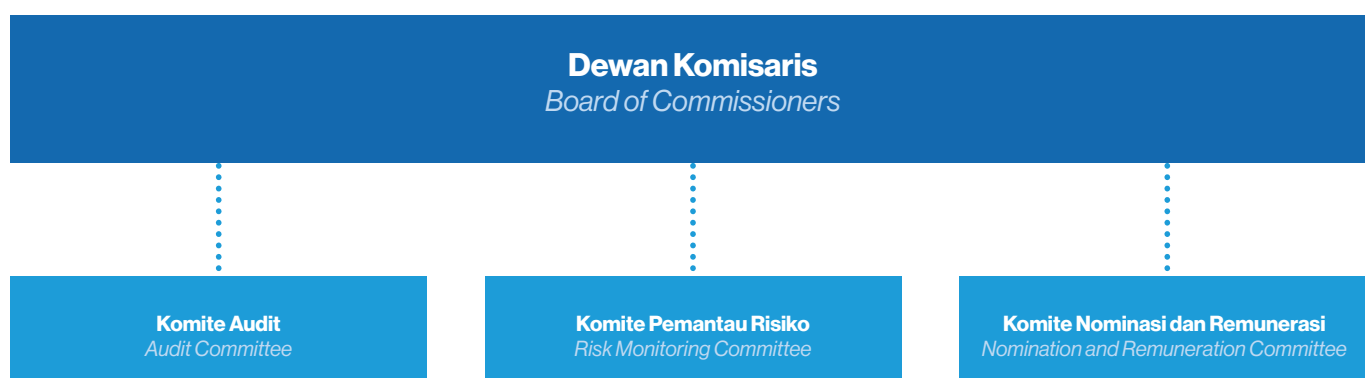


Organ Pendukung Dewan Komisaris

Board of Commissioners Supporting Organizations

Sesuai peraturan perundang-undangan, Dewan Komisaris dapat membentuk organ di bawah Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas pengawasan yang dijalankan. Hingga akhir tahun 2023, Dewan Komisaris BWS telah membentuk 3 (tiga) Komite dengan bidang pengawasan yang berbeda untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pemantau Risiko.

In accordance with laws and regulations, the Board of Commissioners can form organs under the Board of Commissioners to increase the effectiveness of supervision carried out. Until the end of 2023, the BWS Board of Commissioners has formed 3 (three) Committees with different areas of supervision to assist in carrying out the duties of the Board of Commissioners, namely the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Monitoring Committee.





Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit merupakan Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan audit. Pelaksanaan tugas Komite Audit dilakukan dengan memberikan opini secara independen mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Audit Committee is a committee formed and responsible to the Board of Commissioners to assist the duties and functions of the Board of Commissioners related to the implementation of audits. The Audit Committee performs its duties by providing independent opinions on matters that require the attention of the Board of Commissioners in accordance with the principles of Governance and applicable laws and regulations.

Dasar Hukum

Legal Basis

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.
- Otoritas Jasa Keuangan Circular Number 13/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.
- Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of Audit Committee Work.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

Audit Committee Guidelines and Work Procedure

Agar pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan optimal, Bank mengesahkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang merupakan acuan pelaksanaan tugas Komite Audit. Piagam Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan di evaluasi secara berkala dan, apabila diperlukan, dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan terkait lainnya. Bank memiliki pedoman dan tata tertib komite yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005/KEP-DEKOM/A-13/II/23 tanggal 21 Februari 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.

To implement the Audit Committee's duties to run optimally, the Bank ratifies the Audit Committee Guidelines and Work Procedure, which is a reference for implementing the Audit Committee's duties. The Audit Committee Charter is determined by the Board of Commissioners and is evaluated periodically. If necessary, amendments are made to ensure the Bank's compliance with Otoritas Jasa Keuangan regulations and other relevant regulations. The Bank has committee guidelines and rules set out in the Board of Commissioners Decree Number 005/KEP-DEKOM/A-13/II/23 dated February 21, 2023 concerning Guidelines and Work Procedures of the Audit Committee.

Pedoman dan Tata Tertib Komite merupakan dokumen tertulis yang mengatur terutama mengenai kedudukan, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Komite Audit. Pedoman ini juga memberikan batasan dan mengatur tata hubungan kerja antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal.

The Committee Guidelines and Work Procedures are written documents that specifically regulate the position, authority, duties, and responsibilities of the Audit Committee. This guideline also provides boundaries and governs the working relationship between the Audit Committee and the Board of Commissioners, Board of Directors, Internal Auditors, and External Auditors.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit *Structure, Membership, and Expertise of the Audit Committee*

Struktur dan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit Bank sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
2. Komposisi keanggotaan Komite Audit paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
3. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
4. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

The structure and membership of the Audit Committee are as follows:

1. *The Bank's Audit Committee consists of at least 3 (three) members from Independent Commissioners and Independent Parties.*
2. *The membership composition of the Audit Committee is at least 1 (one) Independent Commissioner as Chairman concurrently a member, 1 (one) Independent Party who has expertise in finance or accounting, and 1 (one) Independent Party who has expertise in law or banking.*
3. *Must have at least 1 (one) member with educational background and expertise in accounting and finance.*
4. *The Chairman of the Audit Committee can only hold concurrent positions as chairman of the committee in at most 1 (one) another committee.*

Susunan anggota Komite Audit Per 31 Desember 2023

Composition of Audit Committee members as of December 31, 2023

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Dasar Penunjukan <i>Basis of Appointment</i>	Masa Jabatan <i>Term of Office</i>	Keterangan <i>Description</i>
Ahmad Fajarprana	Ketua <i>Chairman</i>	Keputusan Direksi Nomor 054/KEP.DIR/HC.X/2023 <i>Board of Directors Decree Number 054/KEP.DIR/HC.X/2023</i>	Hingga RUPST 2024 <i>Until Annual GMS 2024</i>	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>
Waldy Gutama	Anggota <i>Member</i>			Pihak Independen <i>Independent Party</i>
Agus Setiadjaja	Anggota <i>Member</i>			Pihak Independen <i>Independent Party</i>
Bambang Sutidjo	Anggota <i>Member</i>	Keputusan Direksi Nomor 094/KEP.DIR/HC.XII/2022 <i>Board of Directors Decree Number 009/KEP.DIR/HC.XII/2022</i>	Hingga 24 Oktober 2023 <i>Until October 24, 2023</i>	Pihak Independen <i>Independent Party</i>

Profil Anggota Komite Audit Audit Committee Profile

Ahmad Fajarprana

Ketua/Komisaris Independen
Chairman/Independent Commissioner

Profil Ketua Komite Audit Sdr. Ahmad Fajarprana dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile of the Audit Committee Chairman, Mr. Ahmad Fajarprana, can be seen in the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Waldy Gutama

Anggota
Member

Warga negara Indonesia, berusia 68 tahun, pendidikan terakhir Magister Manajemen bidang keuangan di sekolah tinggi swasta di Jakarta, pensiun dari Bank Indonesia tahun 2011 terakhir sebagai Pengawas Bank Madya, memiliki sertifikat dari Bank Indonesia sebagai Pemeriksa dan Analis Bank, menjadi peserta di berbagai seminar di dalam dan luar negeri (a.l London dan USA), mengikuti pelatihan *International Finance Corporation (IFC) Audit Committee Master Program* di Bangkok Thailand tahun 2017, pernah menjadi Komite Audit di Bank Woori Indonesia, saat ini juga sebagai anggota Komite Audit di BTN dan saat ini bergabung dengan BWS sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.

Indonesian citizen, 68 years old, last education Masters in Management in finance at a private high school in Jakarta, retired from Bank Indonesia in 2011 final as Supervisor of Madya Bank, has a certificate from Bank Indonesia as a Bank Examiner and Analyst, participated in various seminars at domestic and overseas (i.e., London and USA), participated in the International Finance Corporation (IFC) Audit Committee Master Program training in Bangkok Thailand in 2017, was once an Audit Committee at Bank Woori Indonesia, currently also a member of the Audit Committee at BTN and now joined BWS as a Member of the Risk Monitoring Committee.

Agus Setiadjaja

Anggota
Member

Warga negara Indonesia, berusia 67 tahun, menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Magister Sains Bidang Kajian Ilmu Akuntansi di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung Indonesia, memulai karir perbankan di BWS sebagai staf Ahli atau Biro Direksi pada tahun 1989, sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Dalem Kaum PT Bank HS 1906 sejak 12 September 1994, sebagai Sekretaris Perusahaan PT Bank HS 1906 sejak 3 Mei 1999, sebagai Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern PT Bank HS 1906 sejak 10 Juli 2000 dan menjadi Komisaris BWS sejak 26 Mei 2011.

Indonesian citizen, 67 years old, completed his education at the Faculty of Economics and Master of Science in Accounting Studies at the Postgraduate Faculty of Padjadjaran University, Bandung, Indonesia, started his banking career at BWS as Expert staff or Bureau of the Board of Directors in 1989, as Head of the Dalem Sub-branch Kaum PT Bank HS 1906 since September 12, 1994, as Corporate Secretary of PT Bank HS 1906 since May 3, 1999, as Head of the Internal Audit Work Unit Division of PT Bank HS 1906 since July 10, 2000 and became the BWS Commissioner since May 26, 2011.



Independensi Komite Audit

Audit Committee Independence

Setiap anggota Komite Audit diwajibkan memberikan pernyataan independensi, yang diperbarui setiap tahun. pernyataan independensi Komite Audit disusun sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit pasal 7, terkait persyaratan keanggotaan dan masa tugas Komite Audit.

Each member of the Audit Committee is required to provide a statement of independence, which is updated annually. Statement of independence of the Audit Committee is prepared in accordance with Otoritas Jasa Keuangan Regulations Number 55/POJK.04/2015 concerning the formation and guidelines for the implementation of the Audit Committee's work article 7, regarding the requirements for Membership and Tenure of the Audit Committee.

Aspek Independensi Independence Aspect	Ahmad Fajarprana	Waldy Gutama	Agus Setiadjaja	Bambang Sutidjo*)
Tidak memiliki memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, serta Direksi Has no affiliation with Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan usaha secara langsung dan tidak langsung dengan perusahaan Has no direct or indirect business relationship with the company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan perusahaan Has no management relationship with the company	√	√	√	√
Tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung di perusahaan Does not own shares directly or indirectly in the company	√	√	√	√

*)menjabat hingga 24 Oktober 2023

*) serve until October 24, 2023

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit *Duties and Responsibilities of the Audit Committee*

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan tata kelola Bank. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komite Audit diberikan wewenang untuk menyelidiki semua temuan yang dipandang perlu sebagai upaya menjamin bahwa pengendalian internal, praktik akuntansi dan tata kelola Bank telah berjalan dengan baik.

The Audit Committee has the duties and responsibilities of supervising financial reporting, internal control, and governance of the Bank. To carry out this task, the Audit Committee is authorized to investigate all findings deemed necessary to ensure that the internal control, accounting practices, and governance of the Bank are running correctly.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi antara lain:

The duties and responsibilities of the Audit Committee include, among others:

- Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank dan pasar modal.
- Melakukan penelaahan atas rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, imbalan jasa dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, KAP, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- *Create an annual activity plan approved by the Board of Commissioners.*
- *Conduct a review of the financial information that will be issued by the Bank to the public and/or authorities, including financial reports, projections and other reports related to the Bank's financial information.*
- *Conduct a review of compliance with laws and regulations related to the activities of the Bank and capital market.*
- *Conduct a review of the work plans and implementation of inspections by the Internal Audit Work Unit.*
- *Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the Accountant for the services provided.*
- *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm based on independence, scope of assignment, compensation for services and in accordance with applicable accounting standards, to be submitted to the GMS.*
- *Monitor and evaluate the implementation of the Board of Directors follow-up on the findings of the Internal Audit Work Unit, KAP, and the results of supervision by the Otoritas Jasa Keuangan, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.*
- *Review the implementation of inspections by the internal auditors and supervise the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of the internal auditors.*

- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Bank tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
- Membuat, mengkaji, dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.
- Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya.
- Menjalin kerja sama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau memberikan pengarahannya sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite.
- Conduct a review of risk management implementation activities carried out by the Board of Directors, if the Bank does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners.
- Examine complaints related to the accounting process and financial reporting of the Bank.
- Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest of the Bank.
- Maintain the confidentiality of documents, data and information of the Bank.
- Create, review, and update the Committee's Guidelines and Work Procedures.
- Organize and authorize investigations within the scope of their duties.
- Cooperate with external consultants, accountants or other external parties who provide advice to the Committee or provide direction in connection with investigations, seek various relevant information from employees and employees are asked to work together to fulfill the Committee's requests.



Wewenang Komite Audit *Authority of the Audit Committee*

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
1. Access the Bank's documents, data, and information about employees, funds, assets, and company resources needed.
2. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and parties carrying out the internal audit function, risk management and accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.
3. Involve independent parties outside the members of the Audit Committee who are needed to assist in carrying out their duties (if needed).
4. Carry out other authorities granted by the Board of Commissioners.

Kode Etik Komite Audit

Audit Committee Code of Conduct

Kode etik Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Integritas

- Anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mempertahankan integritasnya yang dilandasi oleh prinsip kejujuran, keadilan, kebijaksanaan dan tanggung jawab.
- Dilarang dengan sengaja menjadi bagian dari kegiatan ilegal, atau terlibat dalam perbuatan yang merusak kredibilitas Komite Audit.

2. Objektif dan Independen

- Anggota Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional tanpa pengaruh dari kepentingan pribadi ataupun pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
- Wajib memperhatikan keseimbangan dan menempatkan kepentingan *stakeholders* di atas kepentingan lainnya.
- Dilarang menerima sesuatu yang dapat atau berpotensi mempengaruhi penilaian yang profesional.

3. Kerahasiaan

- Anggota Komite Audit yang masih, dan yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib bersikap prudent dalam menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
- Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan perseroan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya.

4. Kompetensi

Anggota Komite Audit:

- Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dengan mengaplikasikan pengetahuan, keahlian, dan pengalamannya.
- Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

The Audit Committee's Code of Conduct is as follows:

1. Integrity

- *Members of the Audit Committee, in carrying out their duties and responsibilities, must maintain their integrity based on honesty, fairness, discretion, and accountability.*
- *It is prohibited to become part of illegal activities deliberately or to be involved in actions that damage the credibility of the Audit Committee.*

2. Objective and Independent

- *Members of the Audit Committee carry out their duties and responsibilities professionally without being influenced by personal interests or influence/pressure from any party.*
- *Obligation to pay attention to the balance and put stakeholders' interests above other interests.*
- *Do not accept anything that can or has the potential to influence professional judgment.*

3. Confidentiality

- *Members of the Audit Committee who are still and who are no longer serving as members of the Committee must be prudent in maintaining the confidentiality of company documents, data, and information obtained while serving as members of the Committee, both from internal and external parties and only used for the benefit of the performance of their duties.*
- *Committee members are prohibited from misusing important information relating to the company for personal gain or other interests.*

4. Competence

Audit Committee Members:

- *Carry out their duties and responsibilities professionally by applying their knowledge, expertise, and experience.*
- *Follow the development of laws and regulations in banking, capital market, and other laws and regulations related to the Company's business activities.*

- Memelihara kompetensi profesionalnya dengan mengikuti perkembangan dan praktik-praktik terbaik dalam bidang akunting, pengauditan dan pengendalian internal.
- *Maintain professional competence by keeping abreast of developments and best practices in accounting, auditing, and internal control.*

Kedudukan Komite Audit *Position of the Audit Committee*

Kedudukan Komite Audit berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
 - Komite Audit bekerja secara kolektif dan diketuai oleh Komisaris Independen.
 - Komite Audit wajib melaporkan hasil evaluasinya kepada Dewan Komisaris.
- The position of the Audit Committee based on the Audit Committee Guidelines and Work Procedures is as follows:*
- *The Audit Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners and is directly responsible to the Board of Commissioners.*
 - *The Audit Committee works collectively and is chaired by an Independent Commissioner.*
 - *The Audit Committee is required to report the results of its evaluation to the Board of Commissioners.*

Rapat Komite Audit *Audit Committee Meeting*

Komite Audit menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah anggota termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.

Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

The Audit Committee holds meetings as needed or at least 1 (one) time in 1 (one) month. Committee meetings can only be held if attended by at least 51% (fifty one percent) of the total number of members including one Independent Commissioner and one Independent Party.

Committee meeting decisions are taken based on deliberation to reach a consensus. If a review for agreement does not occur, the decision is made based on the majority vote. The results of Committee meetings must be stated in the minutes of the meeting and properly documented. Dissenting opinions that occur at the Committee meeting must be clearly stated in the minutes of the meeting, along with the reasons for the difference of opinion.



Sepanjang tahun 2023 Komite Audit melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. Berikut disampaikan frekuensi dan kehadiran Komite Audit pada rapat serta risalah rapat.

Throughout 2023 the Audit Committee met 12 (twelve) times. The following is the frequency and attendance of the Audit Committee at meetings and minutes of meetings.

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	AFP	WG	AS	BS
1	25 Januari 2023 January 25, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi Progress Tindak Lanjut Temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 Indikator Risiko Unit Bisnis Hasil Tematik/Special Audit "Take Over Early Disbursement" Hasil Pemeriksaan Audit Keandalan Sistem dan Kualitas Data SCV Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat pada Divisi Jaringan dan Operasi Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat pada Departemen APUPPT <ol style="list-style-type: none"> Recapitulation of the progress of follow-up to Otoritas Jasa Keuangan findings in 2022 Business Unit Risk Indicators Thematic/Special Audit Results "Take Over Early Disbursement" Audit Inspection Results of System Reliability and SCV Data Quality Inspectorate Audit Inspection Results on the Network and Operations Division Inspectorate Audit Inspection Results on the AML CFT Department 	1	1	1	0
2	20 Februari 2023 February 20, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi Progress Tindak Lanjut Temuan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022 Indikator Risiko Unit Bisnis Hasil Pemeriksaan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat pada Wilayah Pekalongan Rekapitulasi Kasus Gagal Take Over Periode Tahun 2022 - 2023 <ol style="list-style-type: none"> Recapitulation of the progress of follow-up to Otoritas Jasa Keuangan findings in 2022 Business Unit Risk Indicators Bank Indonesia Payment System Inspection Results Inspectorate Audit Inspection Results in Pekalongan Region Recapitulation of Failed Take Over Cases for the 2022 - 2023 Period 	1	1	1	1
3	20 Maret 2023 March 20, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi Progress Tindak Lanjut Temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 Indikator Risiko Unit Bisnis Laporan Hasil Investigasi Transaksi Abnormal Pada EDC Bank Permata Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat pada Wilayah Tasikmalaya Pembahasan Lainnya <ol style="list-style-type: none"> Recapitulation of the progress of follow-up to Otoritas Jasa Keuangan findings in 2022 Business Unit Risk Indicators Report on Investigation Results of Abnormal Transactions at EDC Bank Permata Inspectorate Audit Inspection Results in Tasikmalaya Region Other Discussions 	1	1	1	1
4	17 April 2023 April 17, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi Progress Tindak Lanjut Temuan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022 Indikator Risiko Unit Bisnis Rekapitulasi Fraud Semester I 2023 Hasil Pemeriksaan Audit TI pada Wilayah Tangerang Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat Pada Wilayah Bogor <ol style="list-style-type: none"> Recapitulation of the progress of follow-up to Otoritas Jasa Keuangan findings in 2022 Business Unit Risk Indicators Recapitulation of Fraud Semester I 2023 IT Audit Inspection Results in Tangerang Region Inspectorate Audit Inspection Results in Bogor Region 	1	1	1	1

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	AFP	WG	AS	BS
5	23 Mei 2023 May 23, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi Progress Tindak Lanjut Temuan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022 Indikator Risiko Unit Bisnis Rekapitulasi <i>Fraud</i> Semester I 2023 Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat pada Divisi <i>General Affair & Tax</i> Hasil Audit Internal ISO 27001 Hasil Pemeriksaan Audit TI pada Wilayah Diponegoro <ol style="list-style-type: none"> <i>Recapitulation of the progress of follow-up to Otoritas Jasa Keuangan findings in 2022</i> <i>Business Unit Risk Indicators</i> <i>Recapitulation of Fraud Semester I 2023</i> <i>Inspectorate Audit Inspection Results at the General Affairs & Tax Division</i> <i>ISO 27001 Internal Audit Results</i> <i>IT Audit Inspection Results in Diponegoro Region</i> 	1	1	1	1
6	19 Juni 2023 June 19, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Penyampaian Risalah Rapat Komite Audit dengan <i>Auditee</i> Rekapitulasi <i>Progress</i> tindak lanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 Indikator Risiko Unit Bisnis Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat pada Divisi Kredit Konsumer Hasil Pemeriksaan Khusus SLIK <ol style="list-style-type: none"> <i>Submission of Minutes of Audit Committee Meetings with the Auditee</i> <i>Recapitulation of the progress of follow-up to Otoritas Jasa Keuangan findings in 2022</i> <i>Business Unit Risk Indicators</i> <i>Inspectorate Audit Inspection Results in the Consumer Loan Division</i> <i>SLIK Special Inspection Results</i> 	1	1	1	1
7	24 Juli 2023 July 24, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <i>Overview Plan</i> dan Realisasi Kerja Audit Periode Semester I/2023 Rekapitulasi <i>Progress</i> tindak lanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 Indikator Risiko Unit Bisnis <i>Overview</i> Hasil Pemeriksaan FSS Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat Pada Area Bandung 2 Hasil Pemeriksaan Audit TI pada Wilayah Purwokerto <ol style="list-style-type: none"> <i>Overview of Plan and Realization of Audit Work for Semester I/2023 Period</i> <i>Recapitulation of the progress of follow-up to Otoritas Jasa Keuangan findings in 2022</i> <i>Business Unit Risk Indicators</i> <i>Overview of FSS Inspection Results</i> <i>Inspectorate Audit Inspection Results in Bandung Area 2</i> <i>IT Audit Inspection Results in Purwokerto Region</i> 	1	1	1	1
8	21 Agustus 2023 August 21, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi <i>Progres</i> tindak lanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 dan <i>Overview</i> Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023 pada KC Makassar Indikator Unit Bisnis Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat pada Wilayah Solo <ol style="list-style-type: none"> <i>Recapitulation of the progress of follow-up to Otoritas Jasa Keuangan findings in 2022 and Overview of Otoritas Jasa Keuangan inspection results in 2023 at Makassar Branch Office</i> <i>Business Unit Indicators</i> <i>Inspectorate Audit Inspection Results in Solo Region</i> 	1	1	1	1



No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	AFP	WG	AS	BS
9	20 September 2023 September 20, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi Progres tindak lanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 dan Overview Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023 pada KC Surabaya Indikator Risiko Unit Bisnis Review ATM Cardless Withdrawal Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat pada Wilayah Lampung 	1	1	1	1
		<ol style="list-style-type: none"> Recapitulation of the progress of follow-up to Otoritas Jasa Keuangan findings in 2022 and Overview of Otoritas Jasa Keuangan inspection results in 2023 at Surabaya Branch Office Business Unit Risk Indicators ATM Cardless Withdrawals Review Inspectorate Audit Inspection Results in Lampung Region 				
10	23 Oktober 2023 October 23, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi progress tindak lanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022, dan overview hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023 pada KC Makassar, KC Surabaya, dan Kantor Pusat Indikator Risiko Unit Bisnis Review Implementasi Penyaluran KPKB di Unit Bisnis Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat pada Wilayah Garut Ringkasan Temuan Laporan Audit TI 2023 	1	1	1	1
		<ol style="list-style-type: none"> Recapitulation of the progress of follow-up to Otoritas Jasa Keuangan findings in 2022, and overview of Otoritas Jasa Keuangan inspection results in 2023 at Makassar Branch Office, Surabaya Branch Office, and Head Office Business Unit Risk Indicators Review of the Implementation of KPKB Distribution in Business Units Inspectorate Audit Inspection Results in Garut Region Summary of Findings of the 2023 IT Audit Report 				
11	24 November 2023 November 24, 2023	<p>Overview hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023 pada Kantor Pusat</p> <p>Overview of the 2023 Otoritas Jasa Keuangan inspection results at the Head Office</p>	1	1	1	0
12	20 Desember 2023 December 25, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi progress tindak lanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022, dan overview hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023 pada KC Makassar, KC Surabaya, dan Kantor Pusat Indikator Risiko Unit Bisnis Overview Audit Plan vs Realisasi Semester I dan II Tahun 2023 Highlight Rencana Kerja Tahun 2024 (Auditable Unit, Manpower, serta Komparasi Audit Plan Tahun 2023 dan 2024) Hasil Tematik Audit terkait Penyaluran KPH Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat pada Wilayah Subang Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat pada Departemen APU & PPT Ringkasan Temuan Laporan Audit SCV 2023 	1	1	1	0
		<ol style="list-style-type: none"> Recapitulation of the progress of follow-up to Otoritas Jasa Keuangan findings in 2022, and overview of Otoritas Jasa Keuangan inspection results in 2023 at Makassar Branch Office, Surabaya Branch Office, and Head Office Business Unit Risk Indicators Overview of Audit Plan vs Realization for Semesters I and II 2023 Highlights of the 2024 Work Plan (Auditable Unit, Manpower, and Comparative Audit Plan for 2023 and 2024) Thematic Audit Results related to KPH Distribution Inspectorate Audit Inspection Results in the Subang Region Inspectorate Audit Inspection Results at the APU & CFT Department Summary of Findings of the 2023 SCV Audit Report 				
Jumlah Rapat Number of Meetings			12	12	12	10
Jumlah Kehadiran Total of Attendance			12	12	12	9
% Kehadiran % Attendance			100	100	100	90

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Audit Committee Duties Implementation

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit Bank telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Rekapitulasi Progress Tindak Lanjut Temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022
2. Pembahasan indikator Risiko Unit Bisnis
3. Pembahasan Hasil pemeriksaan Audit pada Unit Bisnis
4. Pembahasan Hasil pemeriksaan Audit TI pada Unit Bisnis
5. Pelaksanaan penelaahan laporan dan hal yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris antara lain laporan realisasi rencana bisnis, laporan pelaksanaan fungsi audit;
6. *Review* dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan dari eksternal dan internal, termasuk dalam hal ini evaluasi atas penyelesaian kasus *fraud*;
7. *Review* dan evaluasi rencana kerja audit tahun 2024 dan implementasinya;
8. Evaluasi pelaksanaan audit laporan tahunan 2022 oleh Kantor Akuntan Publik;
9. Penyusunan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2023

During 2023, the Bank's Audit Committee has carried out its duties and responsibilities, among others:

1. *Recapitulation of Progress on Follow-up to Otoritas Jasa Keuangan Findings in 2022*
2. *Business Unit Risk indicators Discussion*
3. *Discussion of Audit inspection Results on Business Units*
4. *Discussion of IT inspection Audit results on Business Units*
5. *Review of reports and matters required to be approved by the Board of Commissioners, including reports on the realization of business plans, reports on the implementation of the audit function;*
6. *Review and evaluation of follow-up to external and internal audits, including in this case evaluation of the resolution of fraud cases;*
7. *Review and evaluation of the 2024 audit work plan and its implementation;*
8. *Evaluation of the implementation of the 2022 annual report audit by the Public Accounting Firm;*
9. *Preparation of recommendations for the appointment of a Public Accounting Firm for the Financial Statements of 2023 Financial Year*

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Audit Committee Competency Development

Untuk menunjang Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank memberikan kesempatan kepada anggota Komite Audit untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh internal Bank atau yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.

To support the Audit Committee in carrying out its duties and responsibilities, the Bank provides opportunities for members of the Audit Committee to take part in training and competency development programs, either held internally by the Bank or organized by external parties.

Adapun program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Komite Audit BWS tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The competency development programs participated in by the BWS Audit Committee in 2023 are as follows:

Nama Peserta <i>Participant Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Program Pengembangan Kompetensi <i>Competency Development Program</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Waktu dan Tempat <i>Time and Place</i>
Ahmad Fajarprana	(Komisaris Independen) <i>(Independent Commissioner)</i>	Manajemen Risiko Operasional di Perbankan <i>Operational Risk Management in Banking</i>	Efektifpro	<i>Virtual</i> 6 Januari 2023 <i>Virtual</i> January 6, 2023
		Rapat Bidang Pengembangan Kajian Hukum & Peraturan <i>Legal & Regulatory Studies Development Sector Meeting</i>	PERBANAS	<i>Zoom</i> 16 Januari 2023 <i>Zoom</i> January 16, 2023
		<i>Uncovering Cybercrime Through The Power of Collaboration</i> <i>Uncovering Cybercrime Through The Power of Collaboration</i>	PERBANAS	Js. Luwansa H.R Rasuna Said 15 Februari 2023 Js. Luwansa H.R Rasuna Said February 15, 2023
		Perubahan NIK menjadi NPWP dan Implikasinya Terhadap Business Proses di Perbankan <i>Changing (Resident ID) to TIN and its Implications for Business Process in Banking</i>	PERBANAS	<i>Zoom</i> 17 Februari 2023 <i>Zoom</i> February 17, 2023
		<i>Bankers Association</i> <i>Bankers Association</i>	PERBANAS	<i>Zoom</i> 6 Maret 2023 <i>Zoom</i> March 6, 2023
		<i>IFRS Sustainability Disclosure Standards</i> <i>IFRS Sustainability Disclosure Standards</i>	OJK	<i>Virtual</i> 27 - 28 Juni 2023 <i>Virtual</i> June 27 - 28, 2023
		Peluang, Harapan dan Tantangan Perekonomian Nasional <i>Opportunities, Hopes and Challenges for the National Economy</i>	Forum Komunikasi DKP <i>DKP Communication Forum</i>	<i>Virtual</i> 10 Oktober 2023 <i>Virtual</i> October 10, 2023
		<i>Workshop BOD-BOC</i> <i>BOD-BOC Workshop</i>	Bank Woori Saudara	<i>Virtual</i> 25 Oktober 2023 <i>Virtual</i> October 25, 2023
<i>Media Gathering PERBANAS</i> <i>Media Gathering PERBANAS</i>	PERBANAS	<i>Virtual</i> 23 - 24 November 2023 <i>Virtual</i> November 23 - 24, 2023		

Remunerasi Komite Audit *Audit Committee Remuneration*

Besarnya honorarium untuk anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan kebijakan Bank, dan dibebankan kepada anggaran Bank. Dalam realisasinya, besaran remunerasi disesuaikan sesuai dengan perkembangan usaha serta kebijakan Bank.

The amount of honorarium for members of the Audit Committee who are not members of the Board of Commissioners is determined based on the Bank's policy and is charged to the Bank's budget. In practice, remuneration is adjusted according to business development and Bank policies.



Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pemberian rekomendasi atas nominasi dan remunerasi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan anggota Komite-Komite di tingkat Dewan Komisaris, beserta kerangka secara keseluruhan remunerasi Pejabat Eksekutif dan pegawai sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

The Nomination and Remuneration Committee is a Committee formed and responsible to the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities related to providing recommendations on nominations and remuneration of members of the Board of Commissioners, Board of Directors and members of Committees at the Board of Commissioners level, along with the overall framework for remuneration of Executive Officers and employees in accordance with the Good Corporate Governance principles.

Dasar Hukum

Legal Basis

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.*
- *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 45/POJK.03/2015 concerning Implementation of Governance in Remuneration for Commercial Banks.*
- *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.*

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Work Guidelines for the Nomination and Remuneration Committee

Agar pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi berjalan optimal, Bank mengesahkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan acuan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan di evaluasi secara berkala dan, apabila diperlukan, dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan terkait lainnya. Piagam Komite

To implement the Nomination and Remuneration Committee's duties to run optimally, the Bank ratifies the Nomination and Remuneration Committee Charter, which is a reference for implementing the Nomination and Remuneration Committee's responsibilities. The Nomination and Remuneration Committee Charter is determined by the Board of Commissioners and is evaluated periodically. If necessary, amendments are made to ensure the Bank's compliance with Otoritas Jasa Keuangan regulations and other

Nominasi dan Remunerasi ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris 004/KEP-DEKOM/A-13/II/23 tanggal 21 Februari 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

related regulations. The Nomination and Remuneration Committee Charter was stipulated by Decree of the Board of Commissioners Number 004/KEP-DEKOM/A-13/II/23 dated February 21, 2023 concerning Guidelines and Work Procedures for the Nomination and Remuneration Committee.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi *Structure, Membership, and Expertise of the Nomination and Remuneration Committee*

Struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

- Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - Seorang Komisaris Independen
 - Seorang Komisaris
 - Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau seorang perwakilan Karyawan
- Komite Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen.
- Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi.
- Dalam hal anggota Komite Remunerasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.

The structure and membership of the Nomination and Remuneration Committee are as follows:

- *The Nomination and Remuneration Committee consists of at least:*
 - *An Independent Commissioner*
 - *A Commissioner*
 - *An Executive Officer in charge of Human Resources or an Employee representative*
- *An Independent Commissioner chairs the Remuneration Committee.*
- *Members of the Board of Directors are prohibited from becoming members of the Remuneration Committee.*
- *If there are more than 3 (three) members of the Remuneration Committee, the number of members of the Independent Commissioners shall be at least 2 (two) people.*
- *The Chairman of the Nomination and Remuneration Committee can only hold concurrent positions as chairman of the Committee in at most 1 (one) other Committee.*

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2023

Composition of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2023

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Dasar Penunjukan <i>Basis of Appointment</i>	Masa Jabatan <i>Term of Office</i>	Keterangan <i>Description</i>
Ahmad Fajarprana	Ketua <i>Chairman</i>	Keputusan Direksi Nomor 054/KEPDIR/HC.X/2023 <i>Board of Directors Decree Number 054/KEP.DIR/HC.X/2023</i>	Hingga RUPST 2024 <i>Until Annual GMS 2024</i>	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>
Arief Budiman	Anggota <i>Member</i>			Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i>
Akhmad Syailendra	Anggota <i>Member</i>			Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia <i>Executive Officer in charge of Human Resources</i>

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi *Profile of the Nomination and Remuneration Committee*

Ahmad Fajarprana

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Profil Ahmad Fajarprana dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Ahmad Fajarprana's profile can be seen in the Board of Commissioners' Profile section in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Arief Budiman

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Profil Arief Budiman dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Arief Budiman's profile can be seen in the Board of Commissioners' Profile section in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Akhmad Syailendra

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Warga Negara Indonesia, berusia 45 tahun. Lulusan Universitas Padjadjaran Bandung Fakultas Ekonomi Manajemen. Bergabung dengan Bank Saudara pada bulan Maret 2001 dan terhitung sejak 17 Februari 2017 menjabat sebagai Kepala Divisi *Human Capital* dan menjadi Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi pada bulan Mei 2017.

Indonesian Citizen, 45 years old. Graduated from Padjadjaran University, Bandung, Faculty of Management Economics. Joined Bank Saudara in March 2001 and since February 17, 2017, has served as Head of the Human Capital Division and became Secretary of the Nomination and Remuneration Committee in May 2017.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi *Independence of the Nomination and Remuneration Committee*

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Tahun 2023 BWS tidak memiliki anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen di luar Komisaris Independen, pihak independen berasal dari Komisaris Independen.

All members of the Nomination and Remuneration Committee who come from independent parties have no financial, management, share ownership, and/or family relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders or connections with the Bank that may affect their ability to act independently.

In 2023, BWS does not have members of the Nomination and Remuneration Committee from independent parties other than Independent Commissioners, and independent parties come from Independent Commissioners..

Tugas dan Tanggung Jawab *Duties and Responsibilities*

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

A. Terkait dengan fungsi remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
2. Memberikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi:
 - a. Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
3. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa gaji, honorarium, insentif, dan tunjangan yang bersifat tetap dan atau variabel.

The duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee are as follows:

A. Related to the remuneration function

1. *Evaluate the remuneration policy based on performance, risk, fairness with the peer group, goals and long-term strategy of the Bank, fulfillment of reserves as stipulated in the laws and regulations and potential income of the Bank in the future.*
2. *Provide evaluation results and recommendations to the Board of Commissioners regarding remuneration policies for:*
 - a. *Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders;*
 - b. *Executive officers and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors.*
3. *Develop a remuneration structure for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners in the form of salary, honorarium, incentives and benefits that are fixed and or variable.*

4. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri perbankan sesuai dengan kegiatan usaha sejenis dan skala usaha;
 - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja bank;
 - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan *variable*.
5. Melakukan evaluasi tentang Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.

B. Terkait dengan fungsi nominasi

1. Menyusun komposisi, proses nominasi, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan serta memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada RUPS.
3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

4. *Prepare the amount of Remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners, taking into account:*
 - a. *Remuneration that applies to the banking industry in accordance with similar business activities and business scale;*
 - b. *The duties, responsibilities and authorities of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners related to achieving the goals and performance of the bank;*
 - c. *Performance targets or the performance of each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and*
 - d. *The balance of benefits between fixed and variable.*
5. *Evaluate the structure, policies, and amount of Remuneration at least 1 (one) time in 1 (one) year.*

B. Related to the nomination function

1. *Prepare the composition, nomination process, policies, and criteria needed, as well as provide recommendations regarding the systems and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.*
2. *Provide recommendations regarding prospective members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors to the GMS.*
3. *Provide recommendations regarding Independent Parties who will become members of the Audit Committee and Members of the Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners.*
4. *Develop capacity-building programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.*

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi *Authority of the Nomination and Remuneration Committee*

Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

The Nomination and Remuneration Committee has the authority to gain full, accessible, and unlimited access to information about employees, funds, assets, and other Bank resources related to the implementation of their duties.

Kedudukan Komite Nominasi dan Remunerasi *Position of the Nomination and Remuneration Committee*

Kedudukan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

- Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif dan diketuai oleh Komisaris Independen.
- Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melaporkan hasil evaluasinya kepada Dewan Komisaris.

The position of the Nomination and Remuneration Committee based on the Guidelines and Work Procedures of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

- *The Nomination and Remuneration Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners and is directly responsible to the Board of Commissioners.*
- *The Nomination and Remuneration Committee works collectively and is chaired by an Independent Commissioner.*
- *The Nomination and Remuneration Committee must report its evaluation results to the Board of Commissioners.*

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi *Nomination and Remuneration Committee Meeting*

Komite menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah anggota termasuk satu orang Komisaris Independen.

The Committee holds meetings as needed or according to the provisions, at least 1 (one) time in 3 (three) months. Committee meetings can only be held if attended by at least 51% (fifty-one percent) of the total members, including one Independent Commissioner.

Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2023 Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali. Berikut disampaikan frekuensi dan kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi pada rapat serta risalah rapat.

Committee meeting decisions are taken based on deliberation to reach a consensus. If a review for agreement does not occur, the decision is made based on the majority vote. The results of the Committee meeting must be recorded in the minutes of the forum and adequately documented. Dissenting opinions at the Committee meeting must be clearly stated in the meeting minutes, along with the reasons for the difference of opinion.

Throughout 2023 the Nomination and Remuneration Committee held a total of 11 (eleven) meetings. Following is the frequency and attendance of the Nomination and Remuneration Committee at meetings and minutes of meetings.

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	AF	AB	AS
1	21 Februari 2023 February 21, 2023	1. Perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi 2. Jabatan dan Fungsi Kritisal <i>1. Changes to the Nomination and Remuneration Committee Guidelines and Work Procedures</i> <i>2. Position and Critical Functions</i>	1	1	1
2	8 Maret 2023 March 8, 2023	1. Perubahan Susunan Pengurus dan Pengangkatan Kembali Pengurus 2. Penilaian Internal calon Direktur 3. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi <i>1. Changes in the Composition of Management and Re-appointment of Management</i> <i>2. Internal Assessment of Director Candidates</i> <i>3. Remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors</i>	1	1	1
3	27 Maret 2023 March 27, 2023	Evaluasi Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris <i>Evaluation of Committee Members under the Board of Commissioners</i>	1	1	1
4	10 April 2023 April 10, 2023	1. Insentif/Bonus Berdasarkan Kinerja 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris 2. Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2023 <i>1. Incentives/Bonuses Based on Performance 2022 for Board of Directors and Board of Commissioners</i> <i>2. Remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners in 2023</i>	1	1	1
5	17 April 2023 April 17, 2023	1. Penyesuaian Gaji Karyawan 2023 2. Insentif Karyawan Kinerja tahun 2022 <i>1. Employee Salary Adjustment in 2023</i> <i>2. Employee Incentives for Performance in 2022</i>	1	1	1
6	18 April 2023 April 18, 2023	Pembahasan Temuan Audit Internal <i>Internal Audit Findings Discussion</i>	1	1	1
7	24 Mei 2023 May 24, 2023	1. Penyesuaian Remunerasi Presiden Direktur 2. Penyesuaian <i>Benefit</i> Pengurus <i>1. President Director's Remuneration Adjustment</i> <i>2. Management Benefit Adjustments</i>	1	1	1
8	9 Agustus 2023 August 9, 2023	1. Pembahasan Remunerasi bagi Direktur yang Berakhir masa bakti tahun 2023 2. Kajian dan Rekomendasi atas Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Pejabat Eksekutif Bidang Teknologi Informasi tahun 2023-2026 <i>1. Discussion of Remuneration for Directors whose term of service ends in 2023</i> <i>2. Review and Recommendations on Plans for the Utilization of Foreign Workers for Executive Officers in the Information Technology Sector for 2023-2026</i>	1	1	1
9	24 Oktober 2023 October 24, 2023	Perubahan Keanggotaan Komite Audit <i>Changes in Audit Committee Membership</i>	1	1	1

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	AF	AB	AS
10	29 November 2023 November 29, 2023	1. Pembahasan Struktur Organisasi tahun 2024 2. Pembahasan Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing 2024-2026 3. Remunerasi Pengurus dan Karyawan 4. Rencana <i>Training</i> 2024 1. <i>Discussion of Organizational Structure in 2024</i> 2. <i>Discussion of on Plans for the Utilization of Foreign Workers for 2024-2026</i> 3. <i>Management and Employees Remuneration</i> 4. <i>2024 Training Plan</i>	1	1	1
11	13 Desember 2023 December 13, 2023	1. Pengunduran diri Presiden Direktur 2. Uang Pisah bagi Pengurus 1. <i>Resignation of the President Director</i> 2. <i>Separation pay for Management</i>	1	1	1
Jumlah Rapat <i>Number of Meetings</i>			11	11	11
Jumlah Kehadiran <i>Total of Attendance</i>			11	11	11
% Kehadiran <i>% Attendance</i>			100	100	100



Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023

Report on the Implementation of Duties of the Nomination and Remuneration Committee for 2023

Selama tahun 2023 Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan kegiatan sebagaimana tugas dan fungsi yang tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang dimiliki BWS, sebagai berikut:

1. *Review* dan evaluasi rencana kerja SDM, pemanfaatan tenaga kerja asing, struktur organisasi.
2. *Review* dan evaluasi pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.
3. Rekomendasi penunjukan anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi.
4. *Review* dan evaluasi kebijakan terkait SDM dan remunerasi.

During 2023 the Nomination and Remuneration Committee has carried out activities according to the duties and functions listed in the Guidelines and Work Procedures of the Nomination and Remuneration Committee owned by BWS, as follows:

- *Review and evaluate HR work plans, use of foreign workers, organizational structure.*
- *Review and evaluate the provision of remuneration for the Board of Commissioners, Board of Directors and Employees.*
- *Recommendations for the appointment of members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors.*
- *Review and evaluate policies related to HR and remuneration.*



Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Competency Development

Untuk menunjang Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank memberikan kesempatan kepada anggota Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh internal Bank atau yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.

To support the Nomination and Remuneration Committee in carrying out its duties and responsibilities, the Bank provides opportunities for members of the Nomination and Remuneration Committee to participate in training and competency development programs, either held internally by the Bank or organized by external parties.

Adapun program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Komite Nominasi dan Remunerasi BWS tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The competency development programs participated in by the BWS Nomination and Remuneration Committee in 2023 are as follows:

Nama Peserta Participant Name	Jabatan Position	Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program	Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and Place
Ahmad Fajarprana	Komisaris Independen Independent Commissioner	Manajemen Risiko Operasional di Perbankan <i>Operational Risk Management in Banking</i>	Efektifpro	Virtual 6 Januari 2023 Virtual January 6, 2023
		Rapat Bidang Pengembangan Kajian Hukum & Peraturan <i>Legal & Regulatory Studies Development Sector Meeting</i>	PERBANAS	Zoom 16 Januari 2023 Zoom January 16, 2023
		Uncovering Cybercrime Through The Power of Collaboration <i>Uncovering Cybercrime Through The Power of Collaboration</i>	PERBANAS	Js. Luwansa H.R Rasuna Said 15 Februari 2023 Js. Luwansa H.R Rasuna Said February 15, 2023
		Perubahan NIK menjadi NPWP dan Implikasinya Terhadap Business Proses di Perbankan <i>Changing (Resident ID) to TIN and its Implications for Business Process in Banking</i>	PERBANAS	Zoom 17 Februari 2023 Zoom February 17, 2023
		Bankers Association <i>Bankers Association</i>	PERBANAS	Zoom 6 Maret 2023 Zoom March 6, 2023
		IFRS Sustainability Disclosure Standards <i>IFRS Sustainability Disclosure Standards</i>	Otoritas Jasa Keuangan	Virtual 27 - 28 Juni 2023 Virtual June 27 - 28, 2023
		Peluang, Harapan dan Tantangan Perekonomian Nasional <i>Opportunities, Hopes and Challenges for the National Economy</i>	Forum Komunikasi DKP <i>DKP Communication Forum</i>	Virtual 10 Oktober 2023 Virtual October 10, 2023
		Workshop BOD-BOC <i>BOD-BOC Workshop</i>	Bank Woori Saudara	Virtual 25 Oktober 2023 Virtual October 25, 2023
		Media Gathering PERBANAS <i>Media Gathering PERBANAS</i>	PERBANAS	Virtual 23 - 24 November 2023 Virtual November 23 - 24, 2023
		Akhmad Syailendra	Kepala Divisi Human Capital Head of Human Capital Division	Product Knowledge: Eazy Medicash <i>Product Knowledge: Eazy Medicash</i>
Risk Management Certification (Level 4) <i>Risk Management Certification (Level 4)</i>	Efektifpro & LSPP			Virtual 11 - 12 Februari 2023 Virtual February 11 - 12, 2023
General Banking (Certificate Refreshment Program) <i>General Banking (Certificate Refreshment Program)</i>	Bank Woori Saudara			E-Learning BWS 13 - 17 Februari 2023 E-Learning BWS February 13 - 17, 2023



Nama Peserta Participant Name	Jabatan Position	Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program	Penyelenggara Organizer	Waktu dan Tempat Time and Place
Akhmad Syailendra	Kepala Divisi Human Capital Head of Human Capital Division	<i>E-Commitment Letter</i> Periode Mei 2023 <i>E-Commitment Letter</i> May 2023 Period	Divisi Human Capital Human Capital Division	<i>E-Learning</i> BWS 15 - 19 Mei 2023 <i>E-Learning</i> BWS May 15 - 19, 2023
		Pencegahan Serangan Ransomware <i>Ransomware Attack Prevention</i>	Divisi Human Capital Human Capital Division	<i>E-Learning</i> BWS 19 - 26 Mei 2023 <i>E-Learning</i> BWS May 19 - 26, 2023
		<i>E-Commitment Letter</i> Periode Juni 2023 <i>E-Commitment Letter</i> June 2023 Period	Divisi Human Capital Human Capital Division	<i>E-Learning</i> BWS 10 - 15 Juni 2023 <i>E-Learning</i> BWS June 10 - 15, 2023
		<i>Regional Group Head Workshop</i> <i>Regional Group Head Workshop</i>	Bank Woori Saudara	Treasury Tower 14 Juni 2023 <i>Treasury Tower</i> June 14, 2023
		<i>E-Commitment Letter</i> Periode Juli 2023 <i>E-Commitment Letter</i> July 2023 Period	Divisi Human Capital Human Capital Division	<i>E-Learning</i> BWS 10 - 15 Juli 2023 <i>E-Learning</i> BWS July 10 - 15, 2023
		<i>E-Commitment Letter</i> Periode Agustus 2023 <i>E-Commitment Letter</i> August 2023 Period	Divisi Human Capital Human Capital Division	<i>E-Learning</i> BWS 10 - 15 Agustus 2023 <i>E-Learning</i> BWS August 10 - 15, 2023
		Sosialisasi <i>Healthy Productive Women Worker Movement</i> <i>Dissemination of Healthy Productive Women Worker Movement</i>	Dinas Kesehatan	Jakarta, Rg. Jirisan 30 Agustus 2023 <i>Jakarta, Rg. Jirisan</i> August 30, 2023
		<i>E-Commitment Letter</i> Periode September 2023 <i>E-Commitment Letter</i> September 2023 Period	Divisi Human Capital Human Capital Division	<i>E-Learning</i> BWS 10 - 15 September 2023 <i>E-Learning</i> BWS September 10 - 15, 2023
		<i>E-Learning</i> Email Phising Secure Awareness <i>E-Learning</i> Email Phising Secure Awareness	Bank Woori Saudara	<i>E-Learning</i> BWS 9 - 20 Oktober 2023 <i>E-Learning</i> BWS October 9 - 20, 2023
		<i>E-Commitment Letter</i> Periode Oktober 2023 <i>E-Commitment Letter</i> October 2023 Period	Divisi Human Capital Human Capital Division	<i>E-Learning</i> BWS 10 - 15 Oktober 2023 <i>E-Learning</i> BWS October 10 - 15, 2023
		<i>E-Commitment Letter</i> Periode November 2023 <i>E-Commitment Letter</i> November 2023 Period	Divisi Human Capital Human Capital Division	<i>E-Learning</i> BWS 10 - 15 November 2023 <i>E-Learning</i> BWS November 10 - 15, 2023
		FHCP <i>Determine Future Talent Readiness</i> <i>FHCP Determine Future Talent Readiness</i>	Forum Human Capital Perbankan Indonesia <i>Indonesian Banking</i> Human Capital Forum	<i>Virtual</i> 1 - 2 Desember 2023 <i>Virtual</i> December 1 - 2, 2023
		Sosialisasi Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja <i>Dissemination of Guidelines for Preventing and Handling Sexual Harassment in the Workplace</i>	Bank Woori Saudara	<i>Virtual</i> 8 - 29 Desember 2023 <i>Virtual</i> December 8 - 29, 2023
		<i>E-Commitment Letter</i> Periode Desember 2023 <i>E-Commitment Letter</i> December 2023 Period	Divisi Human Capital Human Capital Division	<i>E-Learning</i> BWS 10 - 15 Desember 2023 <i>E-Learning</i> BWS December 10 - 15, 2023

Nama Peserta <i>Participant Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Program Pengembangan Kompetensi <i>Competency Development Program</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Waktu dan Tempat <i>Time and Place</i>
Arief Budiman	Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i>	Manajemen Risiko Operasional di Perbankan <i>Operational Risk Management in Banking</i>	Efektifpro	<i>Virtual</i> 6 Januari 2023 <i>Virtual</i> January 6, 2023
		Rapat Bidang Pengembangan Kajian Hukum & Peraturan <i>Legal & Regulatory Studies Development Sector Meeting</i>	PERBANAS	<i>Zoom</i> 16 Januari 2023 <i>Zoom</i> January 16, 2023
		Workshop BOD-BOC <i>BOD-BOC Workshop</i>	Bank Woori Saudara	<i>Virtual</i> 25 Oktober 2023 <i>Virtual</i> October 25, 2023



Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi *Remuneration of the Nomination and Remuneration Committee*

Besarnya honorarium untuk anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan kebijakan Bank, dan dibebankan kepada anggaran Bank. Dalam realisasinya, besaran remunerasi disesuaikan sesuai dengan perkembangan usaha serta kebijakan Bank.

The amount of honorarium for members of the Nomination and Remuneration Committee who are not members of the Board of Commissioners is determined based on Bank policy. It is charged to the Bank's budget. In practice, the amount of remuneration is adjusted according to business development and Bank policies.



Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko merupakan Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait dengan fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi kepada Direksi agar penerapan manajemen risiko Bank memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga risiko Bank dapat terkendali pada batas/limit yang telah ditetapkan.

The Risk Monitoring Committee is a committee formed and responsible to the Board of Commissioners to assist the duties and functions of the Board of Commissioners related to the functions of supervising and providing recommendation to the Board of Directors so that the implementation of the Bank's risk management meets the elements of the adequacy of risk management procedures and methodologies, thus the Bank's risk can be controlled within the limits predetermined.



Dasar Hukum

Legal Basis

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.
- Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 18/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks.



Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Guidelines and Work Procedures

Agar pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko berjalan optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, Bank telah membuat Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang merupakan acuan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko. Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan di evaluasi secara berkala dan, apabila diperlukan, dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan terkait lainnya. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005/KEP-DEKOM/A-13/II/23 tanggal 21 Februari 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.

To implement the Risk Monitoring Committee's duties to run optimally and follow GCG principles, the Bank has prepared a Risk Monitoring Committee Guidelines and Work Procedures, which is a reference for implementing the Risk Monitoring Committee's duties. This Guidelines and Work Procedures is determined by the Board of Commissioners. It is evaluated periodically, and if necessary, amendments are made to ensure the Bank's compliance with Otoritas Jasa Keuangan regulations and other related regulations. The Risk Monitoring Committee Guidelines and Work Procedures is stipulated by Decree of the Board of Commissioners Number 005/KEP-DEKOM/A-13/II/23 dated February 21, 2023 concerning Guidelines and Work Procedures for the Risk Monitoring Committee.



Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Structure, Membership, and Expertise of the Risk Monitoring Committee

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- Komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
- Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan dalam hal memenuhi kriteria:
 - Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, bidang keuangan dan/atau bidang perbankan.
 - Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/atau bidang perbankan.
- Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dalam hal memenuhi kriteria:
 - Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko
 - Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko
- Anggota Direksi BWS maupun Bank lain dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
- Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
- Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.

The structure and membership of the Risk Monitoring Committee are as follows:

- The Risk Monitoring Committee consists of at least 3 (three) people from Independent Commissioners and Independent Parties.
- The membership composition of the Risk Monitoring Committee is at least 1 (one) Independent Commissioner as Chairman concurrently a member, 1 (one) Independent Party with expertise in finance, and 1 (one) Independent Party with expertise in risk management.
- Members of the Risk Monitoring Committee who come from Independent Parties are considered to have expertise in finance in terms of meeting the following criteria:
 - Knowing economics, finance, and/or banking.
 - Have work experience of at least 5 (five) years in economics, finance, and/or banking.
- Members of the Risk Monitoring Committee from Independent Parties are considered to have expertise in risk management in terms of meeting the following criteria:
 - Knowing the field of risk management
 - Have work experience of at least 2 (two) years in the field of risk management
- Members of the Board of Directors of BWS and other Banks are prohibited from becoming members of the Risk Monitoring Committee.
- Independent Commissioners and Independent Parties who are members of the Risk Monitoring Committee are at least 51% (fifty-one percent) of the total members of the Risk Monitoring Committee.
- The Chairman of the Risk Monitoring Committee can only hold concurrent positions as chairman of the Committee in at most 1 (one) other Committee.

Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2023

Composition of the Risk Monitoring Committee as of December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Keterangan Description
Adi Haryadi	Ketua Chairman	Keputusan Direksi Nomor 054/KEP.DIR/HC.X/2023 Board of Directors Decree Number 054/KEP.DIR/HC.X/2023	Hingga RUPST 2024 Until Annual GMS 2024	Komisaris Independen Independent Commissioner
Arief Budiman	Anggota Member			Presiden Komisaris President Commissioner
Choi Jung Hoon	Anggota Member			Komisaris Commissioner
Agus Setiadjaja	Anggota Member			Pihak Independen Independent Party
Nanny Dewi	Anggota Member			Pihak Independen Independent Party

Profil Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Profile

Adi Haryadi

Ketua Komite Pemantau Risiko
Chairman of the Risk Monitoring Committee

Profil Adi Haryadi dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Adi Haryadi's profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Arief Budiman

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Profil Arief Budiman dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Arief Budiman's profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Choi Jung Hoon

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Profil Choi Jung Hoon dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Choi Jung Hoon's profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Agus Setiadjaja

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Warga negara Indonesia, berusia 67 Tahun, menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Magister Sains Bidang Kajian Ilmu Akuntansi di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung Indonesia, memulai karir perbankan di BWS sebagai *staff Ahli* atau Biro Direksi pada tahun 1989, sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Dalem Kaum PT Bank HS 1906 sejak 12 September 1994, sebagai Sekretaris Perusahaan PT Bank HS 1906 sejak 3 Mei 1999, sebagai Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern PT Bank HS 1906 sejak 10 Juli 2000 dan menjadi Komisaris BWS sejak 26 Mei 2011.

Indonesian citizen, 67 years old, completed his education at the Faculty of Economics and Master of Science in Accounting Studies at the Postgraduate Faculty of Padjadjaran University, Bandung, Indonesia, started his banking career at BWS as Expert staff or Bureau of the Board of Directors in 1989, as Head of the Dalem Kaum Sub-branch PT Bank HS 1906 since September 12, 1994, as Corporate Secretary of PT Bank HS 1906 since May 3, 1999, as Head of the Internal Audit Work Unit Division of PT Bank HS 1906 since July 10, 2000 and has been Commissioner of BWS since May 26, 2011.

Nanny Dewi

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Warga negara Indonesia, berusia 60 tahun, Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Padjadjaran sejak tahun 1989 sampai sekarang. Menyelesaikan pendidikan Master di University of Wollongong, Australia pada tahun 1992 dan pendidikan Doktoral di Universitas Padjadjaran pada tahun 2006. Berpengalaman sebagai anggota Komite Audit pada PT Rabobank Indonesia dan PT Energi Mega Persada, Tbk. Bergabung sebagai Anggota Komite Audit BWS pada bulan Maret 2015.

Indonesian citizen, 60 years old, Lecturer at the Faculty of Economics and Business at Padjadjaran University since 1989 until now. Completed Master's education at the University of Wollongong, Australia, in 1992 and Doctoral education at Padjadjaran University in 2006. Experienced as a member of the Audit Committee at PT Rabobank Indonesia and PT Energi Mega Persada, Tbk, and joined the BWS Audit Committee in March 2015.

Independensi Komite Pemantau Risiko *Risk Monitoring Committee Independence*

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

All members of the Risk Monitoring Committee who are independent parties have no financial, management, share ownership and/or family relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationships with the Bank that could affect their ability to act independently.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko *Risk Monitoring Committee Duties and Responsibilities*

Komite Pemantau Risiko bertugas mengevaluasi dan memastikan kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko di lingkup Bank dan pelaksanaannya, serta memantau, mengevaluasi penerapan tugas dan fungsi Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

The Risk Monitoring Committee is tasked with evaluating and ensuring compatibility between risk management policies within the scope of the Bank and their implementation, as well as monitoring and assessing the performance of the duties and functions of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit.

Berikut ini merupakan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko yaitu:

The followings are the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee as described in the Risk Monitoring Committee guidelines and work procedures, namely:

1. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya.
2. Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Melaporkan kepada Dewan Komisaris atas berbagai risiko yang dihadapi Bank dan penerapan manajemen risiko oleh Direksi.
4. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi Bank.
5. Tugas-tugas lain selain yang disebutkan di atas, yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

1. *Evaluate the conformity between the Bank's risk management policies and their implementation.*
2. *Evaluate and monitor the implementation of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit to provide recommendations to the Board of Commissioners.*
3. *Report to the Board of Commissioners on various risks faced by the Bank and the implementation of risk management by the Board of Directors.*
4. *Maintain the confidentiality of all documents, data and information of the Bank.*
5. *Other tasks besides those mentioned above, given by the Board of Commissioners to the Committees in accordance with their functions and duties from time to time as needed.*

Wewenang Komite Pemantau Risiko *Authority of the Risk Monitoring Committee*

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite berwenang untuk mendapatkan berbagai informasi dan data yang diperlukan mengenai karyawan, dana, aset dan sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 2. Dalam melaksanakan kewenangannya, Komite harus bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan unit lain yang dianggap perlu. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The Committee has the authority to obtain various necessary information and data regarding employees, funds, assets and other Bank resources related to the implementation of their duties and responsibilities.</i> 2. <i>In exercising its authority, the Committee must cooperate with the Risk Management Work Unit and other units deemed necessary.</i> |
|--|--|

Kedudukan Komite Pemantau Risiko *Risk Monitoring Committee Position*

- | | |
|--|--|
| <p>Kedudukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. 2. Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dan diketuai oleh Komisaris Independen. 3. Komite Pemantau Risiko wajib melaporkan hasil evaluasinya kepada Dewan Komisaris. | <p><i>The position of the Risk Monitoring Committee based on the Risk Monitoring Committee Guidelines and Work Procedures is as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The Risk Monitoring Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners and is directly responsible to the Board of Commissioners.</i> 2. <i>The Risk Monitoring Committee works collectively and is chaired by an Independent Commissioner.</i> 3. <i>The Risk Monitoring Committee must report its evaluation results to the Board of Commissioners.</i> |
|--|--|

Rapat Komite Pemantau Risiko *Risk Monitoring Committee Meeting*

- | | |
|---|--|
| <p>Komite menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari seluruh jumlah anggota termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.</p> | <p><i>The Committee holds meetings as needed or according to the provisions or at least 1 (one) time in 1 (one) month. Committee meetings can only be held if attended by at least 51% of the total members, including one Independent Commissioner and one Independent Party.</i></p> |
|---|--|

Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Committee meeting decisions are taken based on deliberation to reach a consensus. If a review for agreement does not occur, the decision is made based on the majority vote. The results of the Committee meeting must be recorded in the minutes of the forum and adequately documented. Dissenting opinions at the Committee meeting must be clearly stated in the meeting minutes, along with the reasons for the difference of opinion.

Sepanjang tahun 2023 Komite Pemantau Risiko melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. Berikut disampaikan frekuensi dan kehadiran Komite Pemantau Risiko pada rapat serta risalah rapat.

Throughout 2023 the Risk Monitoring Committee held a meeting 12 (twelve) times. The following is the frequency and attendance of the Risk Monitoring Committee at meetings and minutes of meetings.

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	AH	AB	CJH	AS	ND	
1	25 Januari 2023 January 25, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Profil Risiko Desember 2022 2. Key Issues Risk - Otoritas Jasa Keuangan Review 3. Key Issues Risk - Desember 2022 4. Profil Risiko Kredit, Laporan Pemantauan Portofolio kredit per bulan 5. NPL Ratio Per Sektor Ekonomi, Per Produk dan Per Cabang 6. Profil Risiko Likuiditas, Laporan Pemantauan Likuiditas Harian 7. Profil Risiko Pasar 8. Laporan Pemantauan Kecukupan permodalan bank (CAR) per bulan 9. Laporan Pencapaian Indikator strategik bank 10. Laporan Pemantauan Permodalan, Profitabilitas, Likuiditas dan lainnya sesuai ketentuan regulator 11. Laporan persentase Jumlah Keluhan Nasabah Bulanan 12. Laporan Pemantauan Loan Review Division 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risk Profile Report December 2022 2. Key Issues Risk – Otoritas Jasa Keuangan Review 3. Key Issues Risk - December 2022 4. Credit Risk Profile, Monthly Credit Portfolio Monitoring Report 5. NPL Ratio Per Economic Sector, Per Product and Per Branch 6. Liquidity Risk Profile, Daily Liquidity Monitoring Report 7. Market Risk Profile 8. Monthly bank capital adequacy (CAR) monitoring report. 9. Report on the achievement of bank strategic indicators 10. Monitoring Reports on Capital, Profitability, Liquidity and others in accordance with regulatory provisions 11. Report on percentage of the number of monthly customer complaints 12. Monitoring Report on Loan Review Division 	1	1	0	1	1
2	21 Februari 2023 February 21, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Profil Risiko Januari 2023 2. Key Issues Risk - Januari 2023 3. Profil Risiko Kredit, Laporan Pemantauan Pergerakan Portofolio kredit Bulanan 4. NPL Ratio Per Sektor Ekonomi, Per Produk dan Per Cabang 5. Profil Risiko Likuiditas, Laporan Pemantauan Likuiditas Harian 6. Profil Risiko Pasar 7. Laporan Pemantauan Kecukupan permodalan bank (CAR) per bulan 8. Laporan Pencapaian Indikator strategik bank 9. Laporan Pemantauan Permodalan, Profitabilitas, Likuiditas dan lainnya sesuai ketentuan regulator 10. Laporan persentase Jumlah Keluhan Nasabah Bulanan 11. Laporan Pemantauan Loan Review Division 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risk Profile Report January 2023 2. Key Issues Risk - January 2023 3. Credit Risk Profile, Credit Portfolio Movement Monitoring Report Monthly 4. NPL Ratio Per Economic Sector, Per Product and Per Branch 5. Liquidity Risk Profile, Daily Liquidity Monitoring Report 6. Market Risk Profile 7. Monthly bank capital adequacy (CAR) monitoring report. 8. Report on the achievement of bank strategic indicators 9. Monitoring Reports on Capital, Profitability, Liquidity and others in accordance with regulatory provisions 10. Report on percentage of the number of monthly customer complaints 11. Monitoring Report on Loan Review Division 	1	1	1	1	1

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	AH	AB	CJH	AS	ND	
3	21 Maret 2022 March 21, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Profil Risiko Februari 2023 2. Key Issues Risk - Februari 2023 3. Profil Risiko Kredit, Laporan Pemantauan Pergerakan Portofolio kredit Bulanan 4. NPL Ratio Per Sektor Ekonomi, Per Produk dan Per Cabang 5. Profil Risiko Likuiditas, Laporan Pemantauan Likuiditas Harian 6. Profil Risiko Pasar 7. Laporan Pemantauan Kecukupan permodalan bank (CAR) per bulan 8. Laporan Pencapaian Indikator strategik bank 9. Laporan Pemantauan Permodalan, Profitabilitas, Likuiditas dan lainnya sesuai ketentuan regulator 10. Laporan persentase Jumlah Keluhan Nasabah Bulanan, Laporan Ilustrasi sebab utama kejadian risiko operasional 11. Laporan Pemantauan Loan Review Division 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risk Profile Report February 2023 2. Key Issues Risk - February 2023 3. Credit Risk Profile, Credit Portfolio Movement Monitoring Report Monthly 4. NPL Ratio Per Economic Sector, Per Product and Per Branch 5. Liquidity Risk Profile, Daily Liquidity Monitoring Report 6. Market Risk Profile 7. Monthly bank capital adequacy (CAR) monitoring report. 8. Report on the achievement of bank strategic indicators 9. Monitoring Reports on Capital, Profitability, Liquidity and others in accordance with regulatory provisions 10. Report on percentage of the number of monthly customer complaints 11. Monitoring Report on Loan Review Division 	1	1	1	1	1
4	18 April 2023 April 18, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Profil Risiko Maret 2023 2. Key Issues Risk - Maret 2023 3. Profil Risiko Kredit, Laporan Pemantauan Pergerakan Portofolio kredit Bulanan 4. NPL Ratio Per Sektor Ekonomi, Per Produk dan Per Cabang 5. Profil Risiko Likuiditas, Laporan Pemantauan Likuiditas Harian 6. Profil Risiko Pasar, ilustrasi konfigurasi Neraca, profil suku bunga aktual 7. Laporan pemantauan early warning indikator pasar dan likuiditas. 8. Laporan Pemantauan Kecukupan permodalan bank (CAR) per bulan 9. Laporan Pencapaian Indikator strategik bank 10. Laporan Pemantauan Permodalan, Profitabilitas, Likuiditas dan lainnya sesuai ketentuan regulator 11. Laporan persentase Jumlah Keluhan Nasabah Bulanan 12. Risk external Event, Silicon Valley Bank 13. Laporan Pemantauan Loan Review Division 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risk Profile Report March 2023 2. Key Issues Risk - March 2023 3. Credit Risk Profile, Credit Portfolio Movement Monitoring Report Monthly 4. NPL Ratio Per Economic Sector, Per Product and Per Branch 5. Liquidity Risk Profile, Daily Liquidity Monitoring Report 6. Market Risk Profile, illustration of Balance Sheet configuration, actual interest rate profile 7. Early warning monitoring report on market indicators and liquidity 8. Monthly bank capital adequacy (CAR) monitoring report. 9. Report on the achievement of bank strategic indicators 10. Monitoring Reports on Capital, Profitability, Liquidity and others in accordance with regulatory provisions 11. Report on percentage of the number of monthly customer complaints 12. Risk external Event, Silicon Valley Bank 13. Monitoring Report on Loan Review Division 	1	1	1	1	1



No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	AH	AB	CJH	AS	ND	
5	24 Mei 2023 May 24, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Profil Risiko April 2023 2. Key Issues Risk - April 2023 3. Profil Risiko Kredit, Laporan Pemantauan Pergerakan Portofolio kredit Bulanan 4. NPL Ratio Per Sektor Ekonomi, Per Produk dan Per Cabang 5. Konfigurasi <i>overdue</i> debitur berdasarkan portofolio 6. Profil Risiko Likuiditas, Laporan Pemantauan Likuiditas Harian 7. Profil Risiko Pasar 8. Laporan Pemantauan Kecukupan permodalan bank (CAR) per bulan 9. Laporan Pencapaian Indikator strategik bank 10. Laporan Pemantauan Permodalan, Profitabilitas, Likuiditas dan lainnya sesuai ketentuan regulator 11. Laporan persentase Jumlah Keluhan Nasabah Bulanan 12. Rencana <i>Flow Process Risk Control Self Assessment</i> (RCSA) dan <i>timeline</i> 13. Ilustrasi Metode penanganan <i>ransomware</i>, jenis serangan Siber 14. <i>Timeline</i> mitigasi risiko operasional serangan <i>cyber</i> 15. Laporan Pemantauan <i>Loan Review Division</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risk Profile Report April 2023 2. Key Issues Risk - April 2023 3. Credit Risk Profile, Credit Portfolio Movement Monitoring Report Monthly 4. NPL Ratio Per Economic Sector, Per Product and Per Branch 5. Debtor <i>overdue</i> configuration based on portfolio 6. Liquidity Risk Profile, Daily Liquidity Monitoring Report 7. Market Risk Profile 8. Monthly bank capital adequacy (CAR) monitoring report. 9. Report on the achievement of bank strategic indicators 10. Monitoring Reports on Capital, Profitability, Liquidity and others in accordance with regulatory provisions 11. Report on percentage of the number of monthly customer complaints 12. Risk Control Self Assessment (RCSA) Flow Process Plan and timeline 13. Illustration of methods for dealing with <i>ransomware</i>, types of cyber attacks 14. Timeline for operational risk mitigation of cyber attacks 15. Monitoring Report on Loan Review Division 	1	1	1	1	1
6	20 Juni 2023 June 20, 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Profil Risiko Mei 2023 2. Key Issues Risk - Mei 2023 3. Profil Risiko Kredit, Laporan Pemantauan Pergerakan Portofolio kredit Bulanan 4. NPL Ratio Per Sektor Ekonomi, Per Produk dan Per Cabang 5. Profil Risiko Likuiditas, Laporan Pemantauan Likuiditas Harian 6. Profil Risiko Pasar 7. Laporan Pemantauan Kecukupan permodalan bank (CAR) per bulan 8. Laporan Pencapaian Indikator strategik bank 9. Laporan Pemantauan Permodalan, Profitabilitas, Likuiditas dan lainnya sesuai ketentuan regulator 10. Laporan persentase Jumlah Keluhan Nasabah Bulanan 11. Laporan Hasil <i>Stresstest</i> Triwulan I 2023 12. <i>Detail Key Risk</i> Indikator Risiko Kredit, Likuiditas, Pasar dan Operasional 13. Laporan Pemantauan <i>Loan Review Division</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risk Profile Report May 2023 2. Key Issues Risk - May 2023 3. Credit Risk Profile, Credit Portfolio Movement Monitoring Report Monthly 4. NPL Ratio Per Economic Sector, Per Product and Per Branch 5. Liquidity Risk Profile, Daily Liquidity Monitoring Report 6. Market Risk Profile 7. Monthly bank capital adequacy (CAR) monitoring report. 8. Report on the achievement of bank strategic indicators 9. Monitoring Reports on Capital, Profitability, Liquidity and others in accordance with regulatory provisions 10. Report on percentage of the number of monthly customer complaints 11. First Quarter 2023 <i>Stresstest</i> Results Report 12. Details of Key Risk Indicators on Credit Risk, Liquidity, Market and Operational 13. Monitoring Report on Loan Review Division 	1	1	1	1	1

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	AH	AB	CJH	AS	ND	
7	25 Juli 2023 July 25, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Profil Risiko Juni 2023 Key Issues Risk - Juni 2023 Profil Risiko Kredit, Laporan Pemantauan Pergerakan Portofolio kredit Bulanan NPL Ratio Per Sektor Ekonomi, Per Produk dan Per Cabang Profil Risiko Kredit Profil Risiko Likuiditas, Laporan Pemantauan Likuiditas Harian Profil Risiko Pasar Laporan Pemantauan Kecukupan permodalan bank (CAR) per bulan Laporan Pencapaian Indikator stratejik bank Laporan Pemantauan Permodalan, Profitabilitas, Likuiditas dan lainnya sesuai ketentuan regulator Risiko TI & Keamanan Siber Laporan persentase Jumlah Keluhan Nasabah Bulanan Laporan Pemantauan Loan Review Division 	<ol style="list-style-type: none"> Risk Profile Report June 2023 Key Issues Risk - June 2023 Credit Risk Profile, Credit Portfolio Movement Monitoring Report Monthly NPL Ratio Per Economic Sector, Per Product and Per Branch Credit Risk Profile Liquidity Risk Profile, Daily Liquidity Monitoring Report Market Risk Profile Monthly bank capital adequacy (CAR) monitoring report. Report on the achievement of bank strategic indicators Monitoring Reports on Capital, Profitability, Liquidity and others in accordance with regulatory provisions IT & Cyber Security Risks Report on percentage of the number of monthly customer complaints Monitoring Report on Loan Review Division 	1	1	1	1	1
8	22 Agustus 2023 August 22, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Profil Risiko Juli 2023 Key Issues Risk - Juli 2023 Profil Risiko Kredit, Laporan Pemantauan Pergerakan Portofolio kredit Bulanan NPL Ratio Per Sektor Ekonomi, Per Produk dan Per Cabang Profil Risiko Likuiditas, Laporan Pemantauan Likuiditas Harian Profil Risiko Pasar Laporan Pemantauan Kecukupan permodalan bank (CAR) per bulan Laporan Pencapaian Indikator stratejik bank Laporan Pemantauan Permodalan, Profitabilitas, Likuiditas dan lainnya sesuai ketentuan regulator Laporan persentase Jumlah Keluhan Nasabah Bulanan Konfigurasi NSFR & NIM per 31 Juli 2023, NSFR - Sudut Pandang ASF dan RSF Aktual & Proyeksi I/S Bank (berbasis sederhana) Konfigurasi B/S Bank & Profil Suku Bunga Aktual Rasio Kecukupan Modal Pemantauan Pelanggan, Proses Pemantauan PKPU, Pemantauan Perhatian Khusus Laporan Pemantauan Loan Review Division 	<ol style="list-style-type: none"> Risk Profile Report July 2023 Key Issues Risk - July 2023 Credit Risk Profile, Credit Portfolio Movement Monitoring Report Monthly NPL Ratio Per Economic Sector, Per Product and Per Branch Liquidity Risk Profile, Daily Liquidity Monitoring Report Market Risk Profile Monthly bank capital adequacy (CAR) monitoring report. Report on the achievement of bank strategic indicators Monitoring Reports on Capital, Profitability, Liquidity and others in accordance with regulatory provisions Report on percentage of the number of monthly customer complaints NSFR & NIM Configuration as of July 31, 2023, NSFR - ASF and RSF Viewpoint Bank I/S Actual & Projections (simple basis) Bank B/S Configuration & Actual Interest Rate Profile Capital Adequacy Ratio Customer Monitoring, PKPU Monitoring Process, Special Attention Monitoring Monitoring Report on Loan Review Division 	1	1	1	1	1



No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	AH	AB	CJH	AS	ND	
9	21 September 2023 September 21, 2023	1. Laporan Profil Risiko Agustus 2023	1. Risk Profile Report August 2023	1	1	1	1	1
		2. Key Issues Risk - Agustus 2023	2. Key Issues Risk - August 2023					
		3. Profil Risiko Kredit, Laporan Pemantauan Pergerakan Portofolio kredit Bulanan	3. Credit Risk Profile, Credit Portfolio Movement Monitoring Report Monthly					
		4. NPL Ratio Per Sektor Ekonomi, Per Produk dan Per Cabang	4. NPL Ratio Per Economic Sector, Per Product and Per Branch					
		5. Profil Risiko Likuiditas, Laporan Pemantauan Likuiditas Harian	5. Liquidity Risk Profile, Daily Liquidity Monitoring Report					
		6. Profil Risiko Pasar	6. Market Risk Profile					
		7. Laporan Pemantauan Kecukupan permodalan bank (CAR) per bulan	7. Monthly bank capital adequacy (CAR) monitoring report.					
		8. Laporan Pencapaian Indikator strategik bank	8. Report on the achievement of bank strategic indicators					
		9. Laporan Pemantauan Permodalan, Profitabilitas, Likuiditas dan lainnya sesuai ketentuan regulator	9. Monitoring Reports on Capital, Profitability, Liquidity and others in accordance with regulatory provisions					
		10. Laporan persentase Jumlah Keluhan Nasabah Bulanan	10. Report on percentage of the number of monthly customer complaints					
		11. Konfigurasi B/S Bank & Profil Suku Bunga Aktual	11. Bank B/S Configuration & Actual Interest Rate Profile					
		12. Kemajuan Laporan Laba Rugi	12. Progress of Income Statement					
		13. NSFR - Sudut Pandang ASF dan RSF	13. NSFR - ASF and RSF Viewpoints					
		14. IRRBB - Sudut Pandang yang Disederhanakan	14. IRRBB - Simplified Point of View					
		15. Risiko TI & Keamanan Siber	15. IT & Cyber Security Risks					
		16. Laporan Pemantauan Loan Review Division	16. Monitoring Report on Loan Review Division					
10	24 Oktober 2023 October 24, 2023	1. Laporan Profil Risiko September 2023	1. Risk Profile Report September 2023	1	1	1	1	1
		2. Key Issues Risk - September 2023	2. Key Issues Risk - September 2023					
		3. Profil Risiko Kredit, Laporan Pemantauan Pergerakan Portofolio kredit Bulanan	3. Credit Risk Profile, Credit Portfolio Movement Monitoring Report Monthly					
		4. NPL Ratio Per Sektor Ekonomi, Per Produk dan Per Cabang	4. NPL Ratio Per Economic Sector, Per Product and Per Branch					
		5. Profil Risiko Likuiditas, Laporan Pemantauan Likuiditas Harian	5. Liquidity Risk Profile, Daily Liquidity Monitoring Report					
		6. Profil Risiko Pasar	6. Market Risk Profile					
		7. Laporan Pemantauan Kecukupan permodalan bank (CAR) per bulan	7. Monthly bank capital adequacy (CAR) monitoring report.					
		8. Laporan Pencapaian Indikator strategik bank	8. Report on the achievement of bank strategic indicators					
		9. Laporan Pemantauan Permodalan, Profitabilitas, Likuiditas dan lainnya sesuai ketentuan regulator	9. Monitoring Reports on Capital, Profitability, Liquidity and others in accordance with regulatory provisions					
		10. Laporan persentase Jumlah Keluhan Nasabah Bulanan	10. Report on percentage of the number of monthly customer complaints					
		11. Detail Key Risk Indikator Risiko Kredit, Likuiditas, Pasar dan Operasional	11. Details of Key Risk Indicators on Credit Risk, Liquidity, Market and Operational					
		12. Laporan Pemantauan Loan Review Division	12. Monitoring Report on Loan Review Division					

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	AH	AB	CJH	AS	ND	
11	25 November 2023 November 25, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Profil Risiko Mei 2023 Key Issues Risk - Mei 2023 Profil Risiko Kredit, Laporan Pemantauan Pergerakan Portofolio kredit Bulanan NPL Ratio Per Sektor Ekonomi, Per Produk dan Per Cabang Profil Risiko Likuiditas, Laporan Pemantauan Likuiditas Harian Profil Risiko Pasar Laporan Pemantauan Kecukupan permodalan bank (CAR) per bulan Laporan Pencapaian Indikator strategik bank Laporan Pemantauan Permodalan, Profitabilitas, Likuiditas dan lainnya sesuai ketentuan regulator Prediksi Tingkat Suku Bunga Akhir Tahun, Indikator Ekonomi Makro Laporan persentase Jumlah Keluhan Nasabah Bulanan Detail Key Risk Indikator Risiko Kredit, Likuiditas, Pasar dan Operasional Laporan Pemantauan Loan Review Division 	<ol style="list-style-type: none"> Risk Profile Report May 2023 Key Issues Risk - May 2023 Credit Risk Profile, Credit Portfolio Movement Monitoring Report Monthly NPL Ratio Per Economic Sector, Per Product and Per Branch Liquidity Risk Profile, Daily Liquidity Monitoring Report Market Risk Profile Monthly bank capital adequacy (CAR) monitoring report. Report on the achievement of bank strategic indicators Monitoring Reports on Capital, Profitability, Liquidity and others in accordance with regulatory provisions End of Year Interest Rate Predictions, Macroeconomic Indicators Report on percentage of the number of monthly customer complaints Details of Key Risk Indicators on Credit Risk, Liquidity, Market and Operational Monitoring Report on Loan Review Division 	1	1	1	1	1
12	26 Desember 2023 December 26, 2023	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Profil Risiko Mei 2023 Key Issues Risk - Mei 2023 Profil Risiko Kredit, Laporan Pemantauan Pergerakan Portofolio kredit Bulanan NPL Ratio Per Sektor Ekonomi, Per Produk dan Per Cabang Profil Risiko Likuiditas, Laporan Pemantauan Likuiditas Harian Profil Risiko Pasar Laporan Pemantauan Kecukupan permodalan bank (CAR) per bulan Laporan Pencapaian Indikator strategik bank Laporan Pemantauan Permodalan, Profitabilitas, Likuiditas dan lainnya sesuai ketentuan regulator Laporan persentase Jumlah Keluhan Nasabah Bulanan Pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko Detail Key Risk Indikator Risiko Kredit, Likuiditas, Pasar dan Operasional Laporan Pemantauan Loan Review Division 	<ol style="list-style-type: none"> Risk Profile Report May 2023 Key Issues Risk - May 2023 Credit Risk Profile, Credit Portfolio Movement Monitoring Report Monthly NPL Ratio Per Economic Sector, Per Product and Per Branch Liquidity Risk Profile, Daily Liquidity Monitoring Report Market Risk Profile Monthly bank capital adequacy (CAR) monitoring report. Report on the achievement of bank strategic indicators Monitoring Reports on Capital, Profitability, Liquidity and others in accordance with regulatory provisions Report on percentage of the number of monthly customer complaints Update of the Risk Monitoring Committee Guidelines and Work Procedures Details of Key Risk Indicators on Credit Risk, Liquidity, Market and Operational Monitoring Report on Loan Review Division 	1	1	1	1	1
Jumlah Rapat Number of Meetings			12	12	12	12	12	
Jumlah Kehadiran Total of Attendance			12	12	11	12	12	
% Kehadiran % Attendance			100	100	92	100	100	

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2023 *Risk Monitoring Committee Duties Implementation Report in 2023*

Selama tahun 2023 Komite Pemantau Risiko telah melakukan kegiatan sebagaimana tugas dan fungsi yang tercantum dalam Piagam Komite Pemantau Risiko yang dimiliki BWS, sebagai berikut:

1. *Review* dan evaluasi laporan-laporan terkait manajemen risiko, meliputi Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan *Stress Test*.
2. *Review* usulan reorganisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko di BWS.
3. *Review* dan evaluasi hasil pemeriksaan OJK tahun 2022.
4. Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur terkait Produk dan/atau Aktivitas Baru serta pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
5. *Review* usulan hapus buku kredit.

During 2023 the Risk Monitoring Committee has carried out activities according to the duties and functions listed in the Risk Monitoring Committee Charter owned by BWS, as follows:

1. *Review and evaluate reports related to risk management, including Risk Profile Reports, Bank Soundness Level Reports, Stress Test Reports.*
2. *Review the proposed reorganization of the Risk Management Work Unit at BWS.*
3. *Review and evaluate the results of the 2022 OJK inspection.*
4. *Evaluation of Risk Management Policies, Procedures related to New Products and/or Activities and implementation of the duties of the Risk Management Committee.*
5. *Review the proposal to write off credit books.*

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko *Risk Monitoring Committee Competency Development*

Untuk menunjang Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank memberikan kesempatan kepada anggota Komite Pemantau Risiko untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh internal Bank atau yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.

To support the Risk Monitoring Committee in carrying out its duties and responsibilities, the Bank provides opportunities for members of the Risk Monitoring Committee to take part in training and competency development programs, either held internally by the Bank or organized by external parties.

Adapun program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Komite Pemantau Risiko BWS tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The competency development programs participated in by the BWS Risk Monitoring Committee in 2023 are as follows:

Nama Peserta <i>Participant Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Program Pengembangan Kompetensi <i>Competency Development Program</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Waktu dan Tempat <i>Time and Place</i>
Adi Haryadi	Komisaris <i>Commissioner</i>	Manajemen Risiko Operasional di Perbankan <i>Operational Risk Management in Banking</i>	Virtual	Efektifpro 6 Januari 2023 <i>Efektifpro January 6, 2023</i>
		Rapat Bidang Pengembangan Kajian Hukum & Peraturan <i>Legal & Regulatory Studies Development Sector Meeting</i>	PERBANAS	Zoom 16 Januari 2023 <i>Zoom January 16, 2023</i>
		Peluang, Harapan dan Tantangan Perekonomian Nasional <i>Opportunities, Hopes and Challenges for the National Economy</i>	Forum Komunikasi DKP <i>DKP Communication Forum</i>	Virtual 10 Oktober 2023 <i>Virtual October 10, 2023</i>
Arief Budiman	Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i>	Manajemen Risiko Operasional di Perbankan <i>Operational Risk Management in Banking</i>	Virtual	Efektifpro 6 Januari 2023 <i>Efektifpro January 6, 2023</i>
		Rapat Bidang Pengembangan Kajian Hukum & Peraturan <i>Legal & Regulatory Studies Development Sector Meeting</i>	PERBANAS	Zoom 16 Januari 2023 <i>Zoom January 16, 2023</i>
		Workshop BOD-BOC <i>BOD-BOC Workshop</i>	Bank Woori Saudara	Virtual 25 Oktober 2023 <i>Virtual October 25, 2023</i>
Choi Jung Hoon	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Rapat Bidang Pengembangan Kajian Hukum & Peraturan <i>Legal & Regulatory Studies Development Sector Meeting</i>	PERBANAS	Zoom 16 Januari 2023 <i>Zoom January 16, 2023</i>
		Refreshment Risk Management <i>Refreshment Risk Management</i>	Efektifpro	Jakarta, KC The Energy 15 Desember 2023 <i>Jakarta, KC The Energy December 15, 2023</i>
Nanny Dewi Tanzil	Konsultan <i>Consultant</i>	Peluang, Harapan dan Tantangan Perekonomian Nasional <i>Opportunities, Hopes and Challenges for the National Economy</i>	Forum Komunikasi DKP <i>DKP Communication Forum</i>	Virtual 10 Oktober 2023 <i>Virtual October 10, 2023</i>

Remunerasi *Remuneration*

Besarnya honorarium untuk anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan kebijakan Bank, dan dibebankan kepada anggaran Bank. Dalam realisasinya, besaran remunerasi disesuaikan sesuai dengan perkembangan usaha serta kebijakan Bank.

The amount of honorarium for Risk Monitoring Committee members who are not members of the Board of Commissioners is determined based on Bank policy. It is charged to the Bank's budget. In practice, remuneration is adjusted according to business development and Bank policies.



Organ Pendukung Direksi

Board of Directors Support Organizations

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk organ yang bersifat struktural maupun fungsional untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Bank.

Hingga akhir tahun Direksi telah membentuk organ yang bersifat fungsional berupa komite dan gugus tugas, yaitu Komite Kode Etik, Komite Manajemen Risiko, Komite *Asset Liability Management* (ALMA), Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Pembelian Barang dan Jasa, Komite Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Gugus Tugas *Anti Fraud*.

Selain itu, Direksi juga telah membentuk organ yang bersifat struktural, yaitu Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors may form structural or functional organs to assist the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors in managing the Bank.

By the end of the year, the Board of Directors had formed functional organs in the form of committees and task forces, namely the Code of Conduct Committee, Risk Management Committee, Asset Liability Management Committee (ALMA), Information Technology Committee, Credit Policy Committee, Credit Committee, Procurement Committee, Anti-Money Laundering & Combating Funding of Terrorism Committee and Anti-Fraud Task Force.

In addition, the Board of Directors has also formed structural organs, namely the Corporate Secretary, Internal Audit Work Unit, Risk Management Work Unit, and Compliance Work Unit.



Komite di Bawah Direksi

Committee Under the Board of Directors



Komite Kode Etik

Code of Conduct Committee

Komite Kode Etik merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam hal pemberian sanksi dan/atau ganti rugi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran ketentuan. Penunjukan anggota Komite Kode Etik ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 045/KEP-DIR/A-04/VI/20 tentang Komite Kode Etik tertanggal 18 Juni 2020.

The Code of Conduct Committee is a committee whose job is to assist the Board of Directors in imposing sanctions and/or compensation to employees who violate the provisions. The appointment of the Code of Conduct Committee members is determined through the Board of Directors Decree Number 045/KEP-DIR/A-04/VI/20 concerning the Code of Conduct Committee dated June 18, 2020.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kode Etik

Structure and Membership of the Code of Conduct Committee

Ketua Chairman	Direktur yang membawahi <i>Human Capital</i> Director in charge of <i>Human Capital</i>
Anggota Tetap Permanent Member	1. Direktur yang membawahi Risiko & Kepatuhan 2. Direktur yang membawahi <i>Corporate Legal</i> 3. Kepala Divisi <i>Internal Audit</i> 1. Director in charge of Risk & Compliance 2. Director in charge of <i>Corporate Legal</i> 3. Head of <i>Internal Audit Division</i>
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	Direktur Terkait Related Director
Sekretaris Secretary	Kepala Divisi <i>Human Capital</i> Head of <i>Human Capital Division</i>

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kode Etik

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Kode Etik memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- Melakukan *review* dan mengajukan usulan perubahan atas Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Sanksi dan Pengenaan Ganti Rugi.
- Melakukan *monitoring* terkait penerapan Sanksi dan Ganti Rugi.
- Menetapkan pemberatan Sanksi atau peringanan Sanksi.
- Menetapkan pengenaan Ganti Rugi dan besarnya.

Duties and Responsibilities of the Code of Conduct Committee

In carrying out its functions, the Code of Conduct Committee has the following duties and responsibilities:

- Review and propose changes to the Policy and Guidelines for implementing Sanctions and Imposition of Compensation.*
- Monitor the implementation of Sanctions and Compensation.*
- Determine the aggravation of Sanctions or the reduction of Sanctions.*
- Determine the imposition of Compensation and the amount.*

- | | |
|---|--|
| <p>5. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait peneraan Sanksi Kekaryawan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penundaan promosi dalam kurun waktu 1 tahun periode penilaian Penurunan jabatan dan/atau grade Penurunan gaji pokok maksimal tidak melebihi 50% (lima puluh persen) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) | <p>5. Provide recommendations to the Board of Directors regarding the imposition of Employment Sanctions, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> Postponement of promotions within 1 year of the assessment period Demotion and/or grade The maximum decrease in basic salary does not exceed 50% (fifty percent) Termination of Employment (PHK) |
|---|--|

Pelaksanaan Tugas Komite Kode Etik Tahun 2023

- Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Divisi Audit Internal
- Penetapan Sanksi Karyawan
- Penetapan Permohonan Banding atas sanksi karyawan

Implementation of Duties of the Code of Conduct Committee in 2023

- Discussion of the Internal Audit Division's Inspection Report
- Determination of Employee Sanctions
- Determination of Appeal Application for employee sanctions

Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee

Komite Manajemen Risiko merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memberikan informasi tentang risiko yang dihadapi BWS melalui laporan profil risiko agar Direksi dapat menentukan mitigasi risiko yang dapat diterapkan. Penunjukan anggota Komite Manajemen Risiko ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 080/KEP-DIR/A-05/IX/2020 tertanggal 25 September 2020.

The Risk Management Committee is tasked with assisting the Board of Directors in providing information about the risks faced by BWS through risk profile reports so that the Board of Directors can determine which risk mitigation can be applied. The Risk Management Committee members' appointment is determined by the Board of Directors Decree Number 080/KEP-DIR/A-05/IX/2020 dated September 25, 2020.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee Structure and Membership

Ketua Chairman	Direktur Manajemen Risiko/Kepatuhan Director of Risk Management/Compliance
Anggota Tetap Permanent Member	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Divisi Manajemen Risiko Kepala Divisi Kepatuhan Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern <ol style="list-style-type: none"> Head of Risk Management Division Head of Compliance Division Head of Internal Audit Work Unit Division
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	Pejabat Eksekutif Executive Officer

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan manajemen risiko serta setiap perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka kerja manajemen risiko serta kemungkinan rencana untuk mengantisipasi terjadinya kondisi abnormal.
2. Perbaiki proses manajemen risiko secara teratur serta insidental sebagai akibat dari perubahan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi kecukupan modal Bank, profil risiko Bank, dan penerapan Manajemen Risiko secara efektif berdasarkan hasil evaluasi.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Tahun 2023

1. *Review* dan evaluasi laporan-laporan terkait manajemen risiko, meliputi Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank dan Laporan *Stress Test*;
2. *Review* dan evaluasi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022;
3. Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur terkait Produk dan/atau Aktivitas Baru serta pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko;
4. *Review* usulan hapus buku kredit.

Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee

In carrying out its functions, the Risk Management Committee has the following duties and responsibilities:

1. *Establish a risk management policy and any changes thereto, including the Risk Management strategy, the level of risk taken and risk tolerance, the risk management framework, and possible plans to anticipate any abnormal conditions.*
2. *Improve the risk management process on a regular and incidental basis as a result of changes in external and internal conditions that affect the Bank's capital adequacy, the Bank's risk profile, and the implementation of effective Risk Management based on evaluation results.*

Implementation of Duties of the Risk Management Committee in 2023

1. *Review and evaluate reports related to risk management, including Risk Profile Report, Bank Health Level Report and Stress Test Report;*
2. *Review and evaluation of Otoritas Jasa Keuangan inspection results in 2022;*
3. *Evaluation of Risk Management Policies, Procedures related to New Products and/or Activities as well as implementation of the duties of the Risk Management Committee;*
4. *Review the proposed credit write-off.*

Komite Asset Liability Management (ALMA) Asset Liability Management Committee (ALMA)

Komite *Asset Liability Management* (ALMA) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan aset dan liabilitas Bank, penetapan suku bunga dan likuiditas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas Bank. Penunjukan anggota Komite ALMA ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 020/KEP-DIR/A-03/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020.

The Asset Liability Management Committee (ALMA) is a committee tasked with assisting the Board of Directors in carrying out the function of determining the strategy for managing the Bank's assets and liabilities, determining interest rates and liquidity, as well as other matters related to managing the Bank's assets and liabilities. The appointment of members of the ALMA Committee is stipulated by the Board of Directors Decree Number 020/KEP-DIR/A-03/III/2020 dated March 20, 2020.

Struktur dan Keanggotaan Komite ALMA

ALMA Committee Structure and Membership

Ketua <i>Chairman</i>	Direktur yang membawahi Tresuri <i>Director in charge of Treasury</i>
Wakil Ketua <i>Vice Chairman</i>	Direktur yang membawahi Kredit dan Pendanaan <i>Director in charge of Credit and Funding</i>
Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh anggota Direksi, kecuali Presiden Direktur 2. Kepala Divisi yang membawahi Perencanaan Strategi & Keuangan 3. Kepala Divisi yang membawahi Tresuri 4. Kepala Divisi yang membawahi <i>Funding</i> 5. Kepala Divisi yang membawahi Kredit 6. Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Kredit 7. Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Risiko <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>All members of the Board of Directors, except the President Director</i> 2. <i>Head of Division in charge of Strategic & Financial Planning</i> 3. <i>Head of Division in charge of Treasury</i> 4. <i>Head of Division in charge of Funding</i> 5. <i>Head of Division in charge of Credit</i> 6. <i>Head of Division in charge of Credit Management</i> 7. <i>Head of Division in charge of Risk Management</i>
Sekretaris <i>Secretary</i>	Divisi yang membawahi Manajemen Risiko <i>Division in charge of Risk Management</i>

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALMA

Dalam menjalankan fungsinya, Komite ALMA memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan, kaji ulang dan modifikasi strategi ALMA.
2. Pelaksanaan evaluasi (identifikasi & pengukuran), pemantauan dan pengendalian pada risiko suku bunga Bank dan strategi ALMA guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko suku bunga.
3. Pelaksanaan kaji ulang (identifikasi & pengukuran), pemantauan dan pengendalian pada penetapan harga (*pricing*) aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Bank.
4. Pelaksanaan kaji ulang deviasi antara hasil aktual dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank.
5. Melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi dari butir 2 dan 3 tersebut di atas.
6. Penyampaian informasi kepada Direksi (sistem informasi *management*) mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.
7. Melakukan *stress testing* dengan menggunakan skenario yang bersifat historis, skenario yang bersifat spesifik dan skenario pada pasar (*general market stress scenario*).

ALMA Committee Duties and Responsibilities

In carrying out its functions, the ALMA Committee has the following duties and responsibilities:

1. *Development, review, and modification of the ALMA strategy.*
2. *Implementation of evaluation (identification & measurement), monitoring, and control of the Bank's interest rate risk and ALMA strategy to ensure that the results of the Bank's risktaking position are consistent in managing interest rate risk.*
3. *Implementation of reviews (identification & measurement), monitoring and controlling pricing of assets and liabilities to ensure that the pricing can optimize the results of investing funds, minimize the cost of funds and maintain the Bank's balance sheet structure.*
4. *Review the deviation between the actual results and the Bank's projected budget and business plan.*
5. *Make policy and strategy adjustments based on the evaluation results from points 2 and 3 mentioned above.*
6. *Submission of information to the Board of Directors (management information system) regarding any developments in related rules and regulations that affect ALMA's strategy and policies.*
7. *Conduct stress testing using historical, specific, and market scenarios (the general market stress scenario).*

Pelaksanaan Tugas Komite ALMA Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023 Komite ALMA telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

1. Kondisi makro ekonomi di Indonesia dan luar negeri.
2. Struktur dana pihak ketiga.
3. Pembahasan biaya dana (*Cost of Fund*).
4. Pemenuhan rasio likuiditas dan rasio risiko suku bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in Banking Book/IRRBB)*.
5. Rencana penerbitan Sertifikat Deposito Pembiayaan Inklusif (SDPI)/Surat Berharga Pembiayaan Inklusif (SBPI).
6. Surat Berharga yang beredar.
7. Sumber dana potensial.
8. Jadwal pinjaman antar bank yang telah disepakati (*borrowing schedule*).
9. Penawaran pinjaman antar bank dari *counterparty* (*borrowing offer*).

Implementation of ALMA Committee Duties in 2023

Throughout 2023 the ALMA Committee has held 12 (twelve) meetings with the following discussion agenda:

1. *Macro-economic conditions in Indonesia and overseas.*
2. *Structure of third party funds.*
3. *Discussion of the cost of funds.*
4. *Fulfillment of liquidity ratios and Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) ratio.*
5. *Plans to issue Inclusive Financing Deposit Certificates (SDPI)/ Inclusive Financing Securities (SBPI).*
6. *Securities in circulation.*
7. *Potential sources of funds.*
8. *Agreed interbank borrowing schedule.*
9. *Interbank borrowing offer from counterparties.*

Komite Pengarah Teknologi Informasi Information Technology Steering Committee

Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan operasional BWS pada bidang Teknologi Informasi. Penunjukan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 025/KEP-DIR/A-10/VII/2022 tertanggal 20 Juli 2022.

The Information Technology Steering Committee is tasked with assisting the Board of Directors in decision-making related to BWS operational management policies in the Information Technology sector. The appointment of members of the Information Technology Steering Committee is determined by the Board of Directors Decree Number 025/KEP-DIR/A-10/VII/2022 dated July 20, 2022.

Struktur Kedudukan dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi Information Technology Steering Committee Position and Membership Structure

Ketua <i>Chairman</i>	Direktur yang membawahi Satuan Kerja Teknologi Informasi <i>Director in charge of the Information Technology Work Unit</i>
Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur yang membawahi Risiko & Kepatuhan 2. Direktur yang membawahi Bisnis dan/atau Pendukung Operasional 3. Kepala Divisi yang membawahi Satuan Kerja Teknologi Informasi 4. Kepala Divisi yang membawahi Perencanaan Strategi & Keuangan <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Director in charge of Risk & Compliance</i> 2. <i>Director in charge of Business and/or Operational Support</i> 3. <i>Head of Division in charge of the Information Technology Work Unit</i> 4. <i>Head of Division in charge of Strategic & Financial Planning</i>

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rencana Strategis TI yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, Komite Pengarah Teknologi Informasi harus memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas, dan hal-hal lain, yaitu:
 - Peta jalan (*roadmap*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. Peta jalan (*roadmap*) terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*), dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai
 - Sumber daya yang dibutuhkan
 - Manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis TI diterapkan
 - Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI.
 - b. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama, misalnya kebijakan TI yang utama yaitu kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
 - c. Kesesuaian antara proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite Pengarah Teknologi Informasi juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya pergantian *core banking application*, *server production*, dan topologi jaringan.
 - d. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*). Komite Pengarah Teknologi Informasi harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.

Information Technology Steering Committee Duties and Responsibilities

In carrying out its functions, the Information Technology Steering Committee has the following duties and responsibilities:

1. *Provide recommendations to the Board of Directors regarding the following matters:*
 - a. *IT Strategic Plan, which is in line with the strategic plan of the Bank's business activities. In providing recommendations, the Information Technology Steering Committee must pay attention to efficiency, effectiveness, and other matters, namely:*
 - *Roadmap to achieve IT needs that support the Bank's business strategy. The roadmap consists of the current state, future state, and steps to be taken to achieve the desired condition*
 - *Required resources*
 - *Benefits to be obtained during the Strategic Plan IT implemented*
 - *Constraints that may arise in the implementation of the IT Strategic Plan.*
 - b. *Formulation of central IT policies, standards, and procedures, for example, the central IT policies, namely IT security policies and risk management related to the use of IT in the Bank.*
 - c. *Conformity between approved IT projects and IT Strategic Plans. The Information Technology Steering Committee also determines the priority status of critical IT projects that significantly impact the Bank's operational activities, such as changes in core banking applications, server production, and network topologies.*
 - d. *Conformity between the IT project implementation and the agreed project plan (project charter). The Information Technology Steering Committee must complement recommendations with analysis results from major IT projects to enable the Board of Directors to make decisions efficiently.*

- | | |
|--|--|
| <p>e. Kesesuaian antara TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.</p> <p>f. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi Bank pada sektor TI memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.</p> <p>g. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI, misalnya pendeteksian keusangan infrastruktur TI dan pengukuran efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.</p> <p>h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.</p> <p>i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI, Komite Pengarah Teknologi Informasi harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.</p> <p>2. Bertindak sebagai fasilitator antara Pengguna Utama TI dengan Divisi yang membawahi Satuan Kerja Teknologi Informasi dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait bidang TI.</p> | <p>e. <i>Compatibility between IT and the needs of management information systems and the needs of the Bank's business activities.</i></p> <p>f. <i>The effectiveness of steps in minimizing the risk of the Bank's investment in the IT sector so that the Bank's investment in the IT sector contributes to the achievement of the Bank's business objectives.</i></p> <p>g. <i>Monitoring of IT performance and efforts to improve IT performance, for example, detecting the obsolescence of IT infrastructure and measuring the effectiveness and efficiency of implementing IT security policies.</i></p> <p>h. <i>Efforts to resolve various IT-related problems that cannot be resolved by work units of IT users and organizers in an effective, efficient and timely manner.</i></p> <p>i. <i>Adequacy and allocation of resources owned by the Bank. If the resources owned are inadequate and the Bank will use the services of other parties in implementing IT, the Information Technology Steering Committee must ensure that the Bank has the necessary policies and procedures.</i></p> <p>2. <i>Act as a facilitator between the Main IT Users and the Division in charge of the Information Technology Work Unit to resolve problems related to the IT field.</i></p> |
|--|--|

Pelaksanaan Tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023 Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

1. Pengadaan fungsi *Voice Recorder* atau perekam suara.
2. *Data Loss Prevention (DLP)*.
3. Peningkatan pendapatan Bank melalui produk-produk *Wealth Management*.
4. Rencana pembuatan SOP terkait deteksi serangan *hacker* atau *ransomware*.
5. Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (RPTI).
6. Rencana pengembangan *Security Operation Center*.
7. Kesiapan DRC terkait pengadaan aplikasi *backup*.
8. Relokasi *Data Center (DC)*.

Implementation of Duties of the Information Technology Steering Committee in 2023

Throughout 2023, the Information Technology Steering Committee has held 4 (four) meetings with the following discussion agenda:

1. *Providing Voice Recorder function.*
2. *Data Loss Prevention (DLP).*
3. *Increasing Bank income through Wealth Management products.*
4. *Plan to create SOP related to detecting hacker or ransomware attacks.*
5. *Information Technology Development Plan (RPTI).*
6. *Security Operation Center development plan.*
7. *DRC readiness regarding procurement of backup applications.*
8. *Data Center (DC) Relocation.*

9. Aplikasi Sanction Filter untuk penggunaan transaksi luar negeri SWIFT.
10. Pengadaan Server VMWare.
11. Pengembangan MPN G3 atau *Core Tax Administration System* (CTAS).
12. *WGSS Maintenance Agreement*.
13. Sistem Autentikasi ASABRI.

9. *Sanction Filter application for use of SWIFT foreign transactions.*
10. *VMWare Server Procurement.*
11. *Development of MPN G3 or Core Tax Administration System (CTAS).*
12. *WGSS Maintenance Agreement.*
13. *ASABRI Authentication System.*

Komite Kebijakan Perkreditan *Credit Policy Committee*

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran atau langkah perbaikan. Penunjukan anggota Komite Kebijakan Perkreditan ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 002/KEP-DIR/A-07/III/2022 tertanggal 30 Maret 2022.

Credit Policy Committee is a committee that assists the Board of Directors in formulating policies, supervising policy implementation, monitoring the development and condition of loan portfolios and providing advice or improvement measures. Appointment of Credit Policy Committee members is determined through the Board of Directors Decree Number 002/KEP-DIR/A-07/III/2022 dated March 30, 2022.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Kredit *Structure and Membership of the Credit Policy Committee*

Ketua <i>Chairman</i>	Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Kredit <i>Director in charge of Credit Management Functions</i>
Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur yang membawahkan fungsi Kredit 2. Direktur yang membawahkan fungsi Risiko 3. Kepala Divisi yang melaksanakan fungsi Kredit 4. Kepala Divisi yang melaksanakan fungsi Manajemen Kredit 5. Kepala Divisi yang melaksanakan fungsi Operasional Perkreditan 6. Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko 7. Kepala Satuan Kerja Audit Internal <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Director in charge of Credit Functions</i> 2. <i>Director in charge of Credit Functions</i> 3. <i>Division Head implementing Credit Functions</i> 4. <i>Division Head implementing Credit Management Functions</i> 5. <i>Division Head implementing Credit Operational Functions</i> 6. <i>Risk Management Work Unit Head</i> 7. <i>Internal Audit Work Unit Head</i>
Sekretaris <i>Secretary</i>	Kepala Divisi Loan Review <i>Loan Review Division Head</i>

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Kebijakan Perkreditan (KPB) memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

Functions and Responsibilities of the Credit Policy Committee

In carrying out its functions, the Credit Policy Committee has the following duties and responsibilities:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan KPB, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
 2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPB. Selanjutnya KKP juga melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan KPB.
 3. Memantau dan mengevaluasi:
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus Kredit atau Pembiayaan.
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK.
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan.
 - f. Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB.
 - g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Kredit atau Pembiayaan.
 4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris mengenai:
 - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB.
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam fungsi KKP poin 3.
 5. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan butir 4.
1. *Provide input to the Board of Directors in the preparation of Credit Policy, especially related to the formulation of prudential principles in loan.*
 2. *Supervise that Credit Policy can be applied and implemented consequently and consistently and formulate solutions in the event of obstacles or constraints in the implementation of Credit Policy. Furthermore, Credit Policy Committee also conducts periodic reviews of Credit Policy and provides advice to the Board of Directors in the event of necessary changes or improvements to Credit Policy.*
 3. *Monitor and evaluate:*
 - a. *Development and quality of the loan or financing portfolio comprehensively.*
 - b. *The correctness on the implementation of authority to terminate Loan or Financing.*
 - c. *The correctness on the process of granting, development, and quality of Loan or Financing provided to parties related to the Bank and the debtor with the certain amount.*
 - d. *The correctness on the implementation of LLL provisions.*
 - e. *Adherence to the statutory provisions and other regulations in the implementation of loan or financing.*
 - f. *Non-Performing Loan handling in accordance with the Credit Policy.*
 - g. *The Bank's efforts to meet the adequacy of the allowance for loan write off.*
 4. *Submit a written report periodically to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners regarding:*
 - a. *The results of supervision on the application and implementation of Credit Policy.*
 - b. *The results of monitoring and evaluation on the matters referred to in the Credit Policy Committee function in point 3.*
 5. *Provide suggestions for improvement measures to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners on matters related to point 4.*

Pelaksanaan Tugas Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2023

Selama tahun 2023, Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal memberikan rekomendasi atas pelaksanaan kegiatan perkreditan di BWS.

Implementation of Credit Policy Committee Duties in 2023

During 2023, the Credit Policy Committee has performed its duties well in terms of providing recommendations for the implementation of loan activities at BWS.

Komite Kredit Credit Committee

Komite Kredit merupakan komite yang bertugas membantu Direksi dalam proses pengambilan keputusan atas persetujuan pemberian kredit. Penunjukan anggota Komite Kredit ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 102/KEP-DIR/A-07/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020.

Credit Committee is responsible for assisting the Board of Directors in the decision-making process on the approval of loan granting. The appointment of Credit Committee members is determined by the Board of Directors Decree Number 102/KEP-DIR/A-07/X/20 dated October 26, 2020.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit

Structure and Membership of the Credit Committee

Komite Kredit Direksi Credit Committee for Board of Directors

Anggota Member	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur yang membidangi Korporat 2. Direktur yang membidangi Konsumer 3. Direktur yang membidangi <i>Business Support</i> dan/atau Remedial & SAM 4. Direktur yang membidangi Operasional 5. Kepala Divisi yang membawahi Perencanaan Korporat 6. Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Kredit <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Director in charge of Corporate</i> 2. <i>Director in charge of Consumer</i> 3. <i>Director in charge of Business Support and/or Remedial & SAM</i> 4. <i>Director in charge of Operations</i> 5. <i>Division Head in charge of Corporate Planning</i> 6. <i>Division Head in charge of Credit Management</i>
Anggota Independen Independent Member	Direktur yang membidangi Risiko & Kepatuhan <i>Director in charge of Risk & Compliance</i>
Pemenuhan Kuota Quota Fulfillment	Disetujui sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang anggota <i>Approved by at least 5 (five) members</i>

Komite Kredit Manajemen
Credit Committee for Management

	Kategori A <i>Category A</i>	Kategori B <i>Category B</i>	Kategori C <i>Category C</i>
Anggota <i>Member</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Kredit (Ketua) 3 (tiga) dari 4 (empat) orang <i>Team Leader</i> <i>Head of Division in charge of Credit Management (Chairman)</i> 3 (three) of 4 (four) <i>Team Leaders</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Divisi yang membawahi Kredit Konsumer (Ketua) Kepala Departemen yang menjalankan fungsi Kredit Pensiunan Kepala Departemen yang menjalankan fungsi Kredit Konsumer <i>Division Head in charge of Consumer Loan (Chairman)</i> <i>Department Head in charge of pension loan function</i> <i>Department Head in charge of consumer loan function</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Kredit (Ketua) 3 (tiga) dari 4 (empat) orang <i>Team Leader</i> <i>Head of Division in charge of Credit Management (Chairman)</i> 3 (three) of 4 (four) <i>Team Leaders</i>
Anggota Independen <i>Independent Member</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Departemen yang menjalankan fungsi <i>Corporate Legal</i> Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Risiko & Kepatuhan <i>Department Head in charge of Corporate Legal Functions</i> <i>Division Head in charge of Risk Management & Compliance</i> 		
Pemenuhan Kuota <i>Quota Fulfillment</i>	<ol style="list-style-type: none"> Kategori "A" harus disetujui sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota komite dan ketua komite harus memberikan keputusan. Kategori "B" harus disetujui sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota komite dan ketua komite harus memberikan keputusan. Kategori "C" harus disetujui sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota komite dan ketua komite harus memberikan keputusan. <ol style="list-style-type: none"> <i>Category "A" shall be approved by at least 3 (three) committee members and the chairman of the committee shall give a decision.</i> <i>Category "B" shall be approved by at least 2 (two) committee members and the chairman of the committee shall give a decision.</i> <i>Category "C" shall be approved by at least 3 (three) committee members and the chairman of the committee shall give a decision.</i> 		

Komite Kredit Manajemen (Restrukturisasi)
Credit Committee for Management (Restructuring)

Anggota <i>Member</i>	<ol style="list-style-type: none"> Untuk kredit dengan kolektibilitas 1 & 2 atau masih dikelola oleh Unit Bisnis, Komite disesuaikan dengan tipe kredit "A", "B" atau "C". Kredit dengan Kolektibilitas 3, 4 & 5 <ol style="list-style-type: none"> Kepala Divisi yang membawahi Remedial & SAM (Ketua) Koordinator Wilayah I Koordinator Wilayah II <ol style="list-style-type: none"> <i>For credit with collectability 1 & 2 or still managed by the Business Unit, the Committee is adjusted to the type of credit "A", "B" or "C"</i> <i>Credit with Collectability 3, 4 & 5</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>Head of Division in charge of Remedial & SAM (Chairman)</i> <i>Region I Coordinator</i> <i>Region II Coordinator</i>
Anggota Independen <i>Independent Member</i>	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Departemen yang melaksanakan fungsi <i>Corporate</i> Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Risiko & Kepatuhan <ol style="list-style-type: none"> <i>Head of Department that carries out Corporate Legal functions</i> <i>Head of Division in charge of Risk Management & Compliance</i>
Pemenuhan Kuota <i>Quota Fulfillment</i>	<ol style="list-style-type: none"> Kategori "A" harus disetujui sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota komite dan ketua komite harus memberikan keputusan Kategori "B" harus disetujui sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota komite dan ketua komite harus memberikan keputusan Kredit dengan kolektibilitas 3, 4 & 5 atau kredit yang dikelola oleh Divisi Remedial & SAM harus disetujui sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota komite <ol style="list-style-type: none"> <i>Category "A" must be approved by at least 2 (two) committee members and the committee chairman must make a decision</i> <i>Category "B" must be approved by at least 2 (two) committee members and the committee chairman must make a decision</i> <i>Credit with collectability 3, 4 & 5 or credit managed by the Remedial & SAM Division must be approved by at least 3 (three) committee members</i>

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit *Duties and Responsibilities of the Credit Committee*

Setiap individu yang ditunjuk menjadi pejabat pemutus kredit bersifat independen dalam memberikan pendapat menyetujui atau menolak suatu permohonan kredit. Berkaitan dengan kedudukannya tersebut, anggota pemutus kredit bertanggung jawab untuk:

1. Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
2. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank, Prosedur Perkreditan dan peraturan terkait lainnya.
3. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
4. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.
5. Melaksanakan prinsip/sikap profesionalisme dan memiliki integritas.
6. Mengawasi *watchlist* dan semua pinjaman bermasalah serta memberikan rekomendasi mengenai cara penanganannya.

Pelaksanaan Tugas Komite Kredit Tahun 2023

Selama tahun 2023, Komite Kredit telah melaksanakan tugasnya dengan baik yang ditunjukkan dengan adanya modul/prosedur pemberian persetujuan kredit melalui *core banking system* oleh anggota komite.

Each individual appointed as a Credit Committee is independently in giving an opinion approving or rejecting a loan application. In connection with its position, members of the Credit Committee are responsible for:

1. *Ensure that every granting of loan had meet the general norms of banking and is in accordance with sound loan principles.*
2. *Ensure that the implementation of loan is in accordance with the Bank's Credit Policy, Credit Procedure and other relevant regulations.*
3. *Ensure that the granting of loan has been based on an honest, objective, thorough, and prudence assessment and regardless of the influence of the parties concerned with the loan applicant.*
4. *Believe that the granting of loan can be repaid timely and will not develop into non-performing loans.*
5. *Implement principles/attitudes of professionalism and have integrity.*
6. *Supervise the watchlist and all non-performing loans and provide recommendations on how to handle it.*

Implementation of Credit Committee Duties in 2023

During 2023, the Credit Committee has performed its duties well indicated by the module/procedure of granting loan approval through the core banking system by the committee member user.

Komite Pembelian Barang dan Jasa Procurement Committee

Komite Pembelian Barang dan Jasa dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi dengan tujuan untuk:

1. Membantu Direksi dalam pengelolaan kegiatan Pembelian Barang dan Jasa.
2. Memastikan efektivitas atas aktivitas kegiatan Pembelian Barang dan Jasa.
3. Memastikan pelaksanaan kegiatan Pembelian Barang dan Jasa sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur yang berlaku di BWS.

Procurement Committee is established by and responsible to the Board of Directors with the aim of:

1. *Assist the Board of Directors in the management of goods and services purchase activities.*
2. *Ensure the effectiveness of the Purchase of Goods and Services activities.*
3. *Ensure the implementation of the purchase of goods and services activities in accordance with the applicable policies and procedures in BWS.*

Struktur dan Keanggotaan Komite Pembelian Barang dan Jasa *Structure and Membership of the Procurement Committee*

Anggota Member	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi yang membidangi <i>General Affair</i>; 2. Kepala Divisi yang membidangi Pembukaan Kantor; 3. Kepala Divisi yang membidangi Teknologi Informasi; dan 4. Kepala Divisi yang membidangi Perencanaan Korporasi. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Head of Division in charge of General Affairs;</i> 2. <i>Head of Division in charge of Office Opening;</i> 3. <i>Head of Division in charge of Information Technology; and</i> 4. <i>Head of Division in charge of Corporate Planning.</i>
--------------------------	---

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pembelian Barang dan Jasa

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pembelian Barang dan Jasa memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Membantu Direksi terkait penyusunan Kebijakan, Prosedur, Limit dan Strategi Pembelian Barang dan Jasa.
2. Melakukan evaluasi atas usulan perubahan Kebijakan, Prosedur, Limit dan Strategi Pembelian Barang dan Jasa.
3. Secara berkala melakukan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan terkait kegiatan Pembelian Barang dan Jasa dibandingkan dengan Kebijakan, Prosedur dan Limit yang berlaku di BWS.
4. Memberikan persetujuan atas rekanan/*vendor/supplier* sebagai rekanan/*vendor/supplier* yang resmi dapat digunakan.
5. Melakukan evaluasi atas Daftar Rekanan.

Duties and Responsibilities of the Procurement Committee

In carrying out its functions, the Procurement Committee has the following duties and responsibilities:

1. *Assist the Board of Directors in the preparation of Policies, Procedures, Limits and Strategies for Purchasing Goods and Services.*
2. *Evaluate the proposed changes to the Policy, Procedure, Limit and Strategy of Purchasing Goods and Services.*
3. *Periodically evaluate the implementation of compliance related to the activities of Purchasing Goods and Services compared to the applicable Policies, Procedures and Limits at BWS.*
4. *Provide approval to partners/vendors/suppliers as partners/vendors/suppliers that can be officially used.*
5. *Evaluate the Associate List of Vendor.*

6. Memberikan persetujuan rekomendasi kepada Direktur dan/ atau Direksi atas pelaksanaan Pembelian Barang dan Jasa yang merupakan kewenangan Direktur dan/atau Direksi serta nominal Pembelian Barang dan Jasa lebih dari Rp50 juta kepada Direktur dan/atau Direksi sebelum dilakukan persetujuan.

6. Provide approval of recommendations to the Director and/or Board of Directors on the implementation of the Purchase of Goods and Services which is the authority of the Director and/ or Board of Directors and the nominal purchase of Goods and Services more than IDR50 million to the Director and/or Board of Directors before approval.

Pelaksanaan Tugas Komite Pembelian Barang dan Jasa Tahun 2023

Implementation of Procurement Committee Duties in 2023

Selama tahun 2023, Komite Pembelian Barang dan Jasa telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal memberikan rekomendasi atas persetujuan rekanan/vendor/supplier dan rekomendasi kepada Direktur dan/atau Direksi.

During 2023, the Procurement Committee has performed its duties well in terms of providing recommendations on the approval of partners/vendors/suppliers and recommendations to the Director and/or Board of Directors.



Komite Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism Committee

Komite Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (Komite APU & PPT) dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi dengan tujuan untuk memastikan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU & PPT) di BWS sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau *standard best practice*.

The Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism Committee (AML & CFT Committee) was formed based on the Board of Directors Decree to ensure that the implementation of the Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism Program (AML & CFT Program) at BWS is by the applicable statutory provisions and/or *standard best practice*.

Struktur dan Keanggotan Komite APU & PPT Structure and Membership of AML & CFT Committee

Ketua <i>Chairman</i>	Direktur yang membawahi Kepatuhan <i>Director in charge of Compliance</i>
Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Departemen yang membawahi APU & PPT Kepala Departemen yang membawahi <i>Business Legal</i> Kepala Departemen yang membawahi Kepatuhan <ol style="list-style-type: none"> <i>Head of Department in charge of AML & CFT</i> <i>Head of Department in charge of Business Legal</i> <i>Head of Department in charge of Compliance</i>
Anggota Tidak Tetap <i>Non-Permanent Member</i>	Kepala Divisi dan/atau Pemimpin Cabang <i>Division Head and/or Branch Leader</i>

Tugas dan Tanggung Jawab Komite APU & PPT

Komite APU & PPT bertugas dan bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. Kebijakan dan prosedur terkait penerapan Program APU & PPT.
2. Perbaikan proses kerja penerapan Program APU & PPT.
3. Rencana kerja pelatihan terkait penerapan Program APU & PPT.
4. Permasalahan-permasalahan terkait penerapan Program APU & PPT.

Pelaksanaan Tugas Komite APU & PPT Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023 Komite APU & PPT telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

1. Tindak lanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan 2022.
2. Tindak lanjut temuan *Financial Supervisory Service* (FSS).
3. Pengkinian data nasabah.
4. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL), SIPENDAR, SIPESAT, dan Kantor Pajak.
5. Penutupan rekening dorman.
6. Perbaikan data nasabah.
7. Penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023.

Duties and Responsibilities of the AML & CFT Committee

The AML & CFT Committee is in charge of and responsible for evaluating and providing recommendations to the Board of Directors, which at least include:

1. Policies and procedures related to the implementation of the AML & CFT Program.
2. Improvement of the work process for implementing the AML & CFT Program.
3. Training work plans related to the performance of the AML & CFT Program.
4. Problems associated with the implementation of the AML & CFT Program.

Implementation of Duties of the AML & CFT Committee in 2023

During 2023, the AML & CFT Committee has held 4 (four) meetings with the following discussions agenda:

1. Follow up on Otoritas Jasa Keuangan findings in 2022.
2. Follow up on Financial Supervisory Service (FSS) findings.
3. Updating customer data.
4. Suspicious Transaction Reports (STR), Cash Transaction Reports (CTR), International Funds Transfer Instruction Report (IFTI), SIPENDAR, SIPESAT, and the Tax Office.
5. Closing dormant accounts.
6. Improvement of customer data.
7. Adjustment to Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 8 of 2023.

Gugus Tugas Anti Fraud Anti Fraud Task Force

Gugus Tugas *Anti Fraud* (GTAF) bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan memiliki hubungan komunikasi dengan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

The *Anti-Fraud Task Force* is directly responsible to the President Director and has a communication relationship with direct reporting to the Board of Commissioners

Struktur dan Keanggotaan Gugus Tugas Anti Fraud *Anti Fraud Task Force Structure and Membership*

Ketua <i>Chairman</i>	Kepala Divisi Audit Internal <i>Head of Internal Audit Division</i>
Wakil Ketua <i>Vice Chairman</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi Manajemen Risiko 2. Kepala Divisi Kepatuhan <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Head of Risk Management Division</i> 2. <i>Head of Compliance Division</i>
Anggota <i>Member</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Departemen Audit Inspektorat 2. Kepala Departemen <i>Audit Support</i> 3. Kepala Departemen Manajemen Risiko 4. Kepala Departemen Kepatuhan, Sistem & Prosedur 5. Kepala Departemen <i>Corporate & Business Legal</i> 6. Tim Leader Hubungan Industrial 7. Tim <i>Fraud Detection System</i> 8. Kepala Unit Risiko Operasional dan Kepatuhan <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Head of the Inspectorate Audit Department</i> 2. <i>Head of the Audit Support Department</i> 3. <i>Head of the Risk Management Department</i> 4. <i>Head of Compliance, System & Procedure Department</i> 5. <i>Head of Corporate & Business Legal Department</i> 6. <i>Industrial Relations Leader Team</i> 7. <i>Fraud Detection System Team</i> 8. <i>Head of Operational Risk and Compliance Unit</i>

Tugas dan Tanggung Jawab Gugus Tugas Anti Fraud

Dalam menjalankan fungsinya, Gugus Tugas *Anti Fraud* memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Memantau dan memastikan kesesuaian penerapan strategi *Anti Fraud* yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Penerapan Strategi *Anti Fraud*.
2. Mendukung upaya pengembangan budaya dan kepedulian *Anti Fraud* pada seluruh jajaran organisasi.
3. Menyusun rencana kerja tahunan dan laporan pelaksanaan tugas tahunan serta menyampaikannya kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris. Penyusunan rencana kerja tahunan dan laporan pelaksanaan kerja tahunan dikoordinasikan dengan Divisi/Satuan Kerja/Unit Bisnis terkait.
4. Menyusun uraian tugas dan pedoman kerja internal yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas *Anti Fraud* dalam implementasi strategi *Anti Fraud*.
5. Melakukan evaluasi dan/atau pengikninan strategi *Anti Fraud* yang diterapkan, dengan memperhatikan peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, *best practice* dan perkembangan perusahaan.

Duties and Responsibilities of the Anti-Fraud Task Force

In carrying out its functions, the Anti-Fraud Task Force has the following duties and responsibilities:

1. *Monitor and ensure the appropriateness of implementing the anti-fraud strategy stipulated in the Anti-Fraud Strategy Implementation General Policy.*
2. *Support efforts to develop anti-fraud culture and awareness at all levels of the organization.*
3. *Prepare an annual work plan, report on the implementation of yearly duties, and submit them to the President Director, and the Board of Commissioners. Prepare annual work plans and annual work implementation reports coordinated with the relevant Divisions/Work Units/Business Units.*
4. *Prepare job descriptions and internal work guidelines needed in carrying out the duties and responsibilities of the Anti-Fraud Task Force in implementing the anti-fraud strategy.*
5. *Evaluate and/or update the implemented anti-fraud strategy, taking into account Bank Indonesia regulations and other applicable laws and regulations, best practices, and company developments.*

Pelaksanaan Tugas Gugus Tugas Anti Fraud Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023 Gugus Tugas Anti Fraud telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal memberikan rekomendasi atas penanganan kasus *fraud* serta tindakan lainnya terkait penerapan strategi *Anti Fraud* di BWS.

Gugus Tugas Anti Fraud telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

1. Pembahasan terkait strategi *Anti Fraud*.
2. Pembahasan pokok-pokok/*concern* Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana surat Nomor SR-113/PB.32/2022 perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* PT Bank Woori Saudara 1906, Tbk Semester I dan II Tahun 2021.
3. Pembahasan kasus *fraud* dan *action plan* penyelesaiannya.
4. Penetapan *threshold/limit* signifikansi untuk kejadian *fraud* dan kejadian risiko operasional lainnya.
5. Penetapan kriteria dan pengkinian status tindak lanjut kasus *fraud*.
6. Pembahasan mekanisme deteksi atau identifikasi terkait penyimpangan.
7. Pengembangan aplikasi FINA untuk pencatatan dan *database fraud*.

Implementation of Duties of the Anti Fraud Task Force in 2023

During 2023, the Anti-Fraud Task Force carried out its duties well in providing recommendations for handling fraud cases and other actions related to implementing Anti-Fraud Strategy at BWS.

The Anti-Fraud Task Force has held 4 (four) meetings with the following discussions agenda:

1. Discussion regarding Anti-Fraud Strategy.
2. Discussion of Otoritas Jasa Keuangan's main concerns as referred to in letter Number SR-113/PB.32/2022 regarding the Implementation of the Anti-Fraud Strategy for PT Bank Woori Saudara 1906, Tbk Semester I and II of 2021.
3. Discussion of fraud cases and action plans for their settlement.
4. Determination of the significance threshold/limit for fraud incidents and other operational risk incidents.
5. Determination of criteria and update on the status of follow-up on fraud cases.
6. Discussion of detection or identification mechanisms related to deviations.
7. Development of the FINA application for fraud recording and database.



Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

BWS memiliki Sekretaris Perusahaan sebagai salah satu organ pendukung Direksi yang berfungsi untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam hal keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan yang relevan serta memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan pasar modal, serta menjembatani interaksi antara Bank dengan para pemangku kepentingan, sesuai POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sekretaris Perusahaan bertugas menjadi pihak penghubung (*Compliance Officer*) yang menjembatani kepentingan antara BWS dengan pihak eksternal, terutama dalam menjaga persepsi publik atas citra Bank serta sebagai penghubung antara Bank dengan lembaga/instansi terkait (Bank Indonesia), otoritas pasar modal, komunitas pemodal, dan masyarakat umum. Selain itu, Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam membantu Bank memenuhi peraturan pasar modal, yaitu dengan menyediakan pedoman kepada Dewan Komisaris dan Direksi mengenai seperti GCG, Anggaran Dasar Bank, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab menyediakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat umum maupun untuk kepentingan investor yang berhubungan dengan kinerja Bank secara tepat waktu, akurat dan transparan sesuai ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku bagi bank maupun bagi perusahaan publik.

BWS has a Corporate Secretary as one of the supporting organs of the Board of Directors whose function is to implement good corporate governance, especially in terms of disclosing information to relevant stakeholders and ensuring the Bank's compliance with applicable laws and regulations, especially those relating to the capital market, as well as liaising interaction between the Bank and stakeholders, in accordance with POJK No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies.

The Corporate Secretary is tasked with being a liaison party (Compliance Officer) who liaising the interests between BWS and external parties, especially in maintaining public perception of the Bank's image and as a liaison between the Bank and related institutions/agencies (Bank Indonesia), capital market authorities, the investor community, and general public. In addition, the Corporate Secretary plays an essential role in helping the Bank comply with capital market regulations by providing guidelines to the Board of Commissioners and Board of Directors regarding GCG, the Bank's Articles of Association, and applicable laws and regulations.

The Corporate Secretary is responsible for providing and conveying information to the general public and for the benefit of investors relating to the Bank's performance in a timely, accurate and transparent manner by the provisions and laws that apply to banks and public companies.

◆ Dasar Hukum Legal Basis

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.
- Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies

◆ Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan Appointment and Dismissal of Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi berdasarkan mekanisme internal Bank. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan profesional serta integritasnya di masyarakat dan bisnis.

The Corporate Secretary is directly responsible to the Board of Directors and is appointed and dismissed based on the Decision of the Board of Directors based on the Bank's internal mechanism. The appointment of the Corporate Secretary takes into account his professional abilities and integrity in society and business.

◆ Profil Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Profile

Penetapan Pejabat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 051/KEP.DIR/HC.III/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang mengangkat Wuryanto sebagai Sekretaris Perusahaan dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan ini telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 Juli 2022 dengan nomor surat 006/BWS-CORP.SEC/OJK/VII/22 untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Appointment of Corporate Secretary Officer in accordance with the Board of Directors Decree Number 051/KEP.DIR/HC.III/VI/2022 dated June 24, 2022 which appointed Wuryanto as Corporate Secretary and has received approval from the Board of Commissioners. This appointment was reported to the Otoritas Jasa Keuangan and the Indonesia Stock Exchange on July 1, 2022 with letter number 006/BWS-CORP.SEC/OJK/VII/22 to comply with Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.

Profil Wuryanto dapat dilihat pada Profil Direksi dalam bab Profil Perusahaan di laporan tahunan ini.

Wuryanto profile can be seen in the Board of Directors Profiles in the Company Profile chapter of this annual report.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan *Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary*

Mengacu pada Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah melaksanakan tugas paling kurang meliputi:

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan GCG yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten.
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung antara Emiten dengan Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Sekretaris Perusahaan BWS membagi tugas dan tanggung jawabnya yaitu sebagai berikut:

- Memimpin penyusunan strategi dan rencana kerja Sekretaris Perusahaan, termasuk di dalamnya *Corporate Action* dan *Corporate Social Responsibility Program*.
- Memimpin penyusunan & pengembangan kebijakan dan prosedur terkait pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan.
- Memastikan terselenggaranya *Corporate Agenda* (RUPS, RUPSLB, dsb) dengan baik.
- Memastikan Bank telah memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Referring to Article 5 of Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, the function of the Corporate Secretary is to carry out tasks that include at least:

- *Closely monitoring developments in the capital market, especially the laws and regulations applicable in the capital market sector.*
- *Provide input to the Board of Directors and Commissioners to comply with the statutory provisions in the capital market sector.*
- *Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing GCG, which includes:*
 - *Disclosure of information to the public, including the availability of information on the Issuer's Website.*
 - *Timely submission of reports to Otoritas Jasa Keuangan.*
 - *Implementation and documentation of GMS.*
 - *Implementation and documentation of Board of Directors and Board of Commissioners meetings.*
 - *Implementation of orientation program for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.*
- *As a liaison between Issuers and Shareholders, Otoritas Jasa Keuangan and other Stakeholders.*

In line with the Otoritas Jasa Keuangan Regulations, the BWS Corporate Secretary divides his duties and responsibilities as follows:

- *Lead preparation strategies and work plans for the Corporate Secretary, including the Corporate Action and Social Responsibility Programs.*
- *Lead the preparation & development of policies and procedures related to the implementation of the Corporate Secretary duties.*
- *Ensure the proper implementation of the corporate agenda (GMS, EGMS, etc.).*
- *Ensure that the Bank has complied with the applicable provisions and laws in the Capital Market sector.*

- Memimpin proses penyusunan Sasaran Mutu/*Goal Setting* dan Prosedur Mutu di Unit Kerja *Corporate Secretary*.
 - Mempersiapkan bahan-bahan laporan untuk Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - Mengkoordinasikan penyusunan Sasaran Mutu/*Goal Setting* dan Prosedur Mutu di Unit Kerja *Corporate Secretary* sampai disahkan oleh Direksi.
 - Memimpin kegiatan Sekretaris Perusahaan untuk anak usaha Bank dan memastikan kebenaran informasi/data yang dikeluarkan oleh masing-masing anak usaha tersebut.
 - Memastikan terselenggaranya hubungan yang baik antara Bank dengan Pemangku Kepentingan (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Pemegang Saham Pengendali dan masyarakat).
 - Memastikan terselenggaranya layanan informasi kepada masyarakat, terkait dengan informasi CSR, kondisi Bank selaku emiten atau perusahaan publik, dan informasi lainnya baik melalui internet maupun media lainnya.
 - Memastikan komunikasi informasi kebijakan Bank dan/atau Pemerintah kepada pihak internal dan eksternal berlangsung dengan baik.
 - Memastikan tersedianya Daftar Khusus dan memelihara dokumen Daftar Pemegang Saham.
 - Memimpin kegiatan pelaksanaan tindak lanjut setiap temuan auditor/pemeriksa Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.
 - Memastikan bahwa karyawan di unit kerjanya kompeten dalam menjalankan tugas.
 - Melaksanakan evaluasi kinerja dan *coaching & counselling* kepada *subordinate*.
 - Memberikan rekomendasi bagi penerimaan, penilaian prestasi kerja, promosi, rekomendasi gaji, pemindahan (mutasi) dan pemberhentian karyawan di unit kerjanya.
- *Lead the process of preparing Quality Goals/Goal Setting and Quality Procedures in the Corporate Secretary Work Unit.*
 - *Prepare report materials for Board of Directors Meetings, Board of Commissioners Meetings, and General Meetings of Shareholders (GMS).*
 - *Coordinate the preparation of Quality Targets/Goal Setting and Quality Procedures in the Corporate Secretary Work Unit until it is approved by the Board of Directors.*
 - *Lead the activities of the Corporate Secretary for the Bank's subsidiaries and ensure the accuracy of the information/data issued by each of these subsidiaries.*
 - *Ensure the implementation of good relations between the Bank and Stakeholders (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Indonesia Stock Exchange, Controlling Shareholders, and the public).*
 - *Ensure the implementation of information services to the public related to CSR information, the condition of the Bank as an issuer or public company, and other information via the internet and other media.*
 - *Ensure that the communication of Bank and Government policy information to internal and external parties goes well.*
 - *Ensure the availability of the Special Register and maintain the Shareholders Register document.*
 - *Lead the implementation of follow-up activities on any findings by the Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia auditors/ investigators.*
 - *Ensure that employees in their work units are competent in carrying out their duties.*
 - *Carry out performance evaluations and coaching & counseling to subordinates.*
 - *Provide recommendations for recruitment, performance assessment, promotions, salary recommendations, transfers (mutation), and dismissal of employees in their work units*

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan *Corporate Secretary Duties Implementation Report*

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan BWS telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain dengan menjalankan kegiatan sebagai berikut

1. Menghadiri kegiatan yang diadakan oleh pihak eksternal
2. Menghadiri kegiatan pemberian penghargaan sebagai wakil dari perusahaan.
3. Memastikan terselenggaranya *Corporate Agenda* (RUPST dan sebagainya).
4. Menghadiri kegiatan pemberian CSR sebagai wakil dari perusahaan.
5. Menyampaikan laporan kepada regulator meliputi laporan kegiatan pasar modal, laporan kegiatan CSR, laporan kegiatan literasi dan inklusi keuangan.
6. Melaksanakan seluruh tugas & fungsi kegiatan Sekretaris Perusahaan.
7. Memberikan informasi atas kegiatan yang dilakukan Bank melalui siaran pers.
8. Memantau dan memberikan tanggapan atas berita negatif tentang Bank yang beredar di masyarakat.

During 2023, the BWS Corporate Secretary has carried out his duties and responsibilities, including the following activities:

1. *Attend activities held by external parties.*
2. *Attend awarding activities as a representative of the company.*
3. *Ensure the implementation of the Corporate Agenda (AGMS etc.).*
4. *Attend CSR giving activities as a company representative.*
5. *Submit reports to regulators including reports on capital market activities, reports on CSR activities, reports on literacy activity and financial inclusion.*
6. *Carry out all duties & functions of Corporate Secretary activities.*
7. *Provide information on the Bank's activities through press releases.*
8. *Monitor and provide responses to negative news about the Bank that is circulated in the community.*

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan *Corporate Secretary Competency Development Program*

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Perusahaan BWS mengikuti program pendidikan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh internal Bank maupun yang diselenggarakan oleh pihak ketiga dan telah disampaikan pada halaman 239 bagian Program Peningkatan Kompetensi Direksi.

To support the implementation of its duties and responsibilities, the Corporate Secretary of BWS participates in competency education and development programs, both held internally by the Bank and by third parties and has been submitted on page 239 of the Board of Directors Competency Improvement Program section.



Satuan Kerja Audit Internal

Internal Audit Work Unit

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dibentuk untuk meningkatkan dan melindungi Bank melalui pemberian *assurance* dan konsultasi yang berbasis risiko dan objektif, serta berperan sebagai mitra strategis manajemen dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan dan membantu terciptanya tata kelola yang baik. SKAI sebagai lini ketiga dalam *Three Lines Model*, secara periodik melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan fungsi lini lainnya serta saling berkontribusi dalam menciptakan dan menjaga *value* yang selaras dengan kepentingan *stakeholders*, melalui pelaksanaan fungsi *assurance* dan konsultasi.

Pelaksanaan fungsi *assurance* mencakup pelaksanaan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*) atas dasar hasil analisa penilaian risiko sedangkan untuk pelaksanaan fungsi konsultasi dilakukan secara formal maupun informal berupa penugasan khusus atas permintaan manajemen maupun atas inisiatif dari SKAI. SKAI terus melakukan penyempurnaan metodologi audit dan inovasi dalam penggunaan teknologi dan *tools* audit agar pelaksanaan *assurance* dan konsultasi selaras dengan perkembangan bisnis, sehingga dapat mendorong perbaikan kualitas dan efektivitas tata kelola, pengelolaan risiko serta kecukupan dan efektivitas pengendalian internal.

The Internal Audit Work Unit (SKAI) was formed to improve and protect the Bank by providing risk-based and objective assurance and consultation, as well as acting as a management strategic partner in achieving goals and objectives and helping to create good governance. SKAI as the third line in the Three Lines Model, periodically communicates and collaborates with other line functions and contributes to each other in creating and maintaining value in line with stakeholder interests, through the assurance and consultation functions implementation.

The implementation of the assurance function includes the implementation of Risk Based Audits based on the results of risk assessment analysis, while the implementation of the consultation function is carried out formally or informally in the form of special assignments at the request of management or at the SKAI initiative. SKAI continues to improve the audit methodology and innovate in the use of technology and audit tools to align the assurance and consultation implementation with business developments, thus encourage improvements in the quality and effectiveness of governance, risk management and the adequacy and effectiveness of internal control.



Dasar Hukum

Legal Basis

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
- *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.*
- *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 56/POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for Preparation of Internal Audit Unit Charter.*
- *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 1/POJK.03/2019 concerning Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks.*

Piagam Audit Internal Internal Audit Charter

Dalam menjalankan tugasnya, SKAI berpedoman pada Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang telah ditandatangani Presiden Direktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris, yang terakhir diperbarui pada Mei 2022. Piagam Audit Internal disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal Pada Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dengan tujuan sebagai pedoman pelaksanaan fungsi audit internal atas pelaksanaan audit, inisiasi komunikasi dengan *auditee* pada Bank, pemeriksaan aktivitas Bank dan kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset Bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen.

Piagam Audit Internal BWS mencakup:

- Visi, Misi, dan Fungsi dari Audit Internal
- Struktur dan Kedudukan Audit Internal
- Tugas dan Tanggung Jawab serta hubungan dengan unit kerja lain yang melakukan fungsi pengendalian internal
- Wewenang Satuan Kerja Audit Internal
- Kode Etik Audit Internal (kompetensi, independensi, objektivitas, integritas, kerahasiaan)
- Persyaratan Auditor Internal
- Pertanggungjawaban Divisi Audit Internal
- Ketentuan Rangkap Tugas dan Jabatan
- Kriteria penggunaan tenaga ahli eksternal dalam mendukung fungsi audit intern
- Independensi terkait layanan konsultasi atau tugas khusus lain
- Tanggung jawab dan akuntabilitas Kepala Satuan Kerja Audit Internal
- Persyaratan mematuhi standar profesional audit internal

In carrying out its duties, SKAI is guided by the Internal Audit Charter which has been signed by the President Director and approved by the Board of Commissioners, which was last updated in May 2022. The Internal Audit Charter was prepared based on Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 56/POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for Preparation of Internal Audit Unit Charter and Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 1/POJK.03/2019 concerning Implementation of the Internal Audit Function in Banks, and Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, with the aim of serving as a guideline for the implementation of the internal audit function for conducting audits, initiating communication with auditees at the Bank, examination of Bank activities and authority to access records, documents, data, and physical assets of the Bank, including information management systems and minutes of management meetings.

The BWS Internal Audit Charter includes the following:

- *Vision, Mission, and Functions of Internal Audit*
- *Structure and Position of Internal Audit*
- *Duties and Responsibilities, as well as relationships with other work units that carry out internal control functions*
- *Authority of the Internal Audit Work Unit*
- *Internal Audit Code of Conduct (competence, independence, objectivity, integrity, confidentiality)*
- *Internal Auditor Requirements*
- *Accountability of the Internal Audit Division*
- *Provisions for Concurrent Duties and Positions*
- *Criteria for using external experts to support the internal audit function*
- *Independence related to consulting services or other particular tasks*
- *The responsibility and accountability of the Internal Audit Work Unit Head*
- *Requirements of complying with internal auditing professional standards*

- Koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor eksternal
- Kebijakan pembatasan penugasan dan masa tunggu (cooling off period)
- Pengendalian mutu
- Coordination of the internal audit function with legal experts or external auditors
- Policy on assignment restrictions and waiting periods (cooling off period)
- Quality control

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Appointment and Dismissal of the Internal Audit Work Unit Head

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

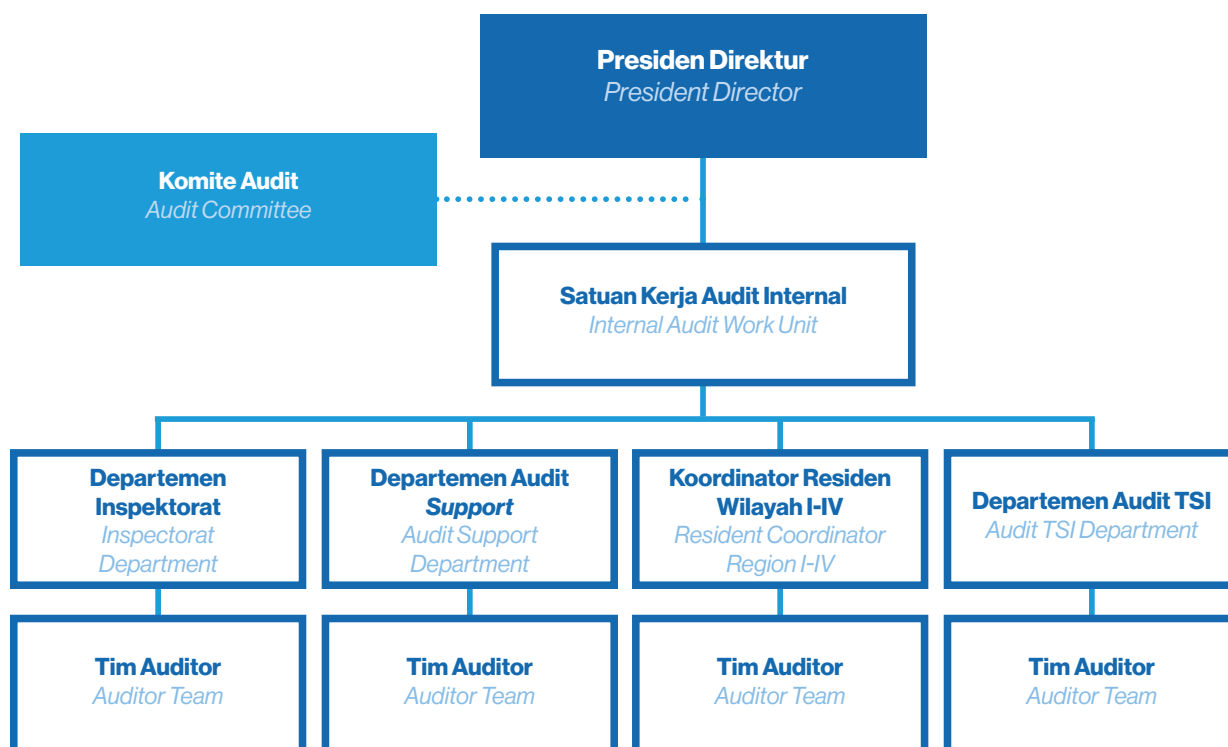
The Head of SKAI is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners and reported to the Otoritas Jasa Keuangan.

Struktur dan Kedudukan Audit Internal

Internal Audit Structure and Position

Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Berikut adalah struktur dan kedudukan SKAI sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 008/KEP.DIR/HC.III/II/2022.

The head of SKAI is directly responsible to the President Director. The following is the structure and position of SKAI in accordance with the Board of Directors Decree Number 008/KEP.DIR/HC.III/II/2022.



Profil Kepala SKAI Profile of the Head of SKAI

Tahun 2023, Kepala SKAI dijabat oleh Galura Wibhawa Bratawijaya yang diangkat pada tanggal 23 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 045/KEP-DIR.HC-II/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021.

In 2023, the Head of SKAI is Galura Wibhawa Bratawijaya, appointed on August 23, 2021, based on the Board of Directors Decree Number 045/KEP-DIR.HC-II/VIII/2021 and effective on August 20, 2021.

Galura Wibhawa Bratawijaya

Kepala Satuan Kerja Audit Internal
Head of the Internal Audit Work Unit

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>
Usia <i>Age</i>	41 tahun <i>41 years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Tangerang, Banten, Indonesia <i>Tangerang, Banten, Indonesia</i>
Dasar Pengangkatan <i>Legal Basis</i>	Surat Keputusan Direksi Nomor 045/KEP-DIR.HC-II/VIII/2021 Tanggal 20 Agustus 2021 <i>Board of Directors Decree Number 045/KEP-DIR.HC-II/VIII/2021 dated August 20, 2021</i>
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	S1 - Ekonomi - Universitas Padjadjaran - 2005 <i>Bachelor of Economics - Padjadjaran University - 2005</i>
Riwayat Pekerjaan <i>Job Experience</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Audit Internal (2021 s.d saat ini) • Kepala Divisi <i>Loan Review</i> (2019-2021) • Team Leader Kredit Manajemen 1 (2017-2019) • Kepala Departemen Kredit <i>Wholesale</i> - AN & APPJ (2014-2017) • <i>Manager</i> (2012-2014) • <i>Senior Officer</i> (2009-2011) • <i>Head of Internal Audit Division</i> (2021 to present) • <i>Head of Loan Review Division</i> (2019-2021) • <i>Team Leader of Credit Management 1</i> (2017-2019) • <i>Head of Wholesale Credit Department – AN & APPJ</i> (2014-2017) • <i>Manager</i> (2012-2014) • <i>Senior Officer</i> (2009-2011)
Sertifikasi yang dimiliki <i>Owned Certification</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 • Serifikasi Audit Level 2 • <i>Anti Fraud Certification</i> • <i>Level 4 Risk Management Certification</i> • <i>Level 3 Risk Management Certification</i> • <i>Level 2 Audit Certification</i> • <i>Anti Fraud Certification</i>

Jumlah Auditor dan Sertifikasi yang Dimiliki

Number of Auditors and Certifications Owned

Tahun 2023, jumlah karyawan SKAI BWS tercatat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, termasuk Kepala SKAI. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit, Bank membekali karyawan SKAI dengan program pendidikan dan pelatihan, termasuk program sertifikasi auditor, baik tingkat nasional maupun internal, serta program sertifikasi lainnya.

In 2023, the number of SKAI BWS employees was recorded to be 39 (thirty nine) people, including the Head of SKAI. To increase the effectiveness of audit implementation, the Bank provides SKAI employees with education and training programs, including auditor certification programs, both national and internal, as well as other certification programs.

Berikut daftar sertifikasi yang dimiliki karyawan SKAI BWS per 31 Desember 2023:

The following is a list of certifications held by SKAI BWS employees as of December 31, 2023:

Nama dan Jenis Sertifikat <i>Name and Type of Certification</i>	Jumlah Auditor Internal yang Memiliki <i>Number of Internal Auditors Who Have</i>
Sertifikasi Auditor <i>Auditor Certification</i>	22
Sertifikasi Manajemen Risiko <i>Risk Management Certification</i>	34
Certified Information Systems Auditor (CISA) <i>Certified Information Systems Auditor (CISA)</i>	1
Anti Fraud Certification <i>Anti Fraud Certification</i>	1
Sertifikasi Auditor <i>Auditor Certification</i>	12

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Duties and Responsibilities of SKAI

Tugas utama SKAI sebagai berikut:

- Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen termasuk perbaikan guna memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.

The main duties of SKAI are as follows:

- *Assist the duties of the President Director, and the Board of Commissioners in carrying out supervision by operationally elaborating the planning, implementation, and monitoring of audit results.*
- *Make analyses and assessments in finance, accounting, operations, and other activities through audits.*
- *Identify all possibilities to improve and increase the efficiency of using resources and funds.*
- *Provide suggestions for improvements and objective information about the activities examined at all levels of management, including improvements to ensure similar incidents do not recur.*

- Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan.
 - Satuan Kerja Audit Internal bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan dan mengembangkan fungsi pengendalian pada Bank. Fungsi pengendalian dilaksanakan dengan konsep pertahanan atau lini, yaitu:
 - Lini pertahanan pertama (*first line*) yaitu pengawasan melekat pada unit bisnis yang bertanggung jawab mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko bisnis.
 - Lini pertahanan kedua (*second line*) mencakup fungsi pendukung yaitu manajemen risiko dan kepatuhan yang bertanggung jawab memastikan bahwa risiko di unit bisnis telah diidentifikasi dan dikelola dengan tepat.
 - Lini pertahanan ketiga (*third line*) yaitu Satuan Kerja Audit Internal yang bertanggung jawab menilai keefektifan proses yang dilakukan pada lini pertahanan pertama dan lini pertahanan kedua untuk memberikan jaminan independen kepada Bank bahwa sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola telah diterapkan secara efektif.
- *Carry out inspection and evaluation of activities.*
 - *The Internal Audit Work Unit cooperates with the work unit that performs and develops the control function at the Bank. The control function is carried out with the concept of defense or line, which are:*
 - *The first line of defense is supervision attached to business units responsible for identifying, assessing, and controlling business risks.*
 - *The second line of defense includes supporting functions, namely risk management and compliance, which are responsible for ensuring that risks in business units are identified and managed appropriately.*
 - *The third line of defense (third line), namely the Internal Audit Work Unit, which is responsible for assessing the effectiveness of processes carried out on the first line of defense and the second line of defense to provide independent assurance to the Bank that the internal control system, risk management, and governance processes and systems are in place applied effectively.*

Kode Etik Auditor *Auditor's Code of Conduct*

Seluruh Auditor wajib mematuhi kode etik Auditor sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal, yang di antaranya meliputi:

1. Kompetensi
 - a. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit internal secara menyeluruh.
 - b. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit internal secara menyeluruh.
 - c. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan.

All Auditors are required to comply with the Auditor's code of conduct as stated in the Internal Audit Charter, which includes:

1. *Competency*
 - a. *Have the knowledge, skills and competencies needed to carry out the internal audit function as a whole.*
 - b. *Apply knowledge, skills and competencies carried out professionally.*
 - c. *Improve knowledge, skills and other competencies through continuous professional development.*

- | | |
|--|---|
| <p>2. Independensi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. b. Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, scope, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan. c. Tidak melakukan kegiatan yang bersifat operasional di luar aktivitas audit internal. d. Dilarang perangkap tugas dan jabatan pada kegiatan operasional perusahaan. <p>3. Objektivitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menunjukkan objektivitas profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang di audit b. Membuat penilaian dan mengungkapkan sesuatu berdasarkan fakta, bukan berdasarkan pertimbangan diri sendiri atau pihak-pihak tertentu. c. Bebas dari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) atas objek atau kegiatan yang di audit. Apabila Internal Auditor mempunyai pertentangan kepentingan atas objek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap objek atau kegiatan dimaksud. <p>4. Integritas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya. b. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas. c. Menghindari benturan kepentingan. d. Mengimplementasikan Kode Etik Audit Internal. <p>5. Kerahasiaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugas. b. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi, atau dalam cara apa pun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan Bank yang sah dan etis. c. Tidak membocorkan dokumen dan hasil pemeriksaan kepada pihak manapun yang tidak berhak. | <p>2. <i>Independence</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Able to express his views and thoughts without influence or pressure from any party.</i> b. <i>Have freedom in determining the method, scope, way, techniques and approach to the audit to be carried out.</i> c. <i>Do not carry out operational activities outside internal audit activities.</i> d. <i>Concurrent duties and positions are prohibited in company operational activities.</i> <p>3. <i>Objectivity</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Demonstrate professional objectivity in collecting, evaluating, and communicating information about the activity or process being audited.</i> b. <i>Make judgments and express things based on facts, not based on considerations of oneself or certain parties.</i> c. <i>Free from conflict of interest regarding the object or activity being audited. If the Internal Auditor has a conflict of interest regarding the object or activity being audited, the person concerned must declare the relationship and not be assigned to carry out an audit of the object or activity concerned.</i> <p>4. <i>Integrity</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Reliable, firm, honest and trustworthy.</i> b. <i>Maintain the confidentiality of information obtained in the performance of duties.</i> c. <i>Avoid conflicts of interest.</i> d. <i>Implement the Internal Audit Code of Ethics.</i> <p>5. <i>Confidentiality</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Must be prudent in using and maintaining information obtained while carrying out tasks.</i> b. <i>Do not use information for personal gain, or in any way, contrary to the law or detrimental to the Bank's legitimate and ethical objectives.</i> c. <i>Do not divulge documents and inspection results to any unauthorized party.</i> |
|--|---|

Ruang Lingkup Satuan Kerja Audit Internal

Scope of the Internal Audit Unit

Satuan Kerja Audit Internal melaksanakan kegiatan audit serta pemberian konsultasi terhadap unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang untuk memastikan kecukupan dan efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko dan GCG.

The Internal Audit Work Unit carries out audit activities and provides consultations to work units at the Head Office and Branch Offices to ensure the adequacy and effectiveness of internal control, risk management and GCG.

Metode Audit

Audit Method

Bank menerapkan metodologi *Risk Based Internal Audit (RBIA)* dengan pendekatan proses bisnis. Di mana RBIA tersebut diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan tingkat kematangan manajemen risiko secara korporat. Dengan metodologi tersebut, maka proses bisnis dan unit bisnis yang diperkirakan memiliki risiko yang signifikan dalam pencapaian tujuan usaha lebih diprioritaskan untuk diaudit, sehingga dapat diyakini bahwa seluruh potensi risiko dapat diminimalkan sesuai dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan.

The Bank applies the Risk Based Internal Audit (RBIA) methodology with a business process approach. The RBIA is implemented in stages according to the maturity level of corporate risk management. With this methodology, business processes and business units that are estimated to have significant risks in achieving business objectives are prioritized for auditing so that it can be ensured that the established risk tolerance can minimize all potential hazards.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Satuan Kerja Audit Internal Tahun 2023

Brief Report on the Implementation of Internal Audit Duties and Activities for 2023

Realisasi Kegiatan Satuan Kerja Audit Internal yang dilakukan Bank sepanjang tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

The internal audit activities carried out by the Bank throughout 2023 can be described as follows:

No.	Aktivitas <i>Activity</i>	Rencana <i>Plan</i>	Realisasi <i>Realization</i>	Pencapaian <i>Achievement</i>	Keterangan <i>Description</i>
Pemeriksaan <i>Inspection</i>					
1	Pemeriksaan Umum <i>General Inspection</i>	18	18	100%	-
2	Review Kepatuhan Sistem Pembayaran (<i>Review BI-SKN, BI-RTGS, BI-ETP, SSSS, BI-FAST dan KPDHN</i>) <i>Payment System Compliance Review (BI-SKN, BI-RTGS, BI-ETP, SSSS, BI-FAST and KPDHN Review)</i>	1	1	100%	-
3	Kajian Pengendalian Internal terhadap Proses Penerapan Manajemen Risiko <i>Internal Control Review of the Risk Management Implementation Process</i>	1	1	100%	-

No.	Aktivitas Activity	Rencana Plan	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Keterangan Description
4	Pemeriksaan SLIK <i>SLIK inspection</i>	1	1	100%	-
5	Pemeriksaan Penyedia Jasa Pembayaran <i>Inspection of Payment Service Providers</i>	1	1	100%	-
6	Pemeriksaan atas Kendala Sistem dan kualitas <i>Data Single Customer View (SCV)</i> <i>Inspection of System Constraints and Single Customer View (SCV) Data quality</i>	1	1	100%	-
7	Pemeriksaan Divisi dan Strategi & Manajemen TI <i>Inspection of IT Division and Strategy & Management</i>	1	1	100%	-
8	Pemeriksaan Penerapan TI di Unit Bisnis <i>Inspection of IT Implementation in Business Units</i>	8	7	88%	Penyesuaian audit objek dengan pemeriksaan khusus <i>Adjustment of object audits with special inspection</i>
9	<i>Special/Thematic Audit</i> <i>Special/Thematic Audit</i>	11	11	100%	-
10	<i>Audit Mandatory Leave</i> <i>Audit Mandatory Leave</i>	31	110	355%	-
11	Pemeriksaan Bulanan oleh Audit Residen <i>Monthly Inspection by Residence Audit</i>	706	857	121%	-
12	<i>Daily & Continuous Audit</i> melalui WGSS oleh Audit Residen <i>Daily & Continuous Audit via WGSS by Resident Audit</i>	100	100	100%	-
Pelaporan (Mandatory) Reporting (Mandatory)					
1	Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Periode Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023 <i>Report on the Main Results of Semester II 2022 and Semester I 2023 Audits</i>	2	2	100%	-
2	Laporan Hasil <i>Review</i> Kepatuhan Sistem Pembayaran (BI-SKN, BI-RTGS, BI-ETP, SSSS, BI-FAST dan KPDHN) <i>Report on Payment System Compliance Review Results (BI-SKN, BI-RTGS, BI-ETP, SSSS, BI-FAST and KPDHN Review)</i>	1	1	100%	-
3	Laporan Hasil Pemeriksaan Divisi dan Strategi & Manajemen TI <i>Report on Inspection Results of IT Division and Strategy & Management</i>	1	1	100%	-
4	Laporan Hasil Pemeriksaan Penyedia Jasa Pembayaran <i>Report on Inspection Results of Payment Service Providers</i>	1	1	100%	-
5	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kendala Sistem dan kualitas <i>Data Single Customer View (SCV)</i> <i>Inspection Result Report on System Constraints and Single Customer View (SCV) Data quality</i>	1	1	100%	-
Lainnya Other					
1	<i>Training/Pelatihan</i> <i>Training</i>	7	17	243%	-
2	Sertifikasi <i>Certification</i>	6	1	17%	-
Pencapaian <i>Achievement</i>				117%	

Kegiatan tidak terencana

Unplanned Audit

No.	Aktivitas Activity	Rencana Plan	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Keterangan Description
1	Special Audit/Investigation Special Audit/Investigation	18	18	100%	Unplanned Audit/Penugasan Khusus (Audit TI: 2 pemeriksaan, Audit Inspektorat: 7 pemeriksaan, Audit TI & Inspektorat: 1 pemeriksaan, dan Audit Residen: 9 Pemeriksaan Unplanned Audit/Special Assignment (IT Audit: 2 inspections, Inspectorate Audit: 7 inspections, IT & Inspectorate Audit: 1 inspection, and Resident Audit: 9 inspections)
2	User Acceptance Test & PR User Acceptance Test & PR	1	1	100%	Sesuai dengan pengembangan aplikasi BWS In accordance with BWS application development
Pencapaian Achievement				100%	



Program Peningkatan Kompetensi SKAI Internal Audit Competency Improvement Program

Untuk menunjang pelaksanaan tugas audit, Kepala SKAI dan karyawan SKAI terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya dengan mengikuti program pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh internal Bank maupun oleh pihak ketiga.

To support the implementation of audit duties, the Head of Internal Audit and Internal Audit employees continue to strive to increase their capacity and competence by participating in education and training programs held internally by the Bank and third parties.

Adapun program pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh Kepala SKAI dan karyawan SKAI tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The education and training programs attended by the Head of Internal Audit and Internal Audit employees in 2022 are as follows:

Program Pendidikan dan Pelatihan Karyawan SKAI

Internal Audit Employee Education and Training Program

Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Jumlah Peserta Total Participants	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Product Knowledge: Eazy Medicash	34	18 Januari 2023 January 18, 2023	Allianz
Polis Asuransi Meritz Korindo Meritz Korindo Insurance Policy	4	25 Januari 2023 January 25, 2023	Meritz Korindo
Sosialisasi Perpajakan dan Laporan Pajak SPT Tahunan Dissemination of Taxation and Annual Tax Return Reporting	37	13 Februari 2023 February 13, 2023	Divisi Human Capital
Market Update, Referral, Manfaat Live Trading, dan Risiko Kerugiannya Market Updates, Referrals, Benefits of Live Trading, and Risks of Losses	38	13 Maret 2023 March 13, 2023	PT Mirae Asset Indonesia
Customer Information System (Peningkatan Informasi Debitur) Customer Information System	1	15 Maret 2023 March 15, 2023	Divisi Manajemen Risiko DKP Communication Forum
Training Cyber Security	3	1 April 2023 April 1, 2023	MPOWERment
General Banking (Certificate Refreshment Program)	12	13 - 17 Februari 2023 February 13 - 17, 2023	Bank Woori Saudara
Training Awareness ISO 27001 ISO 27001 Awareness Training	2	14 April 2023 April 14, 2023	PT Catur Daya Solusi

Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Types of Education and Training</i>	Jumlah Peserta <i>Total Participants</i>	Tanggal <i>Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Training Internal Audit ISO 27001 <i>ISO 27001 Internal Audit Training</i>	3	17 April 2023 <i>April 17, 2023</i>	PT Catur Daya Solusi
Pencegahan Serangan Ransomware <i>Ransomware Attack Prevention</i>	35	19 - 26 Mei 2023 <i>May 19 - 26, 2023</i>	Divisi Human Capital <i>Human Capital Division</i>
Integrity Pact, Antifraud and Sanction Awareness, and Ethic Code	40	15 - 19 Mei 2023 <i>May 15 - 19, 2023</i>	Divisi Human Capital <i>Human Capital Division</i>
Regional Group Head Workshop	1	14 Juni 2023 <i>June 14, 2023</i>	Bank Woori Saudara
Sosialisasi QRIS di WON by BWS <i>Dissemination of QRIS at WON by BWS</i>	3	7 Juni 2023 <i>June 7, 2023</i>	Divisi Digital Banking <i>Digital Banking Division</i>
FGD Standarisasi Supervisor Operasional <i>FGD Standardization of Operational Supervisors</i>	1	15 Juni 2023 <i>June 15, 2023</i>	Tim Pengembangan SDM <i>HR Development Team</i>
Webinar Cyber Security <i>Cyber Security Webinar</i>	2	27 Juni 2023 <i>June 27, 2023</i>	Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI <i>Director General of Information Applications, Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia</i>
Pekan QRIS Nasional Bali <i>Bali National QRIS Week</i>	1	14 - 20 Agustus 2023 <i>August 14 - 20, 2023</i>	Bank Indonesia
Sosialisasi Pengendalian Internal <i>Internal Control Dissemination</i>	3	13 Oktober 2023 <i>October 13, 2023</i>	EY Han Young
Certified Internal Auditor (CIA)	2	28 Oktober 2023 <i>October 28, 2023</i>	Institute of Internal Auditors (IIA)
Training Idea Tools Lv 1 <i>Idea Tools Lv 1 Training</i>	1	4 - 5 Oktober 2023 <i>October 4 - 5, 2023</i>	Insight Consulting
Training Idea Tools Lv 2 <i>Idea Tools Lv 2 Training</i>	1	11 - 12 Oktober 2023 <i>October 11 - 12, 2023</i>	Insight Consulting
Refreshment LHPK dan SP & FMI BI serta KPDHN <i>Refreshment of LHPK and SP & FMI BI and KPDHN</i>	1	3 November 2023 <i>November 3, 2023</i>	Bank Indonesia
E-Learning E-mail Phising Secure Awareness	40	9 - 20 Oktober 2023 <i>October 9 - 20, 2023</i>	Bank Woori Saudara
On Job Training Divisi Audit Internal <i>On Job Training of Internal Audit Division</i>	2	28 Oktober - 11 November 2023 <i>October 28 - November 11, 2023</i>	Bank Woori Saudara
Fraud in Digital Banking and Audit Investigation Training	26	25 - 26 November 2023 <i>November 25 - 26, 2023</i>	Muamalat Institute
Liquidity Risk Management	7	9 Desember 2023 <i>December 9, 2023</i>	Efektifpro
OJT Audit Residen KC Pekanbaru <i>OJT Resident Audit Pekanbaru Branch Office</i>	1	23 November - 15 Desember 2023 <i>November 23 - December 15, 2023</i>	Divisi Audit Internal <i>Internal Audit Division</i>
OJT Audit Residen Wilayah IV (KC Kediri) <i>OJT Resident Audit Region IV (Kediri Branch Office)</i>	1	11 Desember 2023 - 10 Januari 2024 <i>December 11, 2023 - January 10, 2024</i>	Divisi Audit Internal <i>Internal Audit Division</i>
Sosialisasi Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja <i>Dissemination of Guidelines for Preventing and Handling Sexual Harassment in the Workplace</i>	31	8 - 29 Desember 2023 <i>December 8 - 29, 2023</i>	Bank Woori Saudara
Induction Program	5	27 September 2023 - 8 Januari 2024 <i>September 27, 2023 - January 8, 2024</i>	Bank Woori Saudara



Satuan Kerja Kepatuhan

Compliance Work Unit

Bank membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan otoritas (Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.

The Bank formed Compliance Work Unit (SKK) to ensure the Bank's compliance with regulations issued by the authorities (Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia) as well as other applicable laws and regulations, in the context of implementing Corporate Governance.



Dasar Hukum

Legal Basis

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.
- Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 46/POJK.03/2017 concerning Implementation of Compliance Function for Commercial Banks.



Pedoman Kerja Kepatuhan

Compliance Work Guidelines

Bank Woori Saudara telah memiliki pedoman kerja kepatuhan yaitu sebagai berikut:

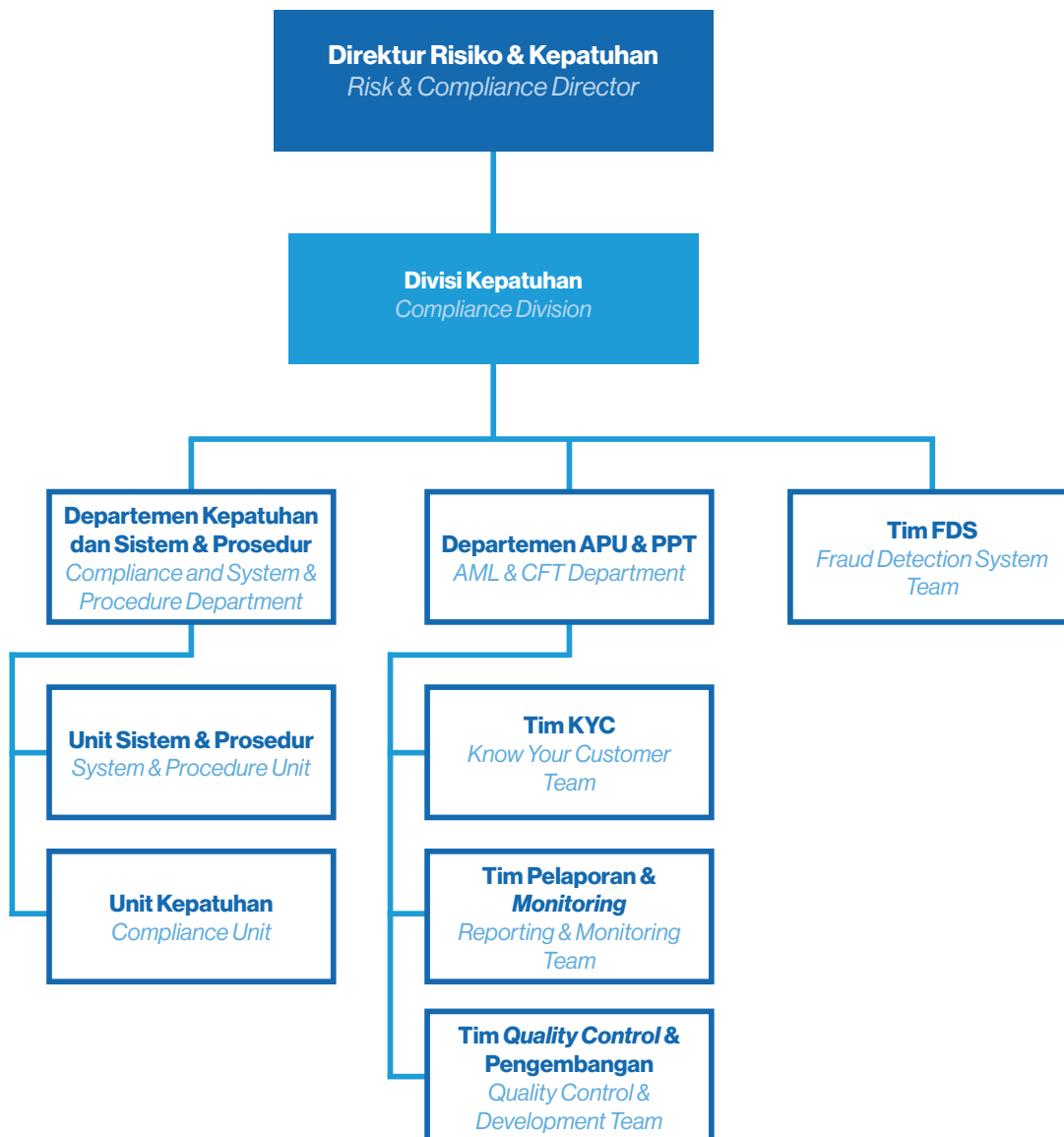
Bank Woori Saudara already has compliance work guidelines, namely as follows:

1. Surat Keputusan Direksi Nomor 023/KEP-DIR/A-11/VII/22 tentang Kebijakan Kepatuhan.
2. Surat Keputusan Direksi Nomor 015/KEP-DIR/A-11/III/20 tentang Kode Etik Kepatuhan.
3. Surat Edaran Direksi Nomor 046/SE-DIR/A-11/VII/22 tentang Prosedur Kepatuhan.
1. Board of Directors Decree Number 023/KEP-DIR/A-11/VII/22 concerning Compliance Policy.
2. Board of Directors Decree Number 015/KEP-DIR/A-11/III/20 concerning the Compliance Code of Ethics.
3. Board of Directors Circular Letter Number 046/SE-DIR/A-11/VII/22 concerning Compliance Procedures.

Struktur Organisasi Kepatuhan
Compliance Organizational Structure

SKK bertanggung jawab kepada Direktur Risiko dan Kepatuhan. Pada tahun 2023, SKK didukung oleh 14 (empat belas) karyawan termasuk Kepala Satuan Kerja Kepatuhan.

Compliance Work Unit is responsible to the Director of Risk & Compliance. In 2023, Compliance Work Unit is supported by 14 (fourteen) employees including the Head of the Compliance Work Unit.



Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Profile of Head of Compliance Work Unit

Tahun 2023, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dijabat oleh Wiwit Sundari yang diangkat pada tanggal 1 Juli 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 054/KEP.DIR/HC.II/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022.

In 2023, the Head of Compliance Work Unit is Wiwit Sundari who was appointed on July 1, 2022 based on Board of Directors Decree Number 054/KEP.DIR/HC.II/VI/2022 dated June 28, 2022.

Wiwit Sundari

Kepala Satuan Kerja Kepatuhan
Head of Compliance Work Unit

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>
Usia <i>Age</i>	49 tahun <i>49 years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta <i>Jakarta</i>
Dasar Pengangkatan <i>Legal Basis</i>	Surat Keputusan Direksi Nomor 054/KEP.DIR/HC.II/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 <i>Board of Directors Decree Number 054/KEP.DIR/HC.II/VI/2022 dated June 28, 2022</i>
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	S1 Manajemen <i>Bachelor of Management</i>
Riwayat Pekerjaan <i>Job Experience</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk: <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Divisi Kepatuhan (2022 - sekarang) b. Kepala Departemen Audit Inspektorat (2018 - 2022) c. Koordinator Audit Residen Wil. I (2018) • PT Bank MNC Internasional, Tbk: <i>Branch Manager</i> (2015-2018) • PT Bank Mutiara, Tbk: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Branch Manager</i> (2011-2015) b. <i>Team Leader Funding</i> (2009-2011) c. <i>Relation Officer</i> (2008-2009) d. <i>Operational Officer</i> (2002-2008) • PT Bank Putra Surya Perkasa: <i>Operational Officer</i> (1997-1999)
Sertifikasi yang dimiliki <i>Owned Certification</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 4 • Sertifikasi <i>General Banking</i> Tingkat 2 • Sertifikasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR), Sub Bidang Pengelolaan Transfer Dana Bank Jenjang 6 • Serifikasi Audit Supervisor • Sertifikasi Kepatuhan

Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan *Directors in Charge of Compliance Function*

BWS telah menunjuk Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan yaitu Wuryanto dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank.
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meminimalkan risiko kepatuhan Bank.

BWS has appointed a Director in charge of the Compliance function, namely Wuryanto with the following duties and responsibilities:

- *Formulate strategies to encourage the creation of a bank's compliance culture.*
- *Propose compliance policies or principles to be determined by the Board of Directors.*
- *Establish compliance systems and procedures that will be used to develop the Bank's internal regulations and guidelines.*
- *Ensure that all system policies and procedures and business activities carried out by the Bank comply with the provisions of the Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia and the applicable laws and regulations.*
- *Minimize the Bank's compliance risk.*

Tugas dan Tanggung Jawab SKK *Compliance Work Unit Duties and Responsibilities*

- Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- *Make steps to support the creation of a Compliance Culture in all Bank business activities at every level of the organization.*
- *Identify, measure, monitor, and control Compliance Risk concerning Otoritas Jasa Keuangan regulations regarding implementing Risk Management for Commercial Banks.*
- *Assess and evaluate the effectiveness, adequacy, and suitability of policies, provisions, systems, and procedures owned by the Bank with the applicable laws and regulations.*

- Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- *Review and/or recommend updating and improving policies, regulations, systems, and procedures owned by the Bank to comply with the provisions of the Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia and the applicable laws and regulations.*
- *Make efforts to ensure that the policies, provisions, systems, and procedures, as well as the Bank's business activities, comply with the requirements of the Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia and the applicable laws and regulations.*



Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2023 *Implementation of the Compliance Function Work Program in 2023*

Dalam mengimplementasikan fungsi kepatuhan, di tahun 2023 Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi, antara lain melalui:

In implementing the compliance function, in 2023, the Director in charge of the compliance function will be assisted by the Compliance Work Unit, which is responsible for taking steps to support the creation of a culture of compliance in all Bank business activities at every level of the organization, including through:

Pengelolaan Budaya Kepatuhan

Selama tahun 2023, satuan kerja kepatuhan telah melaksanakan fungsi kepatuhan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023, telah dilakukan analisa kepatuhan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) analisa yang terdiri dari analisa pengembangan jaringan kantor, produk dan/atau aktivitas baru, *compliance checklist*, dan opini kepatuhan.
2. Telah dilakukan evaluasi dan peninjauan terhadap 165 (seratus enam puluh lima) ketentuan internal.
3. *Monitoring* Ketentuan Regulator dan *Compliance info*, pelaksanaan *monitoring* ketentuan regulator dilakukan secara berkala.
4. Sosialisasi, training, dan *compliance test*.
5. Telah dilakukan *monitoring* terhadap pemenuhan rasio-rasio terkait KPMM, BMPK, GWM, PDN, dan rasio lainnya.

Compliance Culture Management

During 2023, the compliance work unit has carried out the compliance function as follows:

1. *In 2023, 33 (thirty three) compliance analyzes have been carried out, consisting of analysis of office network development, new products and/or activities, compliance checklists, and compliance opinions.*
2. *An evaluation and review of 165 (one hundred sixty five) internal provisions has been carried out.*
3. *Monitoring of Regulatory Provisions and Compliance Info, implementation of monitoring of regulatory provisions is carried out periodically.*
4. *Dissemination, training, and compliance test.*
5. *Monitoring of ratios related to CAR, LLL, BI Reserve, NOP, and other ratios has been fulfilled.*


Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan
Compliance Work Unit Competency Development

Nama Pelatihan <i>Training Name</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i>	Tanggal <i>Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Undangan Acara Pembukaan Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2023 <i>Invitation to the PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Trading Opening Event in 2023</i>	1	02 Januari 2023 <i>January 02, 2023</i>	IDX
Silaturahmi Tahun Baru 2023 <i>New Year's Gathering 2023</i>	1	02 Januari 2023 <i>January 02, 2023</i>	Bank Indonesia
CEO Banking Forum: <i>Leadership Sharing</i> Menyambut Tahun Baru dengan Lebih Optimis <i>CEO Banking Forum: Leadership Sharing Welcoming the New Year with More Optimism</i>	1	09 Januari 2023 <i>January 09, 2023</i>	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)
Outlook Industri Jasa Keuangan di Tahun 2023 <i>Outlook for the Financial Services Industry in 2023</i>	1	10 Januari 2023 <i>January 10, 2023</i>	Otoritas Jasa Keuangan
Pembahasan Perubahan <i>Mapping</i> Laporan Publikasi Bank sesuai dengan Perluasan Metadata Laporan Bank Umum Terintegrasi <i>Discussion of Changes to the Mapping of Bank Publication Reports in accordance with the Metadata Expansion of Integrated Commercial Bank Reports</i>	1	10 Januari 2023 <i>January 10, 2023</i>	Otoritas Jasa Keuangan
Undangan Pembahasan Teknologi Informasi Tahun 2023 <i>Invitation to Discussion on Information Technology in 2023</i>	2	13 Januari 2023 <i>January 13, 2023</i>	Otoritas Jasa Keuangan
Webinar Tren Perbankan di Tahun 2023 <i>2023 Banking Trends Webinar</i>	1	17 Januari 2023 <i>January 17, 2023</i>	Otoritas Jasa Keuangan
Sosialisasi Produk Eazy Medicash bersama Allianz <i>Dissemination of Eazy Medicash Products with Allianz</i>	7	18 Januari 2023 <i>January 18, 2023</i>	Learning Consultant Bancassurance Allianz Sales Academy
Rapat Koordinasi Tahunan PPAK Tahun 2023 <i>PPAK Annual Coordination Meeting 2023</i>	1	19 Januari 2023 <i>January 19, 2023</i>	PPAK
IDX-PwC: Membuka Peluang melalui Peningkatan ESG Rating <i>IDX-PwC: Opening Opportunities by Increasing ESG Ratings</i>	1	19 Januari 2023 <i>January 19, 2023</i>	IDX-PwC
Polis Asuransi Meritz Korindo <i>Meritz Korindo Insurance Policy</i>	1	25 Januari 2023 <i>January 25, 2023</i>	Meritz Korindo
Undangan Forum <i>Group Discussion</i> (FGD) Operasional BWS Regional Wilayah II <i>Invitation to Forum Group Discussion (FGD) of the BWS Regional Operational Region II</i>	1	27 Januari 2023 <i>January 25, 2023</i>	Bank Woori Saudara
Idea Talks Volume 3 - <i>Scaling Up SMEs Through Digitalization and Social Function</i> <i>Idea Talks Volume 3 - Scaling Up SMEs Through Digitalization and Social Function</i>	1	09 Februari 2023 <i>February 09, 2023</i>	Otoritas Jasa Keuangan
Rapat Koordinasi terkait Rencana Implementasi Aplikasi goAML Versi 5.2 <i>Coordination Meeting regarding the goAML Application Implementation Plan Version 5.2</i>	1	09 Februari 2023 <i>February 09, 2023</i>	PPAK
<i>Risk Management Certification</i> (Level 4)	1	11 - 12 Februari 2023 <i>February 11 - 12, 2023</i>	Efektifpro & LSPP
Sosialisasi Perpajakan dan Laporan Pajak SPT Tahunan PPh 21 Karyawan <i>Dissemination of Taxation and Annual Tax Return Reporting of Employees Income Tax 21</i>	3	13 Februari 2023 <i>February 13, 2023</i>	Bank Woori Saudara
Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Online Otoritas Jasa Keuangan (APOLO) Modul Profesi Keuangan AP/KAP <i>Dissemination of the Otoritas Jasa Keuangan Online Reporting Application (APOLO) AP/KAP Financial Profession Module</i>	2	14 Februari 2023 <i>February 14, 2023</i>	Otoritas Jasa Keuangan
<i>E-Learning Induction Program</i>	1	14 - 21 Februari 2023 <i>February 14 - 21, 2023</i>	Bank Woori Saudara
Memperkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah <i>Strengthening Sharia Financial Literacy and Inclusion</i>	1	16 Februari 2023 <i>February 16, 2023</i>	PPAK
<i>Monthly Meeting for Overseas Network Compliance Officers</i>	1	16 Februari 2023 <i>February 16, 2023</i>	Woori Bank Korea
Sosialisasi Rencana Penerbitan PADG Perubahan Kedua Insentif dan PADG Perubahan GWM <i>Dissemination of Second Amendment PADG Publishing Plan Incentives and PADG Changes in BI Reserve</i>	2	20 Februari 2023 <i>February 20, 2023</i>	Bank Indonesia
Training penggunaan Aplikasi DMS (Docufflo) <i>Training on using the DMS Application (Docufflo)</i>	7	22 - 24 Februari 2023 <i>February 22 - 24, 2023</i>	PT InfoConnect Solusi Indonesia



Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
<i>The Role of GRC in Supporting Financial Sector Performance</i>	1	23 Februari 2023 February 23, 2023	Otoritas Jasa Keuangan
Undangan <i>Forum Group Discussion (FGD) Operasional BWS Regional Wilayah IV</i> <i>Invitation to Forum Group Discussion (FGD) of the BWS Regional Operational Region IV</i>	1	23 - 24 Februari 2023 February 23 - 24, 2023	Bank Woori Saudara
Dengar Pendapat Konsep Peraturan Bursa Nomor I-I tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas <i>Hearing on the Concept of Stock Exchange Regulation Number I-I concerning Stock Split and Stock Merger by Listed Companies that Issue Equity Securities</i>	1	27 Februari 2023 February 27, 2023	IDX
Prospek <i>Insurtech</i> di Indonesia <i>Prospects for Insurtech in Indonesia</i>	1	02 Maret 2023 March 02, 2023	Otoritas Jasa Keuangan
Undangan <i>Forum Group Discussion (FGD) Operasional BWS Regional Wilayah III</i> <i>Invitation to Forum Group Discussion (FGD) of the BWS Regional Operational Region III</i>	1	03 - 04 Maret 2023 March 03 - 04, 2023	Bank Woori Saudara
Sosialisasi Perpajakan dan Laporan Pajak SPT Tahunan PPh 21 Karyawan <i>Dissemination of Taxation and Annual Tax Return Reporting of Employees Income Tax 21</i>	4	06 Maret 2023 March 06, 2023	Bank Woori Saudara
Pelatihan <i>Market Update, Referral, Manfaat Live Trading, dan Risiko Kerugiannya</i> <i>Market Update, Referrals, Benefits of Live Trading, and Risks of Losses Training</i>	8	13 Maret 2023 March 13, 2023	Bank Woori Saudara
<i>Refreshment Program: E-Learning General Banking</i>	3	13 - 24 Maret 2023 March 13 - 24, 2023	Bank Woori Saudara
<i>Coaching Clinics</i> SDG 16 Business Framework: <i>Inspiring Transformational Governance with theme "Way forward for ESG: Streamlining and Impact Reporting"</i>	1	21 Maret 2023 March 21, 2023	GCN, IDX, BAPPENAS, dan GRI GCN, IDX, BAPPENAS, and GRI
Sosialisasi <i>Enhancement APOLO Modul Keuangan Berkelanjutan</i> <i>Dissemination of Enhancement APOLO Sustainable Finance Module</i>	1	28 Maret 2023 March 28, 2023	Otoritas Jasa Keuangan
<i>Coaching Clinics</i> SDG 16 Business Framework: <i>Inspiring Transformational Governance with theme "Creating a Safe, Fair, and Decent Work Environment: Sustainability Reporting and Impact Assessment for Human Rights"</i>	1	28 Maret 2023 March 28, 2023	GCN, IDX, BAPPENAS, dan GRI GCN, IDX, BAPPENAS, and GRI
Pelatihan <i>Cyber Security</i> <i>Cyber Security Training</i>	4	01 - 02 April 2023 April 01 - 02, 2023	Bank Woori Saudara
<i>Coaching Clinics</i> SDG 16 Business Framework: <i>Inspiring Transformational Governance with theme "Integrating SDG 16 Business Framework into Business Strategy"</i>	1	04 April 2023 April 04, 2023	GCN, IDX, BAPPENAS, dan GRI GCN, IDX, BAPPENAS, and GRI
FGD "Implementasi Kekayaan Intelektual sebagai Agunan Kredit Dalam Rangka Mendukung Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif" <i>FGD "Implementation of Intellectual Property as Credit Collateral in Support of Government Regulation (PP) Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations of Law No. 24 of 2019 concerning the Creative Economy"</i>	2	04 April 2023 April 04, 2023	Otoritas Jasa Keuangan
Webinar - <i>Anti Money Laundering in Digital Era: Lesson Learned from Selected Countries</i>	1	06 April 2023 April 06, 2023	Otoritas Jasa Keuangan
Mengatasi Tantangan dan Menghadapi Perubahan dalam Sektor Jasa Keuangan <i>Overcoming Challenges and Facing Changes in the Financial Services Sector</i>	1	13 April 2023 April 13, 2023	Otoritas Jasa Keuangan
<i>Training Awareness ISO 270001</i>	2	14 April 2023 April 14, 2023	Bank Woori Saudara
Sosialisasi Asuransi <i>Reliance</i> <i>Reliance Insurance Dissemination</i>	8	27 April 2023 April 27, 2023	Bank Woori Saudara
Sosialisasi Cara Pendaftaran Sertifikasi SPPUR Melalui Sistem Informasi PTUK Bidang Keuangan <i>Dissemination of How to Register for SPPUR Certification Through the PTUK Information System Financial Sector</i>	2	05 Mei 2023 May 05, 2023	PTUK
Peluang <i>Metaverse</i> di Industri Jasa Keuangan <i>Metaverse Opportunities in Financial Services Industry</i>	1	11 Mei 2023 May 11, 2023	Otoritas Jasa Keuangan
<i>Fundamental of Wealth Management</i>	1	16 Mei 2023 May 16, 2023	Otoritas Jasa Keuangan
Rapat Dengar Pendapat Rancangan SEOJK tentang Tata Cara Penggunaan Jasa AP dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan (RSEOJK AP KAP) <i>SEOJK Draft Hearing Meeting on Procedures for Using AP and KAP Services in Financial Services Activities (RSEOJK AP KAP)</i>	1	19 Mei 2023 May 19, 2023	Otoritas Jasa Keuangan

Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
E-Learning Pencegahan Serangan Ransomware	8	19 - 26 Mei 2023 May 19 - 26, 2023	Bank Woori Saudara
Woori Global Family Program	1	21 - 26 Mei 2023 May 21 - 26, 2023	Woori Bank Korea
Webinar Memperkuat Ketahanan Nasional di Industri Jasa Keuangan Strengthening National Resilience in the Financial Services Industry Webinar	1	22 Mei 2023 May 22, 2023	Otoritas Jasa Keuangan
Pertemuan Koordinasi Coordination Meeting	0	23 Mei 2023 May 23, 2023	PPATK
Membangun Keyakinan Nasabah Aset Digital Dari Risiko Siber Building Digital Asset Customer Confidence From Cyber Risk	1	30 Mei 2023 May 30, 2023	Otoritas Jasa Keuangan
Ring the Bell for Gender Equality 2023	1	08 Juni 2023 June 08, 2023	IDX
Sosialisasi RELIDOC RELIDOC Dissemination	3	08 Juni 2023 June 08, 2023	Bank Woori Saudara
The Future of Sustainability Reporting an Exclusive Forum for Regulators and Listed Companies	1	13 Juni 2023 June 13, 2023	IDX-GRI
Infobank Forum 2023 "Data Protection in Financial Services"	1	15 Juni 2023 June 15, 2023	Infobank Institute
Central Banking Services Festival (CBFest) 2023 - National Talks Stream 1, Membangun Ketahanan Perekonomian Nasional Melalui Digitalisasi Trade & Finance Central Banking Services Festival (CBFest) 2023 - National Talks Stream 1, Building National Economic Resilience Through Digitalization of Trade & Finance	2	19 Juni 2023 June 19, 2023	Bank Indonesia
Symposium G20 "Digital Public Infrastructure for Advancing Financial Inclusion and Achieving Inclusive and Sustainable Development Goal" G20 Symposium "Digital Public Infrastructure for Advancing Financial Inclusion and Achieving Inclusive and Sustainable Development Goals"	1	24 Juni 2023 June 24, 2023	Bank Indonesia
ASEAN Capital Markets Forum and International Sustainability Standards Board Joint Conference and Technical Training on the IFRS Sustainability Disclosure Standards	1	27 - 28 Juni 2023 June 27 - 28, 2023	ACMF-ISSB
Undangan Mengajar Pelatihan Karyawan Kantor Cabang Pekanbaru Invitation to Teach Training for Pekanbaru Branch Office Employees	1	07 Juli 2023 July 07, 2023	Bank Woori Saudara
Penyampaian Informasi Penerbitan dan Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional Delivery of Information on Issuance and Dissemination of Bank Indonesia Regulations concerning Short-Term Liquidity Loans for Conventional Commercial Banks	1	12 Juli 2023 July 12, 2023	Bank Indonesia
Manajemen Stress di Era Digital Stress Management in the Digital Era	1	13 Juli 2023 July 13, 2023	Otoritas Jasa Keuangan
Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Dissemination of Bank Indonesia Regulations on Money Market and Foreign Exchange Market	3	17 Juli 2023 July 17, 2023	Bank Indonesia
Entry Meeting Pemeriksaan Khusus Penyelenggaraan Teknologi Informasi tahun 2023 Entry Meeting for Special Inspection of Information Technology Implementation in 2023	2	18 Juli 2023 July 18, 2023	Bank Woori Saudara
Meeting for Overseas Network Compliance Officers	1	20 Juli 2023 July 20, 2023	Woori Bank Korea
Undangan Pelaksanaan Kick Off Lapangan dan Pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Kinerja PPATK dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2023 kepada Pihak Pelapor Invitation to Site Kick Off Implementation and PPATK Performance Effectiveness Index Survey Implementation in Efforts to Prevent and Eradicate Money Laundering Crimes (TPPU) and Terrorism Financing Crimes (TPPT) in 2023 to Reporting Parties	1	25 Juli 2023 July 25, 2023	PPATK
Undangan Sosialisasi SPRINT Modul Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) Bank Umum Konvensional dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri Invitation to Dissemination of the SPRINT Capability and Proper Assessment Module (PKK) for Conventional Commercial Banks and Representative Offices of Banks Domiciled Abroad	1	25 Juli 2023 July 25, 2023	Bank Indonesia
Undangan Forum Diskusi Makroprudensial dengan topik "Arah Kredit Perbankan 2023 di Tengah Tantangan Domestik dan Global" Invitation to Macroprudential Discussion Forum with the topic "Banking Credit Direction in 2023 amidst Domestic and Global Challenges"	1	26 Juli 2023 July 26, 2023	Bank Indonesia
Peluang Perdagangan Karbon dalam Upaya Dekarbonisasi Carbon Trading Opportunities in Decarbonization Efforts	1	27 Juli 2023 July 27, 2023	Otoritas Jasa Keuangan



Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
<p>Sosialisasi Perubahan Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di Papan Akselerasi</p> <p><i>Dissemination of Changes to Regulation Number I-V concerning Special Provisions for Listing of Shares and Equity Securities Other than Shares Issued by Listed Companies on the Acceleration Board</i></p>	1	<p>03 Agustus 2023</p> <p><i>August 03, 2023</i></p>	IDX
<p>Sosialisasi PBI tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia</p> <p><i>PBI Dissemination regarding Bank Indonesia Consumer Protection</i></p>	2	<p>04 Agustus 2023</p> <p><i>August 04, 2023</i></p>	Bank Indonesia
<p>Pelatihan Karyawan Kantor Cabang Manado</p> <p><i>Training for Manado Branch Office Employees</i></p>	1	<p>08 Agustus 2023</p> <p><i>August 08, 2023</i></p>	Bank Woori Saudara
<p>Sosialisasi Transaksi Swap Lindung Nilai Bank dengan Bank Indonesia</p> <p><i>Dissemination of Bank Hedging Swap Transactions with Bank Indonesia</i></p>	2	<p>14 Agustus 2023</p> <p><i>August 14, 2023</i></p>	Bank Indonesia
<p>Sosialisasi Compliance Refreshment</p> <p><i>Compliance Refreshment Dissemination</i></p>	1	<p>22 Agustus 2023</p> <p><i>August 22, 2023</i></p>	IDX
<p><i>Leadership in Changing Atmosphere</i></p>	1	<p>24 Agustus 2023</p> <p><i>August 24, 2023</i></p>	Otoritas Jasa Keuangan
<p><i>Meeting for Overseas Network Compliance Officers</i></p>	1	<p>24 Agustus 2023</p> <p><i>August 24, 2023</i></p>	Woori Bank Korea
<p><i>Workshop on Assistance in the Implementation of Risk-Based AML/CFT/CPF Programs in the Financial Services Sectors 2023</i></p>	1	<p>28 Agustus 2023</p> <p><i>August 28, 2023</i></p>	Otoritas Jasa Keuangan
<p>Komunikasi Awal Ketentuan Mengenai Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Workshop Laporan Kredit atau Pembiayaan Ultra Mikro</p> <p><i>Initial Communication of Provisions Regarding the Macroprudential Liquidity Incentive (KLM) Policy and Workshop on Credit Reports or Ultra Micro Financing</i></p>	1	<p>28 Agustus 2023</p> <p><i>August 28, 2023</i></p>	Bank Indonesia
<p>Diskusi Instrumen Operasi Moneter Valas Berupa Term Deposit Valas Devisa Hasil Ekspor sebagai Instrumen Penempatan Devisa Hasil Ekspor</p> <p><i>Discussion of Foreign Exchange Monetary Operation Instruments in the Form of Term Deposits of Foreign Exchange from Export Proceeds as an Instrument for Placing Foreign Exchange from Export Proceeds</i></p>	1	<p>29 Agustus 2023</p> <p><i>August 29, 2023</i></p>	Bank Indonesia
<p>Sosialisasi Healthy Productive Women Worker Movement</p> <p><i>Dissemination of the Healthy Productive Women Worker Movement</i></p>	2	<p>30 Agustus 2023</p> <p><i>August 30, 2023</i></p>	Dinas Kesehatan Department of Health
<p>Sosialisasi Dampak NPWP 16 Digit dan NITKU 22 Digit kepada ILAP (Otoritas Jasa Keuangan)</p> <p><i>Dissemination of the Impact of 16 Digit NPWP and 22 Digit NITKU to ILAP (Otoritas Jasa Keuangan)</i></p>	2	<p>19 September 2023</p> <p><i>September 19, 2023</i></p>	DJP
<p>Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum</p> <p><i>Dissemination of Otoritas Jasa Keuangan Regulations regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks</i></p>	3	<p>19 September 2023</p> <p><i>September 19, 2023</i></p>	Otoritas Jasa Keuangan
<p>Peluncuran IDX New Listing Information</p> <p><i>Launch of IDX New Listing Information</i></p>	1	<p>20 September 2023</p> <p><i>September 20, 2023</i></p>	IDX
<p>Peluang dan Tantangan Fintech P2P Lending di Era Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)</p> <p><i>Opportunities and Challenges for Fintech P2P Lending in the Era of the Financial Sector Development and Strengthening Law (UU P2SK)</i></p>	1	<p>21 September 2023</p> <p><i>September 21, 2023</i></p>	Otoritas Jasa Keuangan
<p><i>Meeting for Overseas Network Compliance Officers</i></p>	1	<p>21 September 2023</p> <p><i>September 21, 2023</i></p>	Woori Bank Korea
<p><i>Securing the Future of Digital Ecosystem: Navigating Regulations of Approval Application and Cyber Resilience in Payment System</i></p>	1	<p>27 September 2023</p> <p><i>September 27, 2023</i></p>	Bank Indonesia
<p><i>E-Learning "Email Phishing Secure Awareness"</i></p>	7	<p>03 Oktober 2023</p> <p><i>October 03, 2023</i></p>	Bank Woori Saudara
<p>Seminar Free Float dan Penggunaan Form E009 pada Sistem Pelaporan SPE IDXnet</p> <p><i>Seminar on Free Float and Use of Form E009 in the IDXnet SPE Reporting System</i></p>	1	<p>06 Oktober 2023</p> <p><i>October 06, 2023</i></p>	IDX
<p>Sosialisasi Pengendalian Internal</p> <p><i>Internal Control Dissemination</i></p>	1	<p>13 Oktober 2023</p> <p><i>October 13, 2023</i></p>	EY Han Young
<p>ACMF International Conference 2023</p>	1	<p>17 Oktober 2023</p> <p><i>October 17, 2023</i></p>	ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)
<p><i>Meeting for Overseas Network Compliance Officers</i></p>	1	<p>17 Oktober 2023</p> <p><i>October 17, 2023</i></p>	Woori Bank Korea
<p>Webinar "Managing Environmental, Social and Governance Risk and Opportunities"</p>	1	<p>19 Oktober 2023</p> <p><i>October 19, 2023</i></p>	Otoritas Jasa Keuangan

Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
World Financial Innovation Series 2023 Conference	1	24 - 25 Oktober 2023 October 24 - 25, 2023	World Financial Innovation Series (WFIS)
Focus Group Discussion (FGD) Persamaan Persepsi Perizinan Kelembagaan, Pengurus dan Kepemilikan Bank Umum Konvensional Focus Group Discussion (FGD) on Similarities in Perceptions of Institutional Licensing, Management and Ownership of Conventional Commercial Banks	2	26 - 27 Oktober 2023 October 26 - 27, 2023	Otoritas Jasa Keuangan
Pemintaan Tanggapan dan Undangan Rapat Dengar Pendapat atas Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> bagi Lembaga Jasa Keuangan Request for Response and Invitation to Hearing Meeting on the Draft Otoritas Jasa Keuangan Regulation concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions	2	30 Oktober 2023 October 30, 2023	Otoritas Jasa Keuangan
Diseminasi Hasil Pengukuran <i>Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing</i> (FIR on ML/TF) Tahun 2023 Dissemination of Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) Measurement Results in 2023	1	02 November 2023 November 02, 2023	PPATK
Sosialisasi Modul Laporan Rencana Bisnis Bank Dissemination of the Bank Business Plan Report Module	1	03 November 2023 November 03, 2023	Otoritas Jasa Keuangan
Undangan <i>Refreshment</i> Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Sistem Pembayaran dan <i>Financial Market Infrastructure</i> Bank Indonesia serta Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (SP & FMI BI serta KPDPN) Tahun 2023 Invitation to Refreshment of Compliance Assessment Results Report (LHPK) of the Payment System and Financial Market Infrastructure of Bank Indonesia and the National Black List Management Office (SP & FMI BI and KPDPN) in 2023	1	03 November 2023 November 03, 2023	Bank Indonesia
Undangan Sosialisasi <i>Resolution Plan</i> & Premi PRP di Jakarta Invitation to Dissemination of Resolution Plan & PRP Premium in Jakarta	1	08 November 2023 November 08, 2023	LPS
Pengawasan <i>Market Conduct</i> dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Pasca Penerbitan POJK No. 6/POJK.07/2022 dan UU P2SK Market Conduct Supervision and Consumer Protection in the Financial Services Sector Post Issuance of POJK Number 6/POJK.07/2022 and the P2SK Law	3	10 November 2023 November 10, 2023	LPPI
<i>Meeting for Overseas Network Compliance Officers</i>	1	16 November 2023 November 16, 2023	Woori Bank Korea
Sosialisasi Menjawab Tantangan Bisnis: dari Modal hingga Penerapan <i>Best Practices</i> Dissemination of Answering Business Challenges: from Capital to Implementing Best Practices	3	24 November 2023 November 24, 2023	LPPI
Sosialisasi Pasar Uang Money Market Dissemination	1	30 November 2023 November 30, 2023	Bank Indonesia
Undangan Kehadiran dalam Bank Indonesia Bersama Masyarakat (BIRAMA) 2023 Invitation to Attend Bank Indonesia Together with the Community (BIRAMA) 2023	1	30 November 2023 November 30, 2023	Bank Indonesia
<i>Cybersecurity and Data Privacy in Practice: Enhancing Preventions Against Crime in the Financial Sector</i>	1	04 Desember 2023 December 04, 2023	IDX
<i>Enhancing ESG Through Best Practices in Accounting</i>	1	07 Desember 2023 December 07, 2023	Otoritas Jasa Keuangan
Undangan Sosialisasi Ketentuan Bank Umum Invitation to Commercial Bank Regulations Dissemination	5	07 Desember 2023 December 07, 2023	Otoritas Jasa Keuangan
Sosialisasi Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Dissemination of Guidelines for Preventing and Handling Sexual Violence in the Workplace	6	08 - 29 Desember 2023 December 08 - 29, 2023	Bank Woori Saudara
Undangan <i>High-Level Meeting</i> Gubernur Bank Indonesia dengan Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) Invitation to the High-Level Meeting of the Governor of Bank Indonesia with the Indonesian Money Market and Foreign Exchange Market Association (APUVINDO)	1	13 Desember 2023 December 13, 2023	Bank Indonesia
Diseminasi PPATK "Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara Melalui Implementasi Regulasi Mengenai Penundaan, Penghentian, dan Pemblokiran Transaksi," Dissemination of PPATK "Securing the Proceeds of Crime at Cross Borders Through the Implementation of Regulations Concerning Postponement, Suspension and Blocking of Transactions,"	1	14 Desember 2023 December 14, 2023	PPATK
Sosialisasi Kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard 2023 Dissemination of ASEAN Corporate Governance Scorecard Criteria 2023	1	20 Desember 2023 December 20, 2023	IDX
<i>Meeting for Overseas Network Compliance Officers</i>	1	21 Desember 2023 December 21, 2023	Woori Bank Korea
Otoritas Jasa Keuangan's Year-End Knowledge Sharing Session	1	22 Desember 2023 December 22, 2023	Otoritas Jasa Keuangan



Satuan Kerja Manajemen Risiko

Risk Management Work Unit

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) merupakan Satuan Kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. Satuan kerja ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus untuk membawahi fungsi manajemen risiko.

The Risk Management Work Unit is a Work Unit that is independent from operational work units (risk taking units) and work units that carry out internal control functions. This work unit is directly responsible to the Director who is specifically assigned to oversee the risk management function.

Dasar Hukum

Legal Basis

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.03/2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.*
- *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 4/POJK.03/2016 concerning Assessment of the Soundness Level of Commercial Banks.*
- *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 18/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks.*
- *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 27 of 2022 concerning the Second Amendment to the Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 11/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Banks.*
- *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 11/POJK.03/2022 concerning the Implementation of Information Technology by Commercial Banks.*
- *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 31/POJK.03/2019 concerning the Requirement to Meet Leverage Ratios for Commercial Banks.*
- *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 39/POJK.03/2019 concerning Implementation of Anti Fraud Strategy for Commercial Banks.*
- *Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 37/POJK.03/2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports.*

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum.
- Surat Keputusan Direksi Nomor 006/KEP-DIR/A-05/I/22 Tanggal 30 Maret 2022 Tentang Kebijakan Manajemen Risiko.
- Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter Number 24/SEOJK.03/2021 concerning Calculation of Risk-Weighted Assets for Credit Risk Using Standard Approach for Commercial Banks.
- Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter Number 6/SEOJK.03/2020 concerning Calculation of Risk-Weighted Assets for Operational Risk Using Standard Approach for Commercial Banks.
- Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter (SEOJK) Number 23/SEOJK.03/2022 concerning Calculation of Risk-Weighted Assets for Market Risk for Commercial Banks.
- Board of Directors Decree Number 006/KEP-DIR/A05/I/22 dated 30 March 2022 concerning Risk Management Policy.

Pedoman Kerja SKMR Risk Management Work Unit Work Guidelines

Penerapan Manajemen Risiko secara efektif Bank secara individu diputuskan melalui Keputusan Direksi No. 006/KEPDIR/A-05/III/22 tentang kebijakan Manajemen Risiko. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh Risiko sebagaimana dimaksud adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik; dan Risiko Kepatuhan.

The implementation of effective Risk Management by Bank as an individual is decided through Board of Directors Decree Number 006/KEP-DIR/A-05/III/22 concerning Risk Management policies. Implementation of Risk Management as referred to includes:

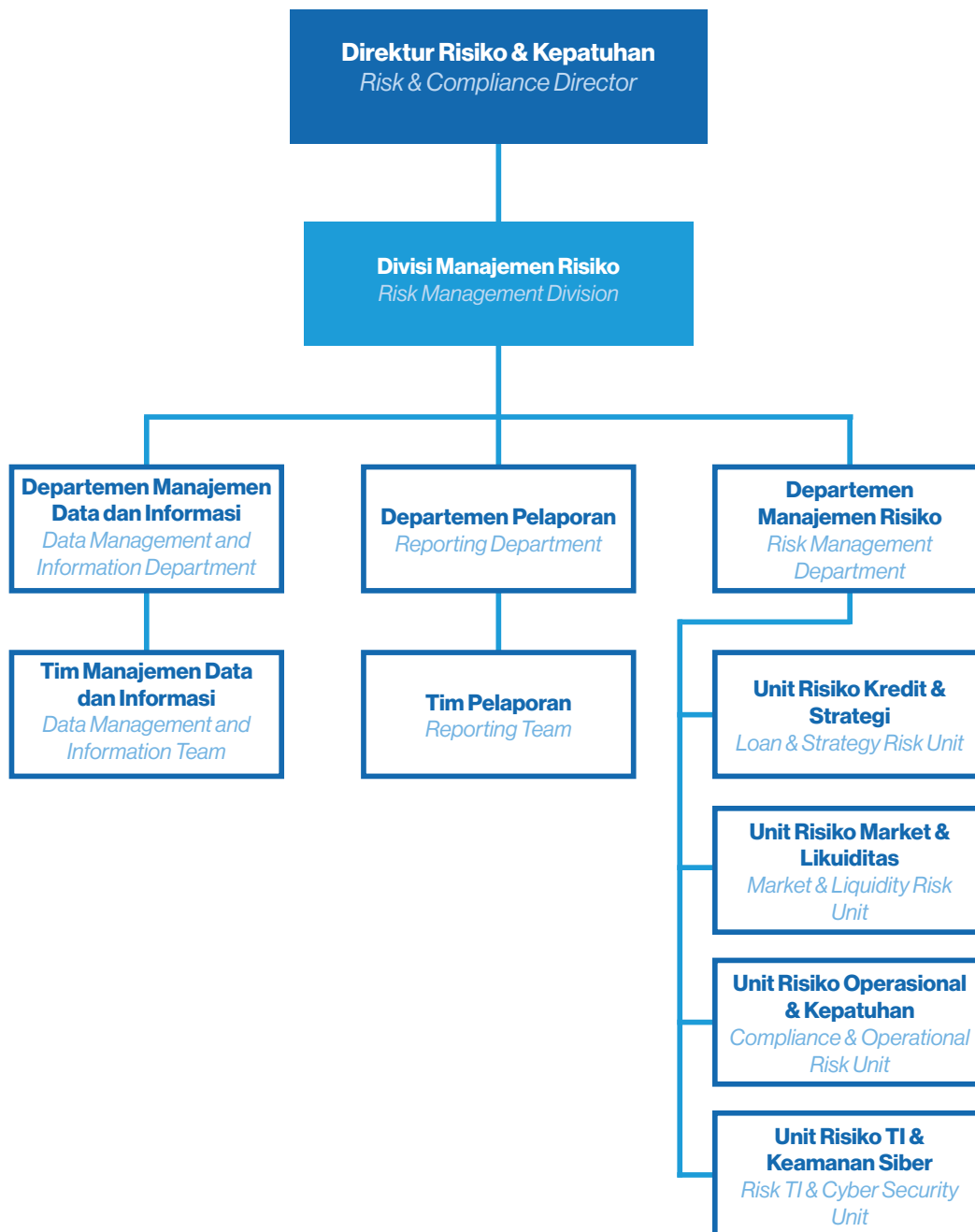
1. *Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners;*
2. *Adequacy of Risk Management policies and procedures and setting of Risk limits;*
3. *Adequacy of the process of identifying, measuring, monitoring, and controlling Risk, as well as the Risk Management information system; and*
4. *Comprehensive internal control system. The risks referred to are Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk; and Compliance Risk.*

Struktur Organisasi SKMR

Risk Management Work Unit Organizational Structure

Pada tahun 2023, SKMR didukung oleh 16 (enam belas) karyawan termasuk Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko. Kepala SKMR bertanggung jawab kepada Direktur Risiko & Kepatuhan.

In 2023, Risk Management Work Unit was supported by 16 (sixteen) employees, including the Head of the Risk Management Work Unit. The Head of Risk Management Work Unit is responsible to the Risk & Compliance Director.



Profil Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko Profile of Head of Risk Management Work Unit

Tahun 2023, Kepala SKMR dijabat oleh Johan Barlian Putra yang diangkat pada tanggal 8 Mei 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 024/KEP.DIR/HC.II/V/2023 tanggal 2 Mei 2023.

In 2023, the Head of Risk Management Work Unit is held by Johan Barlian Putra who was appointed on May 8, 2023 based on Board of Directors Decree Number 024/KEP.DIR/HC.II/V/2023 dated May 2, 2023.

Johan Barlian Putra

Kepala SKMR
Head of Risk Management Work Unit

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>
Usia <i>Age</i>	49 tahun <i>49 years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta <i>Jakarta</i>
Dasar Pengangkatan <i>Legal Basis</i>	Surat Keputusan Direksi Nomor 024/KEP.DIR/HC.II/V/2023 Tanggal 2 Mei 2023 <i>Board of Directors Decree Number 024/KEP.DIR/HC.II/V/2023 dated May 2, 2023</i>
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	S1 - Agronomi - Institut Pertanian Bogor (IPB) - 1998 <i>Bachelor of Agronomy - Bogor Agricultural University (IPB) - 1998</i>
Riwayat Pekerjaan <i>Job Experience</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Manajemen Risiko (2023 - sekarang) • Pemimpin KC Cirebon (2022 - 2023) • Pemimpin KC Purwokerto (2021 - 2022) • Pemimpin KC Semarang (2019 - 2021) • Kepala Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan (2018 - 2019) • Kepala Departemen Manajemen Risiko (2012 - 2018) • Kepala Departemen Compliance (2010 - 2012) • Kepala Unit Compliance (2008 - 2010)
Sertifikasi yang dimiliki <i>Owned Certificate</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 4 • Sertifikasi General Banking Tingkat 2 • Sertifikasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR), Sub Bidang Pengelolaan Transfer Dana Bank Jenjang 6 • Sertifikasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR), Sub Bidang Pengelolaan Uang Tunai Jenjang 6

Sertifikasi yang Dimiliki Karyawan SKMR *Certifications Owned by Risk Management Work Unit Employees*

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem manajemen risiko di Bank, karyawan SKMR juga dibekali dengan pengetahuan dan kompetensi yang cukup, termasuk program sertifikasi, baik tingkat nasional maupun internal, serta program sertifikasi lainnya.

To increase the effectiveness of the implementation of the risk management system at the Bank, Risk Management Work Unit employees are also equipped with sufficient knowledge and competence, including certification programs, both national and internal levels, as well as other certification programs.

Berikut daftar sertifikasi yang dimiliki karyawan SKMR per 31 Desember 2023:

The following is a list of certifications owned by Risk Management Work Unit employees as of December 31, 2023:

Nama dan Jenis Sertifikat <i>Name and Type of Certification</i>	Jumlah Auditor Internal yang Memiliki <i>Number of Employees Who Have</i>
Manajemen Risiko <i>Risk Management</i>	12
Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah <i>Payment System and Rupiah Currency Management</i>	6
General Banking <i>General Banking</i>	6
Anti Fraud <i>Anti Fraud</i>	-

Tugas dan Tanggung Jawab SKMR *SKMR Duties and Responsibilities*

Tugas dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko meliputi:

The duties and responsibilities of the Risk Management work unit include:

- Pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
- Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*.
- Kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko.
- Pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru.
- Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (*internal model*).

- *Monitor the implementation of the Risk Management strategy that has been approved by the Board of Directors.*
- *Monitor overall (composite) Risk position, per type of Risk, and per type of functional activity and conduct stress testing.*
- *Periodic review of the Risk Management process.*
- *Review of proposed new activities and/or products.*
- *Evaluation of the accuracy of the model and the validity of the data used to measure risk, for Banks using the model for internal purposes (internal model).*

- Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan/atau kepada komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki.
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada presiden direktur atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite Manajemen Risiko secara berkala.
- *Provide recommendations to the operational work unit (risk-taking unit) and/or to the Risk Management committee, according to their authority.*
- *Prepare and submit Risk profile reports to the President Director or a specially assigned director and the Risk Management committee on a regular basis.*



Pelaksanaan Program Kerja SKMR Tahun 2023

Implementation of the Risk Management Work Unit Work Program in 2023

Kegiatan pengelolaan risiko yang dilakukan Bank sepanjang tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan eksposur risiko secara keseluruhan (*composite*) maupun per jenis risiko, dan per jenis aktivitas fungsional termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
2. Agresif dalam implementasi budaya sadar risiko pada semua tingkat organisasi.
3. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Yang frekuensi penyampaian laporan dapat ditingkatkan dalam hal terdapat kondisi pasar berubah dengan cepat.
4. Mengkaji usulan produk dan/atau aktivitas baru, termasuk dalam pengkajian adalah penilaian kemampuan Bank untuk melakukan aktivitas dan/atau produk baru dan kajian usulan perubahan sistem dan prosedur.
5. Memantau implementasi kebijakan, strategis, dan pedoman penerapan manajemen risiko yang direkomendasikan oleh *Risk Management Committee* (RMC) dan/atau yang telah disetujui oleh Direksi.
6. Mengevaluasi akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko, apabila menggunakan model untuk keperluan intern (*internal Model*) dan/atau regulator.
7. Menerapkan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit sesuai SEOJK No 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 dengan menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum. Perubahan metodologi perhitungan dalam ketentuan tersebut meliputi perubahan bobot risiko lebih granular dan dalam jumlah *bucket* yang lebih banyak.

The risk management activities carried out by the Bank throughout 2023 can be described as follows:

1. *Monitor risk exposure as a whole (composite) as well as per type of risk, and per type of functional activity, including monitor compliance with risk tolerances and limits established.*
2. *Aggressive in implementing risk awareness culture at all levels of the organization.*
3. *Prepare and submit risk profile reports to the Board of Directors and Board of Commissioners. The frequency of submitting reports can be increased if market conditions change rapidly.*
4. *Review proposed new products and/or activities, including the review on the Bank's ability to carry out new activities and/or products and review proposed changes to systems and procedures.*
5. *Monitor the implementation of risk management policies, strategies and guidelines recommended by the Risk Management Committee (RMC) and/or approved by the Board of Directors.*
6. *Evaluate the model accuracy and the validity of the data used to measure risk, when using the model for internal purpose (internal model) and/or regulators.*
7. *Apply the calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk in accordance with SEOJK Number 24/SEOJK.03/2021 dated October 7, 2021 using the Standard Approach for Commercial Banks. Changes in the calculation methodology in these provisions include changes to more granular risk weights and in a larger number of buckets.*

8. Mengimplementasi Perhitungan ATMR Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Standar, antara lain dengan melakukan penyusunan *gap analysis* dan rekomendasi pemenuhan persyaratan ATMR Operasional Pendekatan Standar sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Melakukan *cleansing* data kerugian Risiko Operasional sesuai kriteria Otoritas Jasa Keuangan serta Menyampaikan hasil uji coba dan *industrial test* kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan.
 9. Persiapan implementasi perhitungan ATMR Risiko Pasar dalam perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan menggunakan Pendekatan Standar sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 10. Mengevaluasi dan menetapkan perubahan suku bunga dana dan pinjaman, suku bunga dasar kredit, serta limit-limit yang berkaitan dengan *Asset Liability Management*.
 11. Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit yang terus dilakukan secara rutin termasuk restrukturisasi kredit yang terdampak oleh COVID-19, baik per kategori kredit (Korporasi, *Consumer* dan *Small and Medium Enterprise* (SME) *Medium*, *Small* serta Mikro).
 12. Pembentukan Unit khusus dibawah Satuan Kerja Manajemen risiko yang memiliki fungsi melakukan analisa terhadap pelaksanaan IT dan *Cyber Security Assessment*.
8. *Implement Operational Risk RWA Calculation using the Standard Approach, including by preparing gap analysis and recommendations for fulfilling the Standard Approach Operational RWA requirements in accordance with the Otoritas Jasa Keuangan Provisions, Clean Operational Risk loss data according to Otoritas Jasa Keuangan criteria and Submit trial results and industrial test to Otoritas Jasa Keuangan according to the specified timeline.*
 9. *Preparation for implementing Market Risk RWA calculations in calculating the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM) ratio using the Standard Approach in accordance with Otoritas Jasa Keuangan approval.*
 10. *Evaluate and determine changes in interest rates for funds and loans, basic credit interest rates, and limits related to Asset Liability Management.*
 11. *Monitor loan quality regularly, including loan restructuring affected by COVID-19, either by loan category (Corporate, Consumer and Small and Medium Enterprise (SME) Medium, Small and Micro).*
 12. *Establishment of a special unit under the Risk Management Work Unit which has the function of analyzing the implementation of IT and Cyber Security Assessment.*



Program Peningkatan Kompetensi SKMR

Risk Management Work Unit Competency Improvement Program

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, karyawan SKMR terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya dengan mengikuti program pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh internal Bank maupun oleh pihak ketiga.

To support the implementation of their duties and responsibilities, Risk Management Work Unit employees continue to strive to increase their capacity and competence by participating in education and training programs held internally by the Bank and by third parties.

Adapun program pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh karyawan SKMR tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The education and training programs attended by Risk Management Work Unit employees in 2023 are as follows:

Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Integrity Pact, Antifraud and Sanction Awareness, and, Ethic Code	16	Mei - Desember 2023 May - December 2023	Divisi Human Capital Human Capital Division
Data Analyst With SQL & Python	1	21 Agustus - 23 Oktober 2023 August 21 - October 23, 2023	DQLab
E-Learning Email Phising Secure Awareness	16	9 - 20 Oktober 2023 October 9 - 20, 2023	Bank Woori Saudara
General Banking (Certificate Refreshment Program)	6	13 - 17 Februari 2023 February 13 - 17, 2023	Bank Woori Saudara
Induction Program	3	28 Maret - 9 November 2023 March 28 - November 9, 2023	Bank Woori Saudara
Liquidity Risk Management	2	9 Desember 2023 December 9, 2023	Efektifpro
Market Update, Referral, Manfaat Live Trading, dan Risiko Kerugiannya Market Update, Referral, Benefits of Live Trading, and Risks of Losses	14	13 Maret 2023 March 13, 2023	PT Mirae Asset Indonesia
Pencegahan Serangan Ransomware Ransomware Attack Prevention	12	19 - 26 Mei 2023 May 19 - 26, 2023	Divisi Human Capital Human Capital Division
Product Knowledge: Eazy Medicash	8	18 Januari 2023 January 18, 2023	Allianz
Regional Group Head Workshop	1	14 Juni 2023 June 14, 2023	Bank Woori Saudara
Sertifikasi SPPUR Jenjang 5: Pengelolaan Transfer Dana Bank SPPUR Certification Level 5: Bank Fund Transfer Management	4	11 Februari - 6 Agustus 2023 February 11 - August 6, 2023	LPPI
Sosialisasi Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Dissemination of Guidelines for Preventing and Handling Sexual Harassment in the Workplace	9	8 - 29 Desember 2023 December 8 - 29, 2023	Bank Woori Saudara
Sosialisasi Pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD) Bank & Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHESDA) Dissemination of Reporting Bank Foreign Exchange Traffic (LLD) & Foreign Exchange Results from Natural Resources Exports (DHESDA)	1	25 September 2023 September 25, 2023	Bank Indonesia
Sosialisasi Pengendalian Internal Internal Control Dissemination	3	13 Oktober 2023 October 13, 2023	EY Han Young
Sosialisasi Perpajakan dan Laporan Pajak SPT Tahunan Dissemination of Taxation and Annual Tax Return Reporting	9	13 Februari - 6 Maret 2023 February 13 - March 6, 2023	Divisi Human Capital Human Capital Division
Sosialisasi QRIS di WON by BWS Dissemination of QRIS at WON by BWS	4	7 Juni 2023 June 7, 2023	Divisi Digital Banking Digital Banking Division
Supervisory Development Program (SDP XIII)	1	2 Mei - 28 Agustus 2023 May 2 - August 28, 2023	MPowerment
Training Awareness ISO 270001	2	14 April 2023 April 14, 2023	PT Catur Daya Solusi
Training Cyber Security	3	1 - 2 April 2023 April 1 - 2, 2023	MPowerment
Webinar Sosialisasi Ketentuan Pasar Uang Webinar on Dissemination of Money Market Regulations	1	30 November 2023 November 30, 2023	Bank Indonesia



Audit Eksternal

External Audit

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Bank dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Akuntan Publik ditunjuk oleh Pemegang Saham melalui forum RUPS. Oleh RUPS, penunjukan Akuntan Publik dipercayakan kepada Dewan Komisaris yang akan memutuskan berdasarkan usulan dari Direksi dengan alasan dan besarnya kompensasi yang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut. Auditor Eksternal harus independen dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris dan pihak yang berkepentingan di Bank. Bank wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi Audit Independen sehingga memungkinkan Audit Independen memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuaian laporan keuangan Bank dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia. Audit Independen wajib memberitahu Bank bila ada kejadian dalam Perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The function of independent oversight of the Bank's financial aspects is carried out by External Audit examinations by Public Accountants and Public Accounting Firms (KAP).

The Shareholders appoint the Public Accountant through the GMS forum. By the GMS, the appointment of a Public Accountant is entrusted to the Board of Commissioners, which will decide based on the proposal from the Board of Directors with the reasons and the amount of compensation proposed for the External Auditor. External Auditors must be independent of the influence of the Board of Directors, Board of Commissioners, and interested parties in the Bank. Banks are required to provide all accounting records and supporting data necessary for the Independent Audit to enable the Independent Audit to give its opinion on the fairness, compliance, and conformity of the Bank's financial statements with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK). The Independent Audit is obliged to notify the Bank if there are events within the Company that are not by the applicable laws and regulations.



Independensi

Independency

Tim Audit yang ditugaskan adalah independen sesuai dengan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP) dan Peraturan Pasar Modal sehubungan dengan audit Bank. Tidak terdapat hubungan personal, pemberian jasa profesional lain atau hubungan bisnis antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan Bank yang dapat mempengaruhi independensi KAP sebagai auditor independen.

The assigned Audit Team is independent in accordance with the Public Accountant Examination Standards (SPAP), and Capital Market Regulations about Bank audits. There is no personal relationship, the provision of other professional services, or business relationship between the Public Accounting Firm (KAP) and the Bank that can affect the independence of the KAP as an independent auditor.

Fungsi Audit Ekstern External Audit Function

Laporan keuangan bank setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai audit eksternal yang independen. Pemilihan KAP didasarkan atas ketentuan yang berlaku antara lain bahwa KAP yang ditunjuk merupakan entitas yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan KAP yang ditunjuk tidak melakukan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan bank lebih dari 7 (tujuh) tahun kumulatif.

Akuntan publik merupakan organ eksternal Bank yang berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Bank terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

The Bank's financial statements are audited annually by a Public Accounting Firm (KAP) as an independent external audit. The selection of the KAP is based on the applicable provisions, including that the appointed KAP is an entity registered with the Otoritas Jasa Keuangan, and the appointed KAP has not carried out audit work on the Bank's Financial Statements for more than 7 (seven) cumulative years.

The public accountant is an external organ of the Bank whose function is to provide opinions regarding the conformity of the presentation of the Bank's financial statements against the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia.

Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Compliance with Indonesian Financial Accounting Standards

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Bank dan patuh terhadap SAK yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Management is responsible for presenting the Bank's financial statements and complying with the applicable SAK in Indonesia established by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) and applicable laws and regulations.

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit External Audit Procedures and Auditing Standards

- Audit atas laporan keuangan Bank dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.
- Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan
- *An audit of the Bank's financial statements is carried out by the professional standards of a Public Accountant, which includes all audit procedures deemed necessary according to the circumstances.*
- *An audit includes testing and evaluating the internal control system and examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit will also include an assessment of the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as an*

dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.

- Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan.
- Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen.
- Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Bank untuk di *review* oleh badan atau otoritas terkait. Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

assessment of the overall presentation of the financial statements by the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) issued by IAI.

- *As part of the audit process, the Public Accounting Firm (KAP) also conducts questions and answers to management regarding management statements presented in the financial statements.*
- *An audit contains an inherent risk if material errors and irregularities exist. If there is such a thing, KAP will convey it to management.*
- *Management approves KAP audit work papers on the Bank for review by the relevant body or authority. The audit is carried out based on the Professional Standards for Public Accountants issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). If there is financial assistance from the Government of the Republic of Indonesia, then the audit is carried out based on the State Financial Audit Standards (SPKN) issued by the Financial Supervisory Agency (BPK) of the Republic of Indonesia.*

Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik Public Accountant Appointment Mechanism

Laporan keuangan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

Financial statements must be audited by a public accountant registered with the Otoritas Jasa Keuangan. The appointment of a public accountant who will provide audit services on annual historical financial information must obtain approval from the Board of Commissioners.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik telah sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan dan merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

*The appointment of the Public Accounting Firm is by the resolutions of the Annual GMS. It is a Public Accountant Firm and Public Accountant (*partner-in-charge*) registered in Otoritas Jasa Keuangan.*

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi aspek-aspek:

Assignment of audits to Public Accountants and KAP has fulfilled these aspects:

- Kapasitas KAP
- Legalitas perjanjian kerja
- Ruang lingkup audit
- Standar Profesional Akuntan Publik
- Komunikasi antara KAP dengan pihak terkait

- *Capacity of KAP*
- *Legality of work agreements*
- *Scope of the audit*
- *Public Accountant Professional Standards*
- *Communication between KAP and related parties*



Akuntan Publik Tahun 2023

Public Accountant in 2023

Berdasarkan RUPS Tahunan pertanggungjawaban kinerja tahun buku 2022 yang diselenggarakan tanggal 30 Maret 2023, Pemegang Saham memutuskan terkait Mata Acara ke-3 tentang Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan imbalan jasa Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apa pun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Menindaklanjuti keputusan tersebut berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 006/BWS.KEP-DEKOM/IX/2023 tanggal 27 September 2023 dan Surat Perikatan Audit Nomor 198/SSR-HO/BWS-A23/MS/X-2023 tanggal 5 Oktober 2023 menyetujui penunjukkan KAP Suharli, Sugiharto & Rekan (Shinewing Indonesia) sebagai Akuntan Eksternal Bank Woori Saudara untuk tahun buku 2023.

Based on the Annual GMS for performance accountability for the 2022 financial year which was held on March 30, 2023, the Shareholders decided regarding the 3rd Agenda regarding the Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Bank's Financial Statements for the 2023 financial year as follows:

1. *Approved granting authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2023 financial year.*
2. *Approved granting authority to the Board of Commissioners to determine the fees for the services of the Public Accountant and other requirements for his appointment, and to appoint a Substitute Public Accountant if the appointed Public Accountant, for any reason, cannot complete the audit of the Company's Financial Statements for the 2023 financial year, provided that in selecting a Public Accountant, the Board of Commissioners must pay attention to recommendations from the Company's Audit Committee and meet the criteria as stipulated in POJK Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Firms in Financial Services Activities.*

Following up on this decision based on the Board of Commissioners' Approval Letter Number Number 006/BWS.KEP-DEKOM/IX/2023 dated September 27, 2023 and Audit Engagement Letter Number 198/SSR-HO/BWS-A23/MS/X-2023 dated October 5, 2023, approved the appointment of KAP Suharli, Sugiharto & Partners (Shinewing Indonesia) as the External Accountant of Bank Woori Saudara for the 2023 financial year.

Nama KAP KAP Name	KAP Suharli, Sugiharto & Rekan (Shinewing Indonesia) KAP Suharli, Sugiharto & Partners (Shinewing Indonesia)
Akuntan Accountant	Michell Suharli
Jasa Service	Audit umum atas Laporan Keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 General audit of the Bank's Financial Statements for the year ended December 31, 2023
Jasa Lainnya yang Diberikan Other Services Provided	-
Periode Penugasan Assignment Period	2023
Opini Opinion	Laporan Keuangan menyajikan secara wajar tanpa modifikasi Financial Statements presented fairly unmodified
Biaya Cost	Rp1.200.000.000 IDR1,200,000,000



Daftar Akuntan Publik

List of Public Accountants

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, Auditor Publik dibatasi paling lama untuk 7 (tujuh) tahun buku kumulatif.

Based on Government Regulation Number 20 of 2015 concerning the Practice of Public Accountants, Public Auditors are limited to a maximum of 7 (seven) cumulative financial years.

Tahun Buku Financial Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Jasa Service
2023	Suharli, Sugiharto & Rekan Nomor 614/KM.1/2020 Suharli, Sugiharto & Partners Number 614/KM.1/2020	Michell Suharli CPA STTD.AP-364/PB.122/2018	Audit atas laporan keuangan 31 Desember 2023 Audit of financial statements December 31, 2023
2022	Suharli, Sugiharto & Rekan Nomor 614/KM.1/2020 Suharli, Sugiharto & Partners Number 614/KM.1/2020	Michell Suharli CPA STTD.AP-364/PB.122/2018	Audit atas laporan keuangan 31 Desember 2022 Audit of financial statements December 31, 2022
2021	Suharli, Sugiharto & Rekan Nomor 614/KM.1/2020 Suharli, Sugiharto & Partners Number 614/KM.1/2020	Michell Suharli CPA STTD.AP-364/PB.122/2018	Audit atas laporan keuangan 31 Desember 2021 Audit of financial statements December 31, 2021
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No. S-39/PB.122/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners Number S-39/PB.122/2015	Jimmy Pangestu, S.E. STTD.AP-393/PB.122/2018	Audit atas laporan keuangan 31 Desember 2020 Audit of financial statements December 31, 2020
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No. S-39/PB.122/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners Number S-39/PB.122/2015	Jimmy Pangestu, S.E. STTD.AP-393/PB.122/2018	Audit atas laporan keuangan 31 Desember 2019 Audit of financial statements December 31, 2019
2018	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No. S-39/PB.122/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners Number S-39/PB.122/2015	Jimmy Pangestu, S.E. STTD.AP-393/PB.122/2018	Audit atas laporan keuangan 31 Desember 2018 Audit of financial statements December 31, 2018
2017	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No. S-39/PB.122/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners Number S-39/PB.122/2015	Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA 208/BL/STTD-AP/2012	Audit atas laporan keuangan 31 Desember 2017 Audit of financial statements December 31, 2017



Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal (SPI) mendukung pencapaian tujuan Bank serta mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi Bank. BWS menerapkan SPI sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Bank dan menjadi acuan kegiatan operasional Bank yang sehat, aman, dan terkendali.

SPI membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Sistem ini juga meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya.

The Internal Control System (SPI) supports the achievement of the Bank's objectives and identifies any possible events that could affect the Bank. BWS implements SPI as an important supervisory component in Bank management and serves as reference for healthy, safe and controlled Bank operational activities.

SPI assists the Board of Commissioners and Board of Directors in safeguarding the Bank's assets, ensuring the availability of reliable financial and managerial reporting, increasing the Bank's compliance with statutory provisions and regulations, and reducing the risk of losses, deviations and violations of prudential aspects. This system also increases organizational effectiveness and cost efficiency.



Dasar Hukum

Legal Basis

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.
- Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.
- Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter Number 35/SEOJK.03/2017 concerning Standard Guidelines of Internal Control Systems for Commercial Banks.



Tujuan Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Objectives of Implementing an Internal Control System

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*ongoing basis*) yang kualitas desain dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh pejabat dan pegawai Bank, dirancang untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai guna:

Internal Control System is a supervisory mechanism established by Bank management on ongoing basis the quality of the design and implementation of which is influenced by the Board of Commissioners, Board of Directors and all officers and employees of the Bank, designed to be able to provide adequate assurance to:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank. 2. Menjamin tersedianya laporan yang akurat. 3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. 4. Mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (<i>fraud</i>) dan pelanggaran aspek kehati-hatian. 5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Maintain and secure the Bank's assets.</i> 2. <i>Guarantee the availability of accurate reports.</i> 3. <i>Improve compliance with applicable regulations.</i> 4. <i>Reduce the impact of financial losses, irregularities including fraud and violations of prudential aspects.</i> 5. <i>Improve organizational effectiveness and increase cost efficiency.</i> |
|---|---|

Pedoman Sistem Pengendalian Internal *Internal Control System Guidelines*

BWS telah menyusun Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal yang menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Pedoman Sistem Pengendalian Internal BWS telah mengacu pada SEOJK Nomor 35/SEOJK.03/2017 yang mencakup 5 (lima) elemen pokok yang saling berkaitan, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian.
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko.
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi.
4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi.
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal BWS adalah untuk memastikan:

1. Semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur internal yang ditetapkan oleh Bank.
2. Tersedianya laporan yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya.
4. Mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

BWS has developed Standard Guidelines for Internal Control Systems which are the basis for sound and safe bank operations. BWS Internal Control System Guidelines refer to Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter Number 35/SEOJK.03/2017 which includes 5 (five) main elements that are interrelated, which are:

1. *Control by Management and Control Culture.*
2. *Risk Identification and Assessment.*
3. *Control Activities and Segregation of Duties.*
4. *Accounting, Information and Communication Systems.*
5. *Monitoring Activities and Correction of Deviations.*

The purpose of the BWS Internal Control System is to ensure:

1. *All business activities of the Bank have been carried out by the applicable laws and regulations, both regulations issued by the government, Bank supervisory authorities, and internal policies, provisions, and procedures established by the Bank.*
2. *Availability of accurate, complete, timely, and relevant reports needed to make appropriate and accountable decisions.*
3. *Increase effectiveness and efficiency in using assets and other resources.*
4. *Identify weaknesses and assess deviations early and reassess the fairness of existing policies and procedures at the Bank on an ongoing basis.*

Unsur-unsur lingkungan pengendalian di Bank dapat disampaikan bahwa lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan sikap, komitmen, perilaku, kepedulian dan langkah-langkah dari Komisaris dan Direksi, dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Bank. Sikap terhadap pentingnya pengendalian internal ini terdiri atas unsur-unsur lingkungan pengendalian yang meliputi:

- Struktur organisasi yang memadai.
- Gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen Bank.
- Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh pegawai.
- Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia Bank.
- Atensi dan arahan manajemen Bank dan komite lainnya, seperti Komite Manajemen Risiko.
- Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank dan penerapan manajemen risiko.

Elements of the control environment at the Bank can be conveyed that the control environment reflects the overall attitude, commitment, behavior, concern, and steps of the Commissioners and Board of Directors in carrying out the Bank's operational control activities. Attitudes towards the importance of internal control consist of elements of the control environment which include:

- *Adequate organizational structure.*
- *Leadership style and management philosophy of the Bank.*
- *Integrity and ethical values, and competence of all employees.*
- *Bank's human resources policies and procedures.*
- *Attention and direction from the Bank's management and other committees, such as the Risk Management Committee.*
- *External factors affecting the Bank's operations and the implementation of risk management.*

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Internal Control System Implementation

Secara garis besar tentang kegiatan pengendalian BWS dapat disampaikan bahwa sistem pengendalian melibatkan seluruh pegawai dan pejabat Bank, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian terlebih dahulu direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau setiap kegiatan Bank sehari-hari.

Aktivitas Pengendalian

BWS melaksanakan kegiatan aktivitas pengendalian dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Internal:

- Kaji ulang manajemen (*Top Level Reviews*) Direksi Bank secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari pejabat dan pegawai sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang kemajuan (realisasi) dibandingkan dengan target yang akan dicapai, seperti laporan keuangan

In general, regarding BWS control activities, the control system involves all employees and officials of the Bank, including the Board of Commissioners and the Board of Directors. Therefore, control activities are planned and implemented to control risks that may affect performance or result in losses for the Bank. Control activities also include establishing control policies and procedures and earlier verification processes to ensure that these policies and practices are consistently complied with and are activities that are an integral part of every function or every day-to-day activity of the Bank.

Control Activity

BWS carries out control activities in the context of implementing the Internal Control System:

- *Management review (Top Level Reviews) Bank Board of Directors periodically request explanations (information) and operational performance reports from officials and employees so that it is possible to review progress (realization) compared to targets to be achieved, such as financial statements compared*

dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (*fraud*).

- Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*). Kaji ulang ini dilaksanakan oleh *Internal Audit Division* dengan frekuensi yang lebih tinggi, baik kaji ulang secara harian, mingguan maupun bulanan.
- Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh satuan kerja manajemen risiko.
- Menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan *output* (laporan) yang dihasilkan oleh satuan kerja manajemen risiko.
- Melakukan kaji ulang atas realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna:
 - Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan.
 - Menetapkan persyaratan untuk tindakan dan perbaikan (*corrective action*).

Pengendalian Sistem Informasi dan Teknologi

- Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan ketentuan intern.
- Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
 - » Pengendalian umum (*general control*) meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan *software*, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *user workstation*, serta jaringan internal-eksternal.
 - » Pengendalian aplikasi (*application controls*) diterapkan terhadap program yang digunakan Bank dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat, dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

to planned budgets set. Based on this review, the Board of Directors immediately detects problems such as control weaknesses, financial statement errors, or other irregularities (fraud).

- *Operational Performance Review (Functional Review). This review is carried out by the Internal Audit Division with a higher frequency, daily, weekly and monthly reviews.*
- *Conduct a review of the risk assessment (risk profile report) produced by the risk management work unit.*
- *Analyze operational data related to risk and financial data, verify details and transaction activities compared to output (reports) generated by the risk management work unit.*
- *Conduct a review of the realization of the implementation of the work plan and budget to:*
 - *Identify causes of significant deviations.*
 - *Define requirements for corrective action.*

Control of Information Systems and Technology

- *The Bank verifies the accuracy and completeness of transactions and carries out authorization procedures by internal regulations.*
- *Information system control activities can be classified into two criteria: general controls and application controls.*
 - » *General control includes control over data center operations, software procurement and maintenance systems, access security, and development and maintenance of existing application systems. This general control is applied to mainframes, servers, users' workstations, and internal-external networks.*
 - » *Application controls are applied to programs used by the Bank to process transactions and ensure that all transactions are correct, accurate, and properly authorized. In addition, application controls must be able to provide the availability of an effective audit process and to check the correctness of the intended audit process.*

Pengendalian Aset Fisik

Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Bank.

- Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan, dan akses terbatas terhadap program komputer dan file data, serta membandingkan nilai Aset dan kewajiban Bank dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aset secara berkala.

Dokumentasi

- Bank sekurang-kurangnya memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem, dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai.
- Dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional Bank secara aktual, dan diinformasikan kepada pejabat dan pegawai.
- Atas suatu permintaan, dokumen harus senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor intern, akuntan publik, dan otoritas pengawasan Bank.
- Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh auditor intern ketika melakukan audit rutin maupun non rutin.

Selain berbagai hal di atas, dapat disampaikan juga aktivitas pemisahan fungsi yang merupakan bagian dalam aktivitas pengendalian yang dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional yaitu sebagai berikut:

- Mematuhi prinsip pemisahan fungsi ini, yang dikenal sebagai "Dual Control".
- Menetapkan prosedur (kewenangan), termasuk penetapan daftar petugas yang dapat mengakses suatu transaksi atau kegiatan usaha yang berisiko tinggi.
- Menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*). Seluruh aspek yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan tersebut diidentifikasi, diminimalisir, dan dipantau secara hati-hati oleh pihak lain yang independen.
- Dalam pelaksanaan pemisahan fungsi tersebut, Bank melakukan langkah-langkah, antara lain:

Control of Physical Assets

Physical asset control is carried out to ensure the implementation of physical security for the Bank's assets.

- This activity includes safeguarding assets, records, and limited access to computer programs and data files, as well as comparing the value of the Bank's assets and liabilities with the values listed on the control records, in particular checking the value of assets periodically.

Documentation

- Banks at least formalize and adequately document policies, procedures, systems and accounting standards and audit processes.
- The document must be updated regularly to describe the actual operational activities of the Bank, and to inform officials and employees.
- Upon request, documents must always be available for the benefit of the internal auditors, public accountants and the Bank's supervisory authority.
- The accuracy and availability of documents must be assessed by the internal auditors when conducting routine and non-routine audits.

In addition to the various things above, it can also be conveyed that the segregation of duties is part of the control activities, which is intended so that everyone in his position does not have the opportunity to make and hide mistakes or deviations in the implementation of his duties at all levels of the organization and all steps of operational activities, namely as follows:

- Follow this principle of separation of functions, known as "Dual Control".
- Establishing procedures (authorities), including establishing a list of officials who can access a high-risk transaction or business activity.
- Avoiding the granting of authority and responsibility which could lead to various conflicts of interest. All aspects that may give rise to a conflict of interest are identified, minimized and monitored carefully by another independent party.
- In implementing the segregation of duties, the Bank took steps, among others:

- » Menetapkan fungsi dan tugas tertentu pada Bank yang dipisahkan atau dialokasikan kepada beberapa orang dalam rangka mengurangi risiko terjadi manipulasi data keuangan atau penyalahgunaan aset Bank;
- » Pemisahan fungsi tersebut tidak terbatas pada kegiatan *front* dan *back office*, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap:
 - Persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran
 - Rekening nasabah dan rekening pemilik Bank
 - Transaksi dalam pembukuan Bank
 - Pemberian informasi kepada nasabah Bank
 - Penilaian terhadap kecukupan dokumentasi perkreditan dan pemantauan debitur setelah pencairan kredit
 - Kegiatan usaha lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang signifikan
 - Independensi fungsi manajemen risiko pada Bank
- » *Assign certain functions and tasks at the Bank that are separated or allocated to several people to reduce the risk of manipulation of financial data or misuse of Bank assets;*
- » *Separation of functions is not limited to front and back office activities but also in the context of controlling:*
 - *Approval of disbursement of funds and realization of expenditure*
 - *Customer accounts and Bank owner accounts*
 - *Transactions in the bookkeeping of the Bank*
 - *Provision of information to the Bank customers*
 - *Assessment of the adequacy of credit documentation and monitoring of debtors after credit disbursement*
 - *Other business activities that may give rise to a significant conflict of interest*
 - *The independence of the risk management function at the Bank*

Kesesuaian dengan Internal Control Integrated Framework *Compliance with Internal Control Integrated Framework*

Sistem pengendalian internal Bank telah sesuai dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO). Tujuan pengendalian internal menurut COSO meliputi tujuan operasional, tujuan pelaporan, dan tujuan kepatuhan. Hal ini sesuai dengan tujuan sistem pengendalian internal Bank yang telah diuraikan di atas.

Tujuan operasional berkaitan dengan efektivitas efisiensi operasi. Tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan yang memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh regulator maupun Bank. Sedangkan tujuan kepatuhan berkaitan dengan kepatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Menurut COSO, unsur-unsur pengendalian internal meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko

The Bank's internal control system complies with the Internal Control Integrated Framework developed by The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Internal control objectives, according to COSO, include operational purposes, reporting goals, and compliance objectives. This is to the objectives of the Bank's internal control system described above.

Operational objectives related to the effectiveness of operating efficiency. The purpose of reporting relates to the interests of financial reporting that meet the criteria of being reliable, timely, transparent, and other requirements set by the regulator and the Bank. Meanwhile, the compliance objective is related to the Bank's compliance with laws and regulations.

According to COSO, the elements of internal control include the following components:

1. *Control environment*
2. *Risk assessment*

3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Kegiatan pemantauan

3. Control activities
4. Information and Communication
5. Monitoring activities

Kelima unsur pengendalian internal menurut COSO sejalan dengan Elemen Sistem Pengendalian Internal Bank menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

The five elements of internal control according to COSO are in line with the Elements of the Bank's Internal Control System according to Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter Number 35/SEOJK.03/2017 concerning Standard Guidelines for Internal Control Systems for Commercial Banks.



Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Review of the Effectiveness of the Internal Control System

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Bank senantiasa melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama Bank harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan-satuan kerja operasional maupun Satuan Kerja Audit Internal. Bank juga memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian internal secara terus-menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal serta harus meningkatkan kapasitas Sistem Pengendalian Internal tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.

Evaluation of the Effectiveness of the Internal Control System The Bank continuously monitors the overall implementation of internal controls. Monitoring of the Bank's main risks must be prioritized and function as part of the Bank's daily activities, including periodic evaluations, both by operational work units and the Internal Audit Work Unit. The Bank also monitors and evaluates the adequacy of the internal control system continuously regarding changes in internal and external conditions and must increase the capacity of the Internal Control System so that its effectiveness can be improved.

Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan Bank dalam rangka memastikan terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, antara lain:

The Bank took steps to ensure the implementation of practical monitoring activities, among others:

- Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Bank.
 - Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian internal.
 - Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Bank dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional.
 - Mengintegrasikan Sistem Pengendalian Internal ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi/penyimpangan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas *irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang.
- *Ensure that the monitoring function has been clearly defined and well structured within the Bank's organization.*
 - *Establish work units/employees assigned to monitor the effectiveness of internal control.*
 - *Determine the appropriate frequency for monitoring activities based on the risks inherent in the Bank and the nature/frequency of changes that occur in operational activities.*
 - *Integrate the Internal Control System into operational activities and provide routine reports such as bookkeeping journals, management reviews, and statements regarding approval of exceptions/deviations from established policies and procedures (justification of irregularities), which are then reviewed.*

- Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan.
- Menetapkan informasi/*feedback* dalam format dan frekuensi yang tepat.
- *Conduct a review of the documentation and evaluation results from the work unit/employee assigned to monitor.*
- *Define information/feedback in the correct format and frequency.*



Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab dan telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal, termasuk menyetujui dan memantau kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian internal tersebut. Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

The Board of Commissioners has responsibility and has supervised the implementation of the Internal Control System, including approving and monitoring the Board of Directors policies that determine internal control. In carrying out its supervisory duties, powers, and responsibilities, the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee assist the Board of Commissioners.

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif serta telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif di setiap level organisasi. Sementara itu, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.

The Board of Directors is responsible for implementing a reliable and effective Internal Control System. It has made efforts to enhance an influential risk awareness culture at every level of the organization. Meanwhile, the Director in charge of the compliance function plays an active role in preventing any irregularities committed by management in establishing policies related to the prudence principle.

Berdasarkan hasil penelaahan dan berdasarkan diskusi bersama Manajemen, Komite Audit dan Dewan Komisaris menilai bahwa bahwa sistem pengendalian internal Bank telah memadai. Terhadap permasalahan yang muncul selalu diupayakan perbaikan dan dilakukan *monitoring* secara konsisten untuk memastikan Sistem Pengendalian Internal telah berjalan secara efektif.

Based on the results of the review and discussions with the Management, the Audit Committee and the Board of Commissioners consider the Bank's internal control system adequate. For any arising problems, improvements are always made, and consistent monitoring is carried out to ensure that the Internal Control System is running effectively.



Manajemen Risiko

Risk Management

BWS memandang penerapan manajemen risiko yang komprehensif merupakan aspek penting bagi Bank dalam mengelola berbagai risiko yang dihadapinya secara efektif. Oleh karena itu, Bank memberikan perhatian yang besar pada pelaksanaan manajemen risiko secara efektif dan efisien dalam aktivitas operasional perbankan sehari-hari.

Penerapan praktik manajemen risiko yang baik merupakan salah satu faktor signifikan bagi keberhasilan Bank. Implementasi tersebut bertujuan untuk melindungi Bank dari kerugian yang mungkin timbul diakibatkan dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan strategi bisnis dan pertumbuhan bank. Karena itu, Bank menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat agar menghasilkan pertumbuhan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham.

BWS views the implementation of comprehensive risk management as an important aspect for the Bank in managing effectively the various risks it faces. Therefore, the Bank pays great attention to implementing risk management effectively and efficiently in daily banking operational activities.

Implementation of good risk management practices is a significant factor for the Bank's success. This implementation aims to protect the Bank from any potential losses as a result of its various activities and maintain the risk level in accordance with the bank's business strategy and growth. Therefore, the Bank maintains a balance between risks and benefits in order to produce sustainable long-term value growth for shareholders.



Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Basis for Implementation of Risk Management

Penerapan Manajemen Risiko di BWS mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Implementing Risk Management at BWS refers to the Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks Number 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 and Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter (OJK) Number 34/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko *Risk Management Framework*

BWS menetapkan pendekatan pengelolaan risiko dan kerangka pengendalian di mana risiko dikelola untuk mendapatkan keseimbangan antara risiko (*risk*) dan pendapatan (*return*). Penerapan kerangka kerja manajemen risiko dilakukan melalui perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), dan toleransi risiko (*risk tolerance*) bagi setiap jenis risiko, pengembangan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkesesuaian serta pengembangan struktur pengendalian internal secara terpadu. Selain itu, Bank juga membangun budaya risiko yang menitikberatkan kesadaran seluruh karyawan akan risiko dan efektivitas proses manajemen risiko di dalam organisasi BWS dalam menghadapi pandemi maupun pasca pandemi.

Untuk tetap menjaga kondisi lingkungan bisnis dan pertumbuhan Bank, serta fokus manajemen risiko di tahun 2023 terdapat beberapa eksposur risiko utama bank yang perlu menjadi perhatian.

*BWS establishes a risk management approach and control framework in which risks are managed to obtain a balance between risk (*risk*) and income (*return*). The application of the risk management framework is carried out by formulating the level of risk to be taken (*risk appetite*) and risk tolerance for each type of risk, developing appropriate risk management policies and procedures, and developing an integrated internal control structure. In addition, the Bank also builds a risk culture that emphasizes awareness of all employees on risks and the effectiveness of the risk management process within the BWS organization in dealing with a pandemic.*

To maintain the condition of the business environment and the growth of the Bank, as well as focus on risk management in 2023, several primary bank risk exposures need attention.

Tata Kelola dalam Manajemen Risiko *Governance in Risk Management*

Penerapan manajemen risiko Bank dikelola melalui pembentukan Komite Pemantau Risiko pada tingkat Dewan Komisaris serta Komite Manajemen Risiko dan *Asset & Liability Committee (ALCO)* pada tingkat Direksi.

Sesuai kewenangan yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, dan memantau implementasinya, mengembangkan budaya pengelolaan risiko serta memastikan sumber daya yang memadai telah dikembangkan untuk memastikan pengelolaan risiko di Bank. Sementara Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dengan tugas utamanya menyusun dan memperbarui kebijakan manajemen risiko serta mengkoordinir penerapannya, memantau kecukupan permodalan Bank terhadap eksposur risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menilai keseluruhan komposisi risiko dalam portofolio Bank.

The implementation of the Bank's risk management is managed through establishing a Risk Monitoring Committee at the Board of Commissioners level as well as a Risk Management Committee and Asset & Liability Committee (ALCO) at the Board of Directors level.

Following the authority delegated by the Board of Commissioners, the Risk Monitoring Committee evaluates risk management policies, monitors their implementation, develops a risk management culture, and ensures that adequate resources have been developed to ensure risk management in the Bank. At the same time, the Risk Management Committee is responsible to the President Director with the main task of preparing and updating risk management policies and coordinating their implementation, monitoring the adequacy of the Bank's capital against risk exposure by applicable regulations, and assessing the overall risk composition in the Bank's portfolio.

Direktur Risiko & Kepatuhan (selaku Direktur yang ditugaskan khusus dalam penerapan manajemen risiko) mengelola Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap fungsi Bisnis dan Operasional Bank serta fungsi yang melakukan Audit. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab melakukan pemantauan pelaksanaan manajemen risiko dan mengkaji secara berkala terhadap proses manajemen risiko termasuk pengkajian setiap usulan produk dan aktivitas baru.

Dalam rangka proses pengukuran dan pemantauan risiko, Departemen Manajemen Risiko menyusun laporan profil risiko yang merupakan laporan penilaian terhadap eksposur risiko yang melekat pada aktivitas fungsional (*inherent risk*) serta kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*).

Laporan profil risiko disusun dan disampaikan secara berkala minimal secara triwulan yang dilaporkan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko.

Penerapan manajemen risiko di lingkup BWS meliputi empat pilar utama dan secara ringkas dijabarkan di bawah ini.

PILAR 1

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko di lingkup Bank. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko di BWS. Sedangkan Direksi bertanggung jawab untuk memaksimalkan fungsi dari manajemen risiko serta secara teratur melakukan pemantauan dan pengendalian atas setiap jenis risiko.

The Risk & Compliance Director (as the Director assigned explicitly to the implementation of risk management) manages the Risk Management Work Unit and the Compliance Work Unit, independent of the Bank's Business and Operational functions and the role that performs the Audit. The Risk Management Work Unit and the Compliance Work Unit are responsible for monitoring the implementation of risk management and periodically reviewing the risk management process, including reviewing every new product and activity proposal.

*In the risk measurement and monitoring process framework, the Risk Management Department prepares a risk profile report, which is an assessment report on the risk exposure inherent in functional activities (*inherent risk*) and the adequacy of the risk control system.*

Risk profile reports are prepared and submitted periodically, at least quarterly, to be reported to the Board of Directors and the Risk Management Committee.

Implementing risk management within the scope of BWS includes four main pillars and is briefly described below.

PILLAR 1

Active Supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors

The Board of Commissioners and Board of Directors plays an active role in supervising the implementation of risk management within the bank. The Board of Commissioners is responsible for evaluating Risk Management policies and the accountability of the Board of Directors for the performance of Risk Management policies at BWS. Meanwhile, the Board of Directors is responsible for maximizing risk management function and regularly monitoring and controlling each type of risk.

Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan melakukan penyusunan serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko BWS. Dalam menjalankan fungsinya menerapkan manajemen risiko yang efektif, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Pengawasan dilakukan melalui Rapat Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*), Komite Aset dan Liabilitas (*ALMA Committee*), Komite Kredit (*Credit Committee*) dan Gugus Tugas Anti Fraud (*Anti Fraud Task Force Team*).

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan antara lain melalui persetujuan dan evaluasi atas Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi. Secara berkala Dewan Komisaris melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui Rapat Direksi dan Komisaris (*Radirkom*) maupun dalam Rapat Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*).

PILAR 2

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Perumusan Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit dilakukan pengkinian sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis bank secara keseluruhan. Dalam implementasinya, kebijakan-kebijakan ini di *review* secara berkala dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan. Direksi Bank memiliki wewenang untuk menetapkan limit risiko, tingkat toleransi bagi setiap jenis risiko, dan eksposur risiko, dengan memperhatikan pengalaman, kemampuan permodalan, kemampuan sistem dan perangkat manajemen risiko, sumber daya yang dimiliki, serta ketentuan yang berlaku.

Arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko harus sejalan dengan visi, misi dan strategis bisnis serta perubahan peraturan yang berlaku. Dalam implementasinya, prosedur manajemen risiko merupakan penjabaran serta aturan pelaksanaan dari Kebijakan manajemen risiko yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan risiko setiap Unit Pengelolaan risiko. Evaluasi dan pengkinian

Active supervision of the Board of Directors is carried out, among others, by compiling and evaluating BWS risk management policies and procedures. In carrying out its function of implementing effective risk management, the Board of Directors is assisted by the Risk Management Work Unit. Supervision is carried out through Risk Management Committee meetings, Asset and Liability Committee (ALMA Committee), Credit Committee, and Anti Fraud Task Force Team.

The active supervision of the Board of Commissioners is carried out, among others, through the approval and evaluation of the General Risk Management Policy prepared by the Board of Directors. Periodically the Board of Commissioners evaluates the implementation of risk management policies through Board of Directors and Commissioners meetings (Radirkom) as well as in Risk Monitoring Committee meetings.

PILLAR 2

Adequacy of Policies, Procedures, and Setting Limits

The formulation of Adequacy of Policies, Procedures, and Setting of Limits is updated in line with the bank's overall strategic and business objectives. In practice, these policies are reviewed periodically with approval up to the level of the Board of Directors through committee meetings or circulation to the Board of Directors according to the level of authority. The Bank's Board of Directors has authority to set risk limits, tolerance levels for each type of risk, and risk exposure, considering experience, capital capability, risk management system and device capabilities, resources owned, and applicable regulations.

Written directions for implementing risk management are outlined in the Risk Management Policy, which must align with the vision, mission, and business strategy, as well as changes in applicable regulations. In its implementation, risk management procedures are the elaboration and implementation rules of the risk management policy, which are used as a reference for implementing risk management in each risk management unit. Evaluation and updating of Risk Management

terhadap Kebijakan dan Prosedur Manajemen risiko dilakukan secara berkala atau dalam hal terjadi perubahan secara signifikan yang mempengaruhi kegiatan usaha BWS.

Kebijakan pengelolaan risiko dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank yang disusun secara berkala setiap awal tahun disesuaikan dengan perkembangan/perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal serta memperhitungkan dampaknya terhadap permodalan terutama pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Salah satu strategi bank untuk melakukan pengendalian risiko, BWS menetapkan toleransi risiko dan limit risiko yang dilakukan *review* secara berkala dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan.

PILAR 3

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko meliputi tahapan Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko yang dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya terhadap BWS. Sedangkan pengukuran risiko dilakukan untuk mengukur eksposur risiko Bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian risiko. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik secara kuantitatif dan/atau kualitatif sesuai metode pengukuran yang telah ditetapkan oleh regulator atau dengan menggunakan metode internal yang dikembangkan berdasarkan *best practice* dalam pengukuran risiko. Untuk mengantisipasi kondisi yang kurang baik, pengukuran risiko juga dilengkapi dengan *stress testing* untuk risiko kredit, pasar, dan likuiditas.

Proses pemantauan risiko terhadap hasil pengukuran risiko dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik antara lain dengan melakukan pemantauan terhadap limit risiko dan toleransi risiko yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan oleh unit kerja pelaksana maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan secara berkala yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

Policies and Procedures are carried out periodically or in the event of significant changes that affect BWS business activities.

The risk management policy is outlined in the Bank's Business Plan, which is prepared periodically at the beginning of each year following developments/changes that occur both internally and externally and take into account the impact on capital, especially the fulfillment of the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM). One of the bank's strategies for carrying out risk control, BWS determines risk tolerance and risk limits which are reviewed periodically with approval up to the level of the Board of Directors through committee meetings or circulation to the Board of Directors according to the level of authority.

PILLAR 3

Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring, and Control Processes and Risk Management Information Systems

The risk management process includes the stages of identification, measurement, monitoring, and risk control of 8 (eight) types of risk which are carried out to analyze the source and possibility of the risk occurring and their impact on BWS. At the same time, risk measurement is carried out to measure the Bank's risk exposure as a reference for carrying out risk control. Risk measurement is carried out periodically, both quantitatively and/or qualitatively, according to the regulator's measurement method or internal methods developed based on best practices in risk measurement. Risk measurement is also equipped with stress testing for credit, market, and liquidity risks to anticipate unfavorable conditions.

The process of monitoring risk against the results of risk measurement is carried out to ensure that the risk have been appropriately managed, among others, by monitoring the established risk limits and risk tolerances. The implementing work unit and the Risk Management Work Unit carry out monitoring. Monitoring results are presented in periodic reports submitted to Management to mitigate risks and necessary actions.

PILAR 4

Sistem Pengendalian Intern Manajemen Risiko

Sistem pengendalian intern diimplementasikan di BWS dengan menggunakan model *Three Lines of Defense* yang terdiri atas Pemilik risiko (*Risk Taking Unit*) sebagai *first line of defense* yang melakukan pengelolaan terhadap risiko yang melekat di bisnis dan fungsinya. Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan bertindak sebagai *second line of defense/risk control unit* dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertindak sebagai *Third Line Of Defense/Risk Assurance unit* yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan bertugas secara independen untuk memastikan kesesuaian proses penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan serta dengan ketentuan dari Regulator.

PILLAR 4

Risk Management Internal Control System

The internal control system is implemented at BWS using the Three Lines of Defense model, which consists of Risk Taking Units as the first line of defense that manages the risks inherent in the business and its functions. The Risk Management Work Unit and the Compliance Work Unit act as the second line of defense/risk control and the Internal Audit Work Unit (SKAI) acts as the Third Line of Defense/Risk Assurance unit, which is responsible to the President Director and is tasked independently of ensuring conformity of the process of implementing risk management and internal control systems with established policies and procedures as well as provisions from Regulators.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Risk Management Work Unit

Satuan Kerja Manajemen Risiko berperan dalam mengoptimalkan *return* dan melindungi modal terhadap risiko. Sebagai *second line*, Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan *continuous monitoring* untuk memastikan pelaksanaan pengendalian internal oleh *first line*. Menyadari bahwa pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja di Bank, maka keberhasilan pengelolaan risiko ditentukan oleh adanya *risk awareness* di seluruh unit kerja Bank yang disertai dengan kemampuan teknis yang memadai. Oleh karena itu, BWS senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal maupun eksternal secara berkala.

The Risk Management Work Unit plays a role in optimize returns and protect capital against risk. As a second line, the Risk Management Work Unit conducts continuous monitoring to ensure the implementation of internal control by the first line. Recognizing that risk management is the responsibility of all work units in the Bank, the existence of risk awareness in all work units of the Bank and adequate technical capabilities determines the success of risk management. Therefore, BWS constantly improves the capacity and knowledge of all employees, especially in risk management, by holding regular internal and external training.


Manajemen Permodalan
Capital Management

Perhitungan rasio kewajiban modal minimum telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku sejak 2 Februari 2016 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016.

The calculation of the minimum capital requirement ratio is by Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 11/POJK.03/2016 concerning Minimum Capital Adequacy Requirements for Commercial Banks, which took effect on February 2, 2016 and as amended by Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 34/POJK.03/2016 concerning Amendments to Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 11/POJK.03/2016.

Bank menghitung modal minimum sesuai profil risiko pada posisi Desember 2023.

The Bank calculates the minimum capital according to the risk profile of the position in December 2023.

Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Konvensional

Calculation Report on Minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) for Conventional & Commercial Banks

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Komponen Modal Capital Component	31 Desember 2023 December 31, 2023		31 Desember 2022 December 31, 2022	
	Individual Individual	Konsolidasian Consolidation	Individual Individual	Konsolidasian Consolidation
I Modal Inti (Tier 1) Common Equity (Tier 1)	8.409.995		8.011.666	
1 CET 1 CET 1	8.409.995		8.011.666	
1.1 Modal Disetor (setelah dikurangi Treasury Stock) Paid-Up Capital (Deducted by Treasury Stock)	856.823		856.823	
1.2 Cadangan Tambahan Modal *) Disclosed Reserve *)	9.263.258		8.908.122	
1.2.1 Faktor Penambah Addition Factors	9.466.020		9.118.787	
1.2.1.1 Pendapatan komprehensif lainnya Other Comprehensive Incomes	1.447		-	
1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan Positive Adjustment Due to Financial Statement	-		-	
1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Unrealized Gain from Increases in Financial Asset Fair Values Classified in Other Comprehensive Incomes	1.447		-	
1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap Fixed Asset Revaluation Surplus Balance	-		-	
1.2.1.2 Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves) Other Disclosed Reserves	9.464.573		9.118.787	
1.2.1.2.1 Agio Agio	4.185.056		4.172.986	
1.2.1.2.2 Cadangan umum General Reserve	173.215		173.215	
1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun lalu Previous Years Earnings	4.408.436		3.912.015	
1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan Current Years Earnings	697.866		860.571	

Komponen Modal Capital Component		31 Desember 2023 December 31, 2023		31 Desember 2022 December 31, 2022	
		Individual Individual	Konsolidasian Consolidation	Individual Individual	Konsolidasian Consolidation
1.2.1.2.5	Dana setoran modal <i>Capital Deposit Fund</i>	-		-	
1.2.1.2.6	Lainnya <i>Others</i>	-		-	
1.2.2	Faktor Pengurang <i>Deduction Factors</i>	202.762		210.665	
1.2.2.1	Pendapatan komprehensif lainnya <i>Other Comprehensive Incomes</i>	24.347		27.791	
1.2.2.1.1	Selisih kurang penjabaran laporan keuangan <i>Negative Adjustment Due to Financial Statement</i>	-		-	
1.2.2.1.2	Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain <i>Unrealized Loss from Decreases in Financial Asset Fair Values Classified in Other Comprehensive Incomes</i>	24.347		27.791	
1.2.2.2	Cadangan tambahan modal lainnya (<i>other disclosed reserves</i>) <i>Disclosed Reserve</i>	178.415		182.874	
1.2.2.2.1	Disagio <i>Disagio</i>	12.070		-	
1.2.2.2.2	Rugi tahun-tahun lalu <i>Previous Years Loss</i>	-		-	
1.2.2.2.3	Rugi tahun berjalan <i>Current Years Loss</i>	-		-	
1.2.2.2.4	Selisih kurang antara Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif <i>Negative Difference Between Regulatory Provision for Quality Asset Losses (PPKA) on Earning Assets and Allowance For Impairment Losses (CKPN) on Earning Assets</i>	135.695		172.968	
1.2.2.2.5	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>Trading Book</i> <i>Negative Difference of Total Adjustment in Fair Values from Financial Instruments in Trading Book</i>	-		-	
1.2.2.2.6	PPKA non-produktif <i>Provision for Quality Asset Losses (PPKA) on Non-Earning Assets</i>	30.650		9.906	
1.2.2.2.7	Lainnya <i>Others</i>	-		-	
1.3	Kepentingan Non-Pengendali yang dapat diperhitungkan <i>Non-Controlling Interests That Can Be Counted</i>				
1.4	Faktor Pengurang Modal Inti Utama *) <i>Deduction Factors in CET1 Capital *)</i>	1.710.086		1.753.279	
1.4.1	Pajak tangguhan <i>Deferred Tax</i>	-		-	
1.4.2	<i>Goodwill</i> <i>Goodwill</i>	1.474.492		1.474.492	
1.4.3	Aset tidak berwujud <i>Intangible Assets</i>	235.145		278.338	
1.4.4	Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang <i>Investments is Taken into Account as A Deduction Factor</i>	449		449	
1.4.5	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi <i>Capital Shortfall in Subsidiary Company</i>	-		-	
1.4.6	Eksposur sekuritisasi <i>Securitization Exposure</i>	-		-	

Komponen Modal Capital Component	31 Desember 2023 December 31, 2023		31 Desember 2022 December 31, 2022	
	Individual Individual	Konsolidasian Consolidation	Individual Individual	Konsolidasian Consolidation
1.4.7 Faktor pengurang modal inti utama lainnya <i>Other Deduction Factor of Common Equity Tier 1</i>	-		-	
1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain <i>Placement of fund in instrument at another bank that meet the criteria for inclusion in at 1 and/or Tier 2</i>	-		-	
1.4.7.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat <i>Cross ownership of other entities obtained due to transfer because of law, grant, or bequest</i>	-		-	
1.4.7.3 Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan settlement (settlement risk) - Non Delivery Versus Payment <i>Exposures of Settlement Risk - Non Delivery Versus Payment</i>	-		-	
1.4.7.4 Eksposur di Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (apabila ada) <i>Exposures in Subsidiary Company that carry out business activities based on sharia principles (if any)</i>	-		-	
2 Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT 1 *) <i>Additional Tier 1 (AT 1 *)</i>	-		-	
2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1 <i>Instruments Issued by The Bank That Meet The Criteria for Inclusion in Additional Tier 1 Capital</i>	-		-	
2.2 Agio/Disagio <i>Agio/Disagio</i>	-		-	
2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan *) <i>Deduction Factor *)</i>	-		-	
2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain <i>Placement of Fund in Instrument at Another Bank That Meet The Criteria for Inclusion in at 1 and/or Tier 2</i>	-		-	
2.3.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat <i>Cross Ownership of Other Entities Obtained Due to Transfer Because of Law, Grant, or Bequest</i>	-		-	
II Modal Pelengkap (Tier 2) <i>Tier 2 Capital</i>	434.682		367.771	
1 Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2 <i>Capital Instruments in The Forms of Stocks or Other Forms That Meet The Requirement in Tier 2 Capital</i>	-		-	
2 Agio/Disagio <i>Agio/Disagio</i>	-		-	
3 Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit) <i>General Allowance for Losses on Earning Assets (Max. 1.25% from Risk-Weighted Assets)</i>	434.682		404.291	
4 Faktor Pengurang Modal Pelengkap *) <i>Deduction Factor of Tier 2 Capital*)</i>	-		-	
4.1 Sinking Fund <i>Sinking Fund</i>	-		-	
4.2 Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain <i>Placement of Fund in Instrument at Another Bank That Meet The Criteria for Inclusion in Tier 2 Capital</i>	-		36.520	
4.3 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat <i>Cross Ownership of Other Entities Obtained Due to Transfer Because of Law, Grant, or Bequest</i>	-		-	
Total Modal <i>Total Capital</i>	8.844.677		8.379.437	



Komponen Modal Capital Component	31 Desember 2023 December 31, 2023		31 Desember 2022 December 31, 2022	
	Individual Individual	Konsolidasian Consolidation	Individual Individual	Konsolidasian Consolidation
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO <i>RISK-WEIGHTED ASSETS (RWAs)</i>				
ATMR RISIKO KREDIT <i>RWAs CONSIDERING CREDIT RISK</i>	34.761.866		32.335.624	
ATMR RISIKO PASAR <i>RWAs CONSIDERING MARKET RISK</i>	510.631		313.219	
ATMR RISIKO OPERASIONAL <i>RWAs CONSIDERING OPERATIONAL RISK</i>	1.758.147		2.778.419	
TOTAL ATMR <i>TOTAL RISK-WEIGHTED ASSETS</i>	37.030.644		35.426.262	
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO (%) <i>CAR RATIO BASED ON RISK PROFILE (%)</i>	9,60		9,48	
ALOKASI PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO <i>CAR ALLOCATION BASED ON RISK PROFILE</i>				
Dari CET 1 (%) <i>From CET 1 (%)</i>	8,43		8,44	
Dari AT 1 (%) <i>From AT 1 (%)</i>	0,00		0,00	
Dari Tier 2 (%) <i>From Tier 2 (%)</i>	1,17		1,04	
RASIO KPMM <i>CAR Ratio</i>				
Rasio CET 1 (%) <i>CET 1 Ratio (%)</i>	22,71		22,62	
Rasio Tier 1 (%) <i>Tier 1 Ratio (%)</i>	22,71		22,62	
Rasio Tier 2 (%) <i>Tier 2 Ratio (%)</i>	1,17		1,04	
Rasio KPMM (%) <i>CAR Ratio (%)</i>	23,88		23,65	
CET 1 UNTUK BUFFER (%) <i>CET 1 FOR BUFFER (%)</i>	14,28		14,17	
PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%) <i>REGULATORY BUFFER PERCENTAGE REQUIRED BY BANK (%)</i>	2,50		2,50	
<i>Capital Conservation Buffer (%)</i>	2,50		2,50	
<i>Countercyclical Buffer (%)</i>	0,00		0,00	
<i>Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (%)</i> <i>Capital Surcharge For Systemic Bank (%)</i>	0,00		0,00	

*) Penyajian rincian dapat tidak ditampilkan apabila nilainya nihil.

*) Detail statements may not be displayed if the value is nil



Pengelolaan dan Pengungkapan Eksposur Risiko serta Mitigasi yang Dilakukan oleh BWS

Management and Disclosure of Risk Exposure and Mitigation Conducted by BWS

• Pengelolaan Risiko Kredit

Bank berupaya untuk terus mendorong pertumbuhan portofolio kredit sebagai upaya untuk meraih pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Bank juga berupaya untuk menjaga kualitas dari kredit yang diberikan agar tidak menjadi beban bagi Bank. Tahun 2023, kredit BWS dapat tumbuh cukup sebesar 9,69%. Namun demikian, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) BWS dapat terjaga pada level 1,25%.

Selama tahun 2023, BWS sangat proaktif dalam upaya melakukan penyempurnaan pengelolaan kredit untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko kredit yang diakibatkan oleh kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya selama kondisi Pandemi. Untuk mempertahankan kemampuan Bank menyerap risiko yang mungkin timbul dan mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak pasti secara bertahap BWS mengimplementasikan sistem peringatan dini (*early warning system*) yaitu suatu *monitoring* untuk mengidentifikasi potensi risiko sejak dini yang digunakan sebagai indikator bagi tindakan lebih lanjut sebelum kredit jatuh menjadi *Net Performing Loan* melalui pengelolaan kredit kualitas rendah antara lain peningkatan fungsi *credit risk review* serta pembentukan *Task Force Team* yang beranggotakan lintas divisi untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan dan penyelesaian kredit dengan lebih dini dan terintegrasi.

Dalam rangka pengelolaan risiko kredit BWS telah memiliki model rating berupa *internal rating system scoring* debitur untuk membantu analisa kualitas debitur dalam proses perkreditan. Untuk menjaga portofolio bank tidak terkonsentrasi pada debitur dan sektor ekonomi tertentu, maka BWS telah menetapkan pembatasan kredit sesuai *risk appetite*, sedangkan untuk mengantisipasi pelampauan BMPK, BWS telah menetapkan limit batas yang *prudent* yang disesuaikan dengan limit BMPK sesuai ketentuan regulator.

• Credit Risk Management

The Bank strives to continue to encourage loan portfolio growth as an effort to achieve sustainable performance growth. In line with this, the Bank also strives to maintain the quality of the loan provided so as not to become a burden for the Bank. In 2023, BWS loan can grow adequately by 9.69%. However, the BWS Non-Performing Loan ratio can be maintained at the level of 1.25%.

During 2023, BWS was very proactive in improving credit management to anticipate and control credit risk caused by debtors' failure to fulfill their obligations during Pandemic conditions. To maintain the Bank's ability to absorb risks that may arise and anticipate uncertain economic needs, BWS gradually implements an early warning system, namely a monitoring system, to identify potential risks early on, which is used as an indicator for further action before credit falls to Net Performing Loan through low-quality credit management, including improving the credit risk review function and forming a Task Force Team consisting of cross-divisions to carry out steps to save and settle credit in an earlier and integrated manner.

In managing credit risk, BWS already has a rating model in the form of an internal rating system scoring for debtors to help analyze debtor quality in the credit process. To keep bank portfolios from being concentrated on specific debtors and economic sectors, BWS has set credit limits according to risk appetite, while to anticipate exceeding the LLL, BWS has set prudent limits that are adjusted to the BMPK limits according to regulatory provisions.

Sebagai bagian dari pengukuran risiko kredit dan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan faktor makro baik dikarenakan pandemi, BWS secara berkala melakukan *stress testing* risiko kredit untuk menilai perubahan portofolio kredit dan pengaruhnya bagi bank serta kemampuan bank menghadapi kondisi tersebut.

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

Disclosure of Net Receivables by Region - Bank Only

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023 *) December 31, 2023 *)			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Net Receivables by Region			
		Jawa Barat West Java	Jakarta	Lainnya Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	7.052.842	-	7.052.842
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	15.228	-	15.228
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	457.509	-	457.509
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	764.190	40.008	804.198
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	296	48.561	337	49.194
9	Kredit Beragun Properti Komersial	-	2.542.317	5.422	2.547.739
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	-	806.700	-	806.700
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	7.671.918	3.649.084	11.094.741	22.415.743
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	2.419	9.494	2.441	14.354
13	Tagihan kepada Korporasi	380.517	17.338.446	1.069.621	18.788.585
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	50.364	222.539	78.624	351.527
15	Aset Lainnya	211.520	638.480	323.891	1.173.892
	Jumlah	8.317.034	33.557.987	12.615.085	54.490.106

» Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

- Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di laporan posisi keuangan, eksposur di Transaksi Rekening Administratif (TRA) dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
- Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
- Pembagian wilayah dilakukan berdasarkan kebijakan masing-masing Bank, sesuai laporan manajemen. Pembagian wilayah ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) wilayah. Bank harus mengungkapkan dalam laporan, rincian tagihan bersih dari masing-masing wilayah.
- Penentuan wilayah dilakukan berdasarkan lokasi proyek dari debitur.

As part of measuring credit risk and anticipating changes in macro factors due to a pandemic, BWS regularly conducts credit risk stress testing to assess changes in the loan portfolio and its impact on banks and the Bank's ability to deal with these conditions.

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

31 Desember 2022 **) December 31, 2022 **)				Portfolio Category
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Net Receivables by Region				
Jawa Barat West Java	Jakarta	Lainnya Others	Jumlah Total	
(7)	(8)	(9)	(10)	
-	7.386.763	-	7.386.763	Receivables on Government
-	-	-	-	Receivables on Public Entity Sector
-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
-	500.301	-	500.301	Receivables on Banks
				Receivables in the form of Covered Bond
				Receivables on Securities Companies and Other Financial Service Institutions
				Receivables on Securities/Subordinated Receivables, Equity, and Other Capital Instruments
135	14.038	1.529	15.702	Loans Secured by Residential Property
139.097	12.565.288	783.630	13.488.016	Loans Secured by Commercial Real Estate
				Loans for Land Procurement, Land Cultivation, and Construction
6.321.053	2.883.618	8.731.411	17.936.082	Employee or Retired Loans
114.058	36.201	135.811	286.070	Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
401.145	8.293.420	788.757	9.483.323	Receivables on Corporate
21.483	187.322	89.048	297.854	Past Due Receivables
201.345	656.648	299.364	1.157.358	Other Assets
7.198.316	32.523.600	10.829.552	50.551.469	Total

» Disclosure of Net Receivables by Region

1. Disclosure of net receivables is carried out for asset exposure in the statement of financial position, exposure in off-balance sheet transactions (TRA), and exposures that give rise to counterparty credit risk.
2. Determination of portfolio categories and calculation of net receivables refer to the provisions regarding the calculation of risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.
3. The division of regions is carried out based on the policies of each bank, according to management reports. The regional division is determined by at least 3 (three) parts. The bank must disclose the net billing details of each region in the reports.
4. Determination of the area is carried out based on the project location of the debtor.

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual

Disclosure of Net Receivables by Remaining Contract Term - Bank Only

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023 *) December 31, 2023 *)					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Net Receivables Based on Remaining Contract Term					
		≤ 1 tahun ≤ 1 year	> 1 thn s.d 3 thn > 1 to 3 years	> 3 thn s.d 5 thn > 3 to 5 years	> 5 tahun > 5 years	Non Kontraktual Non-Contractual	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2.429.156	1.503.548	886.477	-	2.233.661	7.052.842
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	286	14.942	-	-	-	15.228
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	189.137	901	54	53	267.364	457.509
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	525.220	91.253	4.488	183.238	-	804.198
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	5.281,33	2.697,48	36.376,94	4.838,51	-	49.194
9	Kredit Beragun Properti Komersial	871.262	24.145	1.191.644	460.687	-	2.547.739
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	367.272	314.387	121.898	3.143	-	806.700
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	77.518	651.047	1.298.194	20.388.983	-	22.415.743
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	8.525	1.413	967	3.449	-	14.354
13	Tagihan kepada Korporasi	12.892.892	2.168.182	1.968.972	1.758.538	-	18.788.585
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	200.621	25.050	9.767	116.090	-	351.527
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	1.173.892	1.173.892
	Jumlah	17.567.169	4.797.565	5.518.839	22.919.020	3.674.918	54.477.511

» Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

- Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di laporan posisi keuangan, eksposur di transaksi rekening administratif dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
- Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
- Pemetaan ke dalam skala waktu dilakukan berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak untuk pos laporan posisi keuangan, Transaksi Rekening Administratif dan eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan yang memiliki jatuh tempo kontraktual. Untuk pos laporan posisi keuangan, transaksi rekening administratif dan eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual (*non maturity items*) dimasukkan ke dalam kolom non-kontraktual.

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

31 Desember 2022 **) December 31, 2022 **)						Portfolio Category
Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Net Receivables Based on Remaining Contract Term						
≤ 1 tahun ≤ 1 year	> 1 thn s.d 3 thn > 1 to 3 years	> 3 thn s.d 5 thn > 3 to 5 years	> 5 tahun > 5 years	Non Kontraktual Non- Contractual	Jumlah Total	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
3.162.574	409.403	1.569.751	-	2.245.036	7.386.763	Receivables on Government
-	-	-	-	-	-	Receivables on Public Sector Entities
-	-	-	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
1.861	99.496	51	41	398.852	500.301	Receivables on Banks
						Receivables in the form of Covered Bond
						Receivables on Securities Companies and Other Financial Service Institutions
						Receivables in the form of Securities/Subordinated Receivables, Equity, and Other Capital Instruments
4.371,00	3.219,39	739,75	7.371,58	-	15.702	Loans Secured by Residential Property
7.205.623	2.366.161	2.786.103	1.130.129	-	13.488.016	Loans Secured by Commercial Real Estate
						Loans for Land Procurement, Land Cultivation, and Construction
58.983	563.943	1.058.340	16.254.816	-	17.936.082	Employee or Retired Loans
3.518	5.221	11.781	265.550	-	286.070	Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
6.487.358	1.003.417	1.003.624	988.924	-	9.483.323	Receivables on Corporate
219.866	27.184	5.936	44.868	-	297.854	Past Due Receivables
168.220	3.537	1.068	-	984.533	1.157.358	Other Assets
17.312.374	4.481.581	6.437.393	18.691.700	3.628.421	50.551.469	Total

» Disclosure of Net Receivables by the Contractual Maturity

1. Disclosure of net receivables is carried out for asset exposure in the statement of financial position, exposure in off-balance sheet transactions, and exposures that give rise to counterparty credit risk.
2. Determination of portfolio categories and calculation of net receivables refer to the provisions regarding guidelines for calculating of risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.
3. Mapping into time scales is carried out based on the remaining time until maturity according to the contract for the statement of financial position items, off-balance sheet transactions, and exposures that give rise to counterparty credit risk with contractual maturity. For statement of financial position items, off-balance sheet transactions and exposures that give rise to counterparty credit risk that do not have contractual maturity (non-maturity items) are entered into the non-contractual column.



Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

Disclosure of Net Receivables by Economic Sectors - Bank Only

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Receivables on Government</i>	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on Public Entity Sector</i>	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions</i>	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on Banks</i>	Tagihan berupa Covered Bond <i>Receivables in the form of Covered Bond</i>	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya <i>Receivables on Securities Companies and Other Financial Service Institutions</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31 Desember 2023 *)							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	14.942	-	-	-	-
3	Industri pengolahan	-	286	-	-	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	4.611.050	-	-	457.509	-	804.198
12	Real Estate	-	-	-	-	-	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-	-
23	Lainnya	2.441.792	-	-	-	-	-
	Jumlah	7.052.842	15.228	-	457.509	-	804.198

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya <i>Receivables in the form of Securities/ Subordinated Receivables, Equity, and Other Capital Instruments</i>	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal <i>Loans Secured by Residential Property</i>	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans Secured by Commercial Real Estate</i>	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi <i>Loans for Land Procurement, Land Cultivation, and Construction</i>	Kredit Pegawai/ Pensiunan <i>Employee/ Retired Loans</i>	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <i>Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio</i>	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on Corporate</i>	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past Due Receivables</i>	Aset Lainnya <i>Other Assets</i>	Economic Sectors
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
<i>December 31, 2023 *)</i>									
-	-	1.581	-	1.337	15	995.728	529	-	<i>Agriculture, Forestry, and Fishery</i>
-	-	43.299	-	272	-	1.739.302	-	-	<i>Mining and Quarrying</i>
-	588	818.103	-	2.651	147	10.473.603	79.746	-	<i>Manufacturing</i>
-	-	-	-	-	135	-	-	-	<i>Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air</i>
-	-	-	-	60	-	6.169	-	-	<i>Water Management, Waste Water Management, and Waste Recycle Management</i>
-	-	214.574	806.700	-	-	-	37.018	-	<i>Construction</i>
-	3.239	159.385	-	5.047.680	5.666	1.747.440	88.824	-	<i>Wholesale and retail trading, Repair and Maintenance for Cars and Motorcycles</i>
-	-	58.908	-	819	-	331.938	94	-	<i>Transportation and Warehousing</i>
-	2.511	-	-	8.384	339	320.911	21	-	<i>Hotel and Food & Beverage</i>
-	-	-	-	190	-	137.019	20	-	<i>Information and Communication</i>
-	-	-	-	2.782	-	200.411	539	-	<i>Financial Activities and Insurances</i>
-	-	1.247.015	-	-	-	732.610	26.442	-	<i>Real Estate</i>
-	-	-	-	2.817	-	8.435	43	-	<i>Professional, Scientific, and Technical Activities</i>
-	-	1.996	-	607.703	7.347	570.490	4.513	-	<i>Rental and Lease Activities without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support</i>
-	-	-	-	37.113	-	-	334	-	<i>Public Administration, Defense and Compulsory Social Security</i>
-	-	-	-	55.946	224	11.542	197	-	<i>Education</i>
-	-	-	-	9.108	474	-	-	-	<i>Human Health and Social Work Activities</i>
-	-	-	-	66	-	-	-	-	<i>Arts, Entertainment and Recreation</i>
-	35.374	-	-	13.013	7	127.830	-	-	<i>Other Service Activities</i>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>Activities of Households as Employers</i>
-	-	-	-	1.578	-	-	-	-	<i>International Institution and Other Extra International Agencies</i>
-	3.628	645	-	5.709.737	-	97.046	57.940	-	<i>Non-Business Field</i>
-	3.855	2.232	-	10.914.488	-	1.288.109	55.266	1.173.892	<i>Others</i>
-	49.194	2.547.739	806.700	22.415.743	14.354	18.788.585	351.527	1.173.892	<i>Total</i>



Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

Disclosure of Net Receivables by Economic Sectors - Bank Only

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Receivables on Government</i>	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on Public Entity Sector</i>	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions</i>	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on Banks</i>	Tagihan berupa Covered Bond <i>Receivables in the form of Covered Bond</i>	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya <i>Receivables on Securities Companies and Other Financial Service Institutions</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31 Desember 2022 **)							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
3	Industri pengolahan	-	-	-	-	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	500.301	-	-
12	Real Estate	-	-	-	-	-	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-	-
23	Lainnya	7.386.763	-	-	-	-	-
	Jumlah	7.386.763	-	-	500.301	-	-

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya <i>Receivables in the form of Securities/ Subordinated Receivables, Equity, and Other Capital Instruments</i>	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal <i>Loans Secured by Residential Property</i>	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans Secured by Commercial Real Estate</i>	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi <i>Loans for Land Procurement, Land Cultivation, and Construction</i>	Kredit Pegawai/ Pensiunan <i>Employee/ Retired Loans</i>	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <i>Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio</i>	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on Corporate</i>	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past Due Receivables</i>	Aset Lainnya <i>Other Assets</i>	Economic Sectors
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
									December 31, 2022 **)
		- 575.791		1.103	242	497.776	289	-	Agriculture, Forestry, and Fishery
		- 842.348		317	198	1.086.828	2.063	-	Mining and Quarrying
		- 7.590.459		2.479	1.093	3.394.238	134.401	-	Manufacturing
		- -		-	-	-	-	-	Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air
		- -		56	-	6.228	-	-	Water Management, Waste Water Management, and Waste Recycle Management
		- 904.027		-	-	161.437	39.081	-	Construction
		- 1.218.922		4.514.691	132.577	419.600	34.077	-	Wholesale and retail trading, Repair and Maintenance for Cars and Motorcycles
		- 98.330		737	-	12.336	-	-	Transportation and Warehousing
		- 289.439		9.053	82	2.604	21	-	Hotel and Food & Beverage
		- 1.456		127	-	153.382	20	-	Information and Communication
		- -		11.916	1.655	361.124	48	-	Financial Activities and Insurances
		- 1.880.577		177	-	-	29.594	-	Real Estate
		- -		3.777	70	10.703	-	-	Professional, Scientific, and Technical Activities
		- 30.545		604.270	98.252	611.278	2.690	-	Rental and Lease Activities without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support
		- -		50.742	2.092	-	-	-	Public Administration, Defense and Compulsory Social Security
		- 10.411		54.239	12.416	-	86	-	Education
		- -		9.155	1.527	-	-	-	Human Health and Social Work Activities
		- -		33	-	-	-	-	Arts, Entertainment and Recreation
	4.210	34.272		68.703	35.669	161.306	145	-	Other Service Activities
	-	-		-	-	-	-	-	Activities of Households as Employers
	-	-		1.682	197	-	-	-	International Institution and Other Extra International Agencies
	5.604	757		6.599.050	-	837.166	35.418	-	Non-Business Field
	5.888	10.681		6.003.777	-	1.767.318	19.921	1.157.358	Others
	15.702	13.488.016		17.936.082	286.070	9.483.323	297.854	1.157.358	Total

» Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di laporan posisi keuangan, eksposur di transaksi rekening administratif dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
2. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
3. Pembagian sektor ekonomi mengacu pada sektor ekonomi yang tercantum dalam laporan bulanan kepada otoritas, dengan tambahan sektor lainnya untuk sektor ekonomi dari tagihan bersih yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu sektor yang ada.

Selama tahun 2023, Bank berhasil mengantisipasi dan membatasi risiko kreditnya dengan baik, di mana portofolio kredit sebesar Rp43,99 triliun dengan rasio tagihan yang telah jatuh tempo (tagihan atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari) sebesar 1,25% (NPL - bruto) atau sebesar 0,79% (NPL - net).

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

Disclosure of Receivables and Provisioning by Region - Bank Only

No.	Keterangan	31 Desember 2023 December 31, 2023			
		Wilayah Region			
		Jawa Barat West Java	Jakarta	Lainnya Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan	8.358.904	32.548.553	12.687.385	53.594.842
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (Stage 2 dan Stage 3)				
	a. Belum jatuh tempo	91.081	1.679.305	437.639	2.208.025
	b. Telah jatuh tempo	87.956	332.176	130.713	550.845
3	CKPN - Stage 1	18.549	89.968	26.891	135.409
4	CKPN - Stage 2	4.418	319.787	57.300	381.505
5	CKPN - Stage 3	37.948	112.334	52.139	202.420
6	Tagihan yang dihapus buku	4.142	11.736	6.474	22.352

» Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

1. Tagihan adalah nilai aset keuangan yang tercatat dalam laporan posisi keuangan sebelum dikurangi CKPN (*gross*).
2. Definisi penurunan nilai dan perhitungan CKPN aset keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.
3. Pembagian wilayah dilakukan berdasarkan kebijakan masing-masing Bank, sesuai laporan manajemen. Pembagian wilayah ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) wilayah. Bank harus mengungkapkan dalam laporan, rincian dari masing-masing wilayah.
4. Penentuan wilayah dilakukan berdasarkan lokasi proyek dari debitur.
5. Tagihan yang telah jatuh tempo mengacu pada definisi kategori portofolio Tagihan yang Telah Jatuh Tempo dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
6. Tagihan yang dihapus buku merupakan tagihan yang telah dihapus buku selama periode berjalan.
7. Untuk laporan posisi Juli - Desember 2023, Bank dapat mengosongkan laporan posisi tahun sebelumnya.

» Disclosure of Net Receivables Based on Economic Sector

1. Disclosure of net receivables is carried out for asset exposure in the statement of financial position, exposure in off-balance sheet transactions, and exposures that give rise to counterparty credit risk.
2. Determination of portfolio categories and calculation of net receivables refer to the provisions of the Otoritas Jasa Keuangan regarding guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.
3. The division of the economic sector refers to the financial industry listed in the monthly reports to the authorities, with the addition of Other sectors for the economic sector of the net receivables that cannot be classified in one of the existing sectors

During the year, the Bank managed to anticipate and limit its credit risk adequately, with a loan portfolio of IDR43.99 trillion and an overdue ratio (overdue principal and/or interest payments of more than 90 days) of 1.25% (NPL - gross) or 0.79% (NPL - net).

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

31 Desember 2022 December 31, 2022					Description
Wilayah Region				Jumlah Total	
Jawa Barat West Java	Jakarta	Lainnya Others	(10)		
(7)	(8)	(9)	(10)		
7.220.313	32.915.425	10.910.286	51.046.024	Receivables	
Impaired receivables (stage 2 and stage 3)					
70.997	1.024.093	411.061	1.506.151	a. Non past due	
39.604	256.875	127.070	423.549	b. Past due	
14.955	97.607	21.327	133.889	Allowance for impairment losses (CKPN) - Stage 1	
7.906	220.791	45.318	274.015	Allowance for impairment losses (CKPN) - Stage 2	
41.157	174.324	64.818	280.299	Allowance for impairment losses (CKPN) - Stage 3	
40.384	23.162	53.774	117.320	Written-off receivables	

» Disclosure of Receivables and Provisioning by Region

1. Receivables are the value of financial assets recorded in the statement of financial position before deducting CKPN (gross).
2. The definition of impairment and calculation of CKPN for financial assets refer to the applicable financial accounting standards.
3. The division of regions is carried out based on the policies of each bank, according to management reports. The regional division is determined by at least 3 (three) areas. The bank must disclose in the report, the details of each region.
4. Determination of the regions is carried out based on the project location of the debtor.
5. Past due receivables refer to the definition of the portfolio category of Past Due Receivables in the provisions of the Otoritas Jasa Keuangan concerning guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.
6. Written-off Receivables are receivables that have been written off during the current period.
7. For the July - December 2023 position report, the bank can leave the previous year's position report blank.

Metode Perhitungan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dibagi menjadi 2 (dua) metode, yaitu secara individual dan kolektif yang dibagi berdasarkan tingkat signifikansi. Perhitungan CKPN individual terdiri dari kredit yang memiliki nilai di atas tingkat signifikansi dan terdapat bukti objektif mengalami penurunan nilai, yaitu dilakukan langsung oleh pengelola masing-masing debitur.

CKPN secara kolektif dihitung dengan menggunakan data kerugian historis (perhitungan *incurred loss* berdasarkan estimasi *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD) dari masing-masing kelompok aset tertentu. BWS juga telah mengimplementasikan pengembangan metodologi perhitungan *impairment* (CKPN) sesuai IFRS 9 (PSAK 71).

Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Receivables and Provisioning based on Economic Sectors

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan <i>Receivables</i>	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai <i>Impaired Receivables</i>		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1 <i>Allowance for impairment losses (CKPN)-Stage 1</i>
			Belum Jatuh Tempo <i>Non Past Due</i>	Telah jatuh tempo <i>Past Due</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31 Desember 2023					
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	976.941	131.395	1.914	4.386
2	Pertambangan dan Penggalian	1.521.132	29.476	-	6.301
3	Industri pengolahan	10.893.091	1.090.366	110.323	39.076
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	135	-	-	0
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	6.230	-	-	20
6	Konstruksi	1.194.218	354.495	48.081	4.069
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	7.106.787	65.663	152.674	21.295
8	Pengangkutan dan Pergudangan	391.611	-	202	1.603
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	311.382	18	36	801
10	Informasi dan Komunikasi	137.129	-	33	919
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	5.990.091	31.079	2.366	3.755
12	<i>Real Estate</i>	2.027.192	245.126	-	9.224
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	11.334	97	73	50
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	1.182.976	22.943	8.654	4.120
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	37.759	373	611	97
16	Pendidikan	68.103	593	358	191
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	9.582	-	-	22
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	66	-	-	0
19	Aktivitas Jasa Lainnya	176.208	185	-	952
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-

Calculation methods for Establishing Allowance for Impairment Losses (CKPN) are divided into 2 (two) ways, individually and collectively, based on the level of significance. Calculation of individual CKPN consists of loans with a value above the significance level and objective evidence of impairment, which is carried out directly by the manager of each debtor.

Collectively CKPN is calculated using historical loss data (the calculation of incurred loss is based on the estimated Probability of Default (PD) and Loss Given Default (LGD) of each particular asset group. BWS has also implemented the development of an impairment calculation methodology (CKPN) according to IFRS 9 (PSAK 71)).

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2 Allowance for impairment losses (CKPN)-Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3 Allowance for impairment losses (CKPN)-Stage 3	Tagihan yang dihapus buku Written-Off Receivables	Economic Sectors
(7)	(8)	(9)	
<i>December 31, 2023</i>			
1.630	1.665	30	Agriculture, Forestry, and Fishery
1.409	-	8.031	Mining and Quarrying
186.177	32.838	-	Manufacturing
-	-	-	Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air
-	-	-	Water Management, Waste Water Management, and Waste Recycle Management
126.213	11.039	-	Construction
12.815	63.842	1.384	Wholesale and retail trading; Repair and Maintenance for Cars and Motorcycles
-	108	-	Transportation and Warehousing
1	15	-	Hotel and Food & Beverage
-	13	-	Information and Communication
23.749	2.345	-	Financial Activities and Insurances
18.580	4.972	-	Real Estate
9	30	-	Professional, Scientific, and Technical Activities
433	4.164	4	Rental and Lease Activities without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support
36	277	-	Public Administration, Defense and Compulsory Social Security
41	160	-	Education
-	-	-	Human Health and Social Work Activities
-	-	-	Arts, Entertainment and Recreation
11	-	-	Other Service Activities
-	-	-	Activities of Households as Employers

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan <i>Receivables</i>	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai <i>Impaired Receivables</i>		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1 <i>Allowance for impairment losses (CKPN)-Stage 1</i>
			Belum Jatuh Tempo <i>Non Past Due</i>	Telah jatuh tempo <i>Past Due</i>	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	1.578	-	-	3
22	Bukan Lapangan Usaha	5.913.473	98.884	98.136	12.641
23	Lainnya	15.637.823	137.331	127.387	25.884
	Jumlah	53.594.842	2.208.025	550.845	135.409
31 Desember 2022					
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.076.721	12	2.753	5.392
2	Pertambangan dan Penggalian	1.937.576	7.649	6.712	11.129
3	Industri pengolahan	11.296.946	771.895	167.476	42.526
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	6.283	-	-	22
6	Konstruksi	1.270.163	408.818	48.406	4.098
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	6.383.070	80.250	57.470	18.870
8	Pengangkutan dan Pergudangan	111.009	-	-	205
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	298.372	348	36	651
10	Informasi dan Komunikasi	154.997	-	33	1.080
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	501.282	33.094	2.805	1.542
12	<i>Real Estate</i>	1.906.731	-	36.384	10.519
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	14.593	56	-	85
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	1.354.573	16.459	5.342	4.628
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	53.156	75	-	114
16	Pendidikan	77.607	6.455	151	150
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	10.737	-	-	34
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	34	-	-	0
19	Aktivitas Jasa Lainnya	305.172	812	246	1.457
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	1.890	-	-	3
22	Bukan Lapangan Usaha	7.568.450	108.836	60.213	14.511
23	Lainnya	16.716.662	71.392	35.521	16.873
	Jumlah	51.046.024	1.506.151	423.549	133.889

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2 <i>Allowance for impairment losses (CKPN)-Stage 2</i>	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3 <i>Allowance for impairment losses (CKPN)-Stage 3</i>	Tagihan yang dihapus buku <i>Written-Off Receivables</i>	Economic Sectors
-	-	-	<i>International Institution and Other Extra International Agencies</i>
4.251	40.229	7.033	<i>Non-Business Field</i>
6.150	40.723	5.870	<i>Others</i>
381.505	202.420	22.352	<i>Total</i>
<i>December 31, 2022</i>			
0	2.458	184	<i>Agriculture, Forestry, and Fishery</i>
4.049	4.646	-	<i>Mining and Quarrying</i>
84.640	105.980	4.101	<i>Manufacturing</i>
-	-	-	<i>Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air</i>
-	-	-	<i>Water Management, Waste Water Management, and Waste Recycle Management</i>
156.648	9.323	-	<i>Construction</i>
10.152	23.296	5.126	<i>Wholesale and etail trading; Repair and Maintenance for Cars and Motorcycles</i>
-	-	-	<i>Transportation and Warehousing</i>
50	16	60	<i>Hotel and Food & Beverage</i>
-	13	-	<i>Information and Communication</i>
12	26.672	586	<i>Financial Activities and Insurances</i>
-	6.791	-	<i>Real Estate</i>
7	-	-	<i>Professional, Scientific, and Technical Activities</i>
614	2.604	-	<i>Rental and Lease Activities without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support</i>
9	-	-	<i>Public Administration, Defense and Compulsory Social Security</i>
85	65	-	<i>Education</i>
-	-	-	<i>Human Health and Social Work Activities</i>
-	-	2	<i>Arts, Entertainment and Recreation</i>
28	98	-	<i>Other Service Activities</i>
-	-	-	<i>Activities of Households as Employers</i>
-	-	-	<i>International Institution and Other Extra International Agencies</i>
5.518	24.126	12.777	<i>Non-Business Field</i>
12.203	74.212	94.484	<i>Others</i>
274.015	280.299	117.320	<i>Total</i>

» Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

1. Tagihan adalah nilai aset keuangan yang tercatat dalam laporan posisi keuangan sebelum dikurangi CKPN (*gross*).
2. Definisi penurunan nilai dan perhitungan CKPN aset keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.
3. Pembagian sektor ekonomi mengacu pada sektor ekonomi yang tercantum dalam laporan bulanan ke otoritas, dengan tambahan sektor lain untuk sektor ekonomi dari tagihan yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu sektor yang ada.
4. Tagihan yang telah jatuh tempo mengacu pada definisi kategori portofolio Tagihan yang Telah Jatuh Tempo dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
5. Tagihan yang dihapus buku merupakan tagihan yang telah dihapus buku selama periode berjalan.

Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Individual

Disclosure of Movements of Allowance for Impairment Losses - Bank Only

No.	Keterangan	31 Desember 2023 December 31, 2023		
		Stage 1	Stage 2	Stage 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Saldo awal CKPN	133.889	274.015	280.299
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)			
	2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan	55.701	183.782	123.516
	2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan	(52.526)	(76.292)	(179.043)
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan			(22.352)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan			
	Saldo akhir CKPN	137.064	381.505	202.420

» Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

1. Definisi penurunan nilai dan perhitungan CKPN aset keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan.
2. Pembentukan (pemulihan) lainnya dilaporkan antara lain untuk selisih penjabaran valuta asing.
3. Untuk Laporan posisi Juli - Desember 2023, Bank dapat mengosongkan laporan posisi tahun sebelumnya.

Bagian dari risiko kredit di antaranya *Counterparty Credit Risk* yang merupakan risiko akibat kegagalan pihak lawan sebelum penyelesaian akhir dari arus kas pada transaksi tersebut baik dipengaruhi oleh kondisi usaha maupun karena faktor pergerakan nilai wajar atau nilai pasar untuk transaksi derivatif dan kewajiban komitmen yang timbul dari transaksi derivatif dan transaksi repo maupun *reverse repo*. Untuk perhitungan kecukupan modal dengan mempertimbangkan hasil perhitungan ATMR pendekatan standar, maka telah disiapkan perhitungan tambahan ATMR risiko kredit dari *counterparty risk* dengan memasukan komponen eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)*.

» *Receivables and Provisioning based on Economic Sectors*

1. *Receivables are the value of financial assets recorded in the statement of financial position before deducting CKPN (gross).*
2. *The definition of impairment and calculation of CKPN for financial assets refers to the applicable financial accounting standards.*
3. *The division of the economic sector refers to the economic sector listed in the monthly report to the authorities, with the addition of other sectors for the economic sector of the receivables that cannot be classified in one of the existing sectors.*
4. *Past due receivables refer to the definition of the portfolio category of Past Due Receivables in the provisions of the Otoritas Jasa Keuangan concerning guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.*
5. *Written-off Receivables are receivables that have been written off during the current period.*

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	31 Desember 2022 December 31, 2022			Description
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	
	(6)	(7)	(8)	
	157.086	107.788	127.716	Balance beginning on CKPN
				Establishment (recovery) of Allowance for Imporment Losses (CKPN) at the year (Net)
	4.789	270.264	331.718	2.a Establishment of Allowance for Impairment Losses (CKPN) at the year
	(27.987)	(104.037)	(61.814)	2.b Recovery of Allowance for Impairment Losses (CKPN) at the year
			(117.320)	CKPN is used to write-off on claims at the year
				Other establishment (recovery) at the year
	133.889	274.015	280.299	Balance end of CKPN

» *Disclosure of Movements of Allowance for Impairment Losses*

1. *The definition of impairment and calculation of CKPN for financial assets refers to financial accounting standards.*
2. *Another formation (recovery) is reported for foreign currency translation differences.*
3. *For the July - December 2023 position report, the bank can leave the previous year's position report blank*

Part of credit risk includes Counterparty Credit Risk, which is the risk due to the counterparty default before the final settlement of the cash flows in the transaction, both influenced by business conditions and due to factors of movements in fair value or market value for derivative transactions and commitment obligations arising from derivative transactions and repo and reverse repo transactions. For the calculation of capital adequacy by considering the results of the analysis of the standard approach RWA, an additional measure of credit risk RWA has been prepared for counterparty risk by including the weighted exposure component of the Credit Valuation Adjustment (CVA risk-weighted assets).

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual

Disclosure of Net Receivables by Portfolio and Rating Category - Bank Only

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Tagihan Bersih Net Receivables					
		Lembaga Pemeringkat Rating Company	Peringkat Jangka Panjang Long-Term Rating				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31 Desember 2023 *)							
1	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Receivables on Government</i>		7.052.842				
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on Public Sector Entities</i>						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions</i>						
4	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on Banks</i>		181.721	32		3.262	
5	Tagihan berupa Covered Bond <i>Receivables in the form of Covered Bond</i>						
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya <i>Receivables on Securities Companies and Other Financial Service Institutions</i>						
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya <i>Receivables in the form of Securities/ Subordinated Receivables, Equity, and Other Capital Instruments</i>						
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal <i>Loans Secured by Residential Property</i>						
9	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans Secured by Commercial Real Estate</i>						
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi <i>Loans for Land Procurement, Land Cultivation, and Construction</i>						
11	Kredit Pegawai/Pensiunan <i>Employee or Retired Loans</i>						
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <i>Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio</i>						

Tagihan Bersih Net Receivables								
	Peringkat Jangka Panjang Long-Term Rating		Peringkat Jangka Pendek Short-Term Rating				Tanpa Peringkat Unrated	Jumlah Total
	B+ s.d B-	< B-	A-1	A-2	A-3	< A-3		
	B+ s.d B-	< B-	F1+ s.d F1	F2	F3	< F3		
	B1 s.d B3	< B3	P-1	P-2	P-3	< P-3		
	B+(idn) s.d B-(idn)	< B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	< F3(idn)		
	id B+ s.d id B-	< idB-	idA1	idA2	idA3 - idA4	< idA4		
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
<i>December 31, 2023 *)</i>								
								7.052.842
							15.228	15.228
								-
							272.494	457.509
								-
							804.198	804.198
								-

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Tagihan Bersih Net Receivables					
		Lembaga Pemeringkat Rating Company	Peringkat Jangka Panjang Long-Term Rating				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id id BBB-	id BB+ s.d id id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on Corporate</i>						
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past Due Receivables</i>						
15	Aset Lainnya <i>Other Assets</i>						
	JUMLAH		7.234.174	32	-	3.262	-
31 Desember 2022 **)							
1	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Receivables on Government</i>		7.386.763				
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on Public Sector Entities</i>		-				
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions</i>		-				
4	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on Banks</i>		99.395		363.235		
5	Tagihan berupa Covered Bond <i>Receivables in the form of Covered Bond</i>						
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya <i>Receivables on Securities Companies and Other Financial Service Institutions</i>						
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya <i>Receivables in the form of Securities/ Subordinated Receivables, Equity, and Other Capital Instruments</i>						
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal <i>Loans Secured by Residential Property</i>						
9	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans Secured by Commercial Real Estate</i>						
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi <i>Loans for Land Procurement, Land Cultivation, and Construction</i>						

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Tagihan Bersih Net Receivables					
		Lembaga Pemeringkat Rating Company	Peringkat Jangka Panjang Long-Term Rating				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee or Retired Loans						
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio						
13	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporate						
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables						
15	Aset Lainnya Other Assets						
JUMLAH			7.486.159	-	363.235	-	-

» Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di laporan posisi keuangan, eksposur di transaksi rekening administratif dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
2. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
3. Lembaga pemeringkat yang diakui dan skala peringkat mengacu pada ketentuan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui otoritas.

Tagihan Bersih Net Receivables							
Peringkat Jangka Panjang Long-Term Rating		Peringkat Jangka Pendek Short-Term Rating				Tanpa Peringkat Unrated	Jumlah Total
B+ s.d B-	< B-	A-1	A-2	A-3	< A-3		
B+ s.d B-	< B-	F1+ s.d F1	F2	F3	< F3		
B1 s.d B3	< B3	P-1	P-2	P-3	< P-3		
B+(idn) s.d B-(idn)	< B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	< F3(idn)		
id B+ s.d id B-	< idB-	idA1	idA2	idA3 - idA4	< idA4		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						9.483.323	9.483.323
-	-	-	-	-	-	9.520.994	17.370.387

» Disclosure of Net Receivables by Portfolio and Rating Category

1. Disclosure of net receivables is carried out for asset exposure in the statement of financial position, exposure in off-balance sheet transactions, and exposures that give rise to counterparty credit risk.
2. Determination of portfolio categories and calculation of net receivables refer to the provisions of the Otoritas Jasa Keuangan regarding guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.
3. Recognized rating agencies and rating scales refer to the provisions regarding rating agencies and ratings recognized by the authorities.



Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

Net Receivables by Risk Weight after Loan Risk Mitigation - Bank Only

No.	Keterangan Description	31 Desember 2023 *) December 31, 2023 *)								
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Loan Risk Mitigation								
(1)	(2)	0%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	(10)
A.	Eksposur Laporan Posisi Keuangan Balance Sheet Exposure									
1	Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on Government	6.289.900								
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities									
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions									
4	Tagihan Kepada Bank Receivables on Banks			454.607						
5	Tagihan berupa Covered Bond Receivables in the form of Covered Bond									
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Receivables on Securities Companies and Other Financial Service Institutions	14.500		28.327				396.520		
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya Receivables in the form of Securities/ Subordinated Receivables, Equity, and Other Capital Instruments									
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property			8.234	1.143	1.327		2.568		
9	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	154								
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi Loans for Land Procurement, Land Cultivation, and Construction									
11	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee or Retired Loans									
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio	1.928								
13	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporate	200.596								
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	3.481								
15	Aset Lainnya Other Assets	509.076								
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan Total Exposures - Balance Sheet	7.019.636	-	491.168	1.143	1.327	-	399.088	-	

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

31 Desember 2023 *) December 31, 2023 *)										ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Loan Risk Mitigation											
50%	70%	75%	85%	90%	100%	110%	150%	Lainnya Others			
(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
									-	-	
15.165									7.582	728	
									-	-	
							1.995		93.915	9.016	
									-	-	
							346.755		684.406	65.703	
									-	-	
121	35.714								28.418	2.728	
	1.095.366			278.657		1.163.489			2.297.386	220.549	
					806.590				806.590	77.433	
22.415.743									11.207.871	1.075.956	
67		3.569	2.043		890				5.336	512	
					17.392.502				17.392.502	1.669.680	
18.519					220.266		106.257		388.911	37.335	
					603.516		61.300		695.466	66.765	
22.449.614	1.131.080	3.569	2.043	278.657	19.023.764	1.163.489	516.307		33.608.382	3.226.405	

31 Desember 2023 *)
December 31, 2023 *)

No.	Keterangan Description	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Loan Risk Mitigation								
		0%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
B. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif <i>Off Balance Sheet Commitment/Contingency Receivables Exposures</i>										
1	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Receivables on Government</i>									
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on Public Sector Entities</i>									
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions</i>									
4	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on Banks</i>									
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya <i>Receivables on Securities Companies and Other Financial Service Institutions</i>	174						15.744		
6	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal <i>Loans Secured by Residential Property</i>			88						
7	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans Secured by Commercial Real Estate</i>									
8	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi <i>Loans for Land Procurement, Land Cultivation, and Construction</i>									
9	Kredit Pegawai/Pensiunan <i>Employee or Retired Loans</i>									
10	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <i>Receivables on Micro, Small Business and Retail Portfolio</i>									
11	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on Corporate</i>	57.451								
12	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past Due Receivables</i>									
Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif <i>Total Exposures - Off Balance Sheet</i>		57.625	-	88	-	-	-	15.744	-	-
C. Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Loan Risk) <i>Counterparty Loan Risk Exposures</i>										
1	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Receivables on Government</i>	762.942	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on Public Sector Entities</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on Banks</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya <i>Receivables on Securities Companies and Other Financial Service Institutions</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

31 Desember 2023 *) December 31, 2023 *)										ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Loan Risk Mitigation											
50%	70%	75%	85%	90%	100%	110%	150%	Lainnya Others		(19)	(20)
(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)			
										-	-
63										31	3
							906			1.359	130
							2.178			9.565	918
										18	2
	2.985			4.122		2.965				9.060	870
					110					110	11
										-	-
		59	5.799							4.973	477
					1.138.036					1.138.036	109.251
1.307					367		1.331			3.017	290
1.370	2.985	59	5.799	4.122	1.138.513	2.965	4.415	-		1.166.170	111.952
-		-								-	-
-		-								-	-
-		-								-	-
-		-								-	-
										-	-

No.	Keterangan Description	31 Desember 2023 *) December 31, 2023 *)							
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Loan Risk Mitigation							
		0%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <i>Receivables on Micro, Small Business and Retail Portfolio</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on Corporate</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Counterparty Loan Risk <i>Total Exposures - Counterparty Loan Risk</i>		762.942	-	-	-	-	-	-	-
Rasio KPMM sesuai Profil Risiko (%) <i>CAR Ratio according to Risk Profile (%)</i>		9,60							

No.	Keterangan Description	31 Desember 2022 **) December 31, 2022 **)							
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Loan Risk Mitigation							
		0%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
A. Eksposur Laporan Posisi Keuangan <i>Balance Sheet Exposures</i>									
1	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Receivables on Government</i>	5171.909							
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on Public Sector Entities</i>		8.504						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions</i>								
4	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on Banks</i>			322.205					
5	Tagihan berupa Covered Bond <i>Receivables in the form of Covered Bond</i>								
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya <i>Receivables on Securities Companies and Other Financial Service Institutions</i>								
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya <i>Receivables in the form of Securities/ Subordinated Receivables, Equity, and Other Capital Instruments</i>								
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal <i>Loans Secured by Residential Property</i>				7.251		15.218		
9	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans Secured by Commercial Real Estate</i>								
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi <i>Loans for Land Procurement, Land Cultivation, and Construction</i>								

31 Desember 2023 *) December 31, 2023 *)										ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Loan Risk Mitigation											
50%	70%	75%	85%	90%	100%	110%	150%	Lainnya Others			
(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
-										-	-
-										-	-
-										-	-

31 Desember 2022 **) December 31, 2022 **)										ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Loan Risk Mitigation											
50%	70%	75%	85%	90%	100%	110%	150%	Lainnya Others			
(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	
										-	-
										1.276	121
										-	-
										64.441	6.135
										7.139	680
							7.896			7.896	752

31 Desember 2022 **)
 December 31, 2022 **)

No.	Keterangan Description	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Loan Risk Mitigation							
		0%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
11	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee or Retired Loans	2.500							-
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio	5.657		37.057					-
13	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporate	385.088	-	894.939					-
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables								-
15	Aset Lainnya Other Assets	417.810							-
Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan Total Exposures - Balance Sheet		5.982.964	8.504	1.254.201	7.251	-	15.218	-	-
B.	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif Off Balance Sheet Commitment/Contingency Receivables Exposures								
1	Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on Government	-							-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities	-							-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions	-							-
4	Tagihan Kepada Bank Receivables on Banks	-							-
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Receivables on Securities Companies and Other Financial Service Institutions								
6	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	-							-
7	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate								-
8	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi Loans for Land Procurement, Land Cultivation, and Construction								
9	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee or Retired Loans								-
10	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Business and Retail Portfolio	136							-
11	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporate	11.955							-
12	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables								-
Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif Total Exposures - Off Balance Sheet		12.091	-	-	-	-	-	-	-

No.	Keterangan Description	31 Desember 2022 **) December 31, 2022 **)								
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Loan Risk Mitigation								
(21)	(22)	0%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	(30)
C.	Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Loan Risk) Counterparty Loan Risk Exposures									
1	Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on Government	595.245								
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities									
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions									
4	Tagihan Kepada Bank Receivables on Banks			9.492						
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Receivables on Securities Companies and Other Financial Service Institutions									
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Business and Retail Portfolio									
7	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporate									
	Total Eksposur Counterparty Loan Risk Total Exposures - Counterparty Loan Risk	595.245	-	9.492	-	-	-	-	-	-

- » Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di laporan posisi keuangan eksposur di transaksi rekening administratif dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
 2. Penetapan kategori portofolio, perhitungan tagihan bersih, dan perhitungan dampak mitigasi risiko kredit mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
 3. Beban modal adalah hasil perkalian ATMR dengan rasio minimum KPMM sesuai POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
 4. Contoh pengisian:
Bank memiliki tagihan yang tergolong dalam kategori portofolio tagihan kepada korporasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Tagihan tidak memiliki peringkat sehingga dikenakan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen). Sebagian dari tagihan dimaksud yaitu sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*) yang memiliki bobot risiko 0% (nol persen). Pengisian pada baris tagihan kepada korporasi dilakukan sebagai berikut: Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) dimasukkan dalam kolom bobot risiko 100% (seratus persen), dan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dimasukkan dalam kolom bobot risiko 0% (nol persen).



Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

Disclosure of Net Receivables and Loan Risk Mitigation Techniques - Bank Only

No.	Keterangan Description	31 Desember 2023 *) December 31, 2023 *)						Bagian Yang Tidak Dijamin Unsecured Portion
		Tagihan Bersih Net Receivables	Bagian Yang Dijamin Dengan Portion Secured By					
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance	Lainnya Others		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) - [(4)+(5)+(6)+(7)]	
A	Eksposur Laporan Posisi Keuangan Balance Sheet Exposures							
1	Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on Government	6.289.900					6.289.900,16	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities	15.165					15.164,93	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions						-	
4	Tagihan Kepada Bank Receivables on Banks	456.603					456.602,86	
5	Tagihan berupa Covered Bond Receivables in the form of Covered Bond							
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Receivables on Securities Companies and Other Financial Service Institutions	786.102	14.500				771.602,03	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya Receivables in the form of Securities/Subordinated Receivables, Equity, and Other Capital Instruments						-	
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	49.106					49.106,29	
9	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	2.537.667	154				2.537.513,06	
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi Loans for Land Procurement, Land Cultivation, and Construction	806.590	-				806.589,75	
11	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee or Retired Loans	22.415.743	-				22.415.742,59	
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio	8.496	1.928	67			6.501,20	
13	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporate	17.593.098	200.596				17.392.501,53	
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	348.522	3.451				345.071,48	
15	Aset Lainnya Other Assets	1.173.892					1.173.892,10	
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan Total Exposures - Balance Sheet	52.480.884	220.629	67	-		52.260.187,97	

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

31 Desember 2022 **) December 31, 2022 **)					
Tagihan Bersih Net Receivables	Bagian Yang Dijamin Dengan Portion Secured By				Bagian Yang Tidak Dijamin Unsecured Portion
	Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance	Lainnya Others	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
5.911.336	-	-	-	-	5.911.336
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
500.301	-	-	-	-	500.301
15.702	-	1.276	-	-	14.426
13.487.716	134.105	339.445	-	-	13.014.166
17.936.082	-	-	-	-	17.936.082
285.563	1.906	267	-	-	283.391
8.772.511	350.324	83.392	-	-	8.338.796
297.854	30	99.945	-	-	197.878
1.157.358	-	-	-	-	1.157.358
48.364.423	486.365	524.324	-	-	47.353.734

No.	Keterangan Description	31 Desember 2023 *) December 31, 2023 *)						Bagian Yang Tidak Dijamin Unsecured Portion
		Tagihan Bersih Net Receivables	Bagian Yang Dijamin Dengan Portion Secured By					
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance	Lainnya Others		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]	
B	Eksposur Transaksi Rekening Administratif Off Balance Sheet Exposures							
1	Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on Government	-					-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities	63					62,84	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions	-					-	
4	Tagihan Kepada Bank Receivables on Banks	906					906,12	
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Receivables on Securities Companies and Other Financial Service Institutions	18.096	174				17.922,15	
6	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	88					87,98	
7	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	10.071					10.071,48	
8	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi Loans for Land Procurement, Land Cultivation, and Construction	110					110,33	
9	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee or Retired Loans	-					-	
10	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Business and Retail Portfolio	5.858					5.857,72	
11	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporate	1.195.487	57.451				1.138.035,76	
12	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	3.005					3.005,12	
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif Total Exposures - Off Balance Sheet	1.233.685	57.625	-	-		1.176.059,53	

31 Desember 2022 **)					
December 31, 2022 **)					
Tagihan Bersih Net Receivables	Bagian Yang Dijamin Dengan Portion Secured By				Bagian Yang Tidak Dijamin Unsecured Portion
	Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance	Lainnya Others	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	300
-	-	-	-	-	-
507	-	-	-	-	507
710.811	56.613	496.594	-	-	157.604
-	-	-	-	-	-
711.618	56.613	496.594	-	-	158.411

No.	Keterangan Description	31 Desember 2023 *) December 31, 2023 *)						Bagian Yang Tidak Dijamin Unsecured Portion
		Tagihan Bersih Net Receivables	Bagian Yang Dijamin Dengan Portion Secured By					
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance	Lainnya Others		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]	
C	Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Loan Risk) Counterparty Loan Risk Exposures							
1	Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on Government	762.942	762.942				-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities	-					-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions	-					-	
4	Tagihan Kepada Bank Receivables on Banks	-					-	
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Receivables on Securities Companies and Other Financial Service Institutions	-					-	
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Business and Retail Portfolio	-					-	
7	Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporate	-					-	
	Jumlah Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) Total Exposures - Counterparty Loan Risk	762.942	762.942	-	-		-	
	JUMLAH (A+B+C) TOTAL (A+B+C)	54.477.511	1.041.196	67	-		53.436.247	

» Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

1. Penetapan kategori portofolio, perhitungan tagihan bersih dan kriteria teknik mitigasi risiko kredit yang dapat digunakan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
2. Contoh pengisian: Bank memiliki tagihan yang tergolong dalam kategori portofolio tagihan kepada korporasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sebagian dari tagihan dimaksud yaitu sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*) dan sebagian tagihan yaitu sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dijamin dengan garansi dari penerbit yang diakui sesuai ketentuan. Maka sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) diisi dalam kolom Bagian yang Dijamin dengan Agunan, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diisi dalam kolom Bagian yang Dijamin dengan Garansi, dan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) diisi dalam kolom Bagian yang Tidak Dijamin.

31 Desember 2022 **)					
December 31, 2022 **)					
Tagihan Bersih Net Receivables	Bagian Yang Dijamin Dengan Portion Secured By				Bagian Yang Tidak Dijamin Unsecured Portion
	Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance	Lainnya Others	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
1.475.428	1.475.428				-
-					-
-					-
-					-
-					-
-					-
1.475.428	1.475.428	-	-		-
50.551.469	2.018.406	1.020.918	-		47.512.145

» Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation Techniques

1. Determination of portfolio categories, calculation of net receivables, and criteria for credit risk mitigation techniques that can be used refer to the provisions of the Otoritas Jasa Keuangan regarding guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.
2. Filling example: The bank has receivables that fall under the category of corporate receivables portfolio in the amount of IDR100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiahs). A portion of the said receivables, amounting to IDR30,000,000,000.00 (thirty billion rupiahs) is secured by cash collateral and part of the receivables, which is IDR50,000,000,000.00 (fifty billion rupiahs) is secured by a guarantee from the issuer, recognized under the terms. Then an amount of IDR30,000,000,000.00 (thirty billion rupiahs) is filled in the Collateral Secured Portion column, IDR50,000,000,000.00 (fifty billion rupiahs) is filled in the Guarantee Secured Portion column, and IDR20,000,000,000.00 (twenty billion rupiahs) is served in the Unsecured Portion column.



» Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank secara Individual

1. Eksposur Aset di Laporan Posisi Keuangan, kecuali Eksposur Sekuritisasi

Asset Exposure in the Statement of Financial Position, except Securitization Exposures

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023 *) December 31, 2023 *)		
		Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA before CRM	ATMR Setelah MRK RWA after CRM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	6.289.900	-	-
	Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	6.289.900	-	-
	Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	15.165	7.582	7.582
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	456.603	93.915	93.915
	Tagihan Jangka Pendek	355.213	71.043	71.043
	Tagihan Jangka Panjang	101.390	22.872	22.872
5.	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-
6.	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	786.102	706.156	684.406
	Tagihan Jangka Pendek	156.073	197.285	175.535
	Tagihan Jangka Panjang	630.029	508.871	508.871
7.	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-
	Surat berharga/piutang subordinasi	-	-	-
	Instrumen ekuitas	-	-	-
	Instrumen modal lainnya	-	-	-
	Penyertaan dalam rangka program nasional	-	-	-
8.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	49.106	28.418	28.418
9.	Kredit Beragun Properti Komersial	2.537.667	2.297.556	2.297.386
10.	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	806.590	806.590	806.590
11.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	22.415.743	11.207.871	11.207.871
12.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	8.496	6.799	5.336
13.	Tagihan Kepada Korporasi	17.593.098	17.593.098	17.392.502
14.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	348.522	390.681	388.911
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang tidak bergantung dari arus kas properti	916	916	916
	Eksposur lainnya	347.606	389.765	387.995
15.	Aset Lainnya	1.173.892		695.466
	Uang tunai, emas, dan <i>commemorative coin</i>	509.076		-
	Aset tetap dan inventaris neto	353.324		353.324
	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	61.300		91.949
	Antar kantor neto	0		0
	Lainnya	250.193		250.193
	JUMLAH	52.480.884	33.138.665	33.608.382

» Disclosure of Credit Risk RWA Calculation Using Standard Approach - Bank Only

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	31 Desember 2022 **) December 31, 2022 **)			Portfolio Category
	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA before CRM	ATMR Setelah MRK RWA after CRM	
	(6)	(7)	(8)	
	5.911.336	-	-	Receivables on Government
	5.911.336	-	-	Receivables on Indonesia Government
	-	-	-	Receivables on Other Government
	-	-	-	Receivables on Public Sector Entities
	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
	500.301	100.126	100.126	Receivables on Banks
	400.687	80.137	80.137	Short-Term Receivables
	99.615	19.989	19.989	Long-term Receivables
				Receivables in the form of Covered Bond
				Receivables on Securities Companies and Other Financial Service Institutions
				Short-term Receivables
				Long-term Receivables
				Receivables on Banks
				Short-term Receivables
				Long-term Receivables
				Short-term Receivables
				Long-term Receivables
	15.702	3.925	4.244	Loans Secured by Residential Property
	13.487.716	13.487.716	13.183.888	Loans Secured by Commercial Real Estate
				Credit for Land Procurement, Land Cultivation, and Construction
	17.936.082	8.968.041	8.968.041	Employee or Retired Loans
	285.563	214.172	212.676	Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
	8.772.511	8.772.511	8.380.491	Receivables on Corporate
	297.854	446.683	346.693	Past Due Receivables
	195	195	195	Loans Secured by Residential Property
	297.658	446.488	346.498	Except Loans Secured by Residential Property
	1.157.358		740.471	Other Assets
	449.905		-	Cash, Gold and Commemorative Coin
	367.718		367.718	Fixed Asset and Net Inventory
	66.037		99.055	Foreclosed Assets
	-		-	Net Inter Office
	273.697		273.697	Others
	48.364.423	31.993.175	31.936.632	TOTAL

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi

Off Balance Sheets Commitment/Contingency Receivables Exposures, except Securitization Exposures

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023 *) December 31, 2023 *)		
		Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA before CRM	ATMR Setelah MRK RWA after CRM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-
	Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	-	-	-
	Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	62,84	31,42	31,42
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	906,12	1.359,18	1.359,18
	Tagihan Jangka Pendek	63,18	94,77	94,77
	Tagihan Jangka Panjang	842,94	1.264,41	1.264,41
5.	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	18.096,20	9.825,91	9.564,83
	Tagihan Jangka Pendek	858,39	1.287,58	1.287,58
	Tagihan Jangka Panjang	17.237,82	8.538,32	8.277,25
6.	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	87,98	17,60	17,60
7.	Kredit Beragun Properti Komersial	10.071,48	9.060,29	9.060,29
8.	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	110,33	110,33	110,33
9.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-
10.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	5.857,72	4.973,16	4.973,16
11.	Tagihan Kepada Korporasi	1.195.487,03	1.195.487,03	1.138.035,76
12.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	3.005,12	3.017,02	3.017,02
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang tidak bergantung dari arus kas properti	-	-	-
	Eksposur lainnya	3.005,12	3.017,02	3.017,02
	JUMLAH	1.233.684,85	1.223.881,94	1.166.169,59

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	31 Desember 2022 **) December 31, 2022 **)			Portfolio Category
	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA before CRM	ATMR Setelah MRK RWA after CRM	
	(6)	(7)	(8)	
	-	-	-	Receivables on Government
	-	-	-	Receivables on Indonesia Government
	-	-	-	Receivables on Other Government
	-	-	-	Receivables on Public Sector Entities
	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
	-	-	-	Receivables on Banks
	-	-	-	Short-term Receivables
	-	-	-	Long-term Receivables
				Receivables on Securities Companies and Other Financial Service Institutions
				Short-term Receivables
				Long-term Receivables
	-	-	-	Loans secured by Residential Property
	300,00	300,00	300,00	Loans Secured by Commercial Real Estate
				Credit for Land Procurement, Land Cultivation, and Construction
	-	-	-	Employee/Retired Loans
	506,98	380,23	380,23	Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
	710.811,41	710.811,41	405.901,16	Receivables on Corporate
	-	-	-	Past Due Receivables
	-	-	-	Loans Secured by Residential Property not depending on the property cash flows
	-	-	-	Other exposure
	711.618,38	711.491,64	406.581,39	TOTAL

3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

Counterparty Credit Risk Exposures

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023 *) December 31, 2023 *)		
		Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA before CRM	ATMR Setelah MRK RWA after CRM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	762.942	-	-
	Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	762.942	-	-
	Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-
	Tagihan Jangka Pendek	-	-	-
	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-
5.	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-
	Tagihan Jangka Pendek	-	-	-
	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-
7.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-
	JUMLAH	762.942	-	-

4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Settlement (Settlement Risk)

Settlement Risk Exposures

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2023 *) December 31, 2023 *)		
		Nilai Eksposur Exposure Value	Faktor Pengurang Modal Capital deduction factor	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<i>Delivery versus payment</i>			
	Beban Modal 8% (5-15 hari)	0		0
	Beban Modal 50% (16-30 hari)	0		0
	Beban Modal 75% (31-45 hari)	0		0
	Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	0		0
2.	<i>Non-delivery versus payment</i>	0	0	
	JUMLAH	0	0	0

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	31 Desember 2022 **) December 31, 2022 **)			Portfolio Category
	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA before CRM	ATMR Setelah MRK RWA after CRM	
	(6)	(7)	(8)	
	1475.428	-	-	Receivables on Government
	1474.540	-	-	Receivables on Indonesia Government
	-	-	-	Receivables on Other Government
	-	-	-	Receivables on Public Sector Entities
	-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
	-	-	-	Receivables on Banks
	-	-	-	Short-term Receivables
	-	-	-	Long-term Receivables
				Receivables on Securities Companies and Other Financial Service Institutions
				Short-term Receivables
				Long-term Receivables
	-	-	-	Receivables on Micro, Small Business and Retail Portfolio
	-	-	-	Receivables on Corporate
	1475.428	-	-	TOTAL

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	31 Desember 2022 **) December 31, 2022 **)			Type of Transaction
	Nilai Eksposur Exposure Value	Faktor Pengurang Modal Capital deduction factor	ATMR RWA	
	(6)	(7)	(8)	
				Delivery versus payment
	0		0	Capital charge 8% (5-15 days)
	0		0	Capital charge 50% (16-30 days)
	0		0	Capital charge 75% (31-45 days)
	0		0	Capital charge 100% (more than 45 days)
	0	0		Non-delivery versus payment
	0	0	0	TOTAL



5. Eksposur Sekuritisasi

Securitization Exposures

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2023 *)/December 31, 2023 *)	
		Faktor Pengurang Modal <i>Capital deduction factor</i>	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>External Rating Base Approach</i> (ERBA)		0
2.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>Standardized Approach</i> (SA)		0
3.	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama	0	
JUMLAH		0	0

6. Eksposur Derivatif

Derivative Exposures

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2023 *)/December 31, 2023 *)	
		Tagihan Bersih <i>Net Receivables</i>	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-
5.	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-
7.	Eksposur tertimbang dari <i>Loan Valuation Adjustment</i> (CVA risk weighted assets)	-	-
JUMLAH		-	-

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	31 Desember 2022 **)/December 31, 2022 **)		Type of Transaction
	Faktor Pengurang Modal Capital deduction factor	ATMR RWA	
	(5)	(6)	
		0	RWA for securitization exposures calculated by External Rating Base Approach (ERBA) method
		0	RWA for Securitization Exposures calculated by Standardized Approach (SA) method
	0		Securitization Exposures as Deduction Factor of Core Capital
	0	0	TOTAL

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	31 Desember 2022 **)/December 31, 2022 **)		Type of Transaction
	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR RWA	
	(5)	(6)	
	-	-	Receivables on Government
	-	-	Receivables on Public Sector Entities
	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions
	-	-	Receivables on Banks
			Receivables on Securities Companies and Other Financial Service Institutions
	-	-	Receivables on Micro, Small Business and Retail Portfolio
	-	-	Receivables on Corporate
		-	Loan Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)
	-	-	TOTAL

7. Total Pengukuran Risiko Kredit (1+2+3+4+5+6)

Total Loan Risk Measurement (1+2+3+4+5+6)

JUMLAH ATMR RISIKO KREDIT TOTAL RISK WEIGHTED ASSETS CREDIT RISK	(A)
FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT CREDIT RISK RWA DEDUCTION FACTOR	(B)
JUMLAH ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B) TOTAL RWA CREDIT RISK (A) - (B)	(C)
JUMLAH FAKTOR PENGURANG MODAL TOTAL CAPITAL DEDUCTION FACTOR	(D)

- » Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar
Perhitungan ATMR Risiko Kredit mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Analisis Eksposur Counterparty Credit Risk (CCR1)

Analysis of Counterparty Credit Risk Exposures (CCR1)

Keterangan	31 Desember 2023/December 31, 2023					
	a	b	c	d	e	f
	Replacement Cost (RC)	Potential Future Exposure (PFE)	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan Regulatory EAD Alpha used for EAD regulatory calculations	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR RWA
SA-CCR (untuk derivatif)	-	-		1,4	-	-
Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)					N/A	N/A
Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					N/A	N/A
Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					-	-
VaR untuk SFT					N/A	N/A
JUMLAH						-

*) Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar yang secara umum dihitung berdasarkan jenis kategori portofolio dan bobot risiko Berdasarkan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 /SEOJK.03/2021

**) Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar yang secara umum dihitung berdasarkan jenis kategori portofolio dan bobot risiko Berdasarkan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/SEOJK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2018

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	31 Desember 2023 *) December 31, 2023 *)	31 Desember 2022 **) December 31, 2022 **)
	34.774.551,80	32.343.212,99
	12.685,45	8.588,15
	34.761.866,35	32.334.624,83
	-	-

» Disclosure of Calculation of Credit Risk RWA using Standard Approach

Calculation of RWA for Credit Risk refers to the provisions of the Otoritas Jasa Keuangan regarding guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	31 Desember 2022/December 31, 2022						Description
	a	b	c	d	e	f	
	Replacement Cost (RC)	Potential Future Exposure (PFE)	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan Regulatory EAD Alpha used for EAD regulatory calculations	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR RWA	
				1,4	-	-	SA-CCR (for derivatives)
					N/A	N/A	Internal Model Method (for derivatives and SFT)
					N/A	N/A	Standard approach to credit risk mitigation (for SFT)
					-	-	Comprehensive approach to credit risk mitigation (for SFT)
					N/A	N/A	VaR for SFT
						-	TOTAL

*) Calculation of RWA for Credit Risk using the Standard Approach which is generally calculated based on the type of portfolio category and risk weight based on a copy of the Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 24 /SEOJK.03/2021

**) Calculation of RWA for Credit Risk using the Standard Approach which is generally calculated based on the type of portfolio category and risk weight based on a copy of the Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 42/SEOJK.03/2016 as amended by the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 11/SEOJK.03/2018



Capital Charge untuk Credit Valuation Adjustment (CCR2)

Capital Charge for Credit Valuation Adjustment (CCR2)

Keterangan	31 Desember 2023/December 31, 2023	
	a	b
	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR RWA
Total portfolios berdasarkan <i>Advanced CVA capital charge</i>	N/A	N/A
(i) komponen VaR (termasuk 3× multiplier)		N/A
(ii) komponen Stressed VaR (termasuk 3× multiplier)		N/A
Semua Portfolio sesuai <i>Standardised CVA Capital Charge</i>	-	-
Jumlah sesuai <i>CVA Capital Charge</i>	-	-

Eksposur CCR berdasarkan Kategori Portofolio dan Bobot Risiko (CCR3)

CCR Exposure by Portfolio Category and Risk Weight

Bobot Risiko Kategori Portofolio	31 Desember 2023/December 31, 2023									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
	0%	10%	20%	50%	75%	100%	150%	Lainnya Others	Total Tagihan Bersih Total Net Receivables	
Tagihan kepada Pemerintah dan Bank Sentral										-
Tagihan kepada Entitas Sektor Publik										-
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional										-
Tagihan kepada Bank Lain										-
Tagihan kepada perusahaan sekuritas										-
Tagihan kepada Korporasi										-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel										-
Aset lainnya										-
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	31 Desember 2022/December 31, 2022		Description
	a	b	
	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR RWA	
	N/A	N/A	Total portfolios based on Advanced CVA capital charge
		N/A	(i) VaR components (including 3× multipliers)
		N/A	(ii) Stressed VaR components (including 3× multipliers)
	-	-	All Portfolios according to Standardised CVA Capital Charge
	-	-	Total according to CVA Capital Charge

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	31 Desember 2022/December 31, 2022									Portfolio Category and Risk Weight	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i		
	0%	10%	20%	50%	75%	100%	150%	Lainnya Others	Total Tagihan Bersih Total Net Receivables		
	1.475.428									1.475.427,71	Receivables on government and Central Bank
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on public sector entities
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on multilateral development banks and international institutions
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on other banks
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Securities Companies
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on corporate
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on micro, small business & retail portfolio
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Other assets
	1.475.428	-	-	-	-	-	-	-	-	1.475.428	Total

Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book (SEC 1)

Securitization Exposure to banking book (SEC 1)

	31 Desember 2023/December 31, 2023								
	a	b	c	e	f	g	h	i	j
	Bank sebagai originator <i>Bank as originator</i>			Bank sebagai sponsor <i>Bank as sponsor</i>			Bank sebagai investor <i>Bank as an investor</i>		
	Traditional	Sintetis <i>Synthetic</i>	Sub-total	Traditional	Sintetis <i>Synthetic</i>	Sub-total	Traditional	Sintetis <i>Synthetic</i>	Sub-total
<i>Retail (total) - antara lain</i>			-			-			-
Kredit perumahan			-			-			-
Kartu kredit			-			-			-
Eksposur ritel lainnya			-			-			-
Re-sekuritisasi			-			-			-
<i>Non-retail (total) - antara lain</i>			-			-			-
Kredit korporasi			-			-			-
Kredit komersil			-			-			-
Sewa dan piutang			-			-			-
<i>Non-retail lainnya</i>			-			-			-
Re-sekuritisasi			-			-			-

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	31 Desember 2022/December 31, 2022									
	a	b	c	e	f	g	h	i	j	
	Bank sebagai originator <i>Bank as originator</i>			Bank sebagai sponsor <i>Bank as sponsor</i>			Bank sebagai investor <i>Bank as an investor</i>			
	Traditional	Sintetis <i>Synthetic</i>	Sub-total	Traditional	Sintetis <i>Synthetic</i>	Sub-total	Traditional	Sintetis <i>Synthetic</i>	Sub-total	
			-			-			-	Retail (total) – among others
			-			-			-	Housing loans
			-			-			-	Credit card
			-			-			-	Other retail exposures
			-			-			-	Re-securitization
			-			-			-	Non-retail (total) – among others
			-			-			-	Corporate Credit
			-			-			-	Commercial credit
			-			-			-	Rent and receivables
			-			-			-	Other non-retail
			-			-			-	Re-securitization

Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book dan terkait Persyaratannya - Bank yang Bertindak sebagai Investor (SEC4)

Securitization Exposure to the Banking Book and its Capital Requirements - Banks Acts as Investors

Keterangan	31 Desember 2023/December 31, 2023							
	a	b	c	d	e	f	g	h
	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko) Exposure values (based on Risk Weight)					Exposure Values		
	≤20% Bobot Risiko Risk Weight	>20% to 50% Bobot Risiko Risk Weight	>50% to 100% Bobot Risiko Risk Weight	>100% to <1250% Bobot Risiko Risk Weight	1250% Bobot Risiko Risk Weight	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA
Total Eksposur	-							-
Sekuritisasi Tradisional	-							-
Di mana <i>Underlying</i> Sekuritisasi	-							-
Ritel								
<i>Non-Retail</i>	-							-
Di mana Re-Sekuritisasi								
Senior								
Non-Senior								
Sekuritisasi Sintetis								
Di mana <i>Underlying</i> Sekuritisasi								
Ritel								
<i>Non-Retail</i>								
Di mana Re-Sekuritisasi								
Senior								
Non-senior								

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	i	j	k	l	m	n	o	p	q	Description
	Exposure Values	ATMR RWA				Capital Charge After Cap				
	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	
				-				-		Total Exposure
				-				-		Traditional Securitization
				-				-		Where is Underlying Securitization
										Retail
				-				-		Non-Retail
										Where to Re-Securitize
										Senior
										Non-Senior
										Synthetic Securitization
										Where is Underlying Securitization
										Retail
										Non-Retail
										Where is Re-Securitization
										Senior
										Non-Senior

Keterangan	31 Desember 2022/December 31, 2022							
	a	b	c	d	e	f	g	h
	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko) Exposure values (based on Risk Weight)					Exposure Values		
	≤20% Bobot Risiko Risk Weight	>20% to 50% Bobot Risiko Risk Weight	>50% to 100% Bobot Risiko Risk Weight	>100% to <1250% Bobot Risiko Risk Weight	1250% Bobot Risiko Risk Weight	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA
Total Eksposur	-							-
Sekritisasi Tradisional	-							-
Di mana <i>Underlying</i> Sekritisasi	-							-
Ritel								
<i>Non-Retail</i>	-							-
Di mana Re-Sekritisasi								
Senior								
Non-Senior								
Sekritisasi Sintetis								
Di mana <i>Underlying</i> Sekritisasi								
Ritel								
<i>Non-Retail</i>								
Di mana Re-Sekritisasi								
Senior								
Non-senior								

Definisi

Kolom (a) sampai dengan (e) didefinisikan terkait dengan bobot risiko *regulatory*.

Kolom (f) sampai dengan (q) berhubungan dengan pendekatan *regulatory* yang digunakan. Metode SA mencakup RBA dan pendekatan "look through" pada eksposur senior (paragraf 566–605 dari kerangka Basel). Bank pada yurisdiksi yang tidak menggunakan peringkat risiko pada peraturan mereka harus melaporkan nilai sesuai alternatif ("SSFA") untuk pendekatan peringkat kredit yang digunakan.

Kolom (e), (i), (m) dan (q) mengacu pada item dengan bobot risiko 1250% sesuai paragraf 90, poin pertama, kerangka Basel III.

Capital charge after mengacu pada *capital charge after application of the cap* sebagaimana dideskripsikan pada paragraf 594 dan 610 kerangka sekritisasi.

Sebagai catatan, setelah penerapan revisi kerangka sekritisasi di Januari 2018, pergantian ini harus dilakukan:

Kolom IRB RBA (termasuk IAA) harus digunakan untuk IRBA (dan judul kolom juga disesuaikan).

Kolom IRB SFA juga harus digunakan untuk ERBA dan IAA.

Kolom SA/SSFA juga harus digunakan untuk SA/SSFA.

"Kolom 1250% juga harus digunakan untuk item dengan 1250% dikarenakan ketidakmampuan bank terkait penerapan IRBA, ERBA, IAA atau SA kepada item (lihat paragraf 42 revisi kerangka sekritisasi)."

Capital charge after cap mengacu kepada *capital charge* setelah penerapan cap sebagaimana dideskripsikan pada paragraf 88-93 revisi kerangka sekritisasi.

	i	j	k	l	m	n	o	p	q	Description
	Exposure Values	ATMR RWA				Capital Charge After Cap				
	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	
			-				-			Total Exposure
			-				-			Traditional Securitization
			-				-			Where is Underlying Securitization
										Retail
			-				-			Non-Retail
										Where to Re-Securitize
										Senior
										Non-Senior
										Synthetic Securitization
										Where is Underlying Securitization
										Retail
										Non-Retail
										Where is Re-Securitized
										Senior
										Non-Senior

Definition

Columns (a) to (e) are defined in relation to regulatory risk weights.

Columns (f) to (q) relate to the regulatory approach used. SA methods include RBA and a "lookthrough" approach to senior exposure (paragraphs 566–605 of the Basel framework). Banks in jurisdictions that do not use risk ratings in their regulations must report alternative compliance ("SSFA") scores for the credit rating approach used.

Columns (e), (i), (m) and (q) refer to items with a risk weight of 1250% according to paragraph 90, point one, of the Basel III framework.

Capital charge after refers to the capital charge after application of the cap as described in paragraphs 594 and 610 of the securitization framework.

For the record, following the implementation of the revised securitization framework in January 2018, these changes must be made:

IRB RBA column (including IAA) must be used for IRBA (and column headings are also adjusted).

IRB SFA column must also be used for ERBA and IAA.

SA/SSFA column must also be used for SA/SSFA.

The 1250% column must also be used for items with 1250% due to the bank's inability to apply IRBA, ERBA, IAA or SA to the item (see paragraph 42 of the revised securitization framework).

Capital charge after cap refers to the capital charge after the application of the cap as described in paragraphs 88-93 of the revised securitization framework.

• Pengelolaan Risiko Pasar

Aktivitas bisnis pada portofolio *trading book* dan *banking book* yang terekspos risiko pasar karena terdapat potensi pergerakan suku bunga, nilai tukar, dan perubahan harga surat berharga yang dimiliki. Bank senantiasa melakukan pengawasan terhadap perubahan yang terjadi pada portofolio aset yang terekspose risiko pasar. Pemantauan terhadap pergerakan potensi risiko pasar dilakukan oleh Divisi Treasury, Divisi Manajemen Risiko, Divisi *Funding*, dan Divisi terkait yang tergabung dalam *Asset-Liability Committee* (ALCO).

Pemantauan dilakukan dengan metode valuasi *mark to market* perubahan nilai pasar pada portofolio yang dimiliki oleh Bank. Pengendalian risiko pasar dilakukan melalui penetapan maksimum eksposur untuk *unrealized loss* untuk surat berharga, Penetapan limit Posisi Devisa Neto (PDN), Limit maksimum perubahan *Economic Value of Equity* (EVE) pada IRRBB sesuai *hard limit* yang ditetapkan oleh Regulator, dan penetapan limit *cut loss*.

Pengukuran Risiko terhadap aktivitas Bank yang terkespose Risiko Pasar meliputi:

1. Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar meliputi:
 - a. Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*)
 - Metode Risiko Spesifik
 - Metode Risiko Umum
 - b. Eksposur Nilai Tukar (*Banking Book* dan *Trading Book*)
2. *Interest Rate Risk in the Banking Book*

Pengungkapan Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar

Disclosure of Market Risk Using Standardized Method

No.	Keterangan	31 Desember 2023 December 31, 2023			
		Individual		Konsolidasian Consolidation	
		Beban Modal Capital Expense	ATMR RWA	Beban Modal Capital Expense	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Risiko Suku Bunga	39.102	488.779		
	Risiko Spesifik	-	-		
	Risiko Umum	39.102	488.779		
2	Risiko Nilai Tukar	1.748	21.851		
3	Risiko Ekuitas *)				
4	Risiko Komoditas *)				
5	Risiko <i>Option</i>	-	-		
	Jumlah	40.850	510.631		

*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

*) For banks that have subsidiaries that have intended risk exposure

• **Market Risk Management**

Business activities in the trading book and banking book portfolio are exposed to market risk due to potential movements in interest rates, exchange rates, and changes in the prices of securities held. The Bank constantly monitors changes that occur in asset portfolios that are exposed to market risk. The Treasury Division, Risk Management Division, Funding Division, and related Divisions, which are members of the Asset-Liability Committee (ALCO), are monitoring potential market risk movements.

Monitoring is carried out using the mark-to-market valuation method for changes in market value in the portfolio owned by the Bank. Market risk control is carried out by determining the maximum exposure for unrealized loss for securities, Setting limits on Net Open Position (NOP), and Maximum limits on changes in Economic Value of Equity (EVE) on IRRBB following the hard limit set by the Regulator, and setting cut loss limits.

Risk measurement of Bank activities exposed to Market Risk includes:

1. Market Risk using the Standard Method includes:
 - a. Interest Rate Exposure (Trading Book)
 - Specific Risk Method
 - General Risk Method
 - b. Exchange Rate Exposure (Banking Book dan Trading Book)
2. Interest Rate Risk in the Banking Book

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

		31 Desember 2022 December 31, 2022		Description
Individual		Konsolidasian Consolidation		
Beban Modal Capital Expense	ATMR RWA	Beban Modal Capital Expense	ATMR RWA	
(3)	(4)	(5)	(6)	
19.019	237.738			Interest Rate Risk
-	-			Specific Risk
19.019	237.738			General Risk
6.039	75.481			Foreign Exchange Risk
				Equity Risk *)
				Commodity Risk *)
				Option Risk
25.058	313.219			Total

Laporan Hasil Perhitungan IRRBB

IRRBB Calculation Result Report

Tanggal	ΔEVE	
	31 Desember 2023 December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022
EVE at Current Rates	8.707,02	5.928,72
Parallel Up	1.133	1.074
Parallel Down	(5.240)	(2.664)
Steeper	15	(74)
Flattener	(3.204)	(1.042)
Short Up	(1.679)	(181)
Short Down	(2.616)	(1.477)
Max EVE Loss	1.133	1.074
Tier 1 Capital	8.410	8.012
Impact on EVE as % of Tier 1 Capital	13,47%	13,40%
Max NII Loss		
NII Projection		
Impact on NII as % of NII Projection		

Eksposur risiko pasar karena fluktuasi suku bunga, perubahan kurs dan perubahan harga surat berharga yang dimiliki oleh Bank terus dipantau sehingga tidak menyebabkan kerugian secara finansial, pemberian limit terhadap portofolio Bank yang terekspos perubahan harga pasar telah disesuaikan dengan *appetite* dan skala bisnis Bank. Bank melakukan *Stress Test* secara berkala untuk melihat kerugian yang timbul dan membuat tindak lanjut yang akan diambil untuk mengantisipasi kerugian yang berlebih. Perhitungan *Stress Test* dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bank diputuskan dalam rapat *Asset Liability Committee* (ALCO).

- **Pengelolaan Risiko Operasional**

Pengelolaan risiko operasional merupakan suatu proses yang secara terus-menerus mengalami penyempurnaan. Hal tersebut dicapai melalui penerapan model Pertahanan 3 (tiga) Lapis (*Three Lines of Defences*) dalam pengendalian internal Bank. Pada lini pertama, risiko dikelola secara langsung oleh masing-masing unit kerja. Pada lini kedua, Divisi Manajemen Risiko melakukan pengawasan, evaluasi dan metodologi pengelolaan risiko secara organisasi. Pada lini ketiga, Satuan Kerja Audit Intern bertugas memberikan *review* yang menyeluruh terhadap kegiatan operasional Bank dan implementasi praktik kelola risiko yang dijalankan Bank.

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	ΔNII		Date
	31 Desember 2023 December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	
	27	213	Parallel Up
	(28)	(195)	Parallel Down
			Steeper
			Flattener
			Short Up
			Short Down
			Max EVE Loss
			Tier 1 Capital
			Impact on EVE as % of Tier 1 Capital
	(28)	213	Max NII Loss
	1.146	1.147	NII Projection
	2,45%	18,61%	Impact on NII as % of NII Projection

Market risk exposure due to fluctuations in interest rates, changes in exchange rates, and changes in the price of securities owned by the Bank is continuously monitored so that it does not cause financial losses, the provision of limits on the Bank's portfolio exposed to changes in market prices has been adjusted to the Bank's appetite and business scale. The Bank conducts Stress Tests periodically to see losses that have arisen and to take follow-up actions to be taken to anticipate excessive losses. The calculation of the Stress Test and follow-up to be carried out by the Bank is decided in the Asset Liability Committee (ALCO) meeting.

- Operational Risk Management**

Operational risk management is a process that is continuously being improved. This was achieved by implementing the 3 (three) Lines of Defense model in the Bank's internal control. On the first line, the risk is managed directly by each work unit. The Risk Management Division performs organizational monitoring, evaluation, and risk management methodology on the second line. On the third line, the Internal Audit Work Unit is tasked with providing a comprehensive review of the Bank's operational activities, and the implementation of risk management practices carried out by the Bank.

Pengungkapan Risiko Operasional - Bank secara Individual

Disclosure of Risk Operational

No.	Deskripsi	31 Desember 2023 *) / December 31, 2023 *)			
		Komponen Indikator Bisnis (KIB) <i>Business Indicator Component (KIB)</i>	Faktor Pengali Kerugian Internal (FPKI) <i>Internal Loss Multiplication Factor (FPKI)</i>	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO) <i>Minimum Operational Risk Capital</i>	ATMR RWA
JUMLAH		140.652	1	140651.74	1.758.147

Notes

*) Perhitungan Mengikuti SEOJK ATMR Operasional No. 6/SEOJK.03/2020

***) Perhitungan Mengikuti SEOJK ATMR Operasional No. 24/SEOJK.03/2016

• Pengelolaan Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas dilakukan oleh Bank untuk memenuhi kewajiban yang mempunyai jatuh tempo atau dapat ditarik sewaktu-waktu oleh *Counterparty* atau nasabah dari pendanaan arus kas, aset likuid yang dijual atau diagunkan, atau menggantinya dengan sumber pendanaan yang lain.

Dalam mengelola likuiditas, Satuan Kerja Manajemen Risiko secara periodik menyusun laporan profil risiko likuiditas, mengukur pemenuhan rasio-rasio likuiditas yang ditetapkan regulator berupa *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*, *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* dan melakukan identifikasi pengukuran risiko likuiditas berupa proyeksi arus kas secara kontraktual dan *behavioral*. Pengendalian risiko likuiditas Bank melakukan penyediaan sumber pendanaan kas, pemeliharaan aset likuid, serta membuka fasilitas likuiditas berupa *committed* atau *uncommitted* dengan *counterparty* jika Bank membutuhkan likuiditas.

Pemantauan yang dilakukan Satuan Kerja Manajemen Risiko berupa:

1. Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR);
2. *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*; dan
3. Aset terikat (*Encumbrance*).

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

31 Desember 2022 **) / December 31, 2022 **)			Description
Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) Gross Income (Average for the last 3 years)	Beban Modal Capital Charge	ATMR RWA	
1.481.823	222.274	2.778.419	TOTAL

Notes

*) Calculation Complies with Operational SEOJK ATMR Number 6/SEOJK.03/2020

**) Calculation Complies with Operational SEOJK ATMR Number 24/SEOJK.03/2016

• **Liquidity Risk Management**

The Bank carries out liquidity risk management to fulfill obligations that have a maturity date or can be withdrawn at any time by counterparties or customers from cash flow funding, liquid assets sold or pledged as collateral, or replacing them with other sources of financing.

Liquidity risk controls The Bank provides sources of cash funding, maintains liquid assets, and opens committed or uncommitted liquidity facilities with counterparties if the Bank needs liquidity. In managing liquidity, the Risk Management Work Unit periodically compiles liquidity risk profile reports and measures compliance with liquidity ratios set by regulators in the form of Net Stable Funding Ratio (NSFR) and Liquidity Coverage Ratio (LCR). It identifies liquidity risk measurements in the form of cash flow projections contractually and behaviorally.

The Risk Management Work Unit carries out monitoring in the form of

1. Liquidity Coverage Ratio (LCR);
2. Net Stable Funding Ratio (NSFR); and
3. Bonded assets (Encumbrance).



Laporan Perhitungan Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Triwulanan

Calculation Report to Fulfillment Obligations of Quarterly Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Komponen	2023			
	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>), <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan dengan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>). <i>Value of HQLA after deduction of haircut, outstanding liabilities and commitments multiplied by run-off rate or value of contractual receivables multiplied by inflow rate.</i>			
	TW I 2023 Q1 2023	TW II 2023 Q2 2023	TW III 2023 Q3 2023	TW IV 2023 Q4 2023
Jumlah data poin yang digunakan dalam perhitungan LCR	62	52	62	63
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)				
Jumlah <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA)	7.291.062	6.728.175	7.089.605	6.851.112
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)				
Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:				
Simpanan/Pendanaan stabil	233.908	228.112	227.300	224.071
Simpanan/Pendanaan kurang stabil	239.141	206.716	182.783	192.937
Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:				
Simpanan operasional	1.105.241	1.079.712	1.073.964	1.160.205
Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	2.058.791	2.172.835	2.494.214	2.378.582
Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank				
Pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>)	-	-	-	-
Arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>), terdiri dari:				
Arus Kas Keluar Atas Transaksi Derivatif	-	-	-	-
Arus Kas Keluar Atas Peningkatan Kebutuhan Likuiditas	-	-	-	-
Arus Kas Keluar Atas Kehilangan Pendanaan	-	-	-	-
Arus Kas Keluar Atas Penarikan Komitmen Fasilitas Kredit dan Fasilitas Likuiditas	4.290	13.447	9.843	8.749
Arus Kas Keluar Atas Kewajiban Kontraktual Lainnya Terkait Penyaluran Dana	474.292	1.374.818	1.228.363	2.331.715
Arus Kas Keluar Atas Kewajiban Kontijensi Pendanaan Lainnya	3.310	7.352	2.730	3.029
Arus Kas Keluar Kontraktual Lainnya	57.401	23.798	43.503	26.212
JUMLAH ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)	4.176.373	5.106.789	5.262.700	6.325.500

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

2022				Component
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>), <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan dengan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>). Value of HQLA after deduction of haircut, outstanding liabilities and commitments multiplied by run-off rate or value of contractual receivables multiplied by inflow rate.				
TW I 2022 Q1 2022	TW II 2022 Q2 2022	TW III 2022 Q3 2022	TW IV 2022 Q4 2022	
61	55	65	65	Number of Points data for LCR calculation
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)				
5.722.408	6.048.437	6.328.575	6.309.180	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)
Cash Out Flow				
Individual Deposit and MSME Funding, consist of:				
227.854	230.217	234.500	234.197	Stable Deposit/Funding
201.219	230.522	266.176	237.028	Unstable Deposit/Funding
Funding from corporate customers, consisting of				
898.740	994.529	1.193.933	1.113.468	Operational deposits
1.912.247	2.292.787	2.335.034	2.108.919	Non-operational Deposits and/or other non-operational liabilities
Bond issued by Bank				
-	-	-	-	Secured Funding
Other cash outflow (additional requirement), consisting of:				
388	568	43	-	Cash outflow from derivative transactions
-	-	-	-	cash outflow from increased liquidity requirements
-	-	-	-	cash outflow from lost funding
5.976	4.372	3.770	4.087	cash outflow from withdrawal of commitments for credit facilities and liquidity facilities
1.620.457	1.390.409	572.657	1.541.036	cash outflow from other contractual liabilities related to channelling of funds
4.321	9.049	2.396	2.125	cash outflow from other contingency funding liabilities
109.903	48.757	77.893	22.012	Other contractual cash outflow
4.981.104	5.201.210	4.686.401	5.262.872	TOTAL CASH OUTFLOW

Komponen	2023			
	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>), <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan dengan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>). Value of HQLA after deduction of haircut, outstanding liabilities and commitments multiplied by run-off rate or value of contractual receivables multiplied by inflow rate.			
	TW I 2023 Q1 2023	TW II 2023 Q2 2023	TW III 2023 Q3 2023	TW IV 2023 Q4 2023
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)				
Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i>	-	-	-	-
Tagihan berasal dari pihak lawan (<i>counterparty</i>)	901.392	1.223.864	1.067.793	1.102.484
Arus kas masuk lainnya	122.969	104.829	56.611	27.538
JUMLAH ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)	1.024.361	1.328.693	1.124.403	1.130.022
JUMLAH HQLA	7.291.062	6.728.175	7.089.605	6.851.112
JUMLAH ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)	3.152.013	3.778.096	4.138.297	5.195.478
LCR (%)	231,31	178,08	171,32	131,87

Net Stable Funding Ratio

Net Stable Funding Ratio

No.	Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan Desember - 2023 Position Report Dated December - 2023				Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Unweighted Value By Residual Maturity				
		Tanpa Jangka Waktu ¹ No Specified Maturity ¹	<6 bulan <6 months	≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 6 months - < 1 year	≥ 1 tahun ≥ 1 year	
1	Modal:	10.436.618	-	-	-	10.436.618
2	Modal sesuai POJK KPMM	10.447.453	-	-	-	10.447.453
3	Instrumen modal lainnya	(10.835)	-	-	-	(10.835)
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	3.847.147	7.994.237	1.149.168	69.348	12.217.062
5	Simpanan dan pendanaan stabil	3.392.436	4.911.743,33	820.184,79	30.302,61	8.698.448,79
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	454.711	3.082.493,47	328.982,97	39.045,09	3.518.613
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	5.878.124	16.920.434	1.459.479	6.360.560	14.507.324
8	Simpanan operasional	5.850.968,25	5.500,00	-	-	2.928.234,13
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	27.156,00	16.914.934,41	1.459.478,69	6.360.559,88	11.579.089,70
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	134.399,14	-	-	-
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya:	693.932,00	21.650,48	358,68	294,00	24.418,68
12	NSFR liabilitas derivatif	-	-	-	-	-
13	Ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas	693.932	21.650,48	358,68	294,00	24.419
14	Jumlah ASF					37.185.422,44

2022					Component
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>), <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan dengan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>). Value of HQLA after deduction of haircut, outstanding liabilities and commitments multiplied by run-off rate or value of contractual receivables multiplied by inflow rate.					
TW I 2022 Q1 2022	TW II 2022 Q2 2022	TW III 2022 Q3 2022	TW IV 2022 Q4 2022		
					CASH INFLOW
-	-	-	-	-	Secured lending
824.217	1.027.464	1.089.450	1.052.784		Receivables by counterparty
145.815	113.012	59.868	24.119		Other cash inflow
970.032	1.140.476	1.149.318	1.076.903		TOTAL CASH INFLOW
5.722.408	6.048.437	6.328.575	6.309.180		TOTAL HQLA
4.011.073	4.060.735	3.537.083	4.185.969		TOTAL NET CASH OUTFLOWS
142,67	148,95	178,92	150,72		LCR (%)

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Posisi Tanggal Laporan Desember - 2022 Position Report Dated December - 2022						ASF Components
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Unweighted Value By Residual Maturity				Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value		
Tanpa Jangka Waktu ¹ No Specified Maturity ¹	<6 bulan <6 months	≥ 6 bulan - <1 tahun ≥ 6 months - <1 year	≥ 1 tahun ≥ 1 year			
9.897.808	-	-	-	9.897.808	Capital:	
9.922.911	-	-	-	9.922.911	Regulatory Capital	
(25.103)	-	-	-	(25.103)	Other capital instruments	
3.419.186	6.928.224	512.514	31.241	10.019.361	Deposits from individual customers and funding from micro and small business customers:	
2.570.165	1.629.731	83.881	17.630	4.087.218	Stable deposit/funding	
849.020	5.298.492	428.633	13.611	5.932.142	Unstable deposit/funding	
6.757.568	12.942.439	6.205.471	3.791.030	14.571.137	Funding from corporate customers, consisting of	
6.722.478	4.500	-	-	3.363.489	Operational Deposits	
35.089	12.937.939	6.205.471	3.791.030	11.207.647	Other funding from corporate customers	
-	218.452	-	-	-	Liabilities with matching interdependent assets	
775.103	80.389	30.386	2.132	50.114	Other liabilities and assets:	
	-	-	-		NSFR derivative liabilities	
775.103	80.389	30.386	2.132	50.114	All other liabilities and equity not included in the above categories	
				34.538.418	Total ASF	

No.	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan Desember - 2023 Position Report Dated December - 2023				Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Unweighted Value By Residual Maturity				
		Tanpa Jangka Waktu ¹ No Specified Maturity ¹	<6 bulan <6 months	≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 6 months - < year	≥ 1 tahun ≥ 1 year	
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					132.476
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	266.112	-	-	-	133.056
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>)	-	8.063.176	5.399.306	30.395.896	32.469.452
18	Kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	-	-	-	-
19	Kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	254.720	123.806	12.316	112.427
20	Kepada perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, Bank Indonesia dan bank sentral negara lain, entitas sektor publik dan pinjaman lain, yang di antaranya:	-	7.808.439	5.176.815	30.246.366	32.202.038
21	Memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SEOJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	-	-	-	-
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang di antaranya:	-	-	-	82.233	69.898
23	Memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SEOJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	17	-	54.981	35.746
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (<i>performing</i>) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	-	98.685	-	49.343
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	134.399	-	-	-
26	Aset lainnya :	667.299	290.558	44.172	2.171.315	3.173.344
27	Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas	-	-	-	-	-
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai <i>default fund</i> pada <i>central counterparty</i> (CCP)	-	-	-	-	-
29	NSFR aset derivatif	-	-	-	-	-
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan <i>variation margin</i>	-	-	-	-	-
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas	667.299	290.558	44.172	2.171.315	3.173.344
32	Rekening Administratif	-	3.549.201	3.549.201	3.549.201	66.206
33	Total RSF					35.974.534
34	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i> (%))					103,37

Posisi Tanggal Laporan Desember - 2022 Position Report Dated December - 2022					Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value	RSF Components
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Unweighted Value By Residual Maturity						
Tanpa Jangka Waktu ¹ No Specified Maturity ¹	<6 bulan <6 months	≥ 6 bulan - <1 tahun ≥ 6 months - < year	≥ 1 tahun ≥ 1 year			
				116.628	Total HQLA in calculating NSFR	
252.378	-	-	-	126.189	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	
-	8.106.256	4.864.106	27.103.570	29.459.705	Performing loans and securities	
-	-	-	-	-	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	
-	170.670	106.332	19.013	97.780	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	
-	7.935.188	4.757.168	26.904.060	29.214.629	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to government, other government, Bank Indonesia, central banks and public sector entities, of which:	
-	-	-	-	-	Meet qualification for a risk weight of 35% or less according to SEOJK "RWA for Credit Risk"	
-	283	598	48.698	41.833	Performing residential mortgages, of which:	
-	115	8	33.138	21.601	Meet qualification for a risk weight of 35% or less according to SEOJK "RWA for Credit Risk"	
-	-	-	98.660	83.861	Securities with performing and non performing categories that are unsecured, not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	
-	218.452	-	-	-	Assets with matching interdependent liabilities	
648.264	337.406	50.262	2.165.251	3.201.183	Other Assets	
-	-	-	-	-	Physical traded commodities, including gold	
-	-	-	-	-	Cash, securities, and other assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	
-	-	-	-	-	NSFR derivative assets	
-	-	-	-	-	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin	
648.264	337.406	50.262	2.165.251	3.201.183	All other assets not included in the above categories	
-	3.926.879	3.926.879	3.926.879	50.171	Off-balance sheet items	
				32.953.875	Total RSF	
				104,81	Net Stable Funding Ratio (%)	

Risiko Likuiditas - Aset terikat (*Encumbrance*) (ENC)

Risk of Asset Encumbrance Liquidity

31 Desember 2023 / December 31, 2023			
Aset Terikat <i>Encumbered assets</i>	Aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan bank sentral namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas <i>Assets held or contracted with central banks but not used to generate liquidity</i>	Aset tidak terikat <i>Unencumbered assets</i>	Jumlah <i>Total</i>
		1.183.548	3.465.910
			4.649.459

• Pengelolaan Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko kerugian finansial atau lainnya yang terjadi karena litigasi atau kasus hukum. Pengelolaan risiko hukum dilakukan oleh Departemen *Corporate Legal* dan *Legal Support* di Unit Bisnis bersama-sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Departemen *Corporate Legal* dan *Legal Support* di Unit Bisnis berperan sebagai mitra bagi seluruh unit kerja untuk memastikan bahwa semua risiko hukum potensial yang berkaitan dengan transaksi/perjanjian antara Bank dengan nasabah, karyawan, dan pihak ketiga lainnya dapat dimitigasi dengan baik.

Proses manajemen risiko hukum dilakukan melalui mekanisme:

- » *Review* secara berkala atas perjanjian Bank dengan pihak ketiga dan mengupayakan perbaikan atas kelemahan perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.
- » Menangani perkara hukum yang melibatkan Bank serta memantau proses penanganannya dengan melakukan upaya sesuai hukum untuk melindungi kepentingan hukum dan bisnis Bank.
- » Melakukan analisis/*assessment* Risiko Hukum pada produk, aktivitas, dan transaksi baru/eksisting Bank.

• Pengelolaan Risiko Strategik

Pengelolaan Risiko Strategik menjadi tanggung jawab Direksi yang dilakukan bersamaan dengan pengawasan dari Dewan Komisaris. Dalam prosesnya, pengelolaan risiko ini dilaksanakan oleh Divisi *Corporate Planning* dengan dukungan dari Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Risiko strategik merupakan fungsi identifikasi, pengukuran serta pengelolaan dari kesesuaian antara tujuan strategis organisasi, strategi bisnis yang disusun untuk mencapai tujuan tersebut, dan kualitas implementasinya. Melalui penetapan rencana bisnis jangka pendek dan menengah yang mempertimbangkan risiko, baik dari internal maupun eksternal, bank mampu mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis. Hal ini disertai dengan evaluasi rencana bisnis dan analisa berkala atas lingkungan bisnis, makro, dan mikro, termasuk perkembangan regulasi.

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil aktual. Selain itu, faktor-faktor lain dalam identifikasi risiko strategik meliputi kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, posisi bank di pasar, dan kondisi makro ekonomi.

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

31 Desember 2022 / December 31, 2022			
Aset Terikat <i>Encumbered assets</i>	Aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan bank sentral namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas <i>Assets held or contracted with central banks but not used to generate liquidity</i>	Aset tidak terikat <i>Unencumbered assets</i>	Jumlah <i>Total</i>
		1.138.805	1.214.278
			3.827.622

- **Legal Risk Management**

Legal risk is the risk of financial or other loss that occurs due to litigation or legal cases. Legal risk management is carried out by the Corporate Legal and Legal Support Department in the Business Unit and the Risk Management Work Unit. The Corporate Legal and Legal Support Department in the Business Unit acts as a partner for all work units to ensure that all potential legal risks related to transactions/agreements between the Bank and customers, employees, and other third parties can be adequately mitigated

The legal risk management process is carried out through the following mechanisms:

- » Periodic review of the Bank's agreements with third parties and seeks to improve the weaknesses of deals that can cause losses to the Bank.
- » Handling legal cases involving the Bank and monitoring the handling process by making legal efforts to protect the legal and business interests of the Bank.
- » Perform legal risk analysis/assessment on new/existing Bank products, activities, and transactions.

- **Strategic Risk Management**

Strategic Risk Management is the responsibility of the Board of Directors, which is carried out with supervision from the Board of Commissioners. In the process, this risk management is carried out by the Corporate Planning Division with support from the Risk Management Work Unit and the Compliance Work Unit.

Strategic risk is a function of identifying, measuring, and managing the compatibility between the organization's strategic goals, the business strategy designed to achieve these goals and the quality of their implementation. By establishing a short and medium-term business plan that considers internal and external risks, the Bank can identify and respond to changes in the business environment. The evaluation of business plans and regular analysis of the business environment, macro, and micro, including regulatory developments, accompanies this.

Strategic risk measurement and measurement parameters are based on the Bank's performance by comparing the results with actual results. In addition, other factors in strategic risk identification include the suitability of the strategy with the business environment conditions, the Bank's position in the market, and macroeconomic conditions.

- **Pengelolaan Risiko Kepatuhan**

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan. Risiko Kepatuhan dilingkup Bank dikelola oleh bersama-sama oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan mempertahankan kerangka kerja sesuai kebijakan kepatuhan serta memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meminimalkan dampak risiko yang ditimbulkan karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen terhadap satuan kerja operasional yang didukung oleh penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten dari seluruh unit kerja.

- **Pengelolaan Risiko Reputasi**

Bank menjaga prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kebijakan operasional perbankan dengan memprioritaskan pelayanan kepada nasabahnya. Risiko reputasi sangat mungkin timbul dari kegagalan mitigasi yang efektif dari satu atau lebih risiko kredit, likuiditas, pasar hukum, regulasi, dan risiko operasional, atau gagal untuk mematuhi standar sosial, lingkungan dan etika yang memberi dampak terhadap harapan dari *stakeholders* dan perolehan pendapatan di kemudian hari. Risiko Reputasi pada Bank dikelola oleh Departemen *Corporate Communication* dan Departemen *Service Quality*, dengan dukungan dari Divisi Manajemen Risiko yang melakukan pemantauan atas kesesuaian pelaksanaannya.

- **Compliance Risk Management**

Compliance Risk is a risk caused by the Bank not complying with and/or not implementing laws and regulations and other applicable provisions and not fulfilling the commitments agreed upon with the Otoritas Jasa Keuangan. Compliance risk within the scope of the Bank is jointly managed by the Risk Management Work Unit and the Compliance Work Unit, which are responsible for establishing and maintaining a framework according to compliance policies and ensuring that the risk management process can run adequately to minimize the impact of risks arising from non-compliance with provisions and/or applicable laws and regulations.

The compliance risk management strategy is carried out by implementing the duties and responsibilities of the Risk Management Work Unit, which are independent of the operational work units and are supported by consistent performance of the internal control system of all work units.

- **Reputation Risk Management**

The Bank maintains the principle of prudence in carrying out its operational banking policies by prioritizing service to its customers. Reputation risk is very likely to arise from the failure to effectively mitigate one or more credit, liquidity, legal market, regulatory, and operational risks or failure to comply with social, environmental, and ethical standards that impact stakeholder expectations and future revenue generation. Reputation risk at the Bank is managed by the Corporate Communication Department and the Service Quality Department, with support from the Risk Management Division, which monitors the suitability of its implementation.

Strategi pengelolaan risiko reputasi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- » Pemantauan pemberitaan yang berhubungan dengan Bank dalam berbagai media.
- » Penetapan/standarisasi kualitas layanan dan pengujian atas kualitas layanan yang dijalankan oleh unit-unit bisnis.
- » Komunikasi aktif dan terbuka dengan seluruh pihak *stakeholder*; baik pada saat kondisi normal maupun pada saat kondisi krisis reputasi.
- » Melakukan analisis/assessment Risiko Reputasi pada produk, aktivitas dan transaksi baru/eksisting Bank.

The reputation risk management strategy is carried out through the following activities:

- » *Monitoring news related to the Bank in various media.*
- » *Determination/standardization of service quality and testing of service quality carried out by business units.*
- » *Active and open communication with all stakeholders, both during normal conditions and during reputation crisis conditions.*
- » *Performing Reputation Risk analysis/assessment on new/existing Bank products, activities, and transactions.*



Tinjauan atas Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

Review of the Effectiveness of Risk Management Implementation

Fungsi pengawasan dan evaluasi atas proses manajemen risiko Bank dilakukan oleh berbagai komite yang berkaitan dengan risiko dan Divisi SKAI. Informasi hasil evaluasi dari beberapa komite eksekutif yang beranggotakan seluruh jajaran Direksi dan Pejabat Eksekutif dibahas pula melalui rapat Direksi yang dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam rapat tersebut, selain dilakukan pembahasan atas laporan eksposur risiko setiap bulan, juga dilakukan pembahasan terhadap hal-hal spesifik lainnya seperti pembahasan kecukupan modal terhadap tingkat risikonya, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, persetujuan atas limit risiko serta persetujuan metodologi yang digunakan dalam proses pengukuran risiko.

Adapun peran Divisi SKAI sebagai pelaksana atas pengendalian internal Bank secara rutin melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kualitas dan proses GCG secara *bankwide*. Di samping evaluasi secara internal, evaluasi manajemen risiko secara independen juga diperoleh dari audit eksternal maupun pihak-pihak eksternal lainnya seperti Bank Woori Korea sebagai entitas induk. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan selama tahun 2023, secara umum sistem manajemen risiko yang diterapkan Bank telah memadai dan berjalan efektif.

Various risk-related committees and the SKAI Division carry out the monitoring and evaluation function of the Bank's risk management process. Information on evaluation results from several executive committees consisting of all members of the Board of Directors and Executive Officers is also discussed at a Board of Directors meeting chaired by the President Director. Apart from consulting monthly risk exposure reports in these meetings, other specific matters were also discussed, such as capital adequacy for risk levels, approval of policies and procedures, approval of risk limits, and approval of the methodology used in the risk measurement process.

The role of the SKAI Division as executor of the Bank's internal control routinely evaluates and recommends the quality and process of GCG on a bank-wide basis. Besides internal evaluation, independent evaluation of risk management is also obtained from external audits and other external parties, such as Bank Woori Korea as the parent entity. Based on the results of the assessment carried out in 2023, in general, the risk management system implemented by the Bank is adequate and running effectively.

Hasil penilaian manajemen risiko sesuai SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Pada bulan Desember 2023, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk memiliki peringkat 2 (dua) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Risk management assessment results according to SEOJK Number 14/SEOJK.03/2017 concerning the Soundness Rating of Commercial Banks. In December 2023, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk has a rating of 2 (two), reflecting the condition of the Bank, which is generally healthy so that it is considered capable of dealing with significant negative influences from changes in business conditions and other external factors as reflected in the rating of the rating factors, including risk profile, GCG implementation, profitability, and capital are generally good. If there are weaknesses, in general, these weaknesses are less significant.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko



Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the Audit Committee on the Adequacy of the Risk Management System

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko di BWS. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris BWS tercermin dari persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui forum rapat Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala, dalam pelaksanaannya pengawasan aktif Dewan Komisaris didukung oleh Komite Pemantau Risiko.

The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for implementing risk management at BWS. Active Supervision by the Board of Commissioners of BWS is reflected in the approval of the Risk Management Policy prepared by the Board of Directors, as well as the evaluation of the implementation of risk management policies through regular forums of the Board of Directors and Board of Commissioners. In practice, the Risk Monitoring Committee supports the active supervision of the Board of Commissioners.

Pengawasan aktif Direksi BWS antara lain dilaksanakan melalui penyusunan, penerapan, dan evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Pelaksanaan pengawasan aktif juga dilakukan melalui forum rapat Direksi dan Komite Manajemen Risiko (KMR), Bidang Kebijakan Kredit dan Bidang *Asset and Liability*.

The active supervision of the Board of Directors of BWS is carried out through the preparation, implementation, and evaluation of risk management policies and procedures. Active supervision is also performed through the Board of Directors and Risk Management Committee (KMR) meeting forums, the Credit Policy Division and the Asset and Liability Sector.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa kecukupan sistem manajemen risiko telah berjalan memadai.

Based on the results of the evaluation that has been carried out, the Board of Commissioners and the Board of Directors consider that the adequacy of the risk management system has been running adequately.



Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Program APU, PPT & PPPSPM)

Implementation of Anti-Money Laundering, Combating Financing of Terrorism and Combating the Financing of Proliferation of Weapon of Mass Destruction Program (AML, CFT & CPF Program)

Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM merupakan program yang wajib diterapkan oleh Bank dalam melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan pengguna jasa Bank (Nasabah atau *Walk In Customer*) dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan PPATK Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan. Secara operasional dalam penerapannya di Bank, Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM telah diatur dalam Kebijakan, Standar Prosedur maupun Petunjuk Teknis APU, PPT & PPPSPM.

Tujuan penerapan program APU, PPT & PPPSPM adalah untuk mencegah dan melindungi Bank agar tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang (*Money Laundering*) dan pendanaan terorisme termasuk pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh para pelaku kejahatan.

Implementation of the AML, CFT & CPF Program is a program that must be implemented by Banks in conducting business relationships with prospective customers and Bank service users (Customers or Walk In Customers) guided by Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) Number 8 of 2023 concerning Program Implementation Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing and Combating the Financing of Proliferation of Weapon of Mass Destruction in the financial services sector as well as Regulation of the Head of PPATK Number PER-02/1.02/PPATK/02/15 concerning Categories of Service Users Who Have the Potential to Commit Crimes of Money Laundering, and PPATK Regulations Number 18 of 2017 concerning Implementation of Temporary Suspension and Postponement of Transactions by Financial Services Providers. Operationally, in its implementation at the Bank, the implementation of the AML, CFT & CPF Program has been regulated in Policies, Standard Procedures and Technical Instructions for AML, CFT & CPF.

The purpose of implementing the AML, CFT & CPF program is to prevent and protect banks from being used as a means of money laundering and terrorism financing, including funding for the proliferation of weapons of mass destruction, which are carried out directly or indirectly by criminals.



Kebijakan APU, PPT & PPPSPM AML, CFT & CPF Policy

Sejalan dengan regulasi penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, BWS telah melakukan penyempurnaan Kebijakan penerapan Program APU, PPT & PPPSPM di BWS meliputi:

In line with the regulations for implementing the Anti-Money Laundering and Combating Funding of Terrorism programs in the Financial Services Sector, BWS has made improvements to the Policy for implementing the AML, CFT & CPF Program at BWS includes:

Pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris <i>Active supervision by the Board of Directors and Board of Commissioners</i>	Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT & PPPSPM serta melaksanakan pengawasan aktif melalui laporan rutin pelaksanaan program APU, PPT & PPPSPM. <i>Provide approval on the policies and procedures for implementing the AML, CFT & CPF Program and carry out active supervision through regular reports on the implementation of the AML, CFT & CPF Program.</i>
Kebijakan dan Prosedur <i>Policies and Procedures</i>	Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU, PPT & PPPSPM telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan aktivitas Bank. <i>Ensure that the written policies and procedures for implementing the AML, CFT & CPF Program are by applicable laws and regulations and by the Bank's activities.</i>
Pengendalian Intern <i>Internal Control</i>	Pelaksanaan pemantauan secara rutin oleh Internal dan Eksternal Audit, untuk mengukur penerapan program APU, PPT & PPPSPM sesuai dengan peraturan yang berlaku. <i>Policy Implementation of regular monitoring by Internal and External Audits to measure the implementation of the AML, CFT & CPF Program by applicable regulations.</i>
Sistem Informasi Manajemen <i>Management information System</i>	Pengembangan sistem informasi yang dapat mengidentifikasi dan menyediakan Laporan profil dan transaksi yang mendukung penerapan program APU, PPT & PPPSPM. <i>Development of an information system that can identify and provide profile and transaction reports that support the implementation of the AML, CFT & CPF Program.</i>
Sumber Daya Manusia dan Pelatihan <i>Human Resources and Training</i>	Pemberian pelatihan bagi seluruh karyawan termasuk pelatihan secara periodik kepada Frontliner, baik secara tatap muka ataupun e-learning. <i>Provision of training for all employees, including periodic training for Frontliners, either face-to-face or e-learning.</i>

Pelaksanaan Program APU, PPT & PPPSPM di Tahun 2023

Implementation of the AML, CFT & CPF Program in 2023

Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan Program APU, PPT & PPPSPM, BWS juga terus meningkatkan kapasitas karyawan dengan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang terkait APU, PPT & PPPSPM. Adapun program pelatihan yang dilaksanakan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

In addition, to increase effectiveness in implementing the AML, CFT & CPF Program, BWS also continues to increase employee capacity by organizing education and training programs related to AML, CFT & CPF Program. The training program held in 2023 is as follows:

Training Internal

Internal Training

No.	Tanggal Date	Kegiatan Activity	Jumlah Peserta Number of Participants
1	9 - 13 Januari 2023 <i>January 9 - 13, 2023</i>	APU PPT: Sectoral Risk Assessment (SRA) <i>AML & CFT: Sectoral Risk Assessment (SRA)</i>	413
2		APU-PPT Interaktif: Pengantar APU dan PPT <i>Interactive AML-CFT: Introduction to AML and CFT</i>	1185
3		APU-PPT Interaktif: Penerimaan Nasabah <i>Interactive AML-CFT: Customer Acceptance</i>	1154
4	14 Januari - 3 Februari 2023 <i>January 14 - February 3, 2023</i>	APU-PPT Interaktif: Area Berisiko Tinggi <i>Interactive AML-CFT: High Risk Area</i>	1155
5		APU-PPT Interaktif: Pelaporan dan Pengkinian Data <i>Interactive AML-CFT: Reporting and Data Updating</i>	634
6		APU-PPT Interaktif: Sumber Daya Manusia dan Pelatihan <i>Interactive AML-CFT: Human Resources and Training</i>	599

No.	Tanggal Date	Kegiatan Activity	Jumlah Peserta Number of Participants
7		APU-PPT Interaktif: Pengantar APU dan PPT <i>Interactive AML-CFT: Introduction to AML and CFT</i>	1286
8		APU-PPT Interaktif: Penerimaan Nasabah <i>Interactive AML-CFT: Customer Acceptance</i>	1256
9	8 - 29 Desember 2023 <i>December 8 - 29, 2023</i>	APU-PPT Interaktif: Area Berisiko Tinggi <i>Interactive AML-CFT: High Risk Area</i>	1256
10		APU-PPT Interaktif: Pelaporan dan Pengkinian Data <i>Interactive AML-CFT: Reporting and Data Updating</i>	562
11		APU-PPT Interaktif: Sumber Daya Manusia dan Pelatihan <i>Interactive AML-CFT: Human Resources and Training</i>	338
12		APU PPT: Sectoral Risk Assessment (SRA) <i>AML & CFT: Sectoral Risk Assessment (SRA)</i>	455

Training Eksternal

External Training

No.	Tanggal Date	Kegiatan Activity	Jumlah Peserta Number of Participants
1	9 Februari 2023 <i>February 9, 2023</i>	Koordinasi terkait Rencana Implementasi Aplikasi goAML Versi 5.2 <i>Coordination regarding the goAML Application Implementation Plan Version 5.2</i>	1
2	28 Agustus 2023 <i>August 28, 2023</i>	Workshop on Assistance in the Implementation of Risk-Based AML/CFT/CPF Programs in the Financial Services Sectors 2023 <i>Workshop on Assistance in the Implementation of Risk-Based AML/CFT/CPF Programs in the Financial Services Sectors 2023</i>	1



Rekapitulasi Pelaporan kepada PPATK

Recapitulation of Reporting to PPATK

Jenis Laporan Report Type	Jumlah Laporan Number of Reports
Laporan Transaksi Transfer Dana Dari/Ke Luar Negeri (LTKL) <i>International Fund Transfer Instruction Report (IFTI)</i>	151.864
Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) <i>Cash Transaction Report (CTR)</i>	695
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) <i>Suspicious Transaction Report (STR)</i>	9
Permintaan Pemblokiran/Data/Informasi Nasabah Dari PPATK <i>Request for Blocking/Customer Data/Information from PPATK</i>	22
Laporan SIPENDAR <i>SIPENDAR Report</i>	4 Laporan Nihil <i>4 Nil Reports</i>
Laporan Penundaan Transaksi Nasabah <i>Customer Transaction Postponement Report</i>	81
Laporan SIPESAT (Nasabah Baru) <i>SIPESAT Report (New Customer)</i>	82.991 CIF



Perkara Hukum

Legal Cases

Jumlah permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Bank, Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

The number of problems and/or legal Cases faced by the Bank, the Board of Commissioners, and the Board of Directors are as follows:

Permasalahan Hukum <i>Legal Issues</i>	2023		2022	
	Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>	Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>
Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners and Board of Directors</i>				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap <i>Completed and has permanent legal force</i>	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian <i>In the process of completion</i>	-	-	-	-
BWS <i>BWS</i>				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap <i>Completed and has permanent legal force</i>	4	1	2	-
Dalam proses penyelesaian <i>In the process of completion</i>	1	-	3	-
Entitas Anak <i>Subsidiary Entity</i>				
BWS tidak memiliki entitas anak perusahaan <i>BWS does not have a subsidiary entity</i>				
Jumlah <i>Total</i>	5	1	5	-



Uraian Perkara Yang Dihadapi Tahun 2023

2023 Case Description

Nama Perkara <i>Case Name</i>	Gugatan Lain-Lain <i>Other Lawsuit</i>
Para Pihak <i>The Parties</i>	Penggugat Tim Kurator PT Asli Motor Klaten dan Purnomo Budi (Dalam Pailit) <i>Plaintiff Curator Team PT Asli Motor Klaten and Purnomo Budi (Under Bankruptcy)</i>
Pokok Perkara <i>Main Case</i>	Gugatan atas hasil penjualan harta pailit yang dilakukan pada masa insolvensi <i>Lawsuit on the proceeds from the sale of bankruptcy assets carried out during the insolvency period</i>
Nilai Perkara <i>Case Value</i>	Rp4.866.068.502,4
Risiko bagi Bank <i>Risk for Bank</i>	Menyerahkan sebagian hasil penjualan harta pailit sebesar Rp4.866.068.502,4 <i>Hand over part of the proceeds from the sale of bankruptcy assets amounting to IDR4,866,068,502.4</i>
Status Perkara <i>Case Status</i>	Belum berkekuatan hukum tetap <i>Not yet legally enforceable</i>

Nama Perkara Case Name	Perdata Khusus Special Civil
Para Pihak The Parties	H Ayep Zaki
Pokok Perkara Main Case	Gugatan atas aset milik H Ayep Zaki yang dimasukkan kepada pertelaan pailit atas Koperasi Bina Usaha (Dalam Pailit) dan PT Alpindo Mitra Baja (Dalam Pailit) Lawsuit over assets owned by H Ayep Zaki which was submitted to the Bankruptcy report on the Bina Usaha Cooperative (Under Bankruptcy) and PT Alpindo Mitra Baja (Under Bankruptcy)
Nilai Perkara Case Value	-
Risiko bagi Bank Risk for Bank	-
Status Perkara Case Status	Berkekuatan Hukum Tetap Permanent Legal Force

Nama Perkara Case Name	Perdata Civil
Para Pihak The Parties	Ramlan Lubis
Pokok Perkara Main Case	Gugatan atas cessie serta proses penjualan cessie oleh pembeli cessie melalui pelelangan Lawsuit on cessie and the process of selling cessie by cessie buyers through auctions
Nilai Perkara Case Value	-
Risiko bagi Bank Risk for Bank	-
Status Perkara Case Status	Berkekuatan Hukum Tetap Permanent Legal Force

Nama Perkara Case Name	Perdata Civil
Para Pihak The Parties	Tuan Kaman Bin Sadan
Pokok Perkara Main Case	Gugatan atas sengketa tanah atau lahan milik ahli waris Kaman Bin Sadan Lawsuit over land or land disputes belonging to the heirs of Kaman Bin Sadan
Nilai Perkara Case Value	-
Risiko bagi Bank Risk for Bank	-
Status Perkara Case Status	Berkekuatan Hukum Tetap Permanent Legal Force

Nama Perkara Case Name	Pidana Criminal
Para Pihak The Parties	Ex. Karyawan Ex. Employee
Pokok Perkara Main Case	Fraud yang dilakukan mantan karyawan atas Penggelapan dana Nasabah Fraud committed by former employees for Embezzlement of Customer fund
Nilai Perkara Case Value	Rp1.602.725.000
Risiko bagi Bank Risk for Bank	-
Status Perkara Case Status	Berkekuatan Hukum Tetap Permanent Legal Force



Sanksi Administratif

Administrative Sanctions

Selama periode tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank Woori Saudara dan tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

During the 2023 period, there were no material administrative sanctions that affected the continuity of Bank Woori Saudara's business and there were no administrative sanctions imposed on the Board of Commissioners and Board of Directors.



Akses Informasi dan Data Bank serta Pengelolaan Relasi Investor

Access to Bank Information and Data and Management of Investor Relations

Bank telah menyediakan akses informasi bagi para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut melalui:

The Bank has provided access to information for stakeholders to obtain further information via:



Telepon
Telephone

+6221 8783 1906

+6222 8783 1900

E-mail

saudara@bankwoorisaudara.com

customer@bankwoorisaudara.com

Selain melalui Sekretaris Perusahaan, guna memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan dalam mengakses informasi terkait Bank, BWS juga telah memuat informasi-informasi meliputi informasi produk dan layanan, laporan keuangan, serta kegiatan perusahaan yang dapat diakses melalui situs web perusahaan di www.bankwoorisaudara.com.

Apart from going through the Corporate Secretary to provide convenience for stakeholders in accessing information related to the Bank, BWS has also included information including product and service information, financial reports, and company activities which can be accessed via the company website at www.bankwoorisaudara.com.

Komunikasi Internal Internal Communications

Sebagai pemangku kepentingan internal yang berhubungan langsung dengan kinerja Bank, karyawan memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang komprehensif terkait kinerja dan kemajuan Bank. Berikut disampaikan beberapa saluran yang digunakan Bank untuk menyampaikan informasi kepada karyawan dan pihak internal lainnya.

- **CM Site (Corporate Management Site)**
Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi Internal, Bank telah menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan termasuk juga mengenai program, kebijakan manajemen, aktivitas cabang dan divisi melalui CM Site yang secara digital dapat diakses oleh seluruh karyawan Bank.
- **Agenda Kegiatan**
Bank memiliki berbagai kegiatan yang bersifat berkala maupun tertentu, diselenggarakan dan dipromotori oleh Departemen *Corporate Communication* yang mengelola alur kegiatan setiap *event* dari awal hingga akhir. Di mana *event* yang diselenggarakan dihadiri oleh internal karyawan Bank maupun pihak eksternal seperti pemegang saham dan nasabah. *Event-event* yang dilaksanakan oleh Internal Komunikasi yang berlangsung selama tahun 2023 di antaranya:

As internal stakeholders directly related to the performance of the Bank, employees have the right to obtain comprehensive information regarding the performance and progress of the Bank. The following describes several channels the Bank uses to convey information to employees and other internal parties.

- **CM Site (Corporate Management Site)**
In carrying out activities related to internal communication, the Bank has disseminated information related to the activities carried out, including programs, management policies, and branch and division activities, through the CM Site, which can be accessed digitally by all Bank employees.
- **Agenda of Activities**
The Bank has various periodic and specific activities organized and promoted by the Corporate Communication Department, which manages the flow of activities for each event from start to finish. Where the event held was attended by internal Bank employees and external parties such as shareholders and customers. Among the events carried out by Internal Communications taking place during 2023:

Tempat dan Tanggal <i>Place and Date</i>	Tema Kegiatan <i>Activity Theme</i>
18 Januari 2023 <i>January 18, 2023</i>	BWS Business Strategic Meeting Semester 1 2023
30 Maret 2023 <i>March 30, 2023</i>	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 <i>BWS Annual General Meeting of Shareholders 2023</i>
13 April 2023 <i>April 13, 2023</i>	Program Ramadhan Bank Woori Saudara <i>Bank Woori Saudara Ramadhan Program</i>
28 April 2023 <i>April 28, 2023</i>	Penandatanganan kerja sama antara BWS dan Sarana Multigriya Finansial <i>Signing of collaboration between BWS and Sarana Multigriya Finansial</i>
12 Juni 2023 <i>June 12, 2023</i>	Penandatanganan kerja sama antara BWS dan Lotte Land Sawangan <i>Signing of collaboration between BWS and Lotte Land Sawangan</i>
21 Juli 2023 <i>July 21, 2023</i>	BWS Business Strategic Meeting Semester 2 2023

Tempat dan Tanggal Place and Date	Tema Kegiatan Activity Theme
17 Agustus 2023 August 17, 2023	BWS Agustusan 2023 BWS Independence Day August 2023
18 Oktober 2023 October 18, 2023	Pembukaan Bank Woori Saudara KC Pekanbaru Opening of Bank Woori Saudara Pekanbaru Branch Office
20 November 2023 November 20, 2023	Pembukaan Bank Woori Saudara KC Manado Opening of Bank Woori Saudara Manado Branch Office
8 Desember 2023 December 8, 2023	CSR BWS Penanaman 3.000 Pohon Bogor CSR BWS Planting 3,000 Trees in Bogor

Komunikasi Eksternal External Communications

Departemen Komunikasi Eksternal berfungsi untuk memastikan komunikasi Bank dengan pihak eksternal berjalan dengan baik sehingga meningkatkan reputasi dan citra korporat Bank. Berikut adalah tugas dari Departement Komunikasi Eksternal antara lain:

- **Media Internet**
Media internet yang digunakan adalah situs web dengan alamat www.bankwoorisaudara.com yang dapat diakses pengguna jaringan internet. Situs ini menyajikan beragam informasi Bank seperti produk dan layanan, laporan keuangan, jaringan, dan berita.
- **Media Sosial**
Bank juga memperhatikan perkembangan media sosial sebagai fasilitas komunikasi interaksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Bank membuka kanal komunikasi daring melalui Facebook, Instagram, YouTube, dan Tiktok.

The External Communications functions to ensure that the Bank's communication with external parties runs well to enhance the reputation and corporate image of the Bank. The following are the duties of the External Communications, including:

- **Internet Media**
The internet media used is a website with the address www.bankwoorisaudara.com which internet network users can access. This site provides a variety of Bank information such as products and services, financial reports, networks, and news.
- **Social Media**
The Bank also pays attention to the development of social media as an interactive communication facility with all stakeholders. To that end, the Bank opened an online communication channel via Facebook, Instagram, Youtube, and Tiktok.



@bankbws



Bank Woori Saudara



@bankbws



Bank Woori Saudara Official

- **Media Monitoring & Analisis**

Untuk memberikan informasi terkait dengan berbagai macam pemberitaan di media massa baik itu pemberitaan mengenai Bank ataupun lingkup hal yang berkaitan dengan Bank. Media *monitoring* berperan bagi Internal Bank dalam mengetahui seputar informasi atau kegiatan yang sedang hangat seperti halnya Kenaikan pemberitaan *signing* MOU, *merger* bank, dana pensiun, dan lainnya. Media *monitoring* juga berperan dalam perhitungan PR *Value* dan *Advertorial value* di mana setiap kegiatan tersebut akan diliput oleh media cetak maupun elektronik yang pemberitaan Bank telah diekspos.

- **Media Relation**

Dalam rangka membangun kerja sama yang baik dengan pihak media, Departemen Komunikasi Eksternal mempunyai tugas untuk bagian *Media Relations* agar menjaga hubungan baik antara Bank dengan wartawan media. Sepanjang tahun 2023 komunikasi eksternal melakukan serangkaian kegiatan mengundang wartawan dalam acara *Public Expose* untuk kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023.

- **Publikasi dan Iklan**

Publikasi dilakukan oleh Komunikasi Eksternal dalam penyebaran informasi baik berupa iklan produk atau keterbukaan informasi yang harus dipublikasikan menggunakan media cetak dan elektronik Sasaran penyebaran informasi yaitu kepada masyarakat umum dengan komunikasi yang disampaikan berupa publikasi cetak dan elektronik sebagai alat promosi kepada masyarakat. Penyampaian informasi dengan media tersebut dapat berupa iklan cetak koran selama tahun 2023.

- **Media Monitoring & Analysis**

To provide information related to various kinds of news in the mass media, be it news about the Bank or the scope of matters related to the Bank. Media monitoring plays a role for the Internal Bank in finding out about information or activities that are currently hot, such as the increase in news on signing MOUs, bank mergers, pension funds, and others. Media monitoring also plays a role in calculating the PR and Advertorial values. Each of these activities will be covered by the print and electronic media to which the Bank's news has been exposed.

- **Media Relation**

To build good cooperation with the media, the Corporate Communications Department has a duty for the Media Relations section to maintain good relations between the Bank and media journalists. Throughout 2023 Bank carried out a series of activities inviting journalists to the Public Expose event for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

- **Publications and Advertisements**

Publication is made by External Communication in disseminating information either in the form of product advertisements or information disclosure which must be posted using print and electronic media. The target of information dissemination is the general public, with communications delivered in print and electronic publications as promotional tools to the public. Submission of information with these media can be in the form of newspaper print advertisements during 2023.

Tanggal Terbit Date of Issue	Nama Media Media Name	Judul Artikel Article Title
10 Januari 2023 January 10, 2023	Investor.id	BWS Gandeng ASABRI Salurkan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi BWS Collaborated with Asabri to Distribute Scholarships for Outstanding Students
1 Februari 2023 February 1, 2023	Investor.id	BWS Gandeng HI Bangun Sumur Bor Untuk Warga Pandeglang BWS Collaborated with HI to Build Drilled Wells for Pandeglang Residents
18 Maret 2023 March 18, 2023	Investor.id	BWS dan Sinar Mas Land Berkolaborasi Gairahkan Sektor Properti BWS and Sinar Mas Land Collaborated to Excite the Property Sector
30 Maret 2023 March 30, 2023	infobanknews.com	Laba Bersih Bank Woori Tembus Rp860,57 Miliar Woori Bank's Net Profit Reached IDR860.57 Billion
30 Maret 2023 March 30, 2023	sindonews.com	RUPST 2023, BWS Catat Pertumbuhan Kinerja Positif 2023 AGMS, BWS Records Positive Performance Growth

Tanggal Terbit Date of Issue	Nama Media Media Name	Judul Artikel Article Title
31 Maret 2023 March 31, 2023	iNews.id	Bank Woori Saudara Bukukan Laba Bersih Rp860,60 Miliar di 2022 Bank Woori Saudara Recorded Net Profit of IDR860.60 Billion in 2022
31 Maret 2023 March 31, 2023	antaranews.com	Dana pihak ketiga Bank Woori naik 20,73 persen Woori Bank's third party funds rose 20.73 percent
31 Maret 2023 March 31, 2023	thejakartapost.com	BWS records positive performance growth for the year 2022
31 Maret 2023 March 31, 2023	Investor.id	Labas BWS Tumbuh 32% Jadi Rp860 Miliar BWS Profit Grows 32% to IDR860 Billion
18 April 2023 April 18, 2023	Investor.id	Rayakan Hari Jadi Ke-117, BWS Salurkan CSR di Bulan Ramadan Celebrating its 117th Anniversary, BWS Distributes CSR in the Month of Ramadan
31 Mei 2023 May 31, 2023	Investor.id	BWS Genjot Sosialisasi Literasi dan Inklusi Perbankan BWS Boosts Dissemination of Banking Literacy and Inclusion
26 Juli 2023 July 26, 2023	Investor.id	BWS Kembali Gelar Literasi Keuangan untuk Pelajar BWS Again Held Financial Literacy for Students
28 Agustus 2023 August 28, 2023	Investor.id	BWS Lanjutkan Program Literasi Keuangan Pelajar BWS Continues Student Financial Literacy Program
19 Oktober 2023 October 19, 2023	Investor.id	BWS Resmikan Pembukaan Kantor Cabang Pekanbaru BWS Officially Opens Pekanbaru Branch Office
19 Oktober 2023 October 19, 2023	thejakartapost.com	Bank Woori Saudara expands with new branch office in Pekanbaru
20 November 2023 November 20, 2023	Mediaindonesia.com	Luncurkan Fitur QRIS, BWS Tingkatkan Layanan Digital Launching QRIS Feature, BWS Improves Digital Services
20 November 2023 November 20, 2023	Asianpost.id	Luncurkan Fitur QRIS, BWS Tingkatkan Layanan Digital Launching QRIS Feature, BWS Improves Digital Services
20 November 2023 November 20, 2023	Investor.id	BWS Sodorkan Fitur QRIS di Aplikasi Perbankan Digital BWS Offers QRIS Feature in Digital Banking Application
21 November 2023 November 21, 2023	Investor.id	Buka Kantor Cabang, BWS Dukung Ekonomi Manado Opening a Branch Office, BWS Supports Manado's Economy
22 November 2023 November 22, 2023	Mediaindonesia.com	BWS Salurkan Bantuan Kepada Keluarga Korban Kecelakaan Pesawat Super Tucano BWS Distributes Aid to Families of Super Tucano Plane Crash Victims
7 Desember 2023 December 7, 2023	Mediaindonesia.com	Menutup Tahun 2023 dengan CSR, Bank Woori Saudara Kembali Gandeng Human Initiative Closing 2023 with CSR, Bank Woori Saudara Again Collaborated with Human Initiative
7 Desember 2023 December 7, 2023	Asianpost.id	Menutup Tahun 2023 dengan CSR, Bank Woori Saudara Kembali Gandeng Human Initiative Closing 2023 with CSR, Bank Woori Saudara Again Collaborated with Human Initiative
8 Desember 2023 December 8, 2023	Asianpost.id	Pedulih Lingkungan, Bank Woori Saudara Tanam 3.000 Pohon di Bogor Caring for the Environment, Bank Woori Saudara Planted 3,000 Trees in Bogor
8 Desember 2023 December 8, 2023	Mediaindonesia.com	Pedulih Lingkungan, Bank Woori Saudara Tanam 3.000 Pohon di Daerah Bogor, Jabar Caring for the Environment, Bank Woori Saudara Planted 3,000 Trees in the Bogor Area, West Java
14 Desember 2023 December 14, 2023	Asianpost.id	Presdir Bank Woori Saudara Undur Diri, Ini Respons Perseroan President Director of Bank Woori Saudara Resigned, This is the Company's Response
14 Desember 2023 December 14, 2023	Investor.id	Presdir BWS Mundur, Ini Langkah Perseroan President Director of BWS Resigned, This is the Company's Measures
14 Desember 2023 December 14, 2023	Kontan.co.id	Bank Woori Saudara Telah Terima Pengunduran Diri Presiden Direktur Hwang Gyusoon Bank Woori Saudara Has Accepted the Resignation of President Director Hwang Gyusoon
14 Desember 2023 December 14, 2023	Mediaindonesia.com	BWS Tanggapi Pengunduran Diri Presiden Direktur Perseroan Hwang Gyusoon BWS Responds to the Resignation of Company President Director Hwang Gyusoon
18 Desember 2023 December 18, 2023	Mediaindonesia.com	Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Woori Saudara Postponement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of Bank Woori Saudara

- **Media Luar Ruang**

Selain melalui media internet, cetak, elektronik, Bank juga menggunakan media luar ruang sebagai sarana penyampaian informasi dan bentuk promosi berupa iklan Billboard terpasang di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Radio Dalam yang beralamat di Jl. Radio Dalam No. 4, Kel. Gandaria Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

- **Outdoor Media**

Apart from the internet, print, and electronic media, the Bank also uses outdoor media to convey information and promotion in the form of billboard advertisements posted at the Radio Dalam Sub-Branch Office (KCP) located at Jl. Radio In Number 4, Kel. Gandaria Kec. Kebayoran Baru, South Jakarta.



- Korespondensi
Sepanjang tahun 2023 Bank telah melaksanakan korespondensi terkait keterbukaan informasi kepada berbagai pihak. Penyampaian transparansi laporan adalah sebagai berikut:
- *Correspondence*
Throughout 2023 the Bank has carried out correspondence related to information disclosure to various parties. Submission of report transparency is as follows:

Perihal Regarding	Frekuensi Frequency
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek <i>Monthly Report of Securities Holders Registration</i>	13
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum <i>Report on the Use of Public Offering Proceeds</i>	1
Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya <i>Requests for Clarification from Issuers and Other Public Companies</i>	14
Laporan Perubahan Komite Audit <i>Audit Committee Change Report</i>	1
Laporan Perubahan Pengurus <i>Management Change Report</i>	2
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham <i>Minutes of General Meeting of Shareholders</i>	2
Penyampaian Laporan Keuangan <i>Submission of Financial Reports</i>	4
Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Terbuka <i>Ownership Report or Any Changes in Public Company Share Ownership</i>	9

Pengelolaan Informasi Information Management

- Bank memastikan sifat data, informasi, dan pengetahuan organisasi sebagai berikut:
- The Bank ensures the nature of data, information, and organizational knowledge as follows:*
- Untuk memastikan keakuratan data dan informasi, BWS menggunakan *software* aplikasi dan penunjukkan penanggungjawab unit yang bertugas menjaga keakuratan data dan informasi di unit masing-masing.
 - Untuk memastikan integritas dan reliabilitas berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh setiap unit kerja.
 - Untuk memastikan data dan informasi tepat waktu, dilakukan dengan cara bagian keuangan me-review ketepatan data informasi dan juga dilakukan *internal assessment* dan audit IT setiap tahunnya.
 - Untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data dan informasi, maka di buat *username*, *password* dan *antivirus* di jaringan dalam mengakses ke jaringan LAN BWS.
 - *To ensure the accuracy of data and information, BWS uses application software and appoints a unit person in charge who is to maintain the accuracy of data and information in their respective units.*
 - *To ensure integrity and reliability based on the verification results carried out by each work unit.*
 - *To ensure timely data and information, by employing the finance department to review the accuracy of the information data and also conducting internal assessments and IT audits every year.*
 - *To ensure the security and confidentiality of data and information, a username, password, and antivirus are created on the network to access the BWS LAN network.*

Ketersediaan Data dan Akses Informasi bagi Investor *Availability of Data and Access to Information for Investors*

Bank membuat ketersediaan data dan informasi berdasarkan *data center* yang dapat diakses oleh setiap karyawan. Bank juga menyediakan data dan informasi melalui situs web, *webmail* yang dapat diakses oleh pihak-pihak terkait misalnya pelanggan, mitra, dan umum.

The Bank makes data and information available based on a data center that every employee can access. The Bank also provides data and information through websites and webmails, which can be accessed by related parties, such as customers, partners, and the general Public.

Bank berkomitmen untuk melaksanakan prinsip keterbukaan, untuk itu Bank selalu menyampaikan informasi melalui situs web Bank, yaitu www.bankwoorisaudara.com. Selain itu, Bank juga menyampaikan perkembangan dan kemajuan mengenai Informasi Material dan Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik secara teratur kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku, seperti yang telah disampaikan di atas.

The Bank is committed to implementing the principle of transparency; for this reason, the Bank always delivers information through the Bank's website, namely www.bankwoorisaudara.com. In addition, the Bank also submits developments and progress regarding Material Information and Disclosure of Information that the Public Needs to Know regularly to the Indonesia Stock Exchange and the Otoritas Jasa Keuangan by applicable capital market regulations, as stated above.

Kontak Relasi Investor | Investor Relations Contact

Wuryanto	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
Telepon <i>Telephone</i>	+6221 5087 1906
E-mail	saudara@bankwoorisaudara.com
Alamat <i>Address</i>	Treasury Tower Lantai 26 dan 27 District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190

Ragam Media Bank Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Variety of Bank Media to Shareholders and Stakeholders

Di bawah ini tabel yang menggambarkan ragam media komunikasi yang digunakan Bank untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, proses usaha, dan capaian-capaian kinerja yang telah diraih Bank.

Below is a table that describes the various communication media used by the Bank to convey data and information related to operational activities, business processes, and performance achievements that the Bank has achieved.

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Bentuk-bentuk Media Media Forms
Regulator Regulators	Aplikasi spe.ojk.go.id/idxnet, surat menyurat (termasuk surat elektronik) <i>spe.ojk.go.id/idxnet application, correspondence (including electronic mail)</i>
Pemegang Saham Shareholders	Surat menyurat <i>Letters</i>
Investor Investors	Surat menyurat dan berita koran <i>Letters and newspapers</i>
Lembaga Publik Public Institution	Surat menyurat, termasuk surat elektronik <i>Correspondence, including electronic mail</i>
Konsumen Consumer	SMS Blast, e-mail blast, brosur <i>SMS Blast, email blast, brochure</i>
Karyawan Employee	Situs web internal (CM Site), Internal Memo, dan E-mail <i>Internal website (CM Site), Internal Memo, and E-mail</i>
Perusahaan Sejenis Lainnya Other Similar Companies	Surat menyurat, termasuk surat elektronik <i>Correspondence, including electronic mail</i>
Mitra Kerja dan Rekanan Partners and Partners	Surat menyurat, termasuk surat elektronik <i>Correspondence, including electronic mail</i>
Organisasi Profesi Professional Organization	Surat menyurat, termasuk surat elektronik <i>Correspondence, including electronic mail</i>
Masyarakat/Umum General public	Flyer, Brosur <i>Flyer, Brochure</i>

* Situs web Bank tidak termasuk dalam ragam media di atas, karena sifatnya yang terbuka, tidak terbatas dan dapat diakses oleh siapa saja.

** The Bank's website is not included in the variety of media above, because it is open, unlimited and can be accessed by anyone.*



Kode Etik

Code of Conduct

BWS senantiasa menjunjung tinggi integritas dan berkomitmen untuk menerapkan standar yang tinggi dalam penerapan Kode Etik (*Code of Conduct*). Upaya ini dilakukan agar dapat menjalankan praktik-praktik bisnis yang sehat serta menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Guna mendukung hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya, Bank memiliki dan menerapkan pedoman standar mengenai tata cara perilaku yaitu Kode Etik yang mengatur standar, perilaku bisnis, serta tingkah laku pribadi yang etis bagi seluruh karyawan dan *stakeholders* dalam berperilaku di lingkungan kerjanya.

Keberadaan Kode Etik juga merupakan bagian dari upaya Bank untuk menjaga reputasi dan citra Bank sesuai dengan penerapan GCG. Karena itu, setiap karyawan wajib mengisi formulir Pakta Integritas Pelaksanaan Kode Etik yang pada prinsipnya berjanji untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan dan perbuatan yang melanggar Kode Etik Bank.

BWS consistently upholds integrity and is committed to implementing high standards in implementing the Code of Conduct. This effort is made in order to carry out healthy business practices and implement the principles of Good Corporate Governance (GCG). To support this, in its implementation, the Bank has and applies standard guidelines regarding behavioral procedures, namely the Code of Conduct which regulates standards, business behavior and ethical personal behavior for all employees and stakeholders in behaving in their work environment.

The existence of the Code of Conduct is also part of the Bank's efforts to maintain the Bank's reputation and image through the implementation of GCG. Therefore, every employee must fill out the Integrity Pact for implementing the Code of Conduct, which promises not to commit any form of action or conduct that violates the Bank's Code of Conduct.



Visi, Misi dan Budaya Kerja Bank sebagai Landasan Kode Etik

Vision, Mission, and Corporate Culture of the Bank as the Foundation of the Code of Conduct

Penyusunan Kode Etik BWS dilandasi pada Visi, Misi dan Budaya Kerja Bank yang merupakan arah dan tujuan pengembangan Bank secara berkelanjutan. Sebagai bagian upaya membangun lingkungan kerja yang kondusif dan etika kerja yang produktif, Bank terus melakukan beberapa inisiatif untuk membentuk budaya kerja yang positif. Budaya kerja yang dimiliki Bank berisi nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan yang mempengaruhi pemikiran, tingkah laku, dan cara kerja karyawan dan manajemen, yang bermuara pada peningkatan kualitas kinerja Bank.

Preparing the BWS Code of Conduct is based on the Bank's Vision, Mission, and Corporate Culture, which are the direction and objectives of the Bank's sustainable development. As part of efforts to build a conducive work environment and productive work ethics, the Bank continues to carry out several initiatives to form a positive work culture. The Bank's corporate culture contains values, norms, and habits that influence the thinking, behavior, and working methods of employees and management, which leads to improving the quality of the Bank's performance.



Pengesahan Kode Etik dan Pokok-pokok Isi Kode Etik *Ratification of the Code of Conduct and Main Contents of the Code of Conduct*

BWS telah memiliki Kode Etik yang disahkan melalui Keputusan Direksi Nomor 102/KEP-DIR/A-11/IX/20. Kode Etik ini berlaku bagi seluruh Karyawan termasuk dalam hal ini jajaran Direksi dan Dewan Komisaris.

BWS already has a Code of Conduct ratified through Board of Directors Decree Number 102/KEP-DIR/A-11/IX/20. This Code of Conduct applies to all employees, including, in this case, the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Pokok-pokok isi Kode Etik BWS yaitu:

The main contents of the BWS Code of Conduct are:

1. Janji Kepada Pelanggan

Kami harus menempatkan prioritas tertinggi dalam memastikan kebahagiaan pelanggan.

1. Customer Promise

We must place the highest priority on ensuring customer happiness.

2. Janji Kepada Pemegang

Saham Kami harus menegakkan hak-hak pemegang saham dengan nilai tertinggi.

2. Promise to Shareholders

We must uphold the shareholders rights with the highest value.

3. Janji Kepada Pejabat

Eksekutif dan Karyawan Bank harus memperlakukan para eksekutif dan karyawan sebagai aset yang paling berharga.

3. Promises to Executive Officers and Employees

Banks must treat executives and employees as their most valuable assets.

4. Janji Kepada Bangsa dan Masyarakat

Kami akan memenuhi tanggung jawab sosial dan berkontribusi untuk kemajuan nasional.

4. Promise to the Nation and Society

We will fulfill our social responsibility and contribute to national progress.

Sosialisasi, Penyebaran dan Penegakan Kode Etik *Dissemination, Delivery, and Enforcement of the Code of Conduct*

Bank berkomitmen dalam menjalankan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

The Bank is committed to carrying out adequate and comprehensive socialization through the following steps:

1. Melaksanakan sosialisasi *code of conduct* terhadap seluruh jajaran Bank.
2. Melaksanakan evaluasi atas pencapaian kepada jajaran.

1. *Conduct socialization of the code of conduct to all levels of the Bank.*
2. *Evaluate the achievements of the ranks.*

3. Pengkajian secara berkala butir-butir aturan *code of conduct* dalam rangka pengembangan *code of conduct* selanjutnya.
4. Melaksanakan pembacaan kode etik secara berkala pada seluruh jaringan kantor.

Mekanisme penegakan Kode Etik diatur sebagai berikut:

1. Terdapatnya laporan pelanggaran Kode Etik baik melalui media surat atau *e-mail* kepada Atasan Langsung Pegawai.
2. Setiap pelaporan yang masuk akan diperhatikan secara serius dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang sudah ditetapkan Bank.
3. Pelaksanaan proses penyelidikan.
4. Penetapan sanksi apabila hasil penyelidikan menyatakan pegawai melakukan pelanggaran Kode Etik.

Oleh karena itu, karyawan memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan/atau pelanggaran terhadap Kode Etik, baik yang dilakukan oleh sesama karyawan atau pihak-pihak yang terkait, secara sengaja atau tidak sengaja, yang dapat mempengaruhi reputasi Bank. Hak pelaporan ini harus dipergunakan secara bertanggung jawab dan dilakukan hanya apabila diyakini terjadi pelanggaran, bukan pelaporan yang bertujuan untuk menjatuhkan seseorang.

3. *Periodically review the points of the rules of the code of conduct to develop the code of conduct further.*
4. *Carry out the periodic reading of the code of conduct in all office networks.*

The mechanism for enforcing the Code of Conduct is regulated as follows:

1. *There are reports of violations of the Code of Conduct either through letters or e-mails to the Employee's Direct Supervisor.*
2. *Every incoming report will be taken seriously and followed up according to the procedures set by the Bank.*
3. *Implementation of the investigation process.*
4. *Determination of sanctions if the results of the investigation state that the employee has violated the Code of Conduct.*

Therefore, employees have the right and obligation to report suspected violations and/or violations of the Code of Conduct, whether committed by fellow employees or related parties, intentionally or unintentionally, which may affect the Bank's reputation. This reporting right must be used responsibly and carried out only when it is believed that a violation has occurred, not reporting that aims to bring someone down.

Pakta Integritas Integrity Pact

Bank memiliki pakta integritas yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, guna menciptakan pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel dalam lingkungan bisnis. Pakta integritas tersebut berisikan tentang berbagai hal yang dapat menegakan implementasi GCG di dalam Bank sebagai berikut:

- Seluruh insan Bank telah menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku.
- Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham telah menandatangani kontrak manajemen yang memuat kesepakatan antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham tentang target-target kinerja yang akan dicapai pada 2023.

The Bank has an integrity pact that aims to foster openness and honesty, in order to create quality, effective, efficient and accountable tasks in the business environment. The integrity pact contains various things that can uphold the implementation of GCG in the Bank as follows:

- *All Bank personnel have signed a statement of compliance with the Code of Conduct.*
- *The Board of Directors, the Board of Commissioners, and Shareholders have signed a management contract which contains an agreement between the Board of Directors and the Board of Commissioners, and the Shareholders regarding performance targets to be achieved in 2023.*

- Dalam rangka mengupayakan pemenuhan aspek komitmen, Bank telah menunjuk personil yang memantau penerapan tata kelola pada jajaran Bank dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- *To fulfill the commitment aspect, the Bank has appointed personnel who monitor the implementation of governance at the Bank's levels and submit regular reports to the Board of Directors and Board of Commissioners.*

Transparansi Terkait Penyimpangan Internal *Transparency Regarding Internal Fraud*

Berikut disampaikan pelanggaran Kode Etik berupa penyimpangan internal yang terjadi, dan upaya Bank dalam melakukan penyelesaiannya.

The following is a violation of the Code of Conduct in the form of internal fraud that occurred and the Bank's efforts to resolve them.

<i>Internal Fraud</i> <i>Internal Fraud</i>	2023	2022
<i>Fraud yang Dilakukan Pengurus/Manajemen</i> <i>Fraud Committed by Managers/Management</i>	-	-
<i>Fraud yang Dilakukan Pegawai Tetap</i> <i>Fraud Committed by Permanent Employees</i>	1	1
<i>Fraud yang Dilakukan Pegawai Tidak Tetap</i> <i>Fraud Committed by Non-Permanent Employees</i>	-	-
<i>Fraud yang Dilakukan Pihak Eksternal</i> <i>Fraud by External Parties</i>	3	1
<i>Fraud yang Telah Diselesaikan</i> <i>Resolved Fraud</i>	2	1
<i>Fraud yang Dalam Proses Penyelesaian</i> <i>Fraud in the Process of Settlement</i>	2	1
<i>Fraud yang Belum Ditindaklanjuti</i> <i>Unresolved Fraud</i>	-	-
Jumlah Fraud Terjadi <i>Number of Fraud Occurred</i>	4	2

Dari 4 (empat) kasus *fraud* yang terjadi selama kurun waktu tahun 2023, sebanyak 2 (dua) kasus di antaranya telah diselesaikan melalui mekanisme pembebanan biaya Bank, berikut dengan dilakukannya penerbitan sanksi kepada pelaku (*fraud* oleh pegawai tetap) serta pelaporan kepada pihak Kepolisian (*fraud* yang dilakukan oleh pihak eksternal).

Of the 4 (four) fraud cases that occurred during the period 2023, 2 (two) of them have been resolved through the Bank's fee charging mechanism, along with the issuance of sanctions to the perpetrators (fraud by permanent employees) and reporting to the Police (fraud carried out by external parties).

Sementara 2 (dua) kasus lainnya sampai saat ini masih menunggu proses penyelesaian dari pelaku (pihak eksternal).

Meanwhile, 2 (two) other cases are currently waiting for the resolution process from the perpetrators (external parties).



Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Providing Funds for Social and Political Activities

BWS mengalokasikan dana untuk melaksanakan program dan kegiatan *Corporate Social and Responsibility* (CSR) sebesar Rp446 juta. Dana tersebut merupakan salah satu komitmen serta kontribusi Bank dalam jangka panjang kepada lingkungan dan masyarakat, khususnya komunitas di sekitar lokasi Bank. Informasi secara rinci terkait dengan kegiatan CSR Bank selama tahun 2023 disampaikan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Laporan Tahunan ini dan juga Laporan Keberlanjutan 2023 yang dibuat secara terpisah dari Laporan Tahunan ini. BWS berkomitmen penuh tidak memberikan dana untuk kegiatan partai politik manapun. BWS tidak memperkenankan Karyawan untuk menduduki jabatan kepengurusan aktif dalam partai politik maupun organisasi kemasyarakatan yang bermuatan politik.

Komitmen Karyawan terkait kegiatan politik sebagaimana disebutkan di atas, dituangkan dalam Kode Etik, Pedoman Perilaku, dan Kode Etik Kepatuhan. Dalam kebijakan tersebut mengatur mengenai batasan-batasan tertentu terkait keterlibatan Bank dan karyawan dalam kegiatan politik guna menghindari timbulnya benturan kepentingan, termasuk di dalamnya namun tidak terbatas terhadap ketentuan tidak diperkenankannya pemberian dana Bank untuk kepentingan politik. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan karyawan.

BWS allocated funds to implement Corporate Social and Responsibility (CSR) programs and activities amounting to IDR446 million. The funds are one of the Bank's long-term commitment and contribution to the environment and society, especially communities surrounding the Bank's locations. Detailed information related to the Bank's CSR activities during 2023 is presented in the Corporate Social Responsibility section of this Annual Report and also in the 2023 Sustainability Report prepared separately from this Annual Report. BWS is fully committed to not providing funds for the activities of any political party. BWS does not allow employees to hold active management positions in any political parties or social organizations with political content.

Employee commitments related to political activities as mentioned above are outlined in the Code of Ethics, Code of Conduct, and Compliance Code of Ethics. This policy regulates certain limitations regarding the involvement of the Bank and its employees in political activities in order to avoid the emergence of conflicts of interest, including but not limited to the provision that it is not permitted to provide Bank funds for political purposes. The implementation of this policy is expected to maintain the independence and professionalism of the Bank and its employees.



Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System (WBS)

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan GCG, manajemen BWS berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku perusahaan yang sesuai dengan kode etik dan budaya kerja, guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, Bank telah membangun sistem Pelaporan Pelanggaran atau WBS.

WBS merupakan perangkat yang dirancang untuk memberikan saluran terkait pengaduan pelanggaran yang mengedepankan kerahasiaan identitas pelapor dan jaminan keamanan bagi pelapor. Regulator telah mendorong pengelolaan WBS secara mandiri dalam tubuh organisasi entitas usaha, dengan tujuan menciptakan independensi penanganan pengaduan.

To increase the effectiveness of GCG implementation, BWS management is committed to professionally running the company based on corporate behavior that follows the code of ethics and corporate culture to realize good corporate governance. Therefore, the Bank has built a WBS.

The WBS is a tool designed to provide a channel for complaints of violations that prioritizes the confidentiality of the reporter's identity and guarantees security for the reporter. Regulators have encouraged independent management of WBS within business entity organizations to create independence in handling complaints.



Penerapan WBS

Implementation of WBS

Implementasi WBS di lingkup BWS mulai dilakukan pada bulan Mei 2019. Bersama dengan itu BWS mengesahkan Prosedur WBS dengan Surat Edaran Nomor 006/SE-DIR/B-01/V/19.

Bank diwajibkan melaporkan beberapa poin sebagaimana terdapat pada peraturan Bapepam Nomor KEP-431/BL/2012, 1 Agustus 2012 mengenai penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik poin G.13 perihal uraian sistem pelaporan pelanggaran.

Implementation of the WBS within the scope of BWS began in May 2019. Together with that, BWS ratified the WBS Procedure with Circular Letter Number 006/SE-DIR/B-01/V/19.

Banks are required to report several points in Bapepam regulation Number KEP-431/BL/2012, Dated August 1, 2012, regarding the submission of Annual Reports of Issuers or Public Companies issue G.13 regarding the description of the violation reporting system.

Ruang Lingkup Pengaduan melalui WBS *Scope of Complaint through WBS*

WBS terbuka untuk melaporkan perbuatan/perilaku/kejadian yang berhubungan dengan tindakan penipuan, pelanggaran terhadap hukum, peraturan bank, kode etik, maupun benturan kepentingan yang terjadi di lingkup Bank.

WBS is open to reporting actions/behaviors/events related to acts of fraud, violations of laws, bank regulations, and code of ethics, as well as conflicts of interest within the Bank.

Pengelolaan WBS *WBS Management*

Pengelolaan WBS dilakukan oleh Divisi Audit Internal melalui sistem aplikasi *whistleblowing* dan media lainnya yang ditetapkan oleh BWS.

Internal Audit Division carries out WBS management through whistleblowing application system and other media determined by BWS.

Perlindungan bagi Pelapor *Protection for Whistleblower*

Sebagai wujud komitmen Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan data pelaporan, BWS memberikan:

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor.
2. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan.

As a form of the Company's commitment to maintaining the confidentiality of reporting data, BWS provides the following:

1. *Guarantee for the confidentiality of the reporter's identity.*
2. *Guarantee for the confidentiality of the contents of the report submitted.*

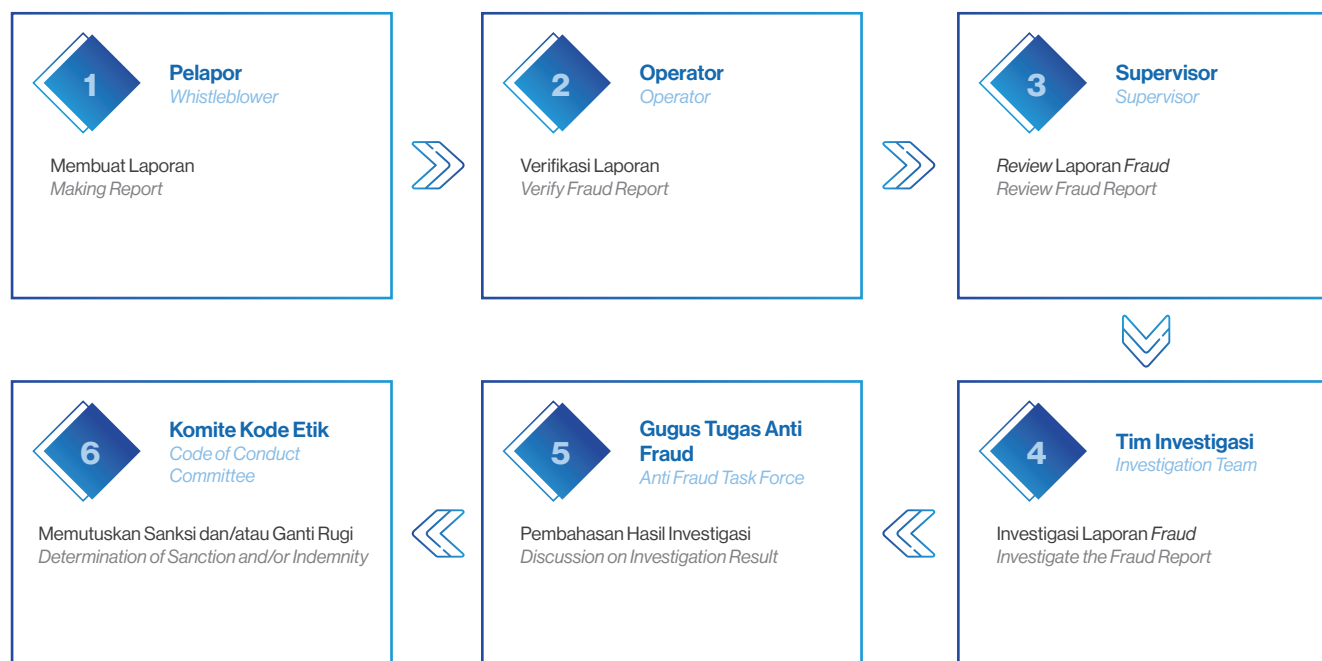
Pelapor dalam mengungkapkan pelanggaran harus dilakukan dengan niat baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atau didasari kehendak buruk/fitnah. Pelapor diwajibkan untuk mencantumkan identitas dengan jelas pada laporan yang dibuat dengan bukti pendukung yang relevan. Tim Investigasi wajib merahasiakan identitas pelapor sebagai bagian dari upaya Bank dalam memberikan perlindungan bagi pelapor. Bank turut menyediakan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Whistleblower in disclosing violations must be carried out with good intentions and not a personal complaint or based on ill will/slander. The complainant must include a clear identity in the report with relevant supporting evidence. The Investigation Team must keep the reporter's identity confidential as part of the Bank's efforts to protect the whistleblower. The Bank also provides legal protection through the applicable laws and regulations.

Mekanisme Penanganan Pengaduan yang Masuk melalui Aplikasi WBS *Mechanism for Handling Complaints Entering through the WBS Application*

Secara umum alur pengaduan yang masuk melalui mekanisme WBS adalah sebagai berikut:

In general, the flow of complaints coming through WBS mechanism is as follows:



Penindakan lanjutan pelaporan yang berpengaruh negatif terhadap citra Bank di masyarakat wajib dilakukan untuk mengetahui secara rinci permasalahan yang terjadi. Melalui Departemen Investigasi, Bank memberikan kewenangan kepada SKAI untuk memeriksa dan mendalami kasus-kasus. Tim Investigasi bertugas melakukan proses pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan, serta memberikan rekomendasi terkait kasus yang ditangani.

Follow-up on reports that harm the image of the Bank in the community must be carried out to find out in detail the problems that have occurred. Through the Investigation Department, the Bank authorizes SKAI to examine and investigate cases. The Investigation Team is tasked with carrying out the examination, investigation, and inquisition process, as well as providing recommendations regarding the issues being handled.

Dalam menangani pengaduan, Tim Investigasi melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan/informasi atau permintaan dari pihak internal bank/pihak lain mengenai kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan, pengurus bank, eksternal bank atau kolaborasi pihak internal dan eksternal bank dan melakukan pemeriksaan berdasarkan pengolahan *database/core banking*.

In handling complaints, the Investigation Team conducts inspections based on reports/information or requests from internal parties of the bank/other parties regarding possible irregularities committed by employees, bank management, external banks, or collaboration of internal and external parties of the Bank. It conducts inspections based on database/core banking processing.

Dalam pelaksanaannya, investigasi dilakukan sesuai standar, pedoman, dan peraturan Bank, di mana Bank memegang teguh kode etik yang telah ditetapkan. Tim Investigasi wajib mengamankan dokumen yang relevan dalam pemeriksaan investigasi, di mana Tim Investigasi akan memeriksa, mengumpulkan dan menilai kecukupan dan relevansi bukti. Selanjutnya, Tim Investigasi wajib mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan dapat diterima untuk dijadikan acuan dan meminimalisir potensi kerugian Bank.

Setelah terungkap pihak yang bersalah, maka pihak yang dinyatakan tidak bersalah akan terbebas dari tuduhan dan wajib dipulihkan nama baiknya, di mana tim investigasi tetap menjaga kerahasiaan saksi. Tim juga memperoleh gambaran yang jelas mengenai penyimpangan yang terjadi dan segera mengambil keputusan tepat untuk langkah selanjutnya. Jika gambaran tersebut telah layak, maka Presiden Direktur akan membuat keputusan mengenai hasil investigasi dan tindaklanjutnya.

Tim Investigasi turut memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko terjadinya penyimpangan dengan tepat. Rekomendasi tersebut merupakan saran dan arahan yang didasarkan kepada kebijakan Bank, di mana pemberian rekomendasi tersebut bukan merupakan keputusan sanksi yang akan diberikan.

Hasil pengaduan akan disampaikan oleh Tim kepada Gugus Tugas Anti Fraud (GTAF) sebelum diserahkan kepada Presiden Direktur dengan memuat kesimpulan dari penanganan yang dilakukan. GTAF juga menyampaikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko terjadinya penyimpangan dengan tepat, dan menyajikan laporan perkembangan (*progress report*) secara berkala untuk membantu pengambilan keputusan mengenai investigasi tahap berikutnya. Investigasi bisa bersifat *iterative*, yaitu suatu investigasi atas dugaan kejahatan/kecurangan berpotensi menghasilkan temuan baru yang melahirkan dugaan tambahan atau suatu dugaan baru.

In practice, investigations are carried out in accordance with the Bank's standards, guidelines, and regulations, in which the Bank adheres to the established code of ethics. The Investigation Team is obliged to secure the relevant documents in the investigative examination, where the Investigation Team will examine, collect and assess the adequacy and relevance of evidence. Furthermore, the Investigation Team must collect sufficient and acceptable evidence to be used as a reference and minimize potential losses to the Bank.

After the guilty party is revealed, the party who is declared innocent will be free from accusations and must have his name restored, where the investigation team continues to maintain the confidentiality of witnesses. The Team also obtained a clear picture of the irregularities and immediately made the right decision for the next step. The President Director will decide on the investigation results and follow up if the description is appropriate.

The Investigation Team also provides recommendations on adequately managing the risk of irregularities. These recommendations are suggestions and directions based on Bank policies, where the provision of these recommendations is not a decision on sanctions to be given.

The Team will submit the complaint results to the Anti Fraud Task Force (GTAF) before being introduced to the President Director with a summary of the handling. GTAF also provides recommendations on adequately managing the risk of irregularities and presents regular progress reports to assist decision-making regarding the next investigation stage. Investigations can be iterative in nature; that is, an investigation into alleged crimes/fraud has the potential to produce new findings that give rise to additional allegations or new allegations.

Oleh karena itu, penanganan pengaduan atau penanganan berdasarkan deteksi Auditor bertujuan agar aktivitas Bank semakin baik dan memotivasi seluruh pihak dan karyawan untuk bekerja secara profesional dengan menjaga keharmonisan hubungan kerja, serta transaksi yang berpotensi merugikan Bank atau dapat mengganggu jalannya operasional Bank dengan aman.

Therefore, complaint handling or handling based on Auditor detection aims to make the Bank's activities better and motivate all parties and employees to work professionally by maintaining harmonious working relations, as well as transactions that have the potential to harm the Bank or can disrupt the Bank's operations safely.



Jumlah Pengaduan (Pelaporan)

Number of Complaints (Reporting)

Berikut adalah jumlah pengaduan (pelaporan) yang masuk diterima dan ditindaklanjuti oleh Bank selama tahun 2023:

The following is the number of incoming complaints (reports) received and followed up by the Bank during 2023:

Penanganan Laporan <i>Report Handling</i>	Jumlah <i>Total</i>
Laporan Pengaduan yang Masuk <i>Incoming Complaint Report</i>	6
Laporan Pengaduan yang Tidak Ditindaklanjuti <i>Unfollowed Complaint Reports</i>	-
Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti <i>Follow-up Complaint Report</i>	6
Jumlah <i>Total</i>	6



Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan (ESOP/MSOP) dan Opsi Saham

Management and Employee Share Ownership (ESOP/MSOP) and Stock Options Program

Di tahun 2023 BWS tidak melaksanakan Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan dan Manajemen, atau *Employee/Management Stock Option Program* (ESOP/MSOP). Program ini terakhir dilaksanakan pada tahun 2010. BWS juga tidak melaksanakan program Opsi Saham di sepanjang tahun 2023.

In 2023, BWS did not implement a Share Ownership Program for Employees and Management or the Employee/Management Stock Option Program (ESOP/MSOP). This program was last implemented in 2010. BWS also did not carry out the Stock Option program throughout 2023.



Pembelian Kembali Saham dan/atau Obligasi Bank

Bank Shares and/or Bond Buyback

Sepanjang tahun 2023, BWS tidak menyelenggarakan pembelian kembali saham dan/atau obligasi Bank.

Throughout 2023, BWS did not carry out buybacks of Bank shares and/or bonds.



Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Provision of Funds to Related Parties and Provision of Large Funds

Pemberian kredit (penyediaan dana) kepada pihak terkait telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Lending (provision of funds) to related parties has been carried out by applicable regulations and has received approval from the Board of Commissioners.

BWS telah menetapkan suatu kebijakan tertulis untuk BMPK dan pengalokasian dana untuk pihak terkait, serta penyediaan dana besar. Selain itu, untuk meningkatkan dan mempermudah pengawasan terhadap penyediaan dana dengan pihak terkait, BWS menyusun dan melakukan pengkinian data daftar rincian pihak terkait secara terus-menerus. Data tersebut merupakan rincian pihak-pihak yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.

BWS has established a written policy for LLL and allocation of funds for related parties, as well as the provision of significant funds. In addition, to improve and facilitate supervision of the condition of funds with associated parties, BWS compiles and updates detailed list data of related parties on an ongoing basis. The data is a breakdown of parties who have a controlling relationship with the Bank, either directly or indirectly, through ownership, management, and/or financial relationships.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti selama 2023 adalah sebagai berikut:

The provision of funds to related parties and core debtors during 2023 is as follows:

Penyediaan Dana Provision of Funds	Jumlah Debitur Number of Debtors	Nominal (Rp-juta) Nominal (IDR-million)
Kepada Pihak Terkait To Related Parties	36	696.157
Kepada Debitur Inti: To Core Debtors:		
Individu Individual	20	6.252.874
Grup Group	3	2.932.801



Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Affiliated Transactions and Conflict of Interest

Pengungkapan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan adalah upaya pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Disclosure of affiliated transactions and conflicts of interest is an effort to comply with Otoritas Jasa Keuangan Regulation 42/POJK.04/2020 Concerning Affiliated Transactions and Transactions with Conflicts of Interest.

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat transaksi afiliasi yang telah dilaksanakan BWS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di atas.

Throughout 2023 there were no affiliate transactions that BWS carried out by the Otoritas Jasa Keuangan Regulations above.

Tanggal <i>Date</i>	Jenis Transaksi <i>Transaction Type</i>	Pihak Terafiliasi <i>Affiliated Parties</i>	Nilai Transaksi (Rp-juta) <i>Transaction Value (IDR-million)</i>	Hubungan <i>Connection</i>
Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>

Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dan pemilik Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak lain yang terkait dengan Bank maka anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

In the event of a conflict of interest between the Bank and the owner of the Bank, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Executive Officers, and/or other parties related to the Bank, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Executive Officers are prohibited from taking actions that may harm or reduce the Bank's profits.

Pengungkapan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan, paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan.

Disclosure regarding transactions containing a conflict of interest includes the name and position of the party with a conflict of interest, the name and position of the decision maker for the transaction containing a conflict of interest, the type of transaction, transaction value, and description.

Selama tahun 2023, Bank tidak memiliki transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.

During 2023, the Bank does not have transactions containing Conflicts of Interest.

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan <i>Name and Position of Parties Having Conflict of Interest</i>	Nama dan Jabatan pengambil Keputusan <i>Name and Position of Decision Maker</i>	Jenis Transaksi <i>Transaction Type</i>	Nilai Transaksi (Rp-juta) <i>Transaction Value (IDR-million)</i>	Hubungan <i>Connection</i>
Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>



Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

Transparency of Financial and Non-Financial Conditions That Have Not Been Disclosed In Other Reports



Transparansi Kondisi Keuangan

Transparency of Financial Conditions

Informasi kondisi keuangan BWS telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan

- Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terdahulu.
- Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, BWS telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham.
- Laporan Tahunan (keuangan dan non keuangan) dan Laporan Keuangan Publikasi BWS telah termuat pada situs web dengan alamat www.bankwoorisaudara.com dan dipublikasikan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di Indonesia.

Information on the financial condition of BWS has been stated clearly and transparently in several reports, including the following:

1. Annual Report

- *Summary of critical financial data, including stock highlights, reports from the Board of Commissioners, reports from the Board of Directors, company profiles, analysis, and management discussion regarding business and financial performance, corporate governance, and corporate social responsibility.*
- *Annual Financial Statements audited by a Public Accountant and a Public Accounting Firm registered with the Otoritas Jasa Keuangan. The Annual Financial Statements is made for 1 (one) Financial Year. It is presented with a comparison of 1 (one) the previous financial year and the beginning of the last comparative year.*
- *Statement of responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors for the accuracy of the contents of the Annual Report. The statement is stated in a statement sheet signed by all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.*
- *By Otoritas Jasa Keuangan Regulations regarding Transparency and Publication of Bank Reports and Otoritas Jasa Keuangan Regulations concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies, BWS has submitted an Annual Report to Otoritas Jasa Keuangan and shareholders.*
- *Annual Reports (financial and non-financial) and BWS Published Financial Statements have been posted on the website at the address www.bankwoorisaudara.com and published in Indonesian language newspapers with wide circulation in Indonesia.*

2. Laporan Publikasi Triwulanan

- BWS telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku pada surat kabar dan situs web BWS.
- Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar berupa Laporan Keuangan Konsolidasi Bank dan Perusahaan Anak dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar dan Laporan Keuangan Entitas Induk Bank dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar. Surat kabar yang digunakan surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi.
- Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada situs web BWS berupa Laporan Keuangan maupun laporan lainnya dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

3. Laporan Publikasi Bulanan

Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku pada situs web Bank.

2. Quarterly Published Reports

- BWS has announced a Quarterly Published Report by applicable Otoritas Jasa Keuangan Regulations to newspapers and the BWS website.
- Announcement of Quarterly Published Reports in newspapers in the form of Consolidated Financial Statements of the Bank and Subsidiaries is carried out in 2 (two) newspapers, and Financial Statements of the Bank's Parent Entity are carried out in 1 (one) newspaper. The Indonesian language printed daily newspaper has a wide circulation in the domicile of the Bank's head office. The Quarterly Published Financial Statements is signed by the President Director and 1 (one) member of the Board of Directors.
- Announcement of Quarterly Published Reports on the BWS website in the form of Financial Statements and other reports maintained for at least the last 5 (five) financial years.

3. Monthly Published Reports

The Bank has announced the Monthly Published Report by the applicable Otoritas Jasa Keuangan Regulations on the Bank's website.



Transparansi Kondisi Non-Keuangan

Transparency of Non-Financial Conditions

Bank telah memberikan informasi mengenai produk secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui BWS Call atau situs web BWS.

Selain itu, BWS menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

The Bank has provided precise, accurate, and up-to-date product information. This information can be easily obtained by customers, including in leaflets, brochures, or other written forms at each branch office in locations that are easily accessible to customers and/or in the form of electronic information provided through BWS Call or the BWS website.

In addition, BWS provides and informs customers of procedures for customer complaints and dispute resolution by Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan regulations regarding customer complaints and banking mediation.



Penilaian dan Evaluasi Penerapan GCG Bank

Assessment and Evaluation of Bank GCG Implementation

Bank memiliki komitmen untuk selalu menerapkan standar GCG dengan selalu berusaha menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, melalui berbagai usaha perbaikan dan peningkatan, serta merujuk pada standar minimal maupun rekomendasi yang harus dipenuhi. Penilaian penerapan GCG secara konsisten dilakukan setiap tahun untuk mengetahui tingkat kecukupan penerapan GCG di lingkungan Bank. Penilaian yang dilakukan oleh Bank menggunakan berbagai acuan standar praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku.

Bank melakukan penilaian berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, penilaian terhadap pelaksanaan GCG yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

The Bank commits to consistently applying GCG standards by constantly trying to use Good Corporate Governance practices through various improvement and enhancement efforts and referring to the minimum requirements and recommendations that must be met. A consistent GCG implementation assessment is carried out every year to determine the adequacy of GCG implementation within the Bank. The evaluation carried out by the Bank uses various references to applicable best practices.

The Bank conducts an assessment based on the provisions of the Otoritas Jasa Keuangan regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks, an assessment of the implementation of GCG based on 5 (five) basic principles grouped in a governance system consisting of 3 (three) aspects of governance, namely governance structure, governance process, and governance outcomes.

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Tata Kelola Periode Semester I dan Semester II Tahun 2023

Governance Self Assessment Results for Semester I and Semester II 2023

	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
Semester I <i>Semester I</i>	2	BAIK GOOD
Semester II <i>Semester II</i>	2	BAIK GOOD

Matriks Peringkat Faktor Tata Kelola

Governance Factor Rating Matrix

Peringkat Rating	Definisi Definition
2	<p>Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p> <p><i>Reflects that the Bank's management has implemented generally good Governance. This is reflected in adequate compliance with the principles of Governance. In the event that there are weaknesses in the implementation of Governance principles, generally these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions by Bank management.</i></p>
Analisis Analysis	
A. Governance Structure	
<p>Kekuatan pada <i>Governance Structure</i> antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya struktur atau komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta komposisi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Bank telah memiliki struktur organisasi yang telah disesuaikan dengan kompleksitas Bank, struktur organisasi ini disusun untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal di Bank Woori Saudara. 3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Satuan Kerja Internal Audit, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola, berjalan dengan efektif. <p>Kelemahan pada <i>Governance Structure</i> : Terdapatnya kasus fraud di Semester II/2023, memperlihatkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal. Bank berkomitmen untuk terus memperkuat aspek penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern, salah satunya melalui penguatan struktur organisasi, peningkatan kompetensi di Unit Kerja SKAI, SKMR dan Satuan Kerja Kepatuhan.</p>	<p><i>The strengths of the Governance Structure include the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fulfillment of the structure or composition of members of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the composition of members of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Nomination and Remuneration Committee.</i> 2. <i>The Bank has an organizational structure that has been adapted to the complexity of the Bank. This organizational structure is structured to support the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the implementation of risk management and internal control at Bank Woori Saudara.</i> 3. <i>The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Internal Audit Work Unit, Compliance Work Unit and Risk Management Work Unit have complied with the principles of Governance, and are running effectively.</i> <p><i>Weaknesses in the Governance Structure :</i> <i>The existence of fraud cases in Semester II/2023 shows that there are still weaknesses in the implementation of risk management and internal control systems. The Bank is committed to continuing to strengthen aspects of implementing risk management and internal control systems, one of which is through strengthening the organizational structure, increasing competency in the SKAI, Risk Management Work Unit and Compliance Work Units.</i></p>
B. Governance Process	
<p>Kekuatan pada <i>Governance Process</i> antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan melakukan rapat bersama Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Komisaris memberikan masukan kepada Direksi yang disampaikan dalam forum rapat Direksi dan Dewan Komisaris. 2. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan melakukan upaya-upaya untuk mendorong Budaya Kepatuhan Bank dengan melakukan: <ul style="list-style-type: none"> • Analisa dan opini Kepatuhan • Monitoring Ketentuan Regulator dan <i>Compliance Info</i> • Sosialisasi dan <i>Compliance Test</i> • <i>Compliance Assessment</i> <p>Salah satu <i>improvement</i> yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan untuk membangun budaya kepatuhan adalah pembuatan aplikasi <i>Regulatory Monitoring Report</i> kepada Regulator untuk memitigasi dikenakan sanksi dan/ atau denda dari Regulator di mana aplikasi ini membantu dalam hal memantau status penyampaian laporan kepada regulator.</p> <p>Selain hal di atas, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan merekomendasikan peneraan sanksi (<i>punishment</i>) terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.</p>	<p><i>Strengths in the Governance Process include the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The Board of Commissioners has supervised the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors by holding meetings with the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors to support the implementation of the Board of Directors duties. Commissioners provide input to the Directors which is conveyed in the Board of Directors and Board of Commissioners meeting forums.</i> 2. <i>The implementation of meetings of the Board of Commissioners, Board of Directors and Committees is in accordance with applicable regulations.</i> 3. <i>The Director in charge of the Compliance function makes efforts to encourage the Bank's Compliance Culture by:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Compliance analysis and opinion</i> • <i>Monitoring Regulatory Provisions and Compliance Info</i> • <i>Socialization and Compliance Test</i> • <i>Compliance Assessment</i> <p><i>One of the improvements implemented by the Compliance Work Unit to build a culture of compliance is the creation of a Regulatory Monitoring Report application for Regulators to mitigate the imposition of sanctions and/or fines from Regulators, where this application helps in monitoring the status of submitting reports to regulators.</i></p> <p><i>In addition to the above, the Director in charge of the Compliance function recommends the imposition of sanctions for violations that have been committed.</i></p>

Analisis Analysis

- | | |
|---|---|
| <p>4. Bank telah berupaya untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Salah satunya dengan melakukan review secara berkala dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>5. Bank telah menyusun, menyampaikan dan mempublikasikan laporan Pelaksanaan Tata Kelola dengan isi dan cakupan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Umum.</p> | <p>4. <i>The Bank has made efforts to ensure that all policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with OJK provisions and other applicable laws and regulations. One of them is by conducting regular reviews and/or recommending updating and improving policies, provisions, systems and procedures owned by the Bank so that they comply with OJK provisions and applicable laws and regulations.</i></p> <p>5. <i>The Bank has prepared, submitted and published a Governance Implementation report with content and scope in accordance with OJK Regulation Number 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks and OJK Circular Letter Number 13/SEOJK.03/2017 concerning Implementation Governance for Commercial Banks.</i></p> |
|---|---|

Kelemahan pada *Governance Process* :

Sampai dengan saat ini masih terdapat sanksi/denda terkait pelaporan, namun Bank berkomitmen untuk selalu memastikan kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia atau OJK yang mengatur proses pelaporan Bank. Satuan Kerja Kepatuhan juga telah mengimplementasikan *Regulatory Monitoring Report* sebagai bagian dari pengawasan terkait penyampaian laporan kepada Regulator.

Weaknesses in the *Governance Process*:

To date, there are still sanctions/fines related to reporting, however the Bank is committed to always ensuring compliance with Bank Indonesia or OJK regulations which regulate the Bank's reporting process. The Compliance Work Unit has also implemented a Regulatory Monitoring Report as part of its supervision regarding the submission of reports to the Regulator.

C. **Governance Outcome** **Governance Outcome**

Kekuatan pada *Governance Outcome* antara lain sebagai berikut:

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham, hubungan keuangan dan hubungan keluarga, remunerasi dan fasilitas lain, serta *share option* yang dimiliki dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola yang dipublikasikan melalui website Bank dan didistribusikan kepada seluruh pemegang saham dan kepada pihak-pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
2. Hasil rapat Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi telah dibuatkan berita acara rapat untuk ditindaklanjuti.
3. Bank telah membuat Rencana Bisnis yang menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan dengan peningkatan pada aspek finansial maupun non finansial. Pada Semester II/2023, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. meraih beberapa penghargaan yaitu:
 - a. Penghargaan KPP PRATAMA Bandung
 - b. Penghargaan Mitra Bayar Terbaik Tahun 2022 ASABRI
 - c. Infobank 12th Digital Brand Awards 2023
 - d. PPKM Award 2023
 - e. Penghargaan Reksa Bandha
 - f. Infobank Award 2023
 - g. Top GRC Award 2023
 - h. 14th IICD Award
 - i. ATM Bersama Award
 - j. The Finance Award
 - k. Indonesia Best Digital Finance Award
 - l. 2023 Elite Quality Recognition Award
4. Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*) beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank melalui *kick off meeting* yang dilaksanakan setiap tahun maupun melalui Rapat Kerja yang diselenggarakan secara berkala.

Strengths in *Governance Outcome* include the following:

1. *All members of the Board of Commissioners and Directors have disclosed share ownership, financial and family relationships, remuneration and other facilities, as well as share options held in the Governance implementation report published on the Bank's website and distributed to all shareholders and other parties. others as stipulated in the applicable provisions.*
2. *The results of the meetings of the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee have made meeting minutes for follow-up.*
3. *The Bank has created a Business Plan that describes the Bank's sustainable growth with improvements in both financial and non-financial aspects. In Semester II/2023, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. received several awards, namely:*
 - a. *KPP PRATAMA Bandung Award*
 - b. *ASABRI Best Paying Partner Award 2022*
 - c. *Infobank 12th Digital Brand Awards 2023*
 - d. *PPKM Award 2023*
 - e. *Reksa Bandha Award*
 - f. *Infobank Award 2023*
 - g. *Top GRC Award 2023*
 - h. *14th IICD Award*
 - i. *ATM Bersama Award*
 - j. *The Finance Award*
 - k. *Indonesia Best Digital Finance Award*
 - l. *2023 Elite Quality Recognition Award*
4. *The Corporate Plan and Bank Business Plan and their realization have been communicated by the Board of Directors to Controlling Shareholders and to all levels of organization at the Bank through kick off meetings which are held annually and through Work Meetings which are held periodically.*

Analisis Analysis

Kelemahan pada *Governance Process*:

1. Kejadian *fraud* dan peneraan sanksi atas kesalahan pelaporan kepada regulator yang terjadi pada Semester II/2023 dapat menjadi indikasi bahwa Bank perlu meningkatkan Budaya kepatuhan yang lebih baik dari yang telah diimplementasikan saat ini.
2. Bank perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko serta prinsip pengendalian intern guna meminimalisir risiko-risiko yang memungkinkan terjadi di kemudian hari.
3. Rencana strategis Bank di dukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai, baik dalam hal sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur, namun perlu ditingkatkan kesinergisan dalam hal pelaksanaannya agar dapat mendukung rencana strategis yang telah ditetapkan.

Pencapaian rencana strategis Bank didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai, baik dalam hal sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, namun perlu ditingkatkan kesinergisan dalam hal pelaksanaannya agar dapat mendukung rencana strategis yang telah ditetapkan.

Weaknesses in Governance Outcome:

1. *Fraud incidents and the imposition of sanctions for reporting errors to regulators that occurred in Semester II/2023 could be an indication that the Bank needs to improve its compliance culture to be better than what has been implemented currently.*
2. *Banks need to improve the implementation of risk management and internal control principles in order to minimize risks that may occur in the future.*
3. *The Bank's strategic plan is supported by the preparation of adequate infrastructure, both in terms of human resources, information technology, office networks, policies and procedures, but synergy in terms of implementation needs to be increased so that it can support the strategic plan that has been determined.*

Achieving the Bank's strategic plan is supported by the preparation of adequate infrastructure, both in terms of human resources, information technology, office networks, policies, and procedures, but synergy in terms of implementation needs to be increased in order to support the strategic plan that has been determined.



Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of Public Company Governance Guidelines

Roadmap GCG yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2014 memiliki dampak yang besar bagi perkembangan GCG di lingkungan dunia usaha. Penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan penyampaian informasi yang wajar menjadi bahasan yang dapat menjadi pegangan bagi entitas usaha, khususnya bagi perusahaan terbuka. Demikian pula dengan hak pemegang saham tanpa terkecuali, khususnya pemegang saham minoritas yang harus menjadi perhatian dari emiten atau perusahaan terbuka.

Secara umum, Bank sebagai perusahaan terbuka telah melaksanakan seluruh peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan, dan akan terus berupaya melakukan perbaikan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Khususnya terkait pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pedoman tersebut yang memuat aspek, prinsip dan rekomendasi tata kelola perusahaan yang baik berguna untuk mendorong penerapan praktik GCG sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani perusahaan terbuka. Bank wajib menerapkan pedoman tersebut, dan jika belum menerapkannya, Bank wajib menjelaskan alasan tidak diterapkannya pedoman tersebut. Pengungkapan penerapan atas rekomendasi dalam pedoman tersebut disampaikan dalam laporan tahunan perusahaan terbuka.

The GCG Roadmap issued by the Otoritas Jasa Keuangan in 2014 significantly impacted the development of GCG in the business world. The emphasis on transparency, accountability, and delivering adequate information is a discussion that can be used as a guide for business entities, especially public companies. Likewise, the rights of shareholders without exception, especially minority shareholders, must be the concern of issuers or public companies.

In general, the Bank, as a public company, has implemented all regulations issued by Otoritas Jasa Keuangan and will continue to make efforts to make improvements to create added value for shareholders and stakeholders. Particularly regarding guidelines for Public Company Governance which are regulated based on Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015 concerning Implementation of Guidelines for Public Company Governance, which are described in Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 regarding Public Company Governance Guidelines. These guidelines, which contain aspects, principles, and recommendations of good corporate governance, help encourage the implementation of GCG practices by international conventions that public companies should emulate. Banks are required to apply these guidelines, and if they still need to implement them, the Bank is required to explain the reasons for not implementing these guidelines. Disclosure of the implementation of the recommendations in the guidelines is conveyed in the public company's annual report.

No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Penerapan di BWS Explanation of Implementation in BWS	Keterangan Description
	Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. <i>Principle 2 Improving Public Company Communication Quality with Shareholders or Investors.</i>	4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. <i>The Public Company has a communication policy with shareholders or investors.</i>	BWS telah menjalankan kegiatan-kegiatan komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor melalui <i>investor meetings</i> dan juga Perusahaan telah membentuk unit <i>Investor Relations</i> untuk menjalankan fungsi tersebut. Namun demikian BWS belum memiliki kebijakan tertulis perihal komunikasi dengan pemegang saham. <i>BWS has communicated with Shareholders or Investors through investor meetings, and the Company has also established an Investor Relations unit to carry out this function. However, BWS still needs to have a written policy regarding communication with shareholders.</i>	-
		5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. <i>The Public Company discloses the Public Company's communication policy with shareholders or investors on the Website.</i>	BWS telah memiliki situs perusahaan yang digunakan sebagai media informasi pemegang saham investor dan pemangku kepentingan lainnya yang merujuk pada ketentuan keterbukaan informasi perusahaan terbuka yang berlaku. <i>BWS already has a company website that is used as a medium of information for shareholders, investors, and other stakeholders, which refers to the applicable provisions for disclosing information on public companies.</i>	-

II Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect 2: Functions and Roles of the Board of Commissioners

	Prinsip 3 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS <i>Principle 3 Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners</i>	6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. <i>Determination of the number of members of the Board of Commissioners takes into account the conditions of the Public Company.</i>	BWS telah memenuhi ketentuan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Jumlah anggota Dewan Komisaris BWS berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris non Independen. <i>BWS has complied with the provisions of Article 20 of Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, namely the number of members of the Board of Commissioners is more than 2 (two) people. The number of members of the BWS Board of Commissioners is 4 (four) people consisting of 2 (two) Independent Commissioners and 2 (two) non-Independent Commissione.</i>	
		7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. <i>Determination of the composition of members of the Board of Commissioners takes into account the diversity of skills, knowledge, and experience required.</i>	Persyaratan-persyaratan untuk mengusulkan Calon Dewan Komisaris telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha BWS yaitu dengan memperhatikan unsur keberagaman keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman. <i>The requirements for nominating Candidates for the Board of Commissioners have been carried out by taking into account the needs and complexity of the BWS business, namely by taking into account the elements of the diversity of expertise, educational background and experience.</i>	

No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Penerapan di BWS Explanation of Implementation in BWS	Keterangan Description
	<p>Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</p> <p><i>Principle 4 Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners</i></p>	<p>8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p><i>The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.</i></p>	<p>Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris melalui mekanisme <i>Self Assessment</i> berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.</p> <p><i>The Board of Commissioners' Performance Assessment is carried out by each member of the Board of Commissioners through a Self Assessment mechanism based on assessment criteria related to the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.</i></p>	-
		<p>9. Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p><i>Self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners, disclosed through the Public Company Annual Report.</i></p>	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.</p> <p><i>The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners has been disclosed in this Annual Report.</i></p>	-
		<p>10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p><i>The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.</i></p>	<p>BWS telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar BWS, yaitu bahwa masa jabatan Dewan Komisaris berakhir salah satunya karena melanggar peraturan perundangan dan apabila mengundurkan diri.</p> <p><i>BWS has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes as stated in the BWS Articles of Association, namely that the term of office of the Board of Commissioners ends one of them for violating laws and regulations and resigning.</i></p>	-
		<p>11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p><i>The Board of Commissioners or Committees that carry out the Nomination and Remuneration functions develop a succession policy in the Nomination process for members of the Board of Directors.</i></p>	<p>BWS telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang membantu Dewan Komisaris untuk dapat mengajukan saran-saran kepada pemegang saham dalam hal, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun, melaksanakan dan menganalisa kriteria dan prosedur nominasi bagi calon Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Mengidentifikasi calon-calon Direksi baik dari dalam maupun dari luar dan calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi Direktur atau Dewan Komisaris. <p><i>BWS already has a Nomination and Remuneration Committee that assists the Board of Commissioners to be able to submit suggestions to shareholders regarding, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Develop, implement and analyze the nomination criteria and procedures for candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors. 2. Identify internal and external candidates for the Board of Directors and candidates for the Board of Commissioners who meet the requirements to be proposed/appointed as Directors or Board of Commissioners. 	-

No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Penerapan di BWS Explanation of Implementation in BWS	Keterangan Description
III Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi				
Aspek 3: Functions and Roles of the Board of Directors				
	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. <i>Principle 5 Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors.</i>	12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. <i>Determination of the number of members of the Board of Directors takes into account the conditions of the Public Company and effectiveness in decision making.</i>	BWS telah memenuhi ketentuan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Per 31 Desember 2023, jumlah Direksi BWS sebanyak 6 (enam) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan BWS. <i>BWS has complied with the provisions of Article 20 of Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, namely the Directors of Issuers or Public Companies consisting of at least 2 (two) members of the Board of Directors. As of December 31, 2023, the number of BWS Board of Directors was 6 (six) people and the determination was based on the complexity and needs of BWS.</i>	-
		13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. <i>Determining the composition of members of the Board of Directors takes into account the diversity of skills, knowledge and experience required.</i>	Penetapan komposisi Direksi BWS telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha BWS yaitu dengan memperhatikan unsur keberagaman keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman serta tidak membedakan gender. Keberagaman komposisi Direksi diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang semakin kompleks yang dihadapi bank dibandingkan dengan anggota Direksi yang bersifat homogen, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan terbaik. <i>The determination of the composition of the BWS Board of Directors has been carried out by taking into account the needs and complexity of the BWS business, namely by considering the elements of the diversity of expertise, educational background, and experience, and it does not differentiate between gender. The variety of the composition of the Board of Directors is expected to provide an alternative solution to an increasingly complex problem faced by banks compared to homogeneous members of the Board of Directors so that the resulting decision is the best.</i>	-
		14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/ atau pengetahuan di bidang akuntansi. <i>Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have expertise and/ or knowledge in accounting.</i>	Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan di BWS adalah Presiden Direktur, yaitu Sdr. Hwang Gyusoon dengan pengalaman di bidang perencanaan, pembiayaan perdagangan, kredit, pendanaan, <i>general affair</i> dan terakhir sebagai <i>Managing Director</i> di Woori Bank. <i>The director in charge of accounting or finance at BWS is the President Director, namely Mr. Hwang Gyusoon with experience in planning, trade finance, credit, funding, general affairs and most recently as Managing Director at Woori Bank.</i>	-

No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Penerapan di BWS Explanation of Implementation in BWS	Keterangan Description
	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. <i>Principle 6 Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.</i>	15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. <i>The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.</i>	Penilaian Kinerja Anggota Direksi dilakukan oleh secara kolektif oleh anggota Direksi melalui mekanisme <i>Self Assessment</i> berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi. <i>The performance assessment of members of the Board of Directors is carried out collectively by members of the Board of Directors through a Self Assessment mechanism based on assessment criteria related to the implementation of the duties and responsibilities of members of the Board of Directors.</i>	-
		16. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. <i>The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed in the Public Company's annual report.</i>	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2022. <i>The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors has been disclosed in the 2022 Annual Report.</i>	-
		17. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. <i>The Board of Directors has a policy regarding the resignation of a member of the Board of Directors if involved in a financial crime.</i>	BWS telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Bank. <i>BWS already has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes as stated in the Bank's Articles of Association.</i>	-
IV	Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect 4: Stakeholder Participation			
	Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. <i>Principle 7 Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.</i>	18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . <i>The Public Company has a policy to prevent insider trading.</i>	Ketentuan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Perusahaan serta Kode Etik Kepatuhan. BWS juga telah mengatur penerapan pengenaan sanksi kepada Karyawan. <i>Provisions to prevent insider trading are regulated in the Company's Code of Ethics and Code of Conduct as well as the Compliance Code of Ethics. BWS has also regulated the imposition of sanctions on employees.</i>	-
		19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> . <i>The Public Company has anti-corruption and anti-fraud policies.</i>	BWS memiliki kebijakan pengendalian gratifikasi dan penerapan strategi <i>anti fraud</i> . <i>BWS has a gratuity control policy and implements an anti-fraud strategy.</i>	-
		20. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/ atau pengetahuan di bidang akuntansi. <i>Member of the Board of Directors who oversees the field accounting or finance have expertise and/ or knowledge in accounting.</i>	BWS memiliki kebijakan terkait pembelian barang dan jasa yang menggunakan vendor. <i>BWS has policies regarding the purchase of goods and services using vendors.</i>	-

No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Penerapan di BWS Explanation of Implementation in BWS	Keterangan Description
		<p>21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p><i>The Public Company has a policy regarding the fulfillment of creditors' rights.</i></p>	<p>BWS memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur yang diatur dalam SPO Produk Dana, Manual Produk dan SPO Pengelolaan Pengaduan Nasabah, yang secara ringkas mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hak untuk memperoleh penjelasan yang cukup tentang karakteristik produk. b. Hak untuk mendapat mengakses syarat dan ketentuan produk dana melalui situs web. c. Kemudahan untuk bertransaksi melalui cabang, layanan <i>e-banking</i> atau sarana lainnya yang ditetapkan BWS. d. Memperoleh bunga yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku. <p><i>BWS has a policy on fulfilling creditor rights which are regulated in Fund Product SPO, Product Manual, and Customer Complaint Management SPO, which briefly holds:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>The right to obtain an adequate explanation of product characteristics.</i> b. <i>The right to access the terms and conditions of the fund product through the website.</i> c. <i>Convenience for transactions through branches, e-banking services, or other facilities determined by BWS.</i> d. <i>Obtain interest in the amount according to applicable regulations.</i> 	-
		<p>22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>.</p> <p><i>The Public Company has a whistleblowing system policy.</i></p>	<p>BWS telah memiliki prosedur yang mengatur <i>Whistleblowing System (WBS)</i>.</p> <p><i>BWS already has procedures governing the Whistleblowing System (WBS).</i></p>	-
		<p>23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p><i>The Public Company has a policy of providing long-term incentives to the Board of Directors and employees.</i></p>	<p>BWS melakukan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan dalam bentuk ESOP & MSOP pada tahun 2010 dan selanjutnya melakukan pengkajian dalam penyusunan kebijakan pemberian insentif jangka panjang agar tepat sasaran, efektif, dan efisien.</p> <p><i>BWS provided long-term incentives to the Board of Directors and employees in the form of ESOP & MSOP in 2010 and then conducted an assessment in preparing policies for providing long-term incentives so that they were right on target, effective, and efficient.</i></p>	-

No.	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Penerapan di BWS Explanation of Implementation in BWS	Keterangan Description
V Aspek 5 : Keterbukaan Informasi Aspect 5: Information Transparency				
	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. <i>Principle 8 Improving the Implementation of Information Disclosure.</i>	24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. <i>Public Companies take advantage of the use of information technology more broadly beside the Website as a medium for information disclosure.</i>	Dalam situs web BWS, terdapat segala informasi yang terkait dengan Keterbukaan Informasi. Selain situs web, BWS memanfaatkan teknologi dan aplikasi media sosial lainnya seperti <i>Internet Banking, Mobile Banking, Instagram, dan Facebook</i> . <i>The BWS website contains all information related to Information Disclosure. In addition to the website, BWS utilizes technology and other social media applications such as Internet Banking, Mobile Banking, Instagram, and Facebook.</i>	-
		25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. <i>The Public Company Annual Report discloses the ultimate beneficial owner in the Public Company's share ownership of at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the ultimate beneficial owner in the Public Company shares ownership through the primary and controlling shareholders.</i>	BWS telah mengungkapkan informasi mengenai Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih saham BWS (kode: SDRA) dalam Laporan Tahunan di bagian Komposisi Pemegang Saham. <i>In the Shareholders Composition section, BWS has disclosed information regarding Shareholders who own 5% or more of BWS shares (code: SDRA) in the Annual Report.</i>	-



Rencana dan Kebijakan Strategis Bank

Strategic Work Plan and Policy

Dalam rangka meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan mematuhi ketentuan dari regulator, Bank telah menyusun Rencana Bisnis yang menggambarkan kegiatan usaha Bank dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sehingga arah kebijakan dan sasaran strategis Bank mengikuti perencanaan yang tepat, hati-hati dan mengikuti prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

BWS senantiasa mempertimbangkan perkembangan ekonomi global dan domestik serta visi dan nilai-nilai Bank. Di tahun 2024, BWS akan menjalankan langkah-langkah strategis untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan arah dan kebijakan Bank sebagai berikut:

1. Pengembangan *Digital Banking* guna menunjang kebutuhan perbankan nasabah serta memperkuat struktur bisnis ke arah digital.
2. Diversifikasi portofolio bisnis, sehingga tidak hanya terbatas pada produk portofolio perbankan ritel dan korporasi tetapi juga mengembangkan usaha ke pasar lokal.
3. Memfokuskan pada peningkatan struktur pendanaan bersumber dari pendanaan yang lebih stabil.
4. Meningkatkan produktivitas organisasi serta meningkatkan kemampuan organisasi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.
5. Melakukan penguatan operasional teknologi informasi, peningkatan keamanan siber dan akses, serta perluasan *channel* IT dalam mendukung pengembangan produk layanan BWS serta kepuasan nasabah.
6. Penyempurnaan kerangka kerja, kebijakan, pedoman, dan prosedur risiko sejalan dengan perkembangan industri.

Selain itu, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau akan selalu menjadi bagian penting dalam strategi Bank. BWS akan selalu menerapkan prinsip "Keuangan Berkelanjutan" dalam bisnis keseharian Bank. Dengan demikian diharapkan BWS akan dapat mampu menyalurkan fasilitas pembiayaan hijau lainnya dan membantu pemerintah dalam proses transisi menuju ekonomi hijau.

In order to improve good corporate governance and comply with the provisions of regulators, the Bank has prepared a Business Plan which describes the Bank's business activities in the short term, medium term and long term so that the Bank's policy direction and strategic targets follow appropriate, careful planning and sound banking principles.

BWS always considers global and domestic economic developments as well as the Bank's vision and values. In 2024, BWS will carry out strategic steps to achieve its vision and mission in accordance with the Bank's direction and policies as follows:

1. *Development of Digital Banking to support customer banking needs and strengthen the business structure in a digital direction.*
2. *Diversify the business portfolio, so as not only limited to retail and corporate banking portfolio products but also expanding the business to the local market.*
3. *Focus on improving the funding structure sourced from more stable funding.*
4. *Increase organizational productivity and improve organizational capabilities while continuing to apply the prudence principle.*
5. *Strengthen information technology operations, increase access and cyber security, as well as expand IT channels to support the development of BWS service products and customer satisfaction.*
6. *Enhancement of risk frameworks, policies, guidelines and procedures in line with industry developments.*

In addition, optimizing clean energy sources and a green economy will always be an important part of the Bank's strategy. BWS will always apply the principles of "Sustainable Finance" in the Bank's daily business. In this way, it is hoped that BWS will be able to distribute other green financing facilities and assist the government in the transition process towards a green economy.



Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Integrity of Reporting and Information Technology System

Bank melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan melalui laporan yang disusun sesuai dengan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank. Berikut publikasi kondisi keuangan dan non keuangan Bank selama periode Tahun 2023 yang disampaikan ke publik baik melalui media cetak atau situs perusahaan <https://www.bankwoorisaudara.com/>:

1. Laporan Keuangan Bulanan

Bank telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator serta telah dipublikasikan pada *website* Bank.

2. Laporan Keuangan Triwulanan

Bank telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator sesuai dengan ketentuan serta telah dipublikasikan melalui *website*.

3. Laporan Tahunan

Bank telah menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada regulator serta telah dipublikasikan melalui *website* resmi Bank.

4. Laporan dan Informasi Lainnya

Bank juga telah menyusun laporan-laporan publikasi lainnya yang diwajibkan oleh regulator, meliputi Laporan Tata Kelola, Laporan Keberlanjutan, Laporan Eksposur Risiko dan Permodalan, informasi produk dan penggunaan data nasabah, informasi jaringan kantor, informasi penyampaian dan penanganan pengaduan, informasi atau fakta material serta informasi-informasi lainnya yang diwajibkan.

Selain itu, Bank juga telah menyusun dan menyampaikan laporan-laporan yang diwajibkan oleh regulator (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, PPATK dan regulator lainnya) sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan eksternal masing-masing regulator. Bank telah memastikan bahwa seluruh penyusunan laporan-laporan kepada regulator telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.

The Bank implements transparency of financial and non-financial conditions to Stakeholders through reports prepared in accordance with the procedures, types and scope in accordance with the Otoritas Jasa Keuangan Regulations regarding transparency and publication of bank reports. The following is a publication of the Bank's financial and non-financial conditions during the 2023 period which was conveyed to the public either through print media or the company website <https://www.bankwoorisaudara.com/>:

1. Monthly Financial Report

The Bank has prepared and submitted Monthly Financial Reports to the regulator and has published them on the Bank's website.

2. Quarterly Financial Reports

The Bank has prepared and submitted Quarterly Financial Reports to the regulator in accordance with the provisions and has been published on the website.

3. Annual Report

The Bank has prepared and submitted an Annual Report to the regulator and published it on the Bank's official website.

4. Other Reports and Information

The Bank has also prepared other published reports required by regulators, including Governance Reports, Sustainability Reports, Risk Exposure and Capital Reports, product information and use of customer data, office network information, information on submitting and handling complaints, material information or facts and other required information.

In addition, the Bank has also prepared and submitted reports required by regulators (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, PPATK and other regulators) in accordance with the provisions and time limits stipulated in the external provisions of each regulator. The Bank has ensured that all preparation of reports to regulators is supported by an adequate management information system to improve the quality of the decision-making process by the Board of Directors and the quality of the supervision process by the Board of Commissioners.



Aspek Pemegang Saham

Shareholders Aspect

BWS merupakan Perusahaan Publik yang sebagian sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Pada tahun 2023, Woori Bank yang merupakan institusi asing dari Korea Selatan tercatat sebagai pemegang saham pengendali Bank dengan penguasaan saham sebanyak 7.214.804.851 lembar saham atau setara dengan 84,20% dari total saham yang diterbitkan Bank.

Pada akhir tahun 2023, jumlah pemegang saham Bank tercatat sebanyak 3,357 pemegang saham yang terdiri dari 3,327 investor domestik dan 30 investor asing, baik perorangan maupun institusi. Namun demikian, Bank memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pemegang saham.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 30 Maret 2023, Bank memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp192.785.273.190,00 (seratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh Rupiah) atau Rp22,50 (dua puluh dua koma lima puluh Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 22,40% (dua puluh dua koma empat nol persen) dari Laba Bersih Bank dibagikan sebagai Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2022 kepada Para Pemegang Saham.

BWS is a Public Company whose shares are partly owned by the public. In 2023, Woori Bank, which is a foreign institution from South Korea, will be listed as the controlling shareholder of the Bank with ownership of 7,214,804,851 shares or the equivalent of 84.20% of the total shares issued by the Bank.

At the end of 2023, the total number of Bank shareholders was recorded at 3,357 shareholders consisting of 3,327 domestic investors and 30 foreign investors, both individuals and institutions. However, the Bank provides the same treatment to all shareholders.

Based on the decision of the Annual GMS held on March 30, 2023, the Bank decided to distribute dividends amounting to IDR192,785,273,190.00 (one hundred ninety-two billion seven hundred eighty-five million two hundred seventy-three thousand one hundred and ninety Rupiah) or IDR22.50 (twenty two point fifty Rupiah) per share or approximately 22.40% (twenty two point four zero percent) of the Bank's Net Profit distributed as Cash Dividends for the 2022 Financial Year to Shareholders.



Strategi Anti Fraud, Anti Penyuapan, dan Gratifikasi

Anti-Fraud, Anti-Bribery, and Gratification Strategies

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 039/POJK.03/2019, perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum, BWS telah melaksanakan fungsi penerapan strategi *anti fraud* secara *bank-wide*. Sebagai dasar pelaksanaan fungsinya, BWS memiliki kebijakan *anti fraud* yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal Bank dalam membangun budaya kepatuhan dan menciptakan kesadaran risiko (*risk awareness*) atas potensi risiko *fraud* dan konsekuensi yang dapat timbul.

Seluruh insan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan tanpa terkecuali, diwajibkan untuk bertindak secara jujur, profesional, menjunjung tinggi integritas dan secara proaktif melindungi serta menjaga aset Bank, nasabah dan *stakeholder* lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal. Sebagai bentuk pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pengendalian *fraud*, BWS melaksanakan kode etik oleh seluruh jajaran organisasi Bank.

Kode Etik (*Code of Conduct*) merupakan pedoman perilaku Jajaran BWS dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan maupun rekan sekerja. Kode Etik disusun sebagai pedoman berperilaku berdasarkan nilai dan pertimbangan integritas, kesadaran diri dan profesionalisme, reputasi Bank, keluarga dan pribadi.

In accordance with Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) Number.039/POJK.03/2019, regarding the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks, BWS has carried out the function of implementing anti-fraud strategies bank-wide. As a basis for implementing its functions, BWS has an anti-fraud policy which is part of the Bank's internal control system in building a culture of compliance and creating risk awareness of potential fraud risks and the consequences that may arise.

All Bank personnel, starting from the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees without exception, are required to act honestly, professionally, uphold integrity and proactively protect and safeguard the Bank's assets, customers and other stakeholders in accordance with applicable regulations both internal and external. As a form of active supervision by the Board of Directors and Board of Commissioners regarding fraud control, BWS implements a code of conducts by all levels of the Bank's organization.

The Code of Conduct is a guideline for the behavior of BWS employee in carrying out their daily duties and official duties as well as in conducting business relationships with customers, partners and co-workers. The Code of Conduct is prepared as a guideline for behavior based on values and considerations of integrity, self-awareness and professionalism, the reputation of the Bank, family and personal.

